Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang

RANCANGAN AWAL
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Tangerang
2025–2045



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2045 memuat rumusan visi dan misi Kabupaten Tangerang dua puluh tahun ke depan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah.

Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2045 ini disusun berdasarkan kajian akademis serta jaring aspirasi (FGD) dengan pemerintah daerah. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gagasan strategis Kabupaten Tangerang 2045 yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. Dokumen ini terdiri atas enam bab yang terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, Visi Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, serta Penutup.

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tangerang dan mendorong partisipasi seluruh pihak untuk turut aktif mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Rancangan Awal RPJPD ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR x

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Dasar Hukum 1-2

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya 1-4

1.4 Maksud dan Tujuan 1-6

1.4.1 Maksud 1-6

1.4.2 Tujuan 1-6

1.5 Sistematika Penulisan 1-7

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2-1

2.1.1 Aspek Geografi 2-1

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 2-1

B. Letak dan Kondisi Geografis 2-2

C. Kondisi Topografi 2-3

D. Kondisi Geologi 2-4

E. Kondisi Hidrologi 2-6

F. Kondisi Klimatologi 2-7

G. Penggunaan Lahan 2-9

H. Potensi Pengembangan Wilayah 2-10

I. Indeks Risiko Bencana 2-11

2.1.2 Aspek Demografi 2-12

A. Jumlah dan Struktur Penduduk 2-12

B. Laju Pertumbuhan Penduduk 2-14

C. Rasio Ketergantungan 2-15

D. Distribusi / Pesebaran Penduduk 2-16

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-16

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2-16

A. Pertumbuhan PDRB 2-16

B. Laju inflasi 2-20

C. PDRB per kapita 2-20
D. Indeks Gini 2-21
E. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia 2-22
F. Persentase Penduduk Miskin 2-24
G. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan 2-25
H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2-25
I. Persentase Keluarga Pra Sejahtera 2-27
J. Persentase PAD terhadap pendapatan atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) ... 2-28
K. Penguatan cadangan pangan 2-28
L. Pertumbuhan Industri 2-29
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2-30
A. Pendidikan 2-30
B. Kesehatan 2-32
C. Pertanahan 2-34
D. Ketenagakerjaan 2-36
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2-41
A. Seni Budaya 2-41
B. Olahraga 2-41
2.3 Aspek Pelayanan Umum 2-42
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar 2-42
A. Pendidikan 2-42
B. Kesehatan 2-52
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2-73
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2-78
E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2-80
F. Sosial 2-82
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2-85
A. Tenaga Kerja 2-85
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2-87
C. Pangan 2-92
D. Lingkungan Hidup 2-98
E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatatan Sipil 2-101
F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2-102
G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2-103
H. Perhubungan 2-108
I. Komunikasi dan Informatika 2-110
J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2-112
K. Penanaman Modal 2-113
L. Kepemudaan dan Olahraga 2-116
M. Statistik 2-119

N. Kebudayaan 2-121
O. Perpustakaan 2-123
P. Kearsipan 2-126
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2-128
A. Pariwisata 2-128
B. Pertanian 2-130
C. Kehutanan 2-133
D. Energi dan Sumber Daya Mineral 2-133
E. Perdagangan 2-134
F. Perindustrian 2-137
G. Transmigrasi 2-139
H. Kelautan dan Perikanan 2-139
2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang 2-147
A. Perencanaan Pembangunan 2-148
B. Keuangan 2-149
C. Kepegawaian 2-152
D. Penelitian dan Pengembangan 2-154
E. Pengawasan 2-154
F. Layanan Masyarakat 2-155
G. Sekretariat Dewan 2-156
2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2-157
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2-158
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita 2-158
B. Nilai Tukar Petani 2-159
C. Indikator Keterbukaan Ekonomi 2-160
D. Produktivitas Total Daerah 2-160
E. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang 2-162
F. Jumlah Restoran atau Rumah Makan 2-162
G. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel 2-163
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 2-163
A. Perhubungan 2-163
B. Penataan Ruang 2-164
C. Komunikasi dan Informatika 2-166
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 2-167
A. Angka kriminalitas 2-167
B. Retribusi Daerah 2-169
C. Lama Proses Perijinan 2-169
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 2-170
A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) 2-170
B. Rasio Ketergantungan 2-170

2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 2-170

2.6 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah 2-172

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 3-1

3.1 Gambaran Indikator Makro..... 3-1

3.2 Permasalahan Pembangunan..... 3-2

3.3 Telaah Dokumen Perencanaan..... 3-12

3.3.1 Isu Global 3-12

3.3.2 Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 3-14

3.3.3 Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043 3-15

3.3.4 Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang 2011-2031 3-17

3.3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 3-20

3.3.6 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025..... 3-22

3.3.7 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 3-25

3.3.8 Dokumen Rencana Sektoral 3-27

3.4 Isu Strategis..... 3-42

3.4.1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia..... 3-42

3.4.2 Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi..... 3-45

3.4.3 Penyelenggaraan Penataan Ruang 3-46

3.4.4 Pengendalian Lingkungan Hidup..... 3-48

3.4.5 Tata Kelola Pemerintahan..... 3-50

BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH 4-1

4.1 Visi 4-1

4.2 Misi 4-3

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 5-1

5.1 Arah Kebijakan..... 5-1

5.2 Sasaran Pokok..... 5-11

5.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahunan..... 5-16

1) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Pertama 5-16

2) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua 5-16

3) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Ketiga..... 5-16

4) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Keempat..... 5-17

BAB 6 PENUTUP 6-1

DAFTAR PUSTAKA xviii

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Administrasi Kecamatan Kabupaten Tangerang 2-1
Tabel 2. 2 Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022 2-9
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang (Jiwa) Tahun 2022 2-13
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 2-14
Tabel 2. 5 PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022..... 2-17
Tabel 2. 6 PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 (dalam Juta Rupiah) 2-19
Tabel 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2-26
Tabel 2. 8 Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Banten Tahun 2020 2-27
Tabel 2. 9 Luas Bidang Tanah Bersertifikat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten..... 2-35
Tabel 2. 10 Jumlah Izin Lokasi Provinsi Banten Tahun 2021 2-35
Tabel 2. 11 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif 2-41
Tabel 2. 12 Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 2-49
Tabel 2. 13 Rasio Guru/Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020 2-49
Tabel 2. 14 Perbandingan Guru dan Murid Menurut Jenis Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021..... 2-49
Tabel 2. 15 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2017-2020.... 2-52
Tabel 2. 16 Tabel Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2020 2-54
Tabel 2. 17 Angka Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2021..... 2-56
Tabel 2. 18 Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk 2-59
Tabel 2. 19 Rasio Dokter Per Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021 2-59
Tabel 2. 20 Rasio Tenaga Medis di Kabupaten Tangerang Tahun 2016 - 2020 2-60
Tabel 2. 21 Cakupan Imunisasi Dasar pada bayi 0-11 bulan Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013–2020 (%) 2-62
Tabel 2. 22 Cakupan Imunisasi dasar pada Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2020 (%) 2-63
Tabel 2. 23 Jumlah Penambahan Kasus Baru dan Kasus Kumulatif Penyakit HIV/AIDS 2-72
Tabel 2. 24 Prevalensi HIV/AIDS dari Populasi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021 2-73
Tabel 2. 25 Proporsi dan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022..... 2-74

Tabel 2. 26 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022 2-74
Tabel 2. 27 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022 2-75
Tabel 2. 28 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022 2-76
Tabel 2. 29 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022 2-77
Tabel 2. 30 Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021 2-77
Tabel 2. 31 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 2-78
Tabel 2. 32 Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 2-78
Tabel 2. 33 Persentase Kelayakan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2021 2-79
Tabel 2. 34 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021 2-79
Tabel 2. 35 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Tahun 2019-2021 2-82
Tabel 2. 36 Capaian Penanganan PMKS di Kabupaten Tangerang Tahun 2017 - 2021..... 2-83
Tabel 2. 37 Jumlah PMKS dan Persentase Jumlah PMKS Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 2-83
Tabel 2. 38 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 2-93
Tabel 2. 39 Fasilitas Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022.....2-101
Tabel 2. 40 Jumlah Posyandu dan Posyandu Aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022 2-103
Tabel 2. 41 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020 2-108
Tabel 2. 42 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2021 dan 2022 2-108
Tabel 2. 43 Jumlah Menara BTS Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dan 2021 2-111
Tabel 2. 44 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Provinsi Banten 2-111
Tabel 2. 45 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen) ...2-112
Tabel 2. 46 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Tangerang yang Dilestarikan 2-122
Tabel 2. 47 Rasio Jumlah Perpustakaan Terakreditasi per Satuan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2022.....2-125
Tabel 2. 48 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 2-127
Tabel 2. 49 Jumlah Wisatawan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018 2-128
Tabel 2. 50 Jumlah Populasi Ternak berdasarkan Jenis di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-132

Tabel 2. 51 Jumlah Produksi Daging Ternak berdasarkan Jenis di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-132
Tabel 2. 52 Jumlah Produksi Telur Unggas berdasarkan Jenis Ternak di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-132
Tabel 2. 53 Luas Lahan Hutan di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2021 2-133
Tabel 2. 54 Persentase Jumlah Pelanggan Listrik di Provinsi Banten Tahun 2021 2-134
Tabel 2. 55 Ekspor Bersih Perdagangan Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020 2-136
Tabel 2. 56 Jumlah Transmigran Berdasarkan Daerah Penempatan Tahun 2015-2018 2-139
Tabel 2. 57 Produksi Ikan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Ikan sesuai Lokasi Budidaya Tahun 2012-2022 2-140
Tabel 2. 58 Produksi Ikan Perairan Umum di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2012-2022 2-141
Tabel 2. 59 Produksi Ikan Laut di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2012-2022 2-141
Tabel 2. 60 Luas Lahan Perikanan berdasarkan Jenis Usaha Perikanan di Kabupaten Tangerang tahun 2012-2022 2-142
Tabel 2. 61 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022 2-147
Tabel 2. 62 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022 ... 2-148
Tabel 2. 63 Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 2-148
Tabel 2. 64 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022 2-149
Tabel 2. 65 Indikator Kinerja Daerah Urusan Keuangan Kabupaten Tangerang 2-150
Tabel 2. 66 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tangerang 2-154
Tabel 2. 67 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2022 2-154
Tabel 2. 68 Indikator Urusan Pengawasan 2-155
Tabel 2. 69 Indeks Pelayanan Publik 2-156
Tabel 2. 70 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 2-156
Tabel 2. 71 Rasio Produktivitas Menurut Sektor/Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2021 2-160
Tabel 2. 72 Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2021 2-162
Tabel 2. 73 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten 2-162
Tabel 2. 74 Jumlah Akomodasi, Kamar, Tempat Tidur di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022 2-163
Tabel 2. 75 Jumlah Kendaraan Menurut Jenisnya di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021 2-163
Tabel 2. 76 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 2-164

Tabel 2. 77 Luas Lahan Total Menurut Penggunaan Lahan dan Kabupaten/Kota di Banten Tahun 2020 (Hektar).....2-164
Tabel 2. 78 Potensi Banjir di Provinsi Banten Tahun 2021 2-164
Tabel 2. 79 Potensi Kekeringan di Provinsi Banten Tahun 2021 2-165
Tabel 2. 80 Daya Listrik yang Terpasang di Provinsi Banten 2-166
Tabel 2. 81 Persentase Jumlah Pelanggan Listrik di Provinsi Banten Tahun 2021.....2-167
Tabel 2. 82 Persentase Penduduk yang Menggunakan Handphone atau Telepon di Provinsi Banten Tahun 2015-2020.....2-167
Tabel 2. 83 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang Tahun 2022 ...2-171
Tabel 2. 84 Capaian Kinerja Pembangunan Menurut Aspek dan Urusan Kabupaten Tangerang 2-172
Tabel 3. 1 Perbandingan Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional.....3-1
Tabel 3. 2 Permasalahan Pembangunan Menurut Bidang Urusan di Kabupaten Tangerang.....3-3
Tabel 3. 3 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Tangerang 3-17
Tabel 3. 4 Faktor Pendorong dan Penghambar Pencapaian Kinerja Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025..... 3-24
Tabel 3. 5 Masalah Pokok dan Isu Strategis Kabupaten Tangerang..... 3-26
Tabel 3. 6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang..... 3-26
Tabel 3. 7 Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator dalam Pilar Pembangunan Kependudukan..... 3-28
Tabel 3. 8 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Urusan berdasarkan Isu Strategis..... 3-32
Tabel 3. 9 Program Bidang Gizi dan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023..... 3-33
Tabel 3. 10 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Tangerang 3-37
Tabel 3. 11 Situ/Danau/Rawa di Kabupaten Tangerang..... 3-38
Tabel 3. 12 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Tangerang..... 3-39
Tabel 4. 1 Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Tangerang 4-2
Tabel 4. 2 Perumusan dan Penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang.....4-3
Tabel 5. 1 Target Capaian Indikator Makro.....5-1
Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 5-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah 1-5
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 2-2
Gambar 2. 2 Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Tangerang 2-3
Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Tangerang 2-4
Gambar 2. 4 Peta Kondisi Geologi Kabupaten Tangerang 2-5
Gambar 2. 5 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tangerang 2-6
Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Kabupaten Tangerang 2-7
Gambar 2. 7 Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 2-8
Gambar 2. 8 Suhu Kabupaten Tangerang Tahun 2022 2-8
Gambar 2. 9 Kelembaban Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2022 2-9
Gambar 2. 10 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022 2-10
Gambar 2. 11 Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Tangerang 2-11
Gambar 2. 12Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2-12
Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2022 2-13
Gambar 2. 14 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2022..... 2-15
Gambar 2. 15 Grafik Rasio Ketergantungan Tiap Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022..... 2-15
Gambar 2. 16 Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022..... 2-16
Gambar 2. 17 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2022 2-17
Gambar 2. 18 Diagram Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Tangerang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012, Tahun 2017, dan Tahun 2022 2-18
Gambar 2. 19 Perbandingan Inflasi Umum Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Nasional Tahun 2018-2022 2-20
Gambar 2. 20 Perbandingan PDRB ADHB per Kapita menurut Kabupaten/Kota 2-21
Gambar 2. 21 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2013-2022 2-21
Gambar 2. 22 Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendapatan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2022 2-22
Gambar 2. 23 Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendapatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022..... 2-23
Gambar 2. 24 Peta Tingkat Persentase Penduduk Berpendapatan Desil 1-4..... 2-23
Gambar 2. 25 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2011-2022..... 2-24
Gambar 2. 26 Perbandingan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2012-2022 2-25

Gambar 2. 27 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-26
Gambar 2. 28 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 2-27
Gambar 2. 29 Perbandingan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2-28
Gambar 2. 30 Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021 2-29
Gambar 2. 31 Pertumbuhan Industri Sedang-Besar Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2-29
Gambar 2. 32 Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012 – 2021 2-30
Gambar 2. 33 Grafik Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2022 dengan Provinsi Banten dan Nasional 2-31
Gambar 2. 34 Grafik Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012 – 2022 2-32
Gambar 2. 35 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2022 2-33
Gambar 2. 36 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2022 2-33
Gambar 2. 37 Prevalensi Stunting di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2022 2-34
Gambar 2. 38 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Tangerang Tahun 2022 2-36
Gambar 2. 39 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2022 2-36
Gambar 2. 40 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 2-37
Gambar 2. 41 Perbandingan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012-2022 2-38
Gambar 2. 42 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012-2022 2-38
Gambar 2. 43 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012-2022 2-39
Gambar 2. 44 Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten 2-40
Gambar 2. 45 Perbandingan Laju PDRB per Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2013-2022 2-40
Gambar 2. 46 Persentase Kelompok Masyarakat yang Berperan Aktif dalam Berolahraga 2-42
Gambar 2. 47 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tangerang tahun 2013 – 2020 2-42
Gambar 2. 48 Grafik Perbandingan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012 – 2022 2-43
Gambar 2. 49 Grafik Perbandingan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012 – 2022 2-44

Gambar 2. 50 Angka Pendidikan yang ditamatkan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tangerang (%) Tahun 2018 – 2021 2-45
Gambar 2. 51 Angka Putus Sekolah Kabupaten Tangerang (%) Tahun 2018 – 2021..... 2-45
Gambar 2. 52 Angka Putus Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun Ajaran 2016/2017 hingga 2022/2023 2-46
Gambar 2. 53 2-46
Gambar 2. 54 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tangerang Menurut Usia Tahun 2012 – 2021..... 2-47
Gambar 2. 55 Angka Melanjutkan Sekolah (%) Kabupaten Tangerang Tahun 2016 – 2020 2-48
Gambar 2. 56 Persentase Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kabupaten Tangerang Tahun Ajaran 2016/2017 hingga Tahun Ajaran 2022/2023 2-48
Gambar 2. 57 Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2-50
Gambar 2. 58 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah..... 2-51
Gambar 2. 59 Proporsi Murid Kelas I yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang (%) Tahun 2015-2019..... 2-51
Gambar 2. 60 Persentase Guru Sekolah Dasar (SD) dan Persentase Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 2-52
Gambar 2. 61 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022 2-53
Gambar 2. 62 Angka Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022 2-53
Gambar 2. 63 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021 2-54
Gambar 2. 64 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang ahun 2013-2022 2-55
Gambar 2. 65 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2020..... 2-55
Gambar 2. 66 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Tangerang tahun 2018 -2022 2-57
Gambar 2. 67 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan 2-58
Gambar 2. 68 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2017 -2022 2-58
Gambar 2. 69 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) 2-60
Gambar 2. 70 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)..... 2-61
Gambar 2. 71 Cakupan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) 2-62
Gambar 2. 72 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (%)..... 2-63
Gambar 2. 73 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%) 2-64
Gambar 2. 74 Penderita Diare Yang Ditangani (%)..... 2-64
Gambar 2. 75 Cakupan Kunjungan Bayi (%)..... 2-65
Gambar 2. 76 Cakupan Puskesmas (%) Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022 (%) 2-66
Gambar 2. 77 Cakupan Pembantu Puskesma Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 (%) 2-66
Gambar 2. 78 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%) 2-67
Gambar 2. 79 Cakupan Pelayanan Nifas 2-67
Gambar 2. 80 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Yang Ditangani..... 2-69

Gambar 2. 81 Cakupan Pelayanan Anak Balita (%) 2-69
Gambar 2. 82 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 2-70
Gambar 2. 83 Perbandingan Jumlah Kasus TBC Terdaftar dan Diobati Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 2-71
Gambar 2. 84 Jumlah Kasus Tuberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 – 2021. 2-71
Gambar 2. 85 Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021 2-72
Gambar 2. 86 Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-73
Gambar 2. 87 Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 2-75
Gambar 2. 88 Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 2-77
Gambar 2. 89 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 2-80
Gambar 2. 90 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 2-81
Gambar 2. 91 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 2-81
Gambar 2. 92 Persentase Penegakan Perda Tahun 2019-2022 2-82
Gambar 2. 93 Persentase PMKS Menurut Kategori PMKS di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 2-84
Gambar 2. 94 Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Tangerang dan Perbandingan Rasio Pencari Kerja Ditempatkan terhadap Terdaftar di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022 2-85
Gambar 2. 95 Besaran Tenga Kerja yang Dilatih di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2019 ... 2-86
Gambar 2. 96 Perbandingan Upah Minimum Regional Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022 2-86
Gambar 2. 97 Angkatan Kerja Tamat Perguruan Tinggi dan Rasio Lulusan Perguruan Tinggi per 10.000 penduduk di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022 2-87
Gambar 2. 98 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012 – 2022 2-88
Gambar 2. 99 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2017 – 2022 2-88
Gambar 2. 100 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangaerang Tahun 2018 - 2022 2-89
Gambar 2. 101 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parleen 2-90
Gambar 2. 102 Proporsi Posisi Manajer, Administrasi, Profesional, dan Teknisi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2022..... 2-90
Gambar 2. 103 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022 2-91

Gambar 2. 104 Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 2-92
Gambar 2. 105 Perbandingan Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022..... 2-93
Gambar 2. 106 Perbandingan Nilai Ketersediaan Energi Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2016-2022 2-94
Gambar 2. 107 Perbandingan Nilai Ketersediaan Protein Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2016-2022 2-94
Gambar 2. 108 Rata-Rata Konsumsi Protein di Kabupaten Tangerang tahun 2017-2022 2-95
Gambar 2. 109 Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2016-2022..... 2-96
Gambar 2. 110 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022..... 2-97
Gambar 2. 111 Persentase Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022 2-97
Gambar 2. 112 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional 2-98
Gambar 2. 113 Peta Status DDDTLH Pangan Kabupaten Tangerang..... 2-99
Gambar 2. 114 Peta Status DDDTLH Air Kabupaten Tangerang 2-100
Gambar 2. 115 Perbandingan Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola di Kabupaten Tangerang, ...2-100
Gambar 2. 116 Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2021.....2-102
Gambar 2. 117 Persentase PKK Aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022.....2-103
Gambar 2. 118 Angka Kelahiran Total Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2022.....2-104
Gambar 2. 119 Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun di Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2022 2-104
Gambar 2. 120 ASFR 15-19 Kabupaten Tangerang Tahun 2018 – 2022 2-105
Gambar 2. 121 *Unmet Need* Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022 (%) 2-106
Gambar 2. 122 Persentase Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022 (%).....2-107
Gambar 2. 123 Rata – Rata Usia Kawin Pertama Perempuan di Kabupaten Tangerang 2-107
Gambar 2. 124 Pintu Masuk Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto.....2-109
Gambar 2. 125 Dermaga Kapal Pelabuhan Tanjung Pasir.....2-110
Gambar 2. 128 Realisasi PMDN dan Rasio Serapan Tenaga Kerja PMDN di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten tahun 2018-2022.....2-114
Gambar 2. 130 Realisasi PMA dan Jumlah Proyek PMA di Kabupaten Tangerang tahun 2012-2022 2-115
Gambar 2. 132 Realisasi PMA dan Rasio Serapan Tenaga Kerja PMA di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten tahun 2018-2022.....2-115

Gambar 2. 134 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2019-2022 2-116
Gambar 2. 136 Persentase Wirausaha Muda 2-117
Gambar 2. 138 Cakupan Pembinaan Olahraga 2-117
Gambar 2. 140 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi.....2-118
Gambar 2. 142 Cakupan Pembinaan Atlet Muda 2-118
Gambar 2. 144 Jumlah Atlet Berprestasi dan Prestasi Olahraga Kabupaten Tangerang.....2-119
Gambar 2. 146 Laman Muka Kabupaten Tangerang Open Data 2-120
Gambar 2. 148 Dokumen Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2006 dan 2023.....2-120
Gambar 2. 150 Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tangerang Menurut Pengeluaran dan Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 2-121
Gambar 2. 151 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya.....2-121
Gambar 2. 153 Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi 2-122
Gambar 2. 155 Jumlah Kunjungan Perpustakaan 2-123
Gambar 2. 157 Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah 2-124
Gambar 2. 159 Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah 2-124
Gambar 2. 160 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (PLM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 2-126
Gambar 2. 162 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku.....2-127
Gambar 2. 164 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021 2-128
Gambar 2. 165 Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021.....2-129
Gambar 2. 167 Kontribusi PAD Sektor Pariwisata.....2-129
Gambar 2. 169 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dibanding Kontribusi Sektor Lain terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-130
Gambar 2. 171 Luas Lahan Pertanian dan Lahan Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022 2-131
Gambar 2. 173 Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-131
Gambar 2. 175 Jumlah Pelanggan Listrik dan Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021 2-134
Gambar 2. 176 Persentase Kontribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022.....2-135
Gambar 2. 177 Laju PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022.....2-135
Gambar 2. 179 Nilai Ekspor, Nilai Impor, Nilai Net Ekspor PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-136
Gambar 2. 180 Persentase Kontribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022.....2-137

Gambar 2. 181 Laju PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022 2-138
Gambar 2. 183 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021 ... 2-139
Gambar 2. 185 Produksi Perikanan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022 2-140
Gambar 2. 186 Luas Lahan Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-142
Gambar 2. 187 Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012-2022 2-143
Gambar 2. 189 Cakupan Kelompok Bina Nelayan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022 2-144
Gambar 2. 191 Proporsi Tangkapan Ikan Produksi di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022 2-144
Gambar 2. 193 Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022 2-145
Gambar 2. 195 Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022 2-146
Gambar 2. 197 Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022 2-147
Gambar 2. 198 Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2018-2022 2-150
Gambar 2. 200 Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung 2-151
Gambar 2. 202 Persentase Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dan Desa 2-152
Gambar 2. 204 ASN Kabupaten Tangerang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2022 2-152
Gambar 2. 206 ASN Kabupaten Tangerang Menurut Golongan Tahun 2020-2022 2-153
Gambar 2. 208 ASN Kabupaten Tangerang Menurut Jabatan Tahun 2020-2022 2-153
Gambar 2. 209 Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021 2-155
Gambar 2. 210 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/kota, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2022 2-157
Gambar 2. 212 PDRB dan Laju PDRB Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-158
Gambar 2. 214 Pensentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 2-159
Gambar 2. 216 Nilai Tukar Petani Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2010-2022 2-159
Gambar 2. 217 Perbandingan Derajat Keterbukaan Ekonomi Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2-160
Gambar 2. 220 Diagram Rasio Produktivitas Menurut Sektor/Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2021 2-161
Gambar 2. 221 Peta Tingkat Bahaya Banjir Kabupaten Tangerang 2-165
Gambar 2. 222 Peta Tingkat Bahaya Kekeringan di Kabupaten Tangerang 2-166
Gambar 2. 222 Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk 2-168

Gambar 2. 223 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana 2-168
Gambar 2. 224 Besaran dan Persentase Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang 2-169
Gambar 2. 226 Angkatan Kerja Tamat Perguruan Tinggi dan Rasio Lulusan Perguruan Tinggi per 10.000 penduduk di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022 2-170
Gambar 3. 1 Peta Struktur Ruang Provinsi Banten 3-15
Gambar 3. 2 Peta Pola Ruang Provinsi Banten 3-17
Gambar 3. 3 Peta Struktur Ruang Kabupaten Tangerang 3-19
Gambar 3. 4 Peta Pola Ruang Kabupaten Tangerang..... 3-20
Gambar 3. 5 Daya Dukung Daya Tampung Ketersediaan Air Kabupaten Tangerang 3-21
Gambar 3. 6 Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 3-28
Gambar 3. 7 Peta Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata dan Pelayanan Destinasi Pariwisata Kabupaten Tangerang 3-36
Gambar 3. 8 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Banten 3-39
Gambar 3. 9 Persebaran Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Tangerang..... 3-41
Gambar 3. 10 Model Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3-50
Gambar 4. 1 Konsep Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Tangerang 4-1
Gambar 4. 2 Diagram Konsep Visi RPJPD Kabupaten Tangerang.....4-2
Gambar 5. 1 Perumusan Sasaran Pokok dan Indikator 5-2

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan ***holistik-tematik***, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu ***integratif***, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan ***spasial***, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selain itu, pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat 1 Permendagri 86/2017 tersebut dijelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang periode 2005-2025 akan berakhir masa berlakunya. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1, setiap daerah diamanatkan untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Berdasarkan amanat perundangan di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dalam bidang perencanaan merasa perlu untuk segera menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045.

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tangerang tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

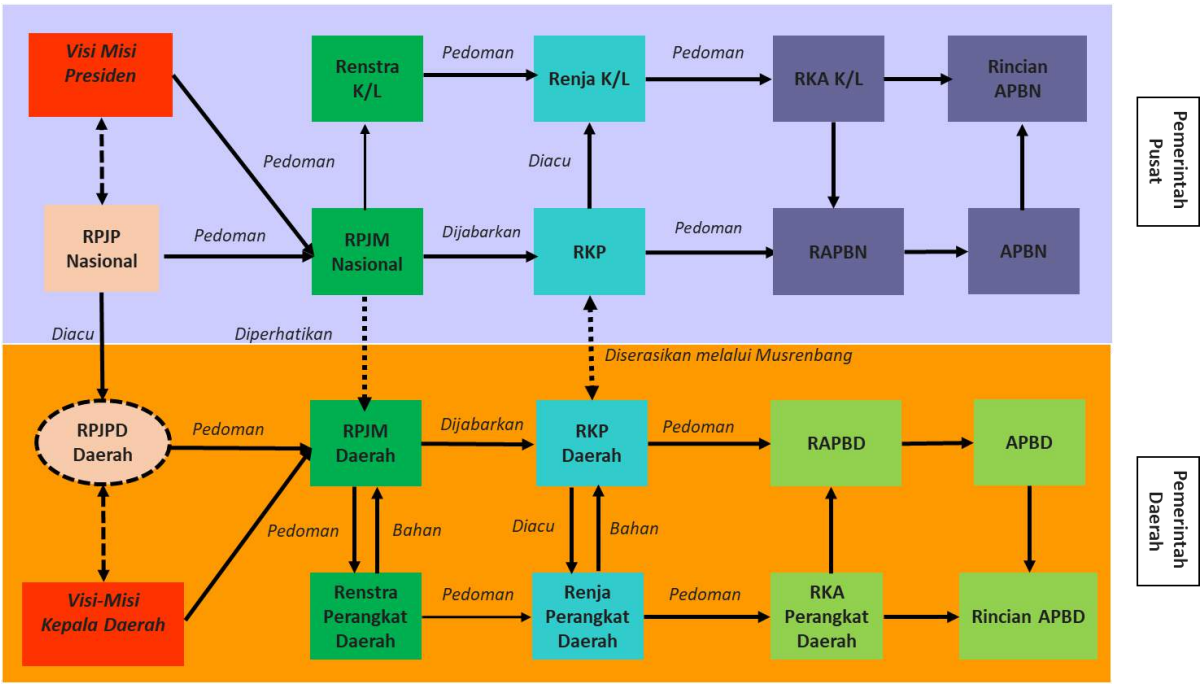
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Tangerang merupakan perencanaan yang bersifat makro

yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Gambar 1.1.
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah
Sumber: diolah dari UU No 25 Tahun 2004

Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Banten 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Banten, maupun Kabupaten Tangerang. RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD

merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen awal perencanaan Pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 akan menjadi landasan dokumen perencanaan daerah RPJMD, RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Tangerang yang berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW, dalam rangka:

1. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta
4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam pasal 20 Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten; serta sistematika penulisan (Pasal 20 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Bab 2: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum tentang kondisi kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Informasi gambaran umum kondisi daerah selaras dan mendukung permasalahan pembanguan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

Bab 3: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

Bab 4: Visi dan Misi Daerah

Menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang secara terukur dan spesifik yang akan dicapai sampai dengan akhir periode serta selaras dengan visi dan misi Provinsi Banten serta Indonesia 2045.

Bab 5: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20

Bab 6: Penutup

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD empat periode ke depan.

BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang sedang direncanakan.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

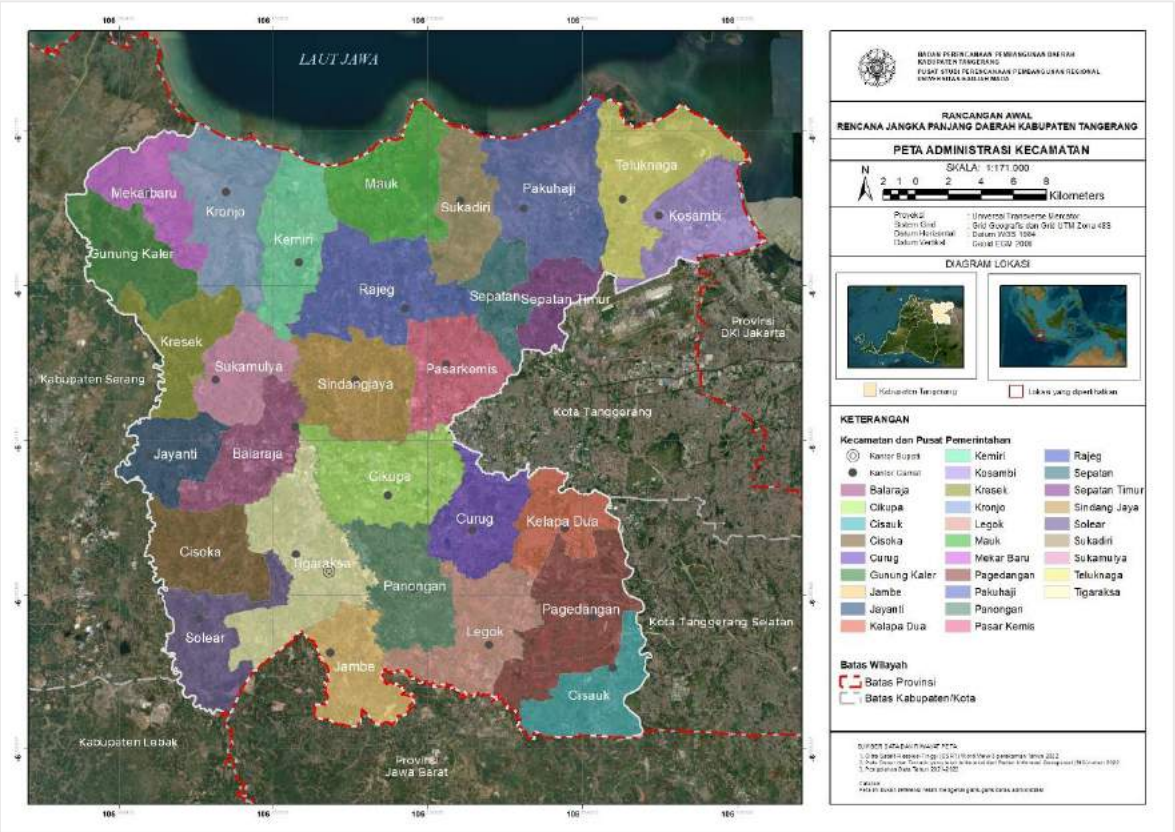
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi, dan Pulau, Kabupaten Tangerang dengan kode wilayah 36.03 memiliki luas wilayah 1.027,757 km^2. Keputusan tersebut juga menjabarkan bahwa Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa. Berikut adalah rincian data administrasi wilayah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 1
Administrasi Kecamatan Kabupaten Tangerang

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
			(km^2)	(%)	Kelurahan	Desa
1	Tigaraksa	Tigaraksa	55,32	5,41	1	8
2	Pakuhaji	Pakuhaji	53,24	5,20	2	12
3	Pagedangan	Pagedangan	51,21	5,00	1	5
4	Rajeg	Rajeg	50,16	4,90	-	10
5	Teluknaga	Teluknaga	46,89	4,58	3	4
6	Kronjo	Kronjo	45,14	4,41	-	9
7	Cikupa	Cikupa	44,62	4,36	-	10
8	Sindangjaya	Sindangjaya	41,45	4,05	-	8
9	Mauk	Mauk	40,92	4,00	5	1
10	Legok	Legok	39,51	3,86	-	7
11	Panongan	Panongan	36,27	3,54	3	7
12	Kemiri	Kemiri	35,86	3,50	-	9
13	Kosambi	Kosambi	33,70	3,29	-	10
14	Cisoka	Cisoka	33,64	3,29	1	10
15	Gunung Kaler	Gunung Kaler	32,95	3,22	1	11
16	Solear	Solear	32,60	3,19	-	8
17	Pasarkemis	Pasarkemis	31,98	3,13	1	10
18	Balaraja	Balaraja	31,26	3,05	1	13
19	Curug	Curug	30,39	2,97	1	7
20	Cisauk	Cisauk	29,56	2,89	4	5
21	Jambe	Jambe	28,86	2,82	1	12
22	Sukadiri	Sukadiri	28,72	2,81	1	7
23	Kresek	Kresek	28,57	2,79	-	8
24	Mekarbaru	Mekarbaru	28,40	2,77	-	7
25	Sukamulya	Sukamulya	27,24	2,66	-	7
26	Kelapa Dua	Kelapa Dua	24,09	2,35	-	8
27	Jayanti	Jayanti	23,79	2,32	-	8
28	Sepatan	Sepatan	18,70	1,83	-	13
29	Sepatan Timur	Sepatan Timur	18,38	1,80	2	12
Kabupaten Tangerang		**Tigaraksa**	**1.023,439**	**100**	**28**	**246**

Sumber: ArcMap, BPS Kabupaten Tangerang, dan Kementerian Dalam Negeri, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tigaraksa adalah kecamatan terluas dengan persentase luasan 5,41% dari total luas wilayah Kabupaten Tangerang. Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Tigaraksa juga merupakan ibukota Kabupaten Tangerang. Pusat-pusat pemerintahan kecamatan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: Sumber: ArcMap dan Badan Informasi Geospasial, 2023

Selain pusat-pusat pemerintahan, gambar diatas juga memperlihatkan batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang. Batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut.

Utara : Laut Jawa
Selatan : Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak
Timur : Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta
Barat : Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak

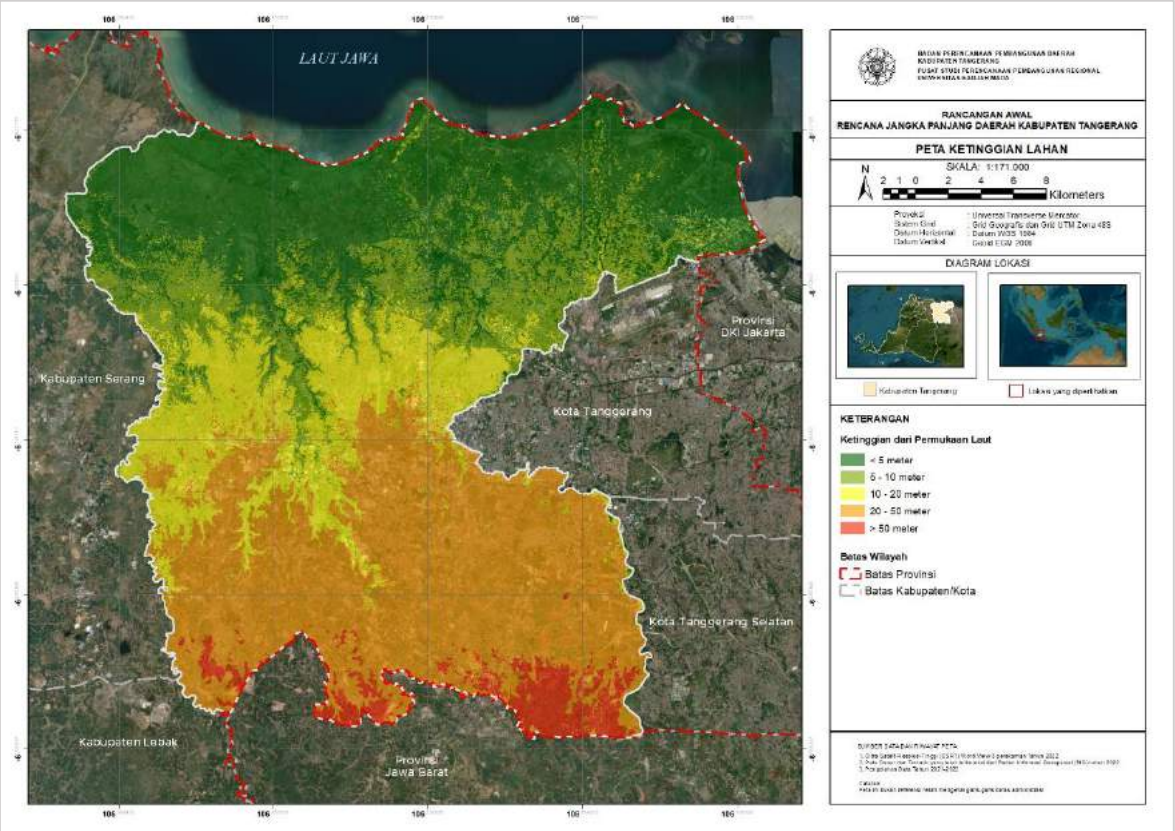
B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Tangerang terletak pada 6°00'-6°20' Lintang Selatan dan 106°20'-106°43' Bujur Timur. Kabupaten Tangerang terletak pada bagian utara Pulau Jawa sehingga bagian utara wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kabupaten Tangerang juga berbatasan dengan ibu kota Negara, yaitu Provinsi DKI

Jakarta (pusat pemerintahan dan pusat perekonomian negara). Bagian utara merupakan kawasan pesisir dan bagian lainnya merupakan daratan.

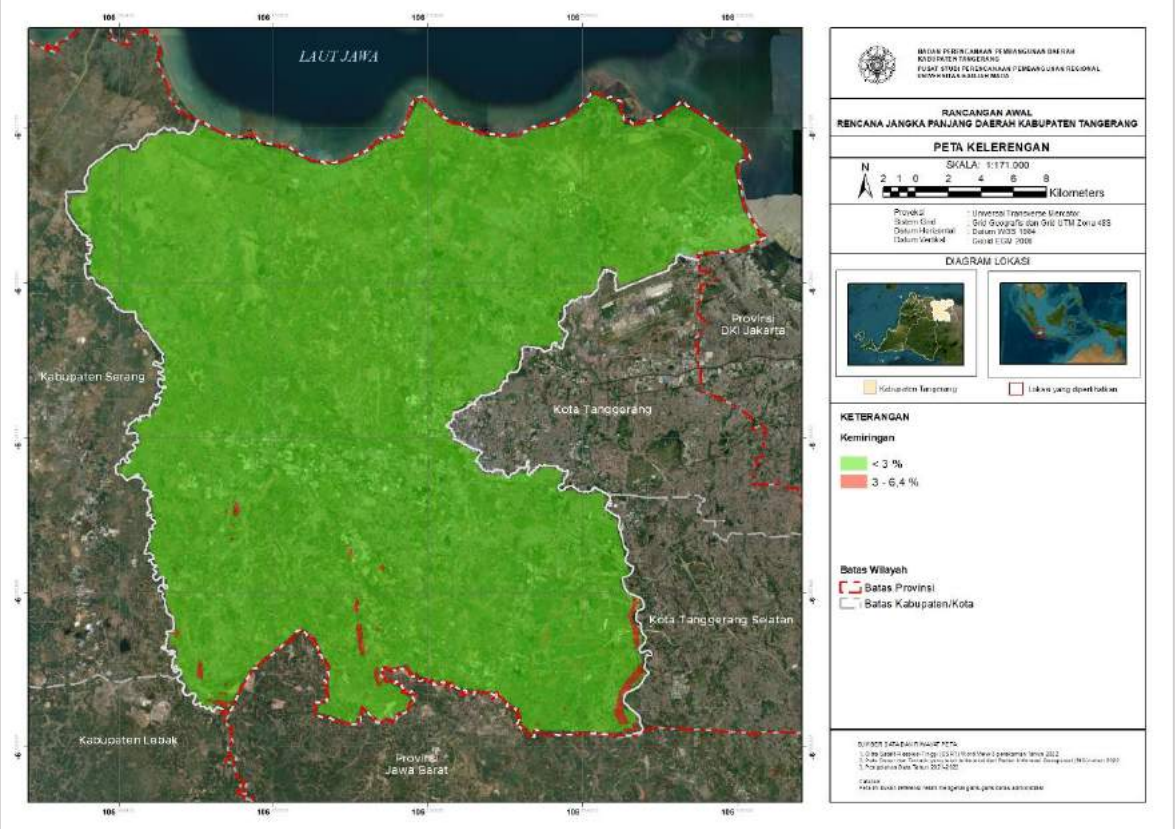
C. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah dapat dilihat dari dua jenis, yaitu ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian lahan, Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah karena semua wilayahnya berada pada ketinggian di bawah 200 mdpl.



Gambar 2. 2
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Tangerang
Sumber: Sumber: Badan Informasi Geospasial dan ArcMap (diolah), 2023

Berdasarkan gambar diatas, bagian utara Kabupaten Tangerang berada di ketinggian 0-10 mdpl, bagian tengah berada di ketinggian 10-20 mdpl, dan bagian selatan berada di ketinggian >20 mdpl. Selain ketinggiannya, data kemiringan lahan juga menunjukan bahwa Kabupaten Tangerang merupakan suatu dataran. Data kemiringan lahan menunjukan bahwa hampir seluruh bagian wilayah Kabupaten Tangerang memiliki kemiringan lahan <3%, sementara sisanya memiliki kemiringan lahan 3 - 6,4%. Berikut adalah peta kemiringan lahan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 3
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Tangerang
Sumber: Badan Informasi Geospasial dan ArcMap (diolah), 2023

D. Kondisi Geologi

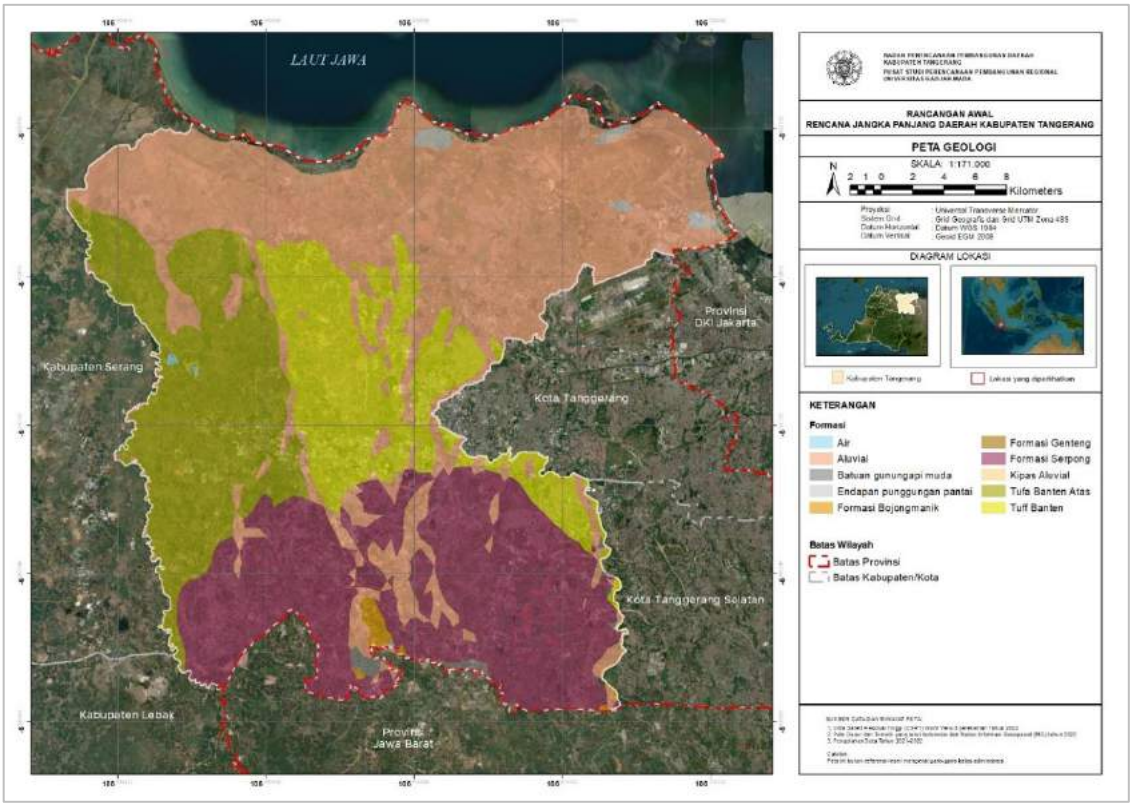
Secara geomorfologi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang termasuk dataran Batavia (Bemmelen, 1949) yang berupa dataran dengan penyebaran di bagian barat hingga di bagian timur, sedangkan di bagian selatan merupakan kaki dari gunung api Kwarter (G.Manceuri, G.Panunggangan dan G,Simbangpelem) yang terletak di sebelah barat daya kota Tangerang). Dengan kondisi geomorfologi tersebut, maka wilayah Kabupaten Tangerang merupakan produk pengendapan batuan Tersier dan produk pengendapan dari kegiatan gunungapi Kwarter baik secara primer maupun sekunder sebagai batuan sedimen piroklastik dan batuan sedimen epiklastik, serta produk sedimen klastik sebagai endapan alluvial (Qa) yang terjadi hingga sekarang.

Dari segi stratigrafi, wilayah Kabupaten Tangerang tersusun oleh batuan Tersier, dan batuan Kwarter. Batuan Tersier terdapat di bagian selatan wilayah (aliran sungai Cisadane) yang terdiri dari Formasi Bojongmanik (Tmb), Formasi Genteng (Tpg) dan Formasi Serpong (Tpss), sedangkan batuan Kwarter terdiri dari Tuff Banten (QTvb), Batuan Gunungapi Muda (Qv), Endapan Pematang Pantai (Qbr) dan Endapan Aluvial (Qa). Pada saat Tersier diendapkan *Formasi Bojongmanik* terdiri dari perselingan batupasir dengan batulempung dengan sisipan batugamping, sedangkan *Formasi Genteng* terdiri dari tuff batuapung, batupasir tufan, breksi andesit, konglomerat, dan sisipan batulempung tufan. *Formasi Serpong* terdiri dari perselingan konglomerat, batupasir,

batulanau dan batulempung mengandung sisa sisa tanaman, konglomerat batuapung dan tuff batuapung, sedangkan *Tuff Banten* terdiri dari tuff, tuff batuapung dan batupasir tufan. Selanjutnya pada saat Kwarter diendapkan *Batuan Gunungapi Muda* yang terdiri dari breksi, lahar, tuff breksi, dan tuff batuapung. Selanjutnya masih pada saat Kwarter diendapkan *Endapan Pematang Pantai* yang berupa pasir halus sampai kasar, sortasi baik, terdapat cangkang moluska, disamping itu juga terjadi *Endapan Alluvial* yang terdiri dari lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Hubungan stratigrafi *tidak selaras* terdapat antara *Formasi Genteng* dan *Formasi Serpong*, dan antara *Tuff Banten* dengan *Endapan Pematang Pantai* atau *Endapan Aluvial*. Beberapa *lapisan pasir* pada Endapan Pematang Pantai dan Endapan Alluvial dapat berfungsi sebagai lapisan pembawa air (*akifer)* baik akifer bebas maupun akifer tertekan.

Dari tinjauan struktur geologi regional, wilayah Kabupaten Tangerang terletak disebelah utara sesar aktif (sesar naik) Baribis yang bisa menjadi pergerakan aktif kerak bumi sehingga bisa menjadi tempat kedudukan episentrum gempabumi. Struktur geologi wilayah Kabupaten Tangerang didominasi struktur lapisan horizontal bagi batuan sedimen Kawrter, hingga struktur homoklin untuk batuan Tersier.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kabupaten Tangerang mempunyai potensi sumberdaya geologi berupa pasir dan potensi sumberdaya air berupa air permukaan (DAS) dan air tanah sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Tangerang – Jakarta dengan beberapa lapisan akifer.

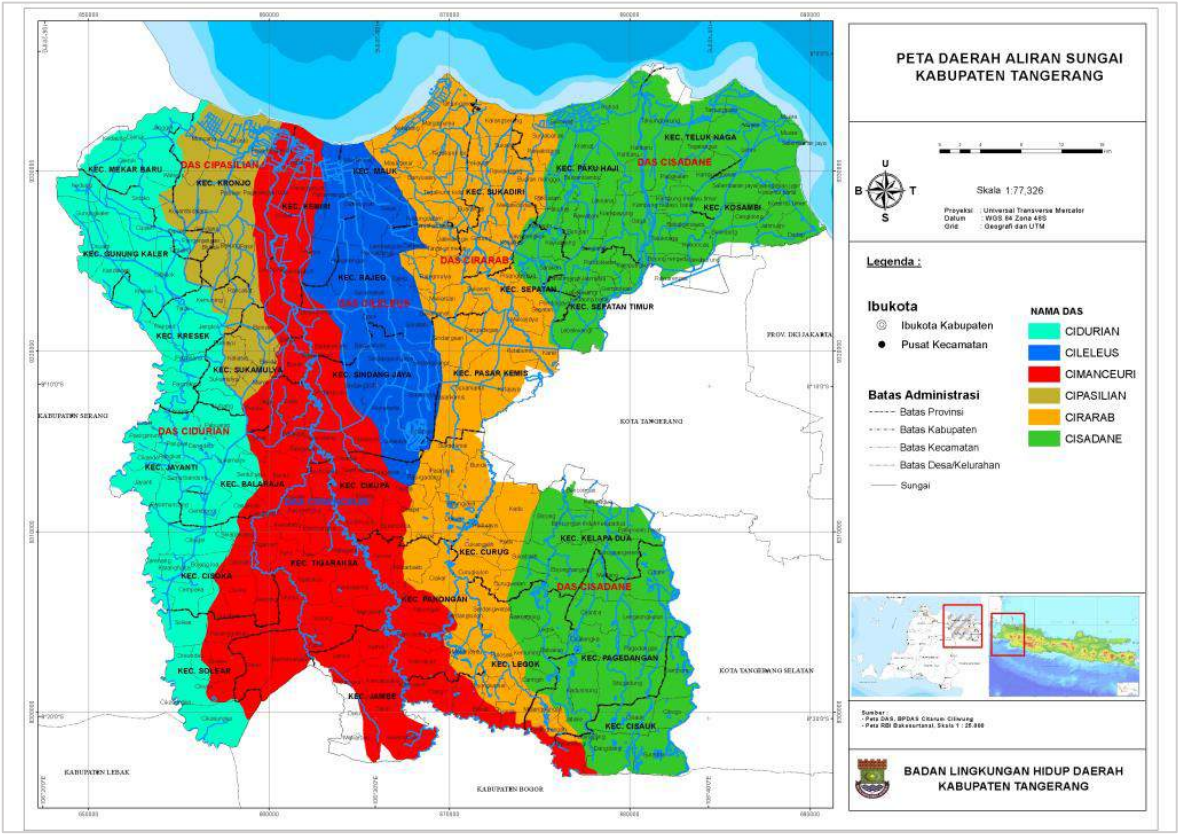


Gambar 2. 4
Peta Kondisi Geologi Kabupaten Tangerang
Sumber: Badan Informasi Geospasial dan ArcMap (diolah), 2023

E. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Tangerang dialir oleh banyak sungai. Sungai-sungai tersebut dapat dikelompokan lagi berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat disebut sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi enam DAS, yaitu:

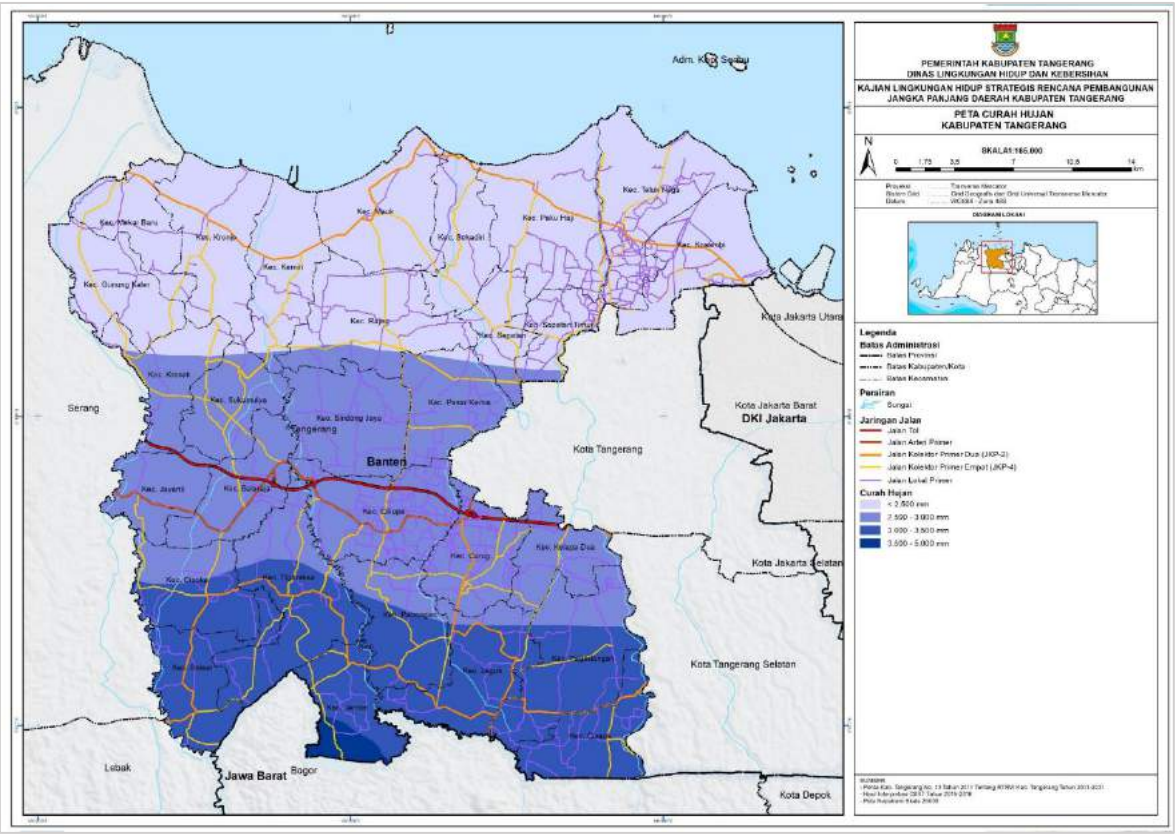
a. DAS Cidurian :terbentang di bagian barat yang meliputi Kecamatan Mekar Baru sampai Kecamtan Solear.
b. DAS Cipasilia :berada di bagian utara yang meilupti Kecamatan Kronjo. Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek.
c. DAS Cimanceuri :terbentang di bagian tengah yang meliputi Kecamatan Kemiri sampai Kecamatan Jambe.
d. DAS Cileleus :berada di bagian utara yang meliputi Kecamatan Mau, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Sindangjaya.
e. DAS Cirarab :terbentang di bagian tengah yang meliputi Kecamatan Kecamatan Mau sampai Kecamatan Pagedangan.
f. DAS Cisadane :berada di bagian timur yang meliputi Kecamatan Teluknaga sampai Kecamatan Cisauk, dan melewati Kota Tangerang.



Gambar 2. 5
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tangerang
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang

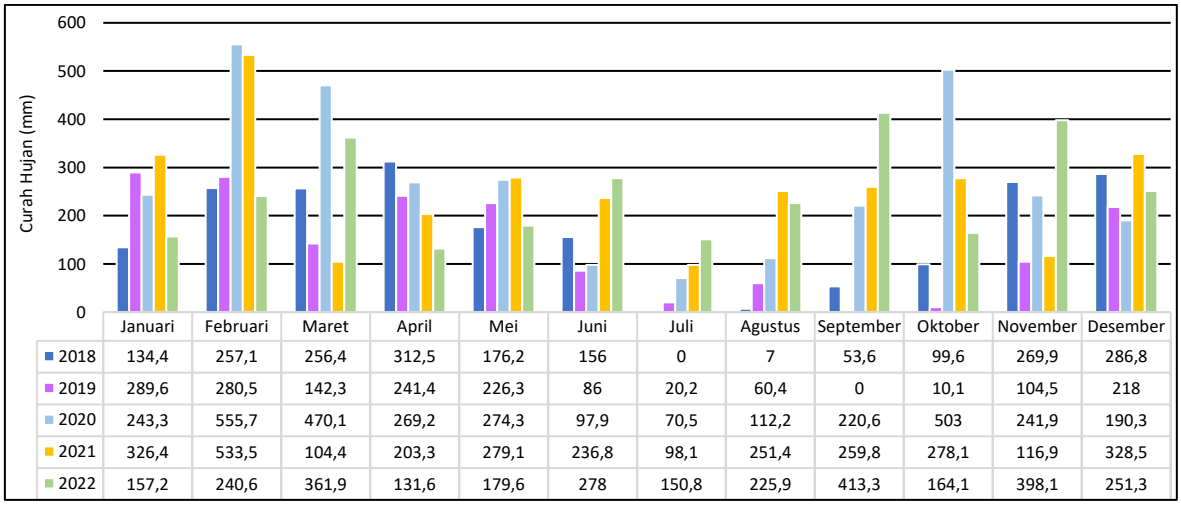
F. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat diamati dari berbagai hal, beberapa diantaranya adalah curah hujan, suhu, dan kelembaban. Curah hujan di Kabupaten Tangerang dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok: kelompok pertama dengan curah hujan <2.500 mm berada di bagian utara, kelompok ke-dua dengan curah hujan 2.500-3.000 mm berada di bagian tengah, dan kelompok ke-tiga dengan curah hujan 3.000-3.500 mm berada di bagian selatan. Berikut adalah peta curah hujan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 6
Peta Curah Hujan Kabupaten Tangerang
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang 2023

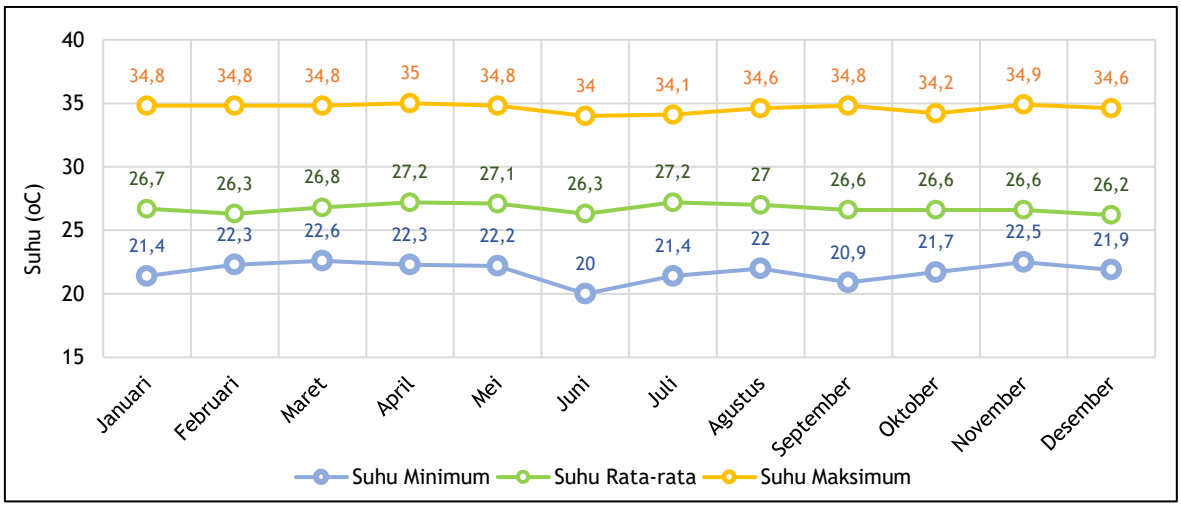
Dilihat beradasarkan tahun dan bulannya, curah hujan di Kabupaten Tangerang membetuk grafik yang cekung di bagian tengah (bulan tengah tahun). Setiap tahunnya curah tertinggi berada di bulan yang relatif berbeda: tahun 2018 berada di bulan April, tahun 2019 berada di bulan Januari, tahun 2020 berada di bulan Februari, tahun 2021 berada di bulan Februari, dan tahun 2022 berada di bulan September.



	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2018	134,4	257,1	256,4	312,5	176,2	156	0	7	53,6	99,6	269,9	286,8
2019	289,6	280,5	142,3	241,4	226,3	86	20,2	60,4	0	10,1	104,5	218
2020	243,3	555,7	470,1	269,2	274,3	97,9	70,5	112,2	220,6	503	241,9	190,3
2021	326,4	533,5	104,4	203,3	279,1	236,8	98,1	251,4	259,8	278,1	116,9	328,5
2022	157,2	240,6	361,9	131,6	179,6	278	150,8	225,9	413,3	164,1	398,1	251,3

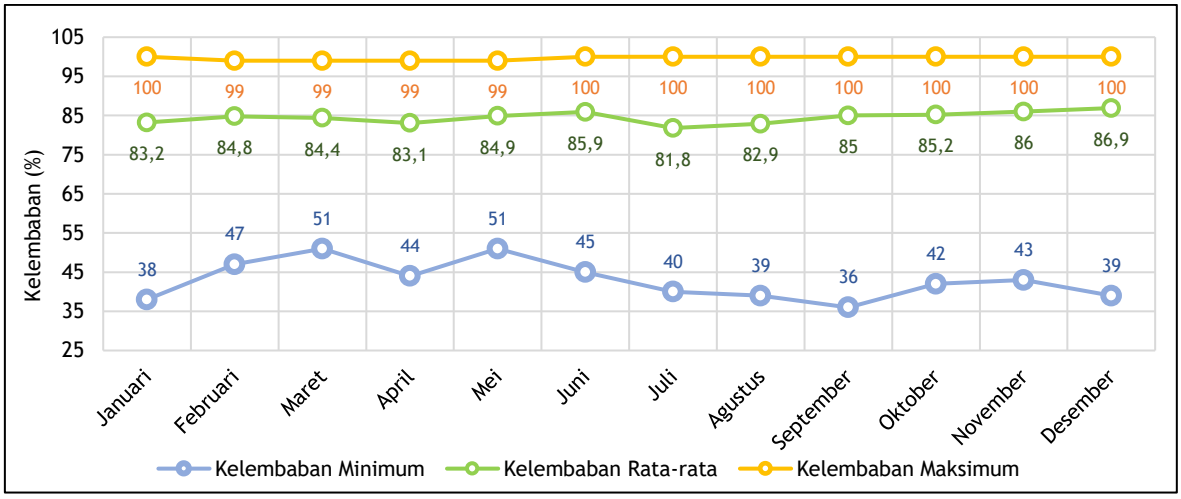
Gambar 2. 7
Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Suhu rata-rata pada tahun 2022 berkisar antara 26,2ºC sampai 27,2ºC. Suhu tertinggi pada satu tahun terakhir adalah 35ºC yang terjadi di bulan April. Suhu terendah adalah 20 ºC yang terjadi di bulan Juni.



Gambar 2. 8
Suhu Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Kelembaban rata-rata pada tahun 2022 berkisar antara 81,8% sampai 86,9%. Kelembaban tertinggi pada satu tahun terakhir adalah 100% yang terjadi di bulan Januari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kelembaban terendah adalah 36% yang terjadi di bulan September.



Gambar 2. 9
Kelembaban Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

G. Penggunaan Lahan

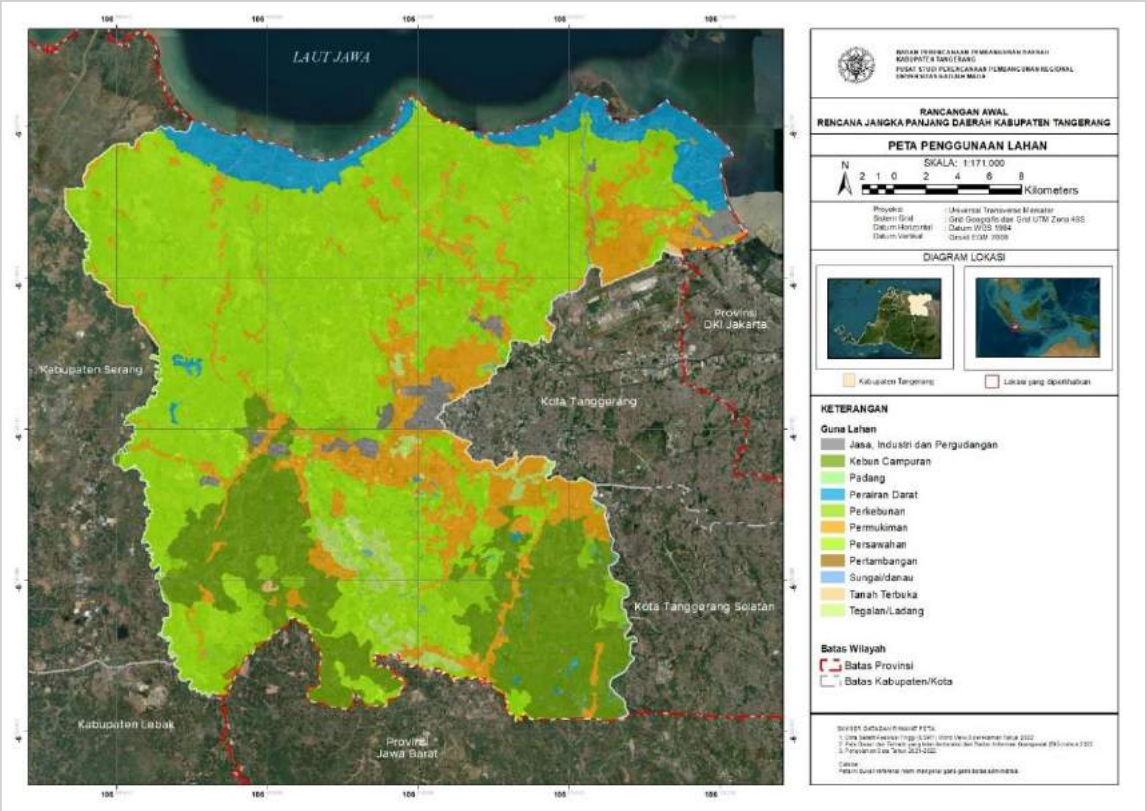
Penggunaan lahan Kabupaten Tangerang terdiri dari lahan persawahan; kebun campuran; perkampungan; perairan darat; perkebunan; tegalan/ladang; jasa, industri, dan pergudangan; sungai/danau; pertambangan, tanah terbuka, dan padang.

Tabel 2. 2
Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Persawahan	57.431	56,08
2	Kebun Campuran	16.835	16,44
3	Perkampungan	14.874	14,52
4	Perairan Darat	5.919	5,78
5	Perkebunan	2.183	2,13
6	Tegalan/Ladang	2.049	2,00
7	Jasa, Industri, dan Pergudangan	1.785	1,74
8	Sungai/Danau	1.126	1,10
9	Pertambangan	111	0,11
10	Tanah Terbuka	93	0,09
11	Padang	8	0,01

Sumber: Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten

Lahan persawahan dengan luas 57.431 Ha dan persentase luasan 56,08% dari total luas wilayah merupakan jenis penggunaan lahan terluas di Kabupaten Tangerang. Lahan persawahan tersebut umumnya berada di bagian utara dan beberapa bagian di bagian selatan. Kebun campuran sebagai lahan terluas kedua berada di bagian selatan. Guna lahan permukiman didominasi dibagian timur di dekat Kota Tangerang.



Gambar 2. 10
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten

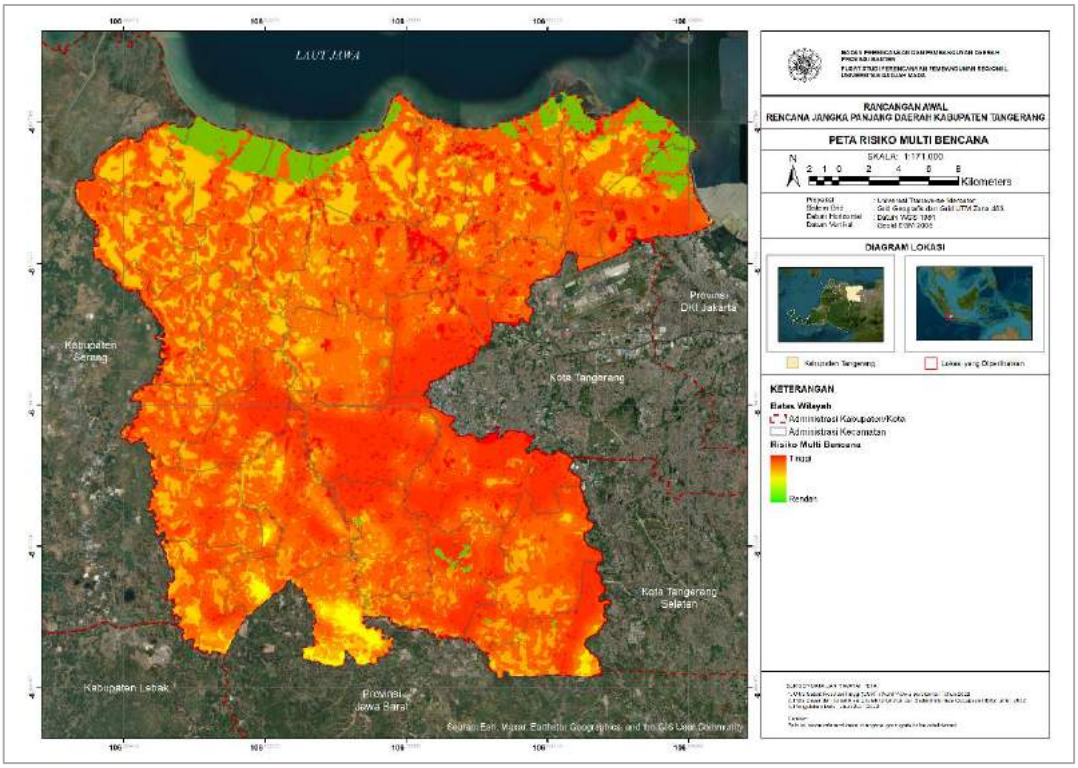
H. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, arahan pemanfaatan ruang Kab. Tangerang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud adalah kawasan hutan lindung (di Kecamatam Kronjo, Kemiri, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga, dan Kosambi); kawasan resapan air pada bagian hulu DAS; kawasan sempadan sungai; kawasan sempadan pantai; dan kawasan cagar budaya. Sementara itu kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pertanian; perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; kawasan pertahanan dan keamanan; serta kawasan transportasi.

Berdasarkan aktivitas ekonomi dan diarahkan dalam RTRW, Kabupaten Tangerang berpotensi untuk dikembangkan kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa, industri, perumahan, dan pergudangan di Kecamatan Balaraja, Kecamatan Jurug, dan Kecamatan Teluknaga. Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045, dijabarkan bahwa Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk direncanakan sebagai Kawasan Strategis Dryport untuk kegiatan utama transportasi dan pergudangan. Ditambah lagi dengan wilayah perbatasan Kabupaten Tangerang dengan perbatasan Jakarta dengan kegiatan utama pergudangan, industri, perdagangan dan jasa yang perlu dioptimalkan untuk mendorong perekonomian Kabupaten Tangerang. Selain itu juga kawasan reklamasi berjarak 200 meter dari garis pantai utara Kab. Tangerang diarahkan sebagai kasawan ekonomi baru dengan kegiatan utama perumahan, pelabuhan, dan industri.

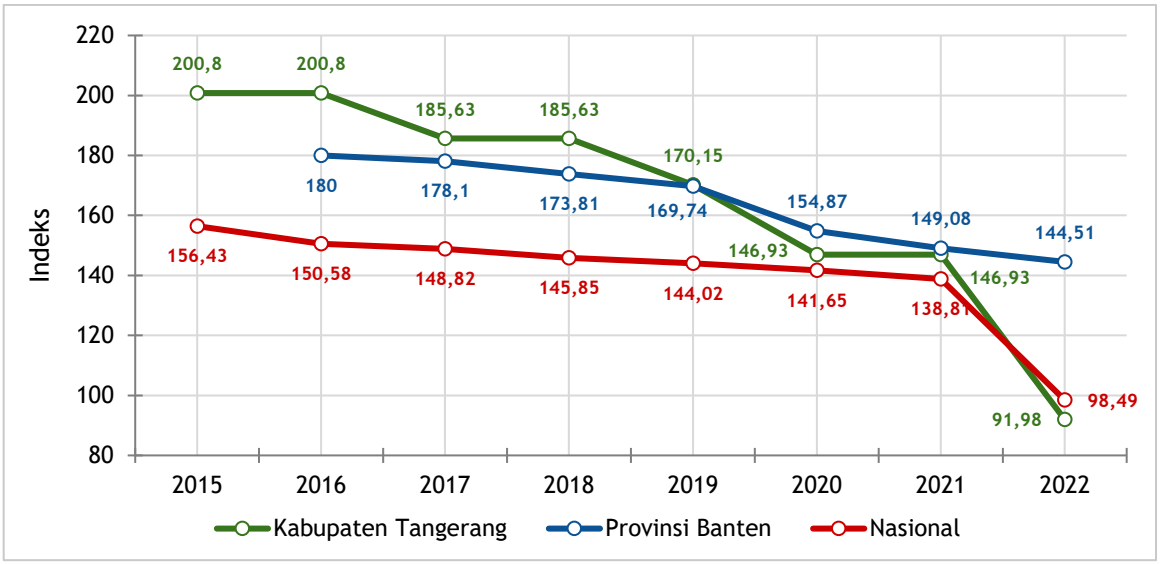
I. Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan data yang ditampilkan oleh InaRISK BNPB Tahun 2023, kebencanaan di kabupaten Tangerang terbagi menjadi 3 kelas bahaya diantaranya kelas bahaya rendah, sedang, dan tinggi. Kebencanaan tersebut meliputi bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan likuefaksi. Secara keseluruhan, peta berikut memperlihatkan besaran risiko multi bencana di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 11
Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Tangerang
Sumber: InaRISK BNPB, 2023 (diolah)

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tangerang menunjukkan potensi bencana geologi berupa bencana gempa bumi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Potensi bencana tsunami terletak di sepanjang pesisir pantai utara yang berjarak 1 km dari bibir pantai, daerah yang memiliki risiko dampak parah yaitu pada Kecamatan Kronjo, Kemiri, dan Mauk. Potensi bencana banjir berupa banjir rob (pasang surut) di kawasan pesisir dan banjir di sepanjang aliran sungai. Kemudian potensi kekeringan dapat terjadi akibat curah hujan di suatu kawasan jauh di bawah curah hujan normal dalam waktu lama. Bencana ini dipicu oleh perubahan siklus iklim global yang ditandai dengan meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan.



Gambar 2. 12Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten
Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Kemudian, dari grafik di atas diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Tangerang memperlihatkan tren menurun dalam kurun waktu tahun 2015-2022. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Tangerang sudah sangat baik. Pemerintah daerah berhasil menurunkan tingkat risiko bencana yang awalnya berada jauh diatas indeks risiko bencana nasional mencapai angka 200,8 pada tahun 2015 dan 2016. Hingga pada tahun 2022, angka IRB Kabupaten Tangerang berada di bawah kategori tinggi (>144) dan di bawah Provinsi Banten (144,51) serta mengikuti tren positif nasional dengan angka 91,98.

2.1.2 Aspek Demografi

Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, S., 2008). Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan sejarah kependudukan, ada dua pemahaman terkait hubungan antara penduduk dan perubahannya dengan pembangunan suatu wilayah.

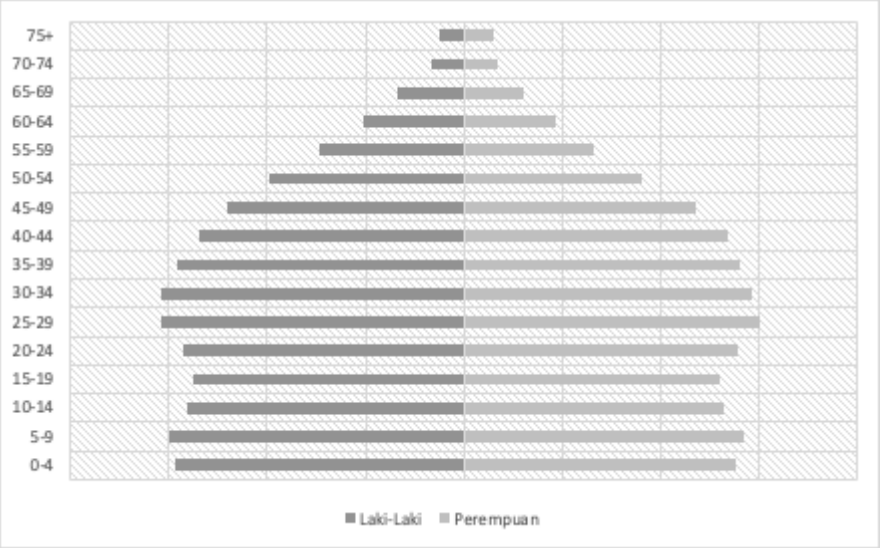
A. Jumlah dan Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Tangerang yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang (Jiwa) Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	146907	138435	285342
05-09	149708	142616	292324
10-14	140576	132397	272973
15-19	137363	130074	267437
20-24	142795	139779	282574
25-29	153752	150618	304370
30-34	154477	146480	300957
35-39	146091	140205	286296
40-44	134812	134507	269319
45-49	120403	117671	238074
50-54	99199	90820	190019
55-59	73591	66022	139613
60-64	51186	46513	97699
65-69	33729	30432	64161
70-74	16868	17527	34395
75+	12091	14828	26919
Total	1713548	1638924	3352472

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2023



Gambar 2. 13
Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Secara garis besar, karakteristik penduduk di Kabupaten Tangerang dapat dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Tangerang adalah piramida penduduk muda yang menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Karakteristik penduduk ini menunjukkan ada laju pertumbuhan yang cukup cepat dengan populasi yang masih muda dan berkembang. Kelompok umur dengan populasi paling banyak adalah kelompok umur 25-29 tahun disusul dengan kelompok umur 5-9 tahun. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat distribusi setara di dalam tiap kelompok umur, generasi millenial yaitu generasi usia produktif yang lahir pada tahun 1981-1996 (atau berumur 26-41 tahun) mendominasi karakteristik penduduk di Kabupaten

Tangerang. Generasi Z dan Generasi X kemudian menyusul di urutan kedua dan ketiga secara berurutan.

Menurut data Tahun 2022, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah penduduk yang tersebar pada 29 jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis yang terdiri atas 281.603 jiwa penduduk. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Mekar Baru.

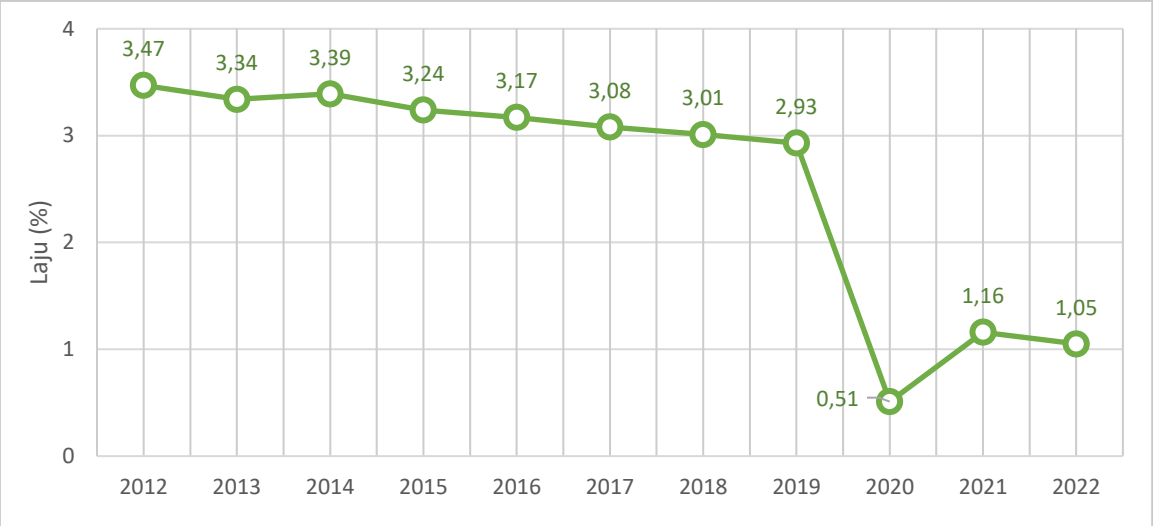
Tabel 2. 4
Jumlah Penduduk dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Cisoka	100.454	3%
2	Solear	100.579	3%
3	Tigaraksa	164.081	5%
4	Jambe	53.679	2%
5	Cikupa	208.948	6%
6	Panongan	138.632	4%
7	Curug	177.012	5%
8	Kelapa Dua	169.866	5%
9	Legok	122.995	4%
10	Pagedangan	110.755	3%
11	Cisauk	97.379	3%
12	Pasar Kemis	281.603	8%
13	Sindang Jaya	94.373	3%
14	Balaraja	121.239	4%
15	Jayanti	66.075	2%
16	Sukamulya	71.591	2%
17	Kresek	69.683	2%
18	Gunung Kaler	51.887	2%
19	Kronjo	63.198	2%
20	Mekar Baru	42.663	1%
21	Mauk	87.374	3%
22	Kemiri	49.749	1%
23	Sukadiri	65.848	2%
24	**Rajeg**	205.098	6%
25	Sepatan	122.326	4%
26	Sepatan Timur	111.169	3%
27	Pakuhaji	122.550	4%
28	Teluknaga	166.048	5%
29	Kosambi	115.618	3%
Total		3.354.494	100%

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka 2023 (diolah)

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

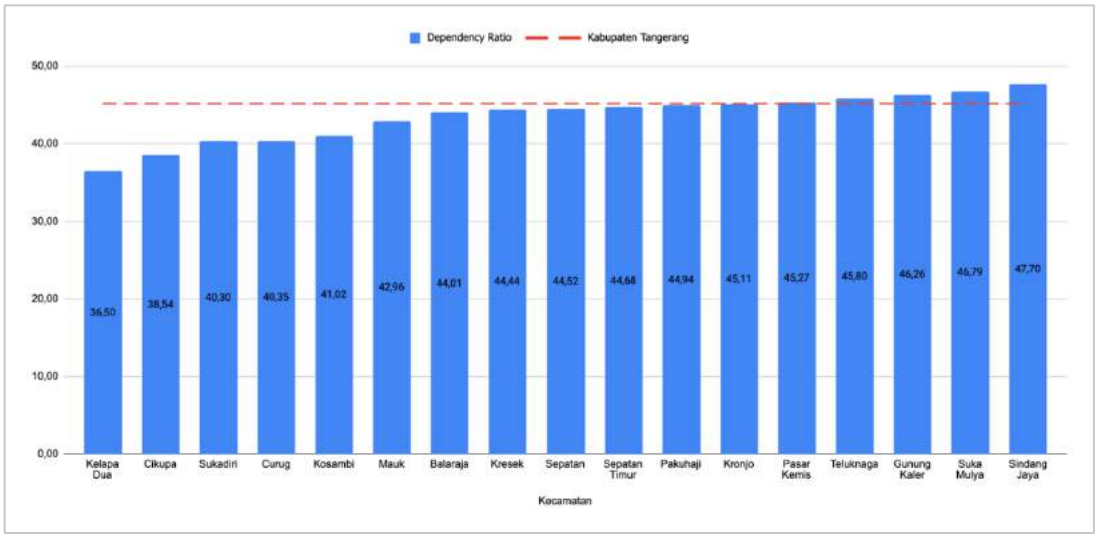
Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode geometrik. Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2011 hingga 2022 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun melambat.



Gambar 2. 14
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2012 - 2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

C. Rasio Ketergantungan

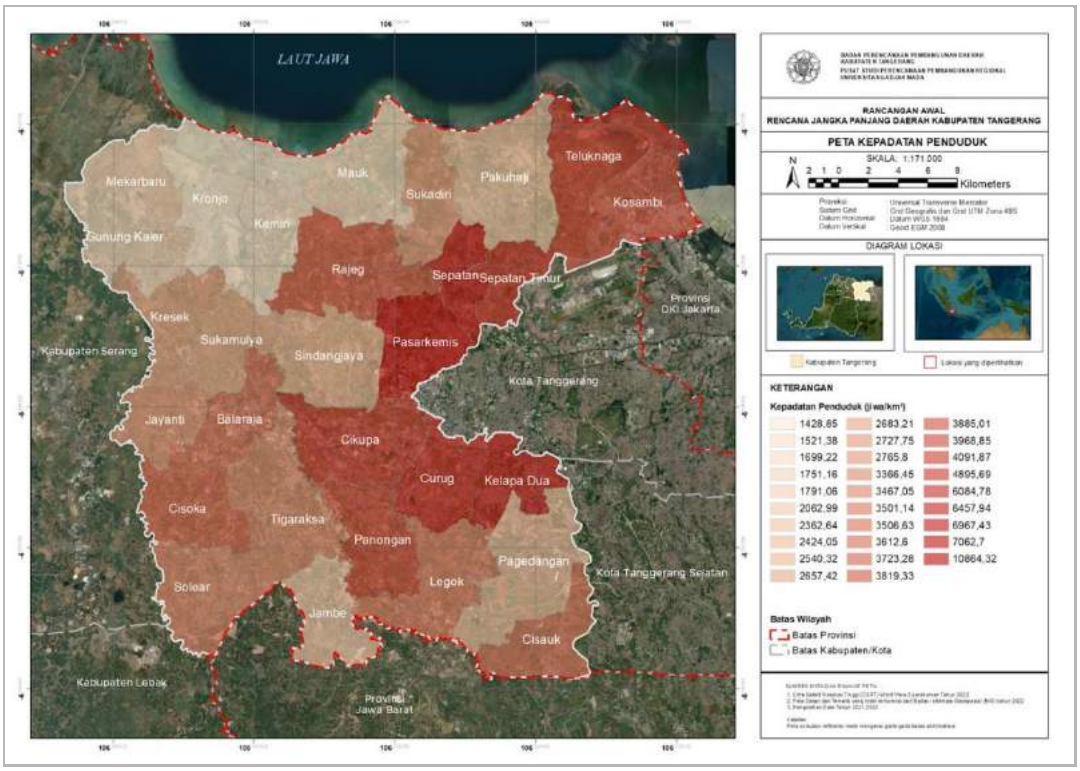
Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, dapat diketahui pada tahun 2022 bahwa *dependency ratio* penduduk Kabupaten Tangerang adalah 41,07 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 42 penduduk yang berusia tidak produktif. Rasio ini lebih rendah daripada rasio nasional yang berada di angka 44,4 dan juga lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Jika dilihat dari trend rasio ketergantungan, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang mengalami penurunan sebesar 8,7% selama sepuluh tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) berkurang dan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua memiliki nilai rasio ketergantungan yang paling rendah.



Gambar 2. 15
Grafik Rasio Ketergantungan Tiap Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka 2023 (diolah)

D. Distribusi / Pesebaran Penduduk

Jika dilihat dari persebaran jumlah penduduk, maka Kabupaten Tangerang memiliki persebaran yang tidak merata (lihat gambar 2.5) dengan perbedaan hingga 86 persen antara kecamatan yang terpadat dan terendah kepadatannya. Kepadatan penduduk paling tinggi ditemukan di Kecamatan Pasar Kemis di angka 10.864,31 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kronjo dengan kepadatan sebesar 1.428,9 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan tinggi adalah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta. Pertumbuhan kepadatan paling tinggi terjadi di Kecamatan Rajeg dengan peningkatan kepadatan penduduk hingga 40%. Kecamatan ini juga mengalami laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.



Gambar 2. 16
Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2023 (diolah)

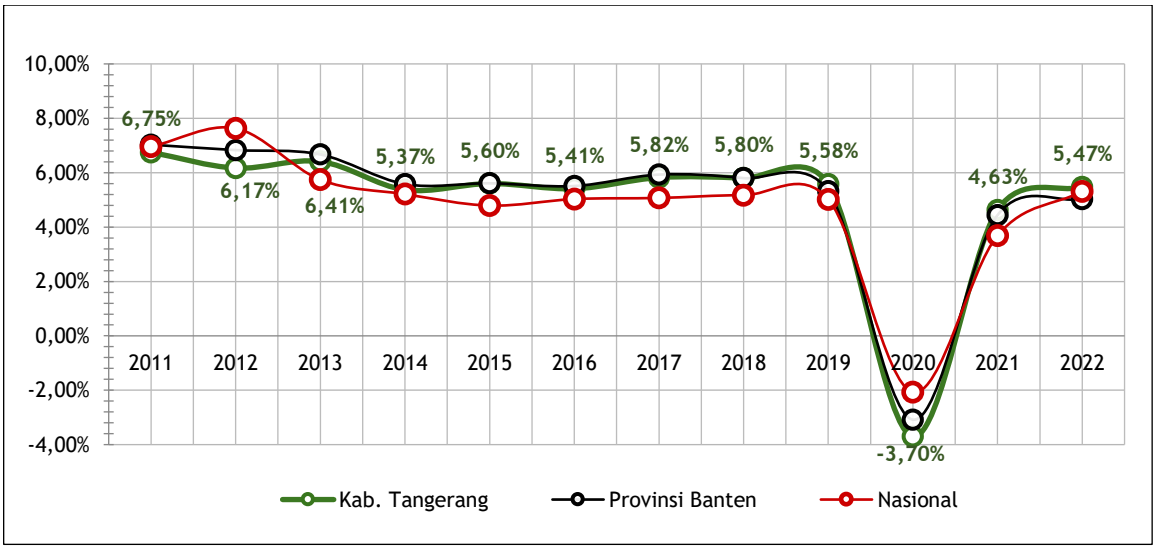
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun untuk menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. Perekonomian Kabupaten Tangerang yang didukung oleh sektor industri dan perdagangan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, PDRB ADHK Kab. Tangerang sebesar 103.221,02 miliar rupiah dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,47%

dan capaian tersebut diatas provinsi dan nasional. Jika melihat berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,34% dan sektor lapangan usaha konstruksi sebesar 8,25%.



Gambar 2. 17
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2022
Sumber: Hasil Olahan, 2023

Gambar diatas menunjukkan perbandingan LPE Kabupaten Tangerang dengan provinsi dan nasional. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir LPE Kabupaten Tangerang berada di atas nasional, tetapi cenderung mengalami perlambatan. Periode tahun 2019-2020 terjadi perlambatan ekonomi sebagai dampak dari pandemi dan mampu untuk kembali pulih tahun 2021-2022.

- PDRB menurut lapangan usaha

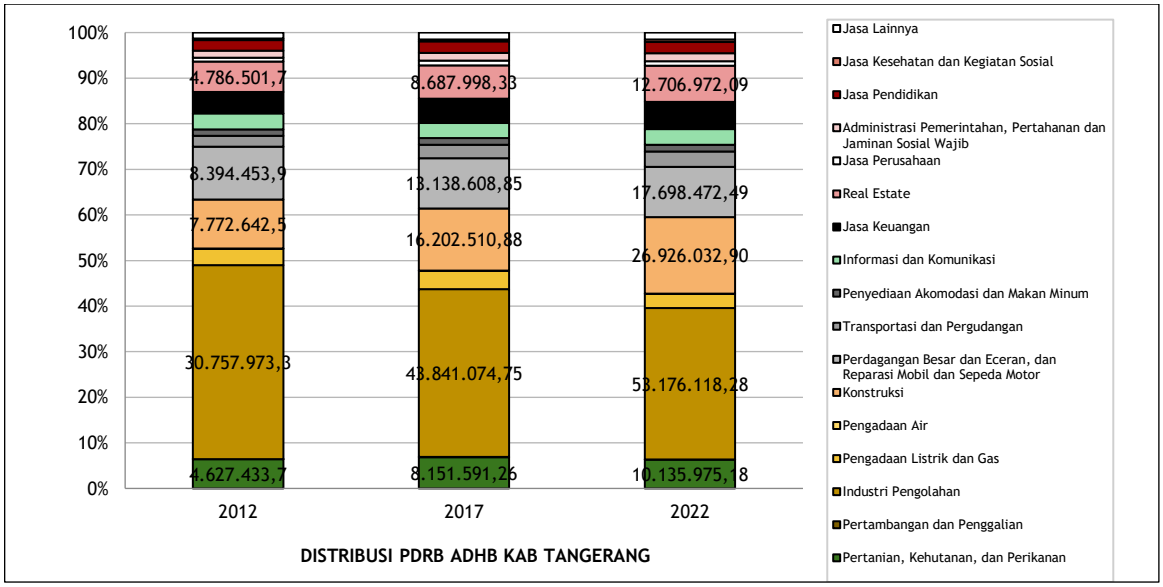
Tabel 2. 5
PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022
(dalam Miliar Rupiah)

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	8.678,39	9.045,55	9.435,98	9.473,10	10.135,98
B	Pertambangan dan Penggalian	56,53	58,54	55,54	50,93	45,88
C	Industri Pengolahan	46.552,10	49.164,34	45.200,55	48.117,52	53.176,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.947,79	4.693,53	4.096,16	4.630,76	4.936,40
E	Pengadaan Air	79,67	85,48	93,49	100,24	102,87
F	Konstruksi	18.448,09	20.797,30	20.159,33	23.459,65	26.926,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.742,54	16.234,31	15.934,12	16.403,33	17.698,47
H	Transportasi dan Pergudangan	3.865,87	4.320,45	4.148,08	4.651,38	5.330,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.960,20	2.133,60	2.021,19	2.123,07	2.342,57
J	Informasi dan Komunikasi	4.136,44	4.505,50	4.898,70	5.144,75	5.553,03
K	Jasa Keuangan	7.081,15	7.290,26	7.412,07	8.239,97	9.597,07
L	Real Estate	9.698,31	10.957,41	11.392,27	11.859,43	12.706,97

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah				
		2018	2019	2020	2021	2022
M.N	Jasa Perusahaan	1.357,31	1.537,10	1.470,01	1.454,75	1.569,84
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.200,72	2.469,16	2.571,45	2.618,05	2.742,84
P	Jasa Pendidikan	3.444,99	3.899,57	3.981,03	3.957,24	4.030,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	570,59	656,87	695,57	774,48	811,76
R.S.T.U	Jasa lainnya	2.005,27	2.240,33	2.166,13	2.225,00	2.461,19
PDRB (dalam miliar rupiah)		**129.825,98**	**140.089,29**	**135.731,68**	**145.283,68**	**160.168,18**

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Pada tahun 2022, PDRB ADHB Kab. Tangerang sebesar 160.168,18 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 53.176,12 miliar rupiah (33,20% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 26.926,03 miliar rupiah (16,81% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17.698,47 miliar rupiah (11,05% dari PDRB).



Gambar 2. 18
Diagram Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Tangerang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012, Tahun 2017, dan Tahun 2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Gambar di atas menunjukkan diagram distribusi lapangan usaha pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Tangerang. Dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kontribusi lapangan usaha terbesar adalah sektor industri pengolahan. Di Kabupaten Tangerang terdapat beberapa kawasan industri besar dengan jenis industri petrokimia, barang logam, dan industri makanan. Akan tetapi mengalami persentase kontribusi sektor tersebut menurun. Terjadi pergeseran struktur PDRB Kab. Tangerang dari sektor sekunder (industri) ke sektor tersier (perdagangan dan jasa). Selain itu, kontribusi lapangan usaha Konstruksi terus meningkat dan menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar kedua. Hal tersebut dipicu oleh pembangunan infrastruktur Kabupaten Tangerang seperti proyek strategis nasional dan regional Provinsi Banten.

Selain itu dalam dokumen RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 dijabarkan mengenai penentuan sektor basis dan non basis sektor unggulan di Kabupaten Tangerang tahun 2015-2022. Berdasarkan hasil analisis LQ, bahwa terdapat lima sektor basis di Kab. Tangerang yaitu (1) Jasa Keuangan dan Asuransi; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Konstruksi; (4) Industri Pengolahan; serta (5) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara itu berdasarkan analisis *shift share* ditemukan bahwa seluruh sektor lapangan usaha (17 lapangan usaha) yang ada di Kabupaten Tangerang tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata Provinsi Banten.

- PDRB menurut pengeluaran

Tabel 2. 6
PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 (dalam Juta Rupiah)

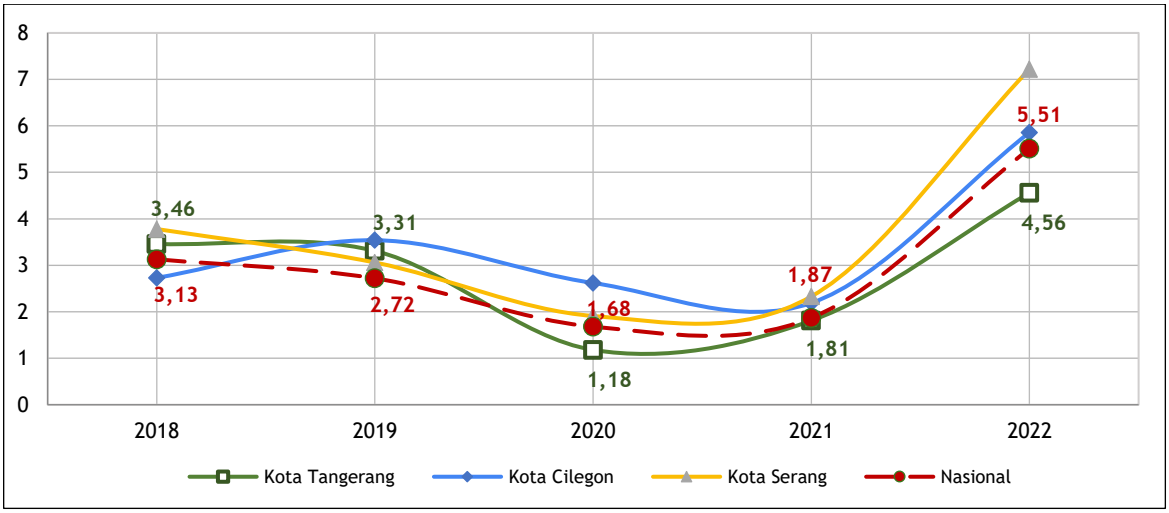
PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	67.159.455,23	72.998.709,26	71.693.730,68	74.770.602,15	81.562.475,55
Konsumsi LNPRT	625.023,31	710.429,81	679.685,90	701.768,54	749.881,39
Konsumsi Pemerintah	4.677.236,12	5.031.644,99	4.621.839,02	4.890.012,15	5.219.166,20
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31.140.889,89	35.233.021,18	35.450.044,41	37.900.875,49	40.717.192,10
Perubahan Inventori	5.869,13	4.346,34	716,21	61,28	300,11
Ekspor	93.217.259,07	98.587.772,18	94.833.778,71	105.562.340,92	132.194.567,86
Impor	66.999.751,91	72.476.636,17	71.548.113,04	78.541.984,01	100.275.406,41
PDRB	129.825.980,80	140.089.287,58	135.731.681,88	145.283.676,52	160.168.176,80

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2022, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 50,92%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Provinsi Banten yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Desember 2022, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 4,56 persen. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai peran penting yaitu sebesar 82,53% produk wilayah Kab. Tangerang diekspor ke luar wilayah.

Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 25,42 persen kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

B. Laju inflasi



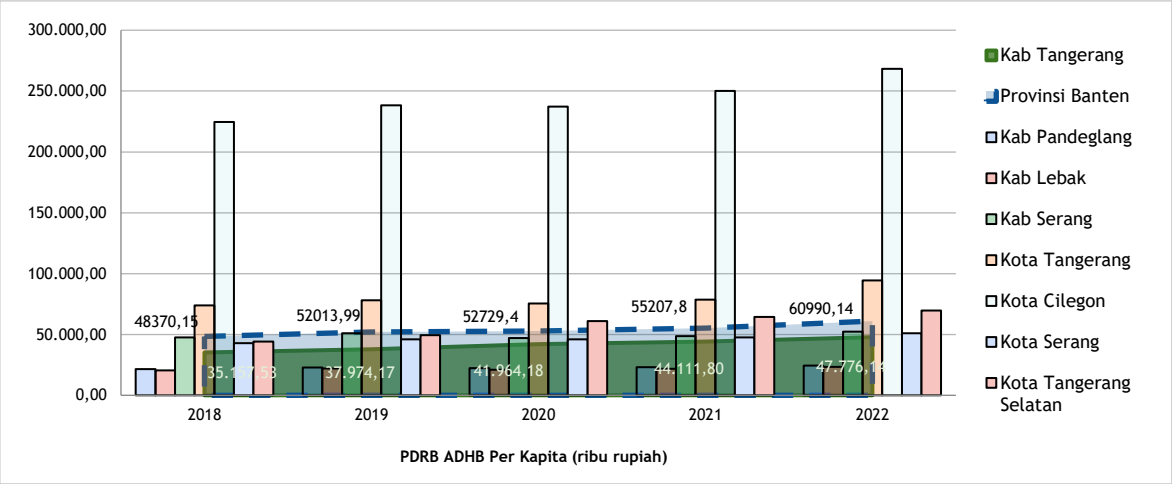
Gambar 2. 19
Perbandingan Inflasi Umum Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Nasional (diolah)

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat kesejahteraan masyarakat. Pada Desember 2022, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 4,56 persen.

Inflasi di Tangerang disebabkan oleh kenaikan harga dari indeks 10 kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy di Tangerang (per Desember 2022) yaitu bensin, mobil, angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, upah asisten rumah tangga, tukang bukan mandor, telur ayam ras, tahu mentah dan daging ayam ras.

C. PDRB per kapita

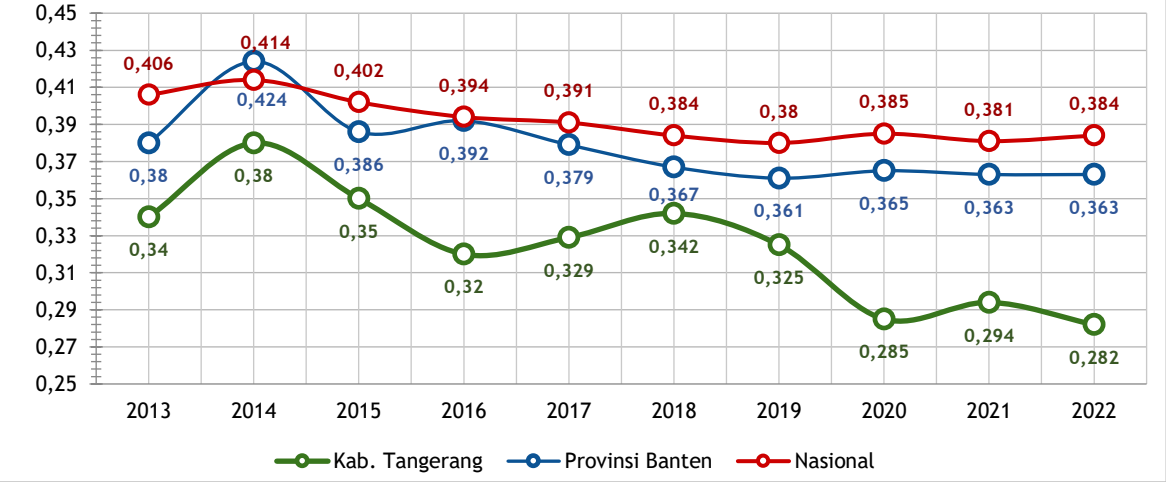
Kesejahteraan penduduk dapat digambarkan dengan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Pada tahun 2022, PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan sebesar 30,79 juta rupiah dan menurut Harga Berlaku sebesar 47,78 juta rupiah.



Gambar 2. 20
Perbandingan PDRB ADHB per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar di atas menunjukkan perbandingan PDRB ADHB per kapita menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten. Berdasarkan grafik diatas bahwa PDRB ADHB Kab. Tangerang lebih rendah dibanding Provinsi Banten yang sebesar 60,99 juta rupiah. PDRB ADHB Kota Cilegon menjadi yang tertinggi sebesar 268,16 juta rupiah, sementara Kabupaten Tangerang terendah kedua dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

D. Indeks Gini



Gambar 2. 21
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2013-2022
Sumber: Statistik Indeks Gini Menurut Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 dan Provinsi Banten dalam Angka 2023 (diolah)

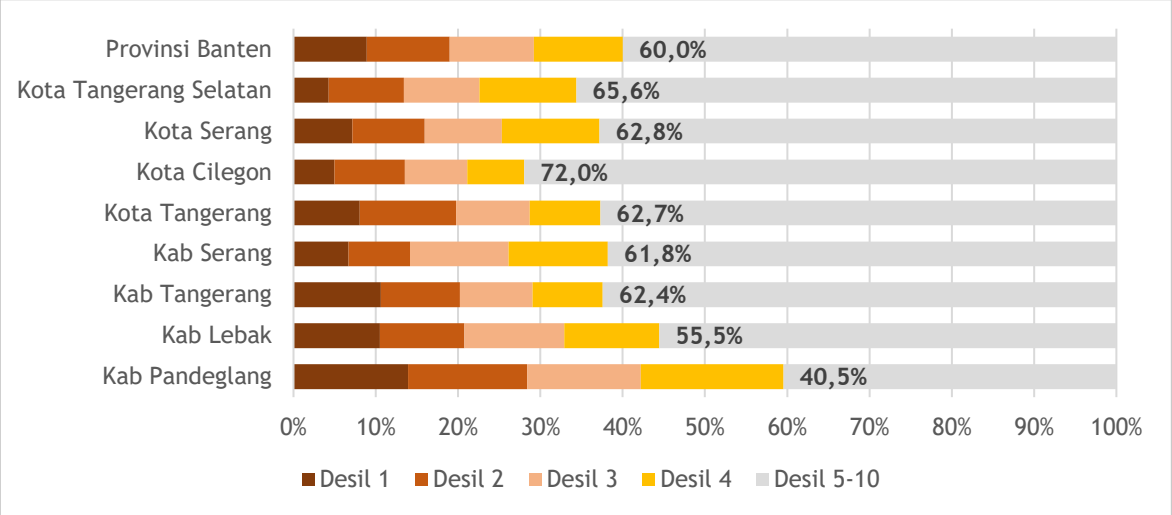
Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut. Indeks Gini Kab.

Tangerang tahun 2022 sebesar 0,282 yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. Grafik diatas menunjukkan dalam 10 tahun terakhir Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan lebih rendah dibanding Indeks Gini Provinsi Banten dan nasional.

Dalam dokumen RPJMD Kab. Tangerang 2019-2023, ketimpangan di Kabupaten Tangerang dipengaruhi oleh kurang berkembangnya sektor pertanian, nilai tambah sektor pertanian yang rendah, produktivitas tenaga kerja (sektor rumah makan, hotel, dan restoran) yang rendah, industri padat modal yang membutuhan sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah yang tinggi, dan berbagai faktor lainnya.

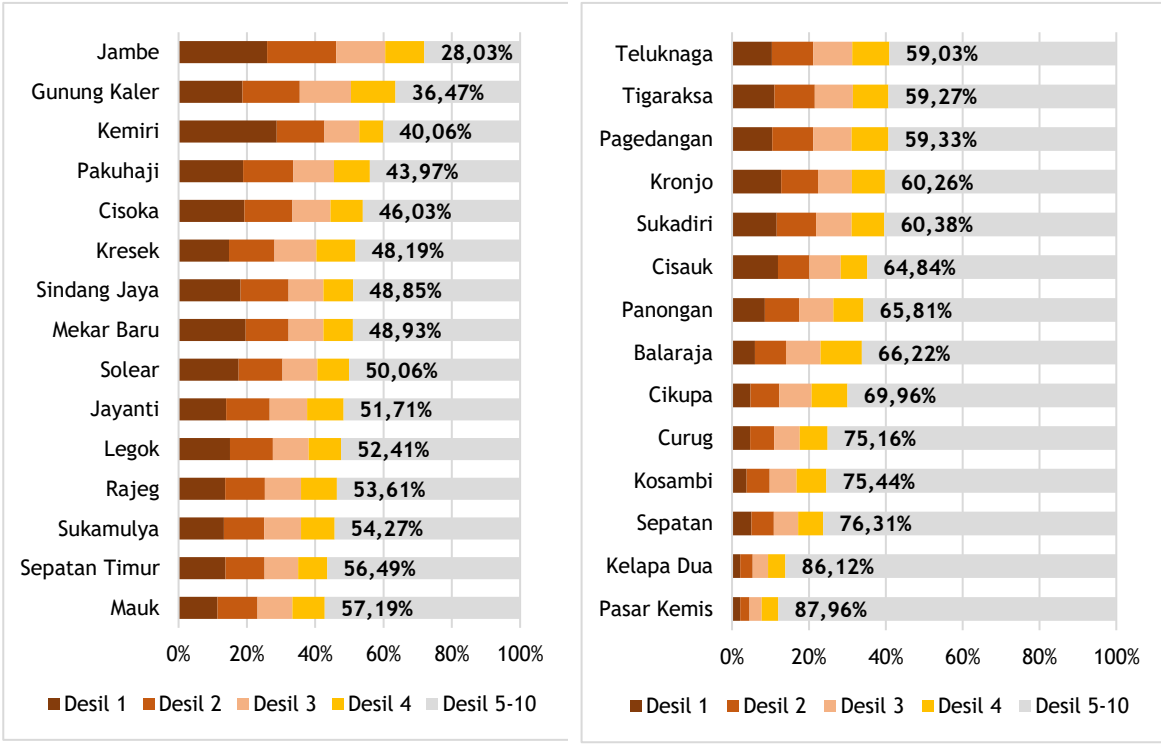
E. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

Pemerataan pendapatan (ukuran Bank Dunia) diukur dengan persentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Diagram dibawah ini menunjukkan persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendapatan desil 1 (10%), desil 2(20%), desil 3 (30%), desil 4 (40%), desil 5-10 (> 40%).

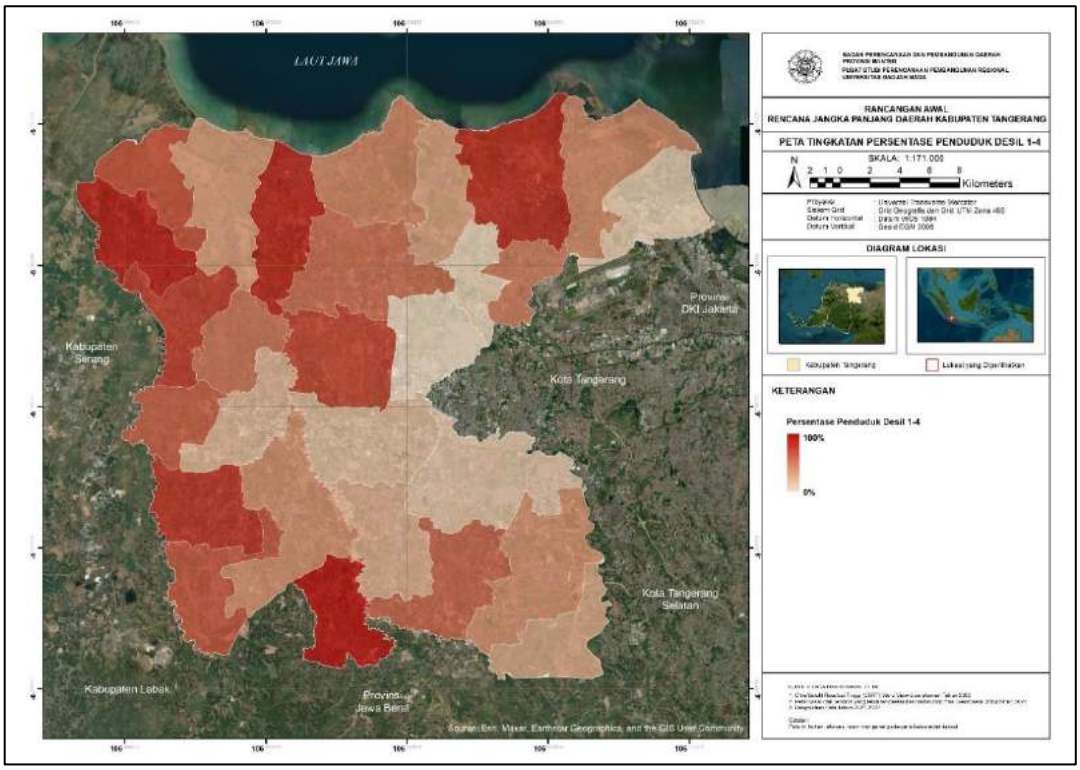


Gambar 2. 22
Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendapatan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2022
Sumber: Website P3KE Kemenko PMK (https://p3ke.kemenkopmk.go.id/)

Berdasarkan diagram diatas, bahwa persentase penduduk dengan berpendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 37,6% atau 1.260.022 jiwa. Capaian tersebut lebih baik dibanding Provinsi Banten sebesar 40% dari jumlah penduduk Banten. Pada tahun 2022, jumlah penduduk dalam desil 1 sebanyak 356.068 jiwa (8,1%), desil 2 sebanyak 321.511 jiwa (9,6%), desil 3 sebanyak 296.699 (8,9%), dan desil 4 sebanyak 285.804 jiwa (8,5% dari jumlah penduduk Kab. Tangerang).



Gambar 2. 23
Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendapatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: Website P3KE Kemenko PMK (https://p3ke.kemenkopmk.go.id/)

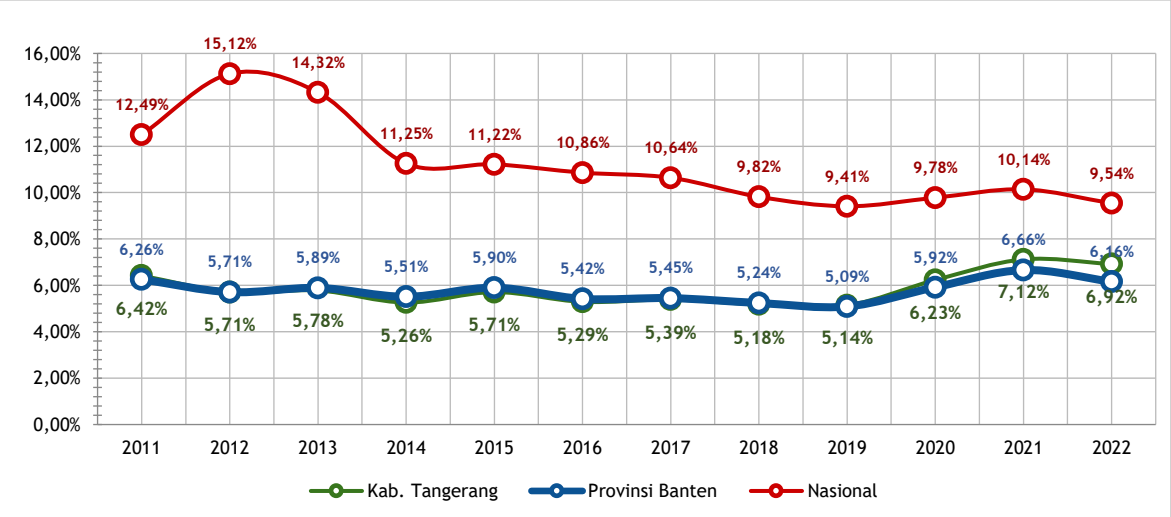


Gambar 2. 24
Peta Tingkat Persentase Penduduk Berpendapatan Desil 1-4
Sumber: Hasil Olahan, 2023

Berdasarkan kecamatan dengan jumlah penduduk desil 1-4 terbesar yaitu Kecamatan Rajeg. Berdasarkan diagram diatas, bahwa persentase penduduk terbesar dengan kelompok berpendapatan 40% terendah (Desil 1-4) yaitu Kecamatan Jambe dengan jumlah penduduk Desil 1-4 sebesar 38.634 jiwa atau 71,97% dari jumlah penduduk kecamatan tersebut. Sementara itu persentase penduduk terendah untuk kelompok Desil 1-4 adalah Kecamatan Pasar Kemis yang sebesar 33.891atau 12,04% dari jumlah penduduk kecamatan tersebut.

F. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada tahun 2022, Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang sebesar 576.222 rupiah/kapita/bulan. Angka tersebut di atas Provinsi Banten yang sebesar 570.368 rupiah/kapita/bulan.

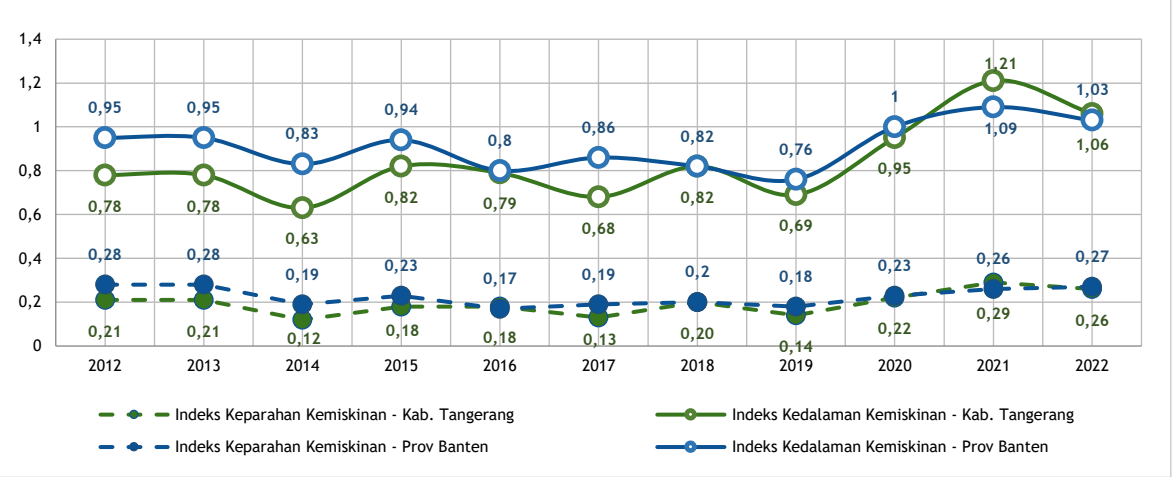


Gambar 2. 25
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2011-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional (diolah)

Gambar di atas menunjukkan perbandingan Persentase Penduduk Miskin (PPM) Kabupaten Tangerang dengan provinsi dan nasional dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan grafik tersebut, PPM Kabupaten Tangerang sebesar 6,92% dan posisinya di bawah nasional. Namun, dalam lima tahun terakhir PPM Kab. Tangerang meningkat dan di atas PPM Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, PPM Kab. Tangerang terendah ketiga di mana yang tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 9,32% sementara yang terendah adalah Kota Tangerang Selatan yang sebesar 2,5%.

G. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

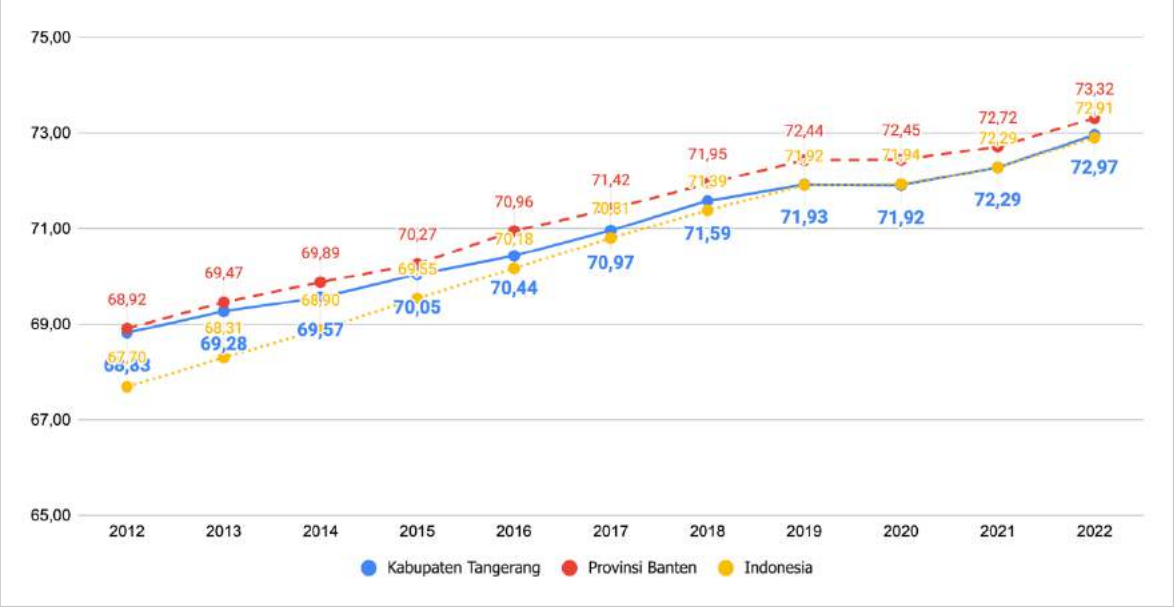


Gambar 2. 26
Perbandingan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2012-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Pada tahun 2022, Indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Tangerang sebesar 1,06 dan berada di atas provinsi yang mencapai 1,03. Sementara itu, Indeks Kedalaman kemiskinan di Kab. Tangerang sebesar 0,26 dan berada di bawah provinsi yang mencapai angka 0,27.

H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran rata-rata capaian aspek utama pembangunan manusia yang meliputi umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Pengukuran IPM pada aspek kesehatan mengacu pada indikator angka harapan hidup. Aspek pengetahuan dapat diukur melalui indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk aspek hidup layak dapat diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Diagram di bawah ini merupakan perbandingan IPM nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 27
Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Nasional (diolah)

Secara umum, capaian IPM Kabupaten Tangerang dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen, dengan capaian IPM pada tahun 2012 sebesar 66,74, dan meningkat menjadi 73,32 di tahun 2022 (lihat gambar 2.7). Namun kondisi IPM di Kabupaten Tangerang selalu di bawah angka pencapaian Provinsi Banten dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Capaian IPM Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 menempati posisi kelima dari delapan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, namun telah mampu melampaui capaian nasional pada tahun 2022 sebesar 72,91. Pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang masih disusul oleh 4 kabupaten kota lainnya dalam hal capaian IPM yang dapat dilihat pada tabel berikut.

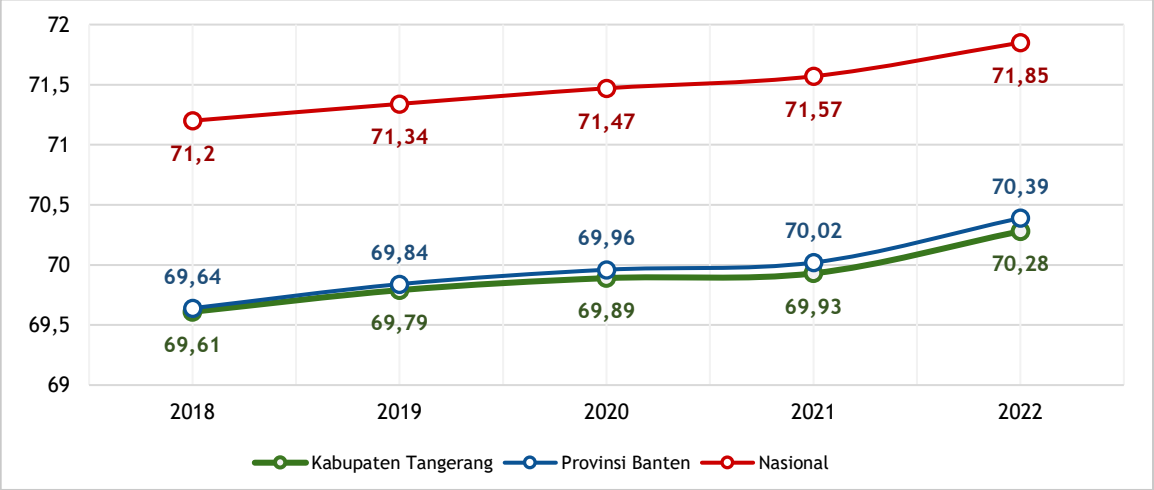
Tabel 2. 7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Tangerang Selatan	80,84	81,17	81,48	81,36	81,6	81,95
Kota Tangerang	77,01	77,92	78,43	78,25	78,5	78,9
Kota Cilegon	72,29	72,65	73,01	73,05	73,35	73,95
Kota Serang	71,31	71,68	72,1	72,16	72,44	72,98
Kab Tangerang	70,97	71,59	71,93	71,92	72,29	72,97
Kab Serang	65,6	65,93	66,38	66,7	66,82	67,75
Kab Pandeglang	63,82	64,34	64,91	65	65,17	65,84
Kab Lebak	62,95	63,37	63,88	63,91	64,03	64,71
Provinsi Banten	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	73,32

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Angka harapan hidup adalah salah satu aspek yang diperhatikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan

kemiskinan. Semakin tinggi capaian Angka Harapan Hidup maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.



Gambar 2. 28
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2018 - 2022
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023

Angka harapan hidup di Kabupaten Tangerang tidak jauh berbeda dengan Provinsi Banten namun capaian angka harapan hidup masih berada di bawah capaian Nasional. Pada Tahun 2022 angka harapan hidup di Indonesia adalah 71,85 sedangkan di Kabupaten Tangerang adalah 70,28 tahun.

I. Persentase Keluarga Pra Sejahtera

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan yaitu keluarga pra sejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KSI), keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III plus, di mana masing-masing tahapan terdapat indikator penilaiannya. Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).

Tabel 2. 8
Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Banten Tahun 2020

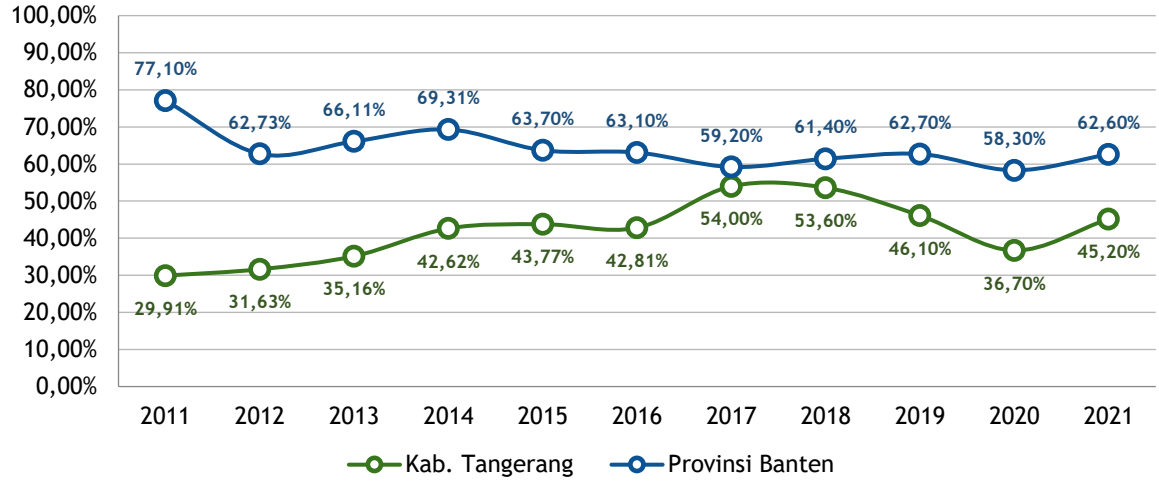
Kabupaten/Kota	Keluarga Prasejahtera	Keluarga Sejahtera		Jumlah
		I	II	
Kab Pandeglang	71.065	181.082	66.598	318.745
Kab Lebak	67.211	206.557	83.969	357.737
Kab Tangerang	109.242	355.235	148.328	612.805
Kab Serang	61.082	239.872	92.347	393.301
Kota Tangerang	40.139	191.369	94.318	325.826
Kota Cilegon	9.952	53.629	35.717	99.298
Kota Serang	23.030	74.459	46.780	144.269
Kota Tangerang Selatan	31.573	95.253	104.732	231.558
Provinsi Banten	413.294	1.397.456	672.789	2.483.539

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel diatas, bahwa keluarga pra sejahtera di Kabupaten Tangerang sebesar 109.242 keluarga atau 17,83% dari jumlah keluarga. Sementara di Provinsi Banten keluarga pra sejahtera sebesar 413.294 keluarga atau 16,64%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, persentase keluarga pra sejahtera Kab. Tangerang ke-tiga tertinggi setelah Kab Pandeglang (22,30% dari jumlah keluarga) dan Kab Lebak (18,79% dari jumlah keluarga).

J. Persentase PAD terhadap pendapatan atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah.

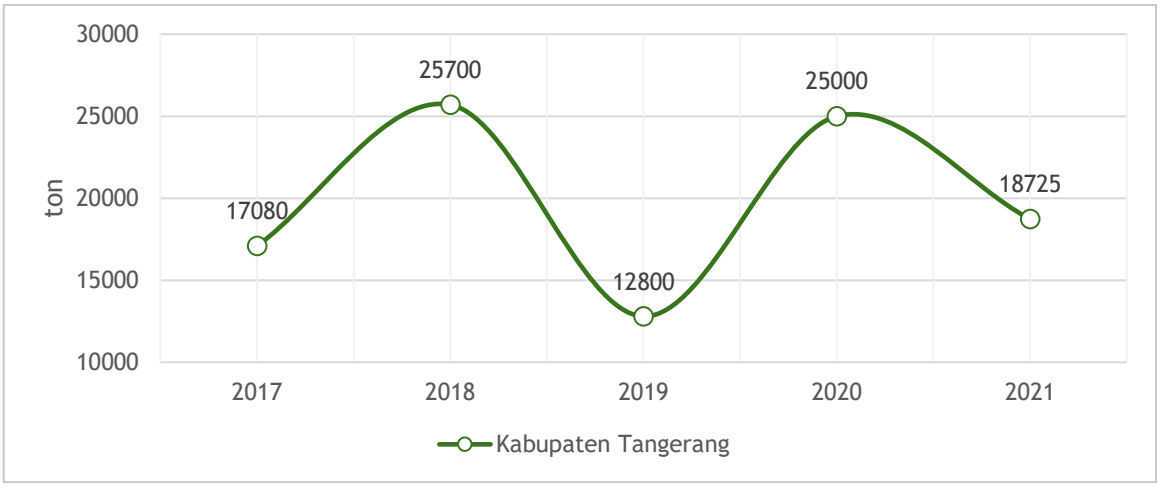


Gambar 2. 29
Perbandingan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2011-2022
Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

Berdasarkan gambar diatas, Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tangerang dalam kategori Cukup (30-40%) dan Baik (40-50%). Dalam 10 tahun terakhir, DDF Kabupaten Tangerang lebih rendah dibanding Provinsi Banten.

K. Penguatan cadangan pangan

Penguatan cadangan pangan merupakan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kuantitas stok pangan di suatu wilayah dengan menghitung jumlah cadangan pangan dan membaginya dengan 100. Cadangan pangan dihitung menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita pertahun, dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa) serta cadangan pangan masyarakat.

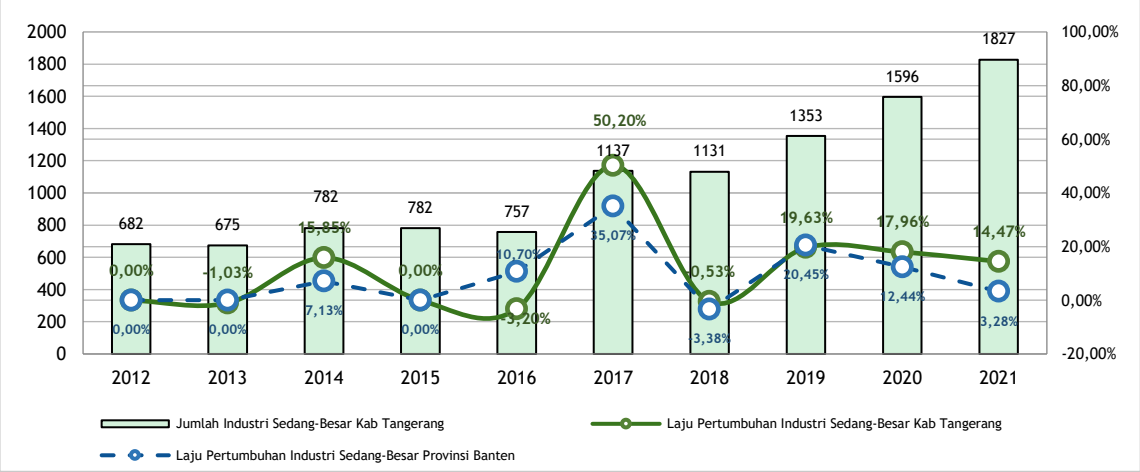


Gambar 2. 30
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021
Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, penguatan cadangan pangan di Kabupaten Tangerang bersifat sangat fluktuatif. Terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2018 sebesar 8620 ton. Kemudian, dalam rentang 2019-2021, angka tersebut mengalami fluktuasi yang cukup drastis. Hal ini diasumsikan terjadi karena situasi Covid-19 yang terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2021.

L. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri menjadi salah satu indikator untuk melihat peningkatan kinerja ekonomi khususnya sektor industri yang menjadi lapangan usaha utama di Kabupaten Tangerang. Gambar dibawah menunjukkan pertumbuhan industri sedang-besar di Kabupaten Tangerang dalam 10 tahun terakhir.



Gambar 2. 31
Pertumbuhan Industri Sedang-Besar Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2021
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan industri sedang besar di Kabupaten Tangerang meningkat secara signifikan terutama pada tahun 2016-

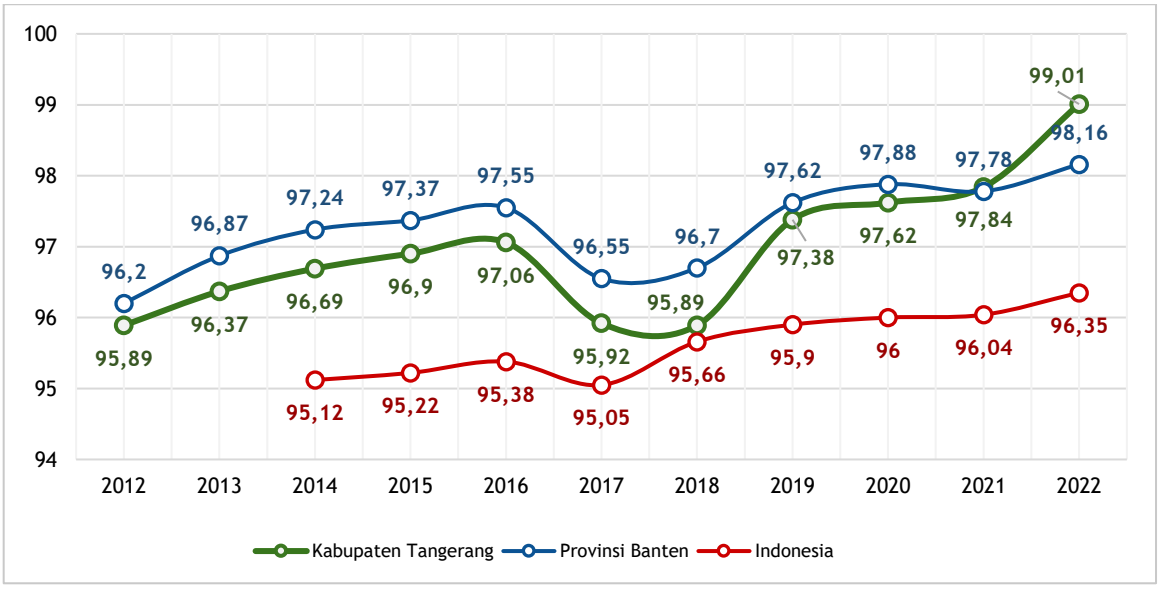
2017 yang meningkat 50,2%. Laju pertumbuhan industri Kabupaten Tangerang cenderung lebih tinggi dibanding Provinsi Banten.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

1) Angka Melek Huruf

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf Jawa, Kanji, dll). Kisaran angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Angka melek huruf memperlihatkan pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Berikut ini dapat dilihat angka melek huruf Kabupaten Tangerang dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Indonesia dari tahun 2012-2021.



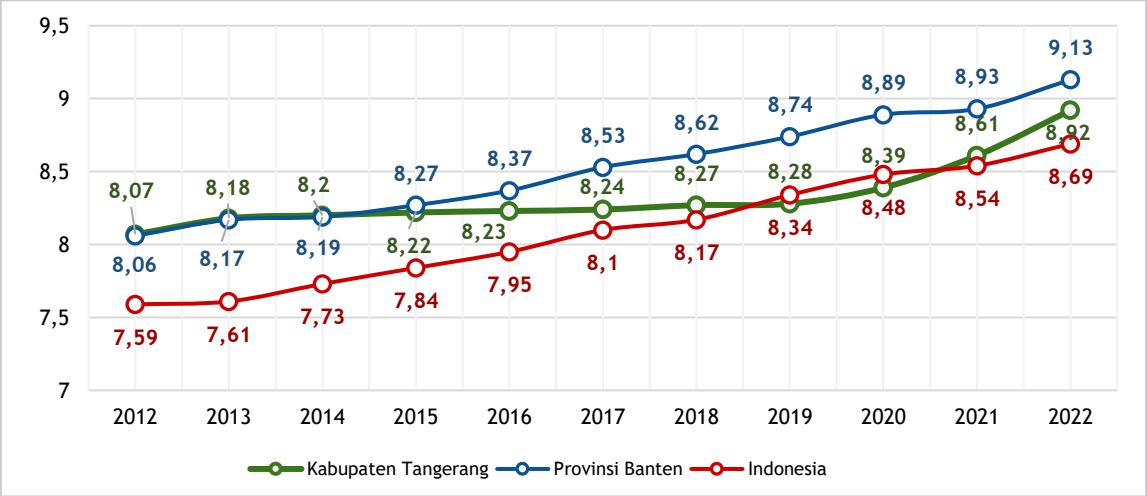
Gambar 2. 32
Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012 - 2021
Sumber: BPS Nasional dan BPS Kabupaten Tangerang (2022)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dengan kemiripan trend dengan Provinsi Banten. Pada tahun 2022 angka melek huruf di Kabupaten Tangerang adalah sebesar 99,01%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan angka tertinggi. Dibandingkan dengan capaian provinsi angka melek huruf di Kabupaten Tangerang lebih rendah pada

pada tahun 2012 hingga tahun 2020 dan meningkat lebih tinggi dari Provinsi Banten pada tahun 2021 dengan gap yang kecil.

2) Angka Rata- Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka ini turut berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam bab pengetahuan. Untuk menghitung Rata - Rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi mengenai partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Analisis ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Berikut adalah diagram RLS Kabupaten Tangerang dan perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Indonesia.



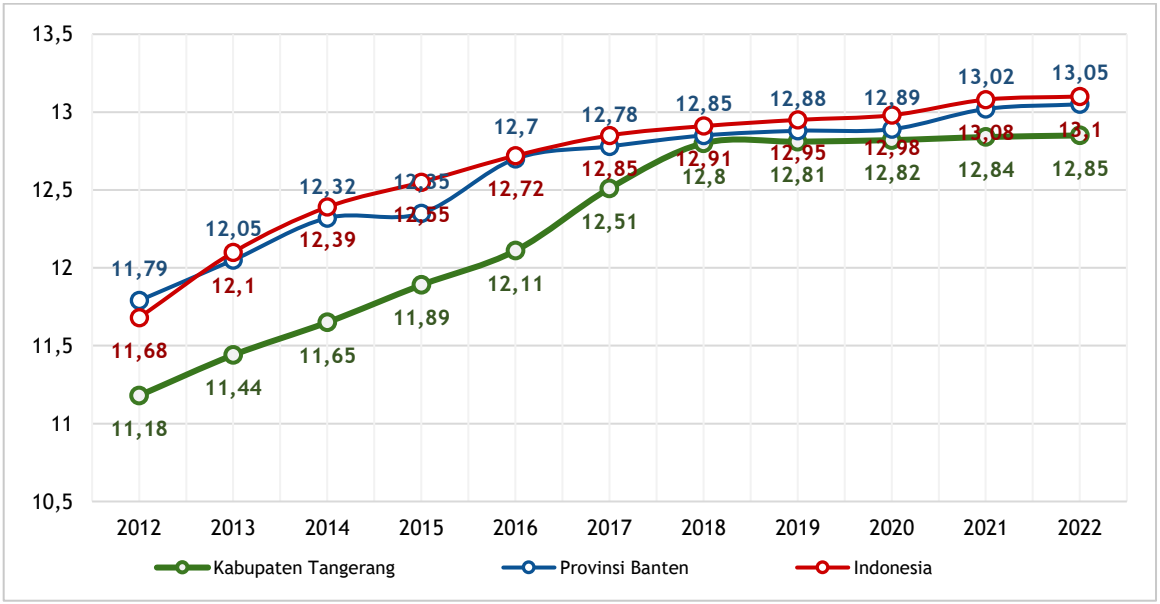
Gambar 2. 33
Grafik Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2022 dengan Provinsi Banten dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dan Nasional, 2023

Capaian indikator rata-rata lama sekolah Kabupaten Tangerang dalam sepuluh tahun terakhir telah mampu melampaui capaian nasional pada tahun 2022. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Tangerang adalah 8,92 tahun sementara capaian nasional tercatat sebesar 8,69 tahun. Namun capaian kabupaten masih lebih rendah daripada capaian Provinsi Banten yang sebesar 9,13 tahun. Rata - rata lama sekolah mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten ini telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas tiga pada jenjang sekolah menengah pertama.

3) Angka Harapan Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh

anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah.



Gambar 2. 34
Grafik Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012 - 2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dan Nasional, 2023

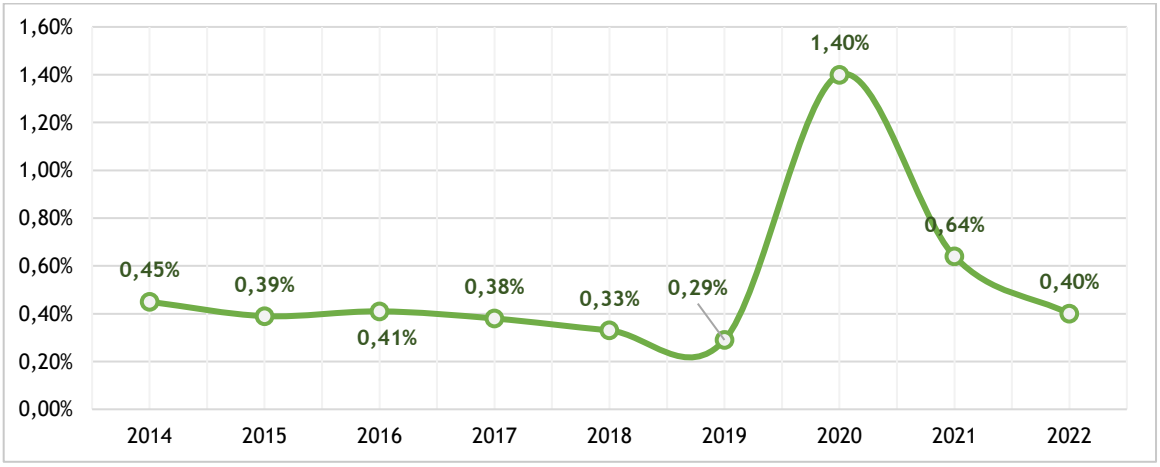
Dilihat dari indikator harapan lama sekolahnya, dalam sepuluh tahun terakhir, capaian Kabupaten Tangerang masih berada di bawah capaian nasional menurut gambar di atas dengan dengan gap yang kecil yaitu capaian Kabupaten Tangerang tercatat sebesar 12,85 tahun dan capaian nasional sebesar 13,1 tahun di tahun 2022. Dari dimensi pengetahuan tersebut, pada tahun 2022 anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Tangerang memiliki harapan dapat menjalani pendidikan selama 12 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I.

B. Kesehatan

1) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi balita dapat diukur berdasarkan indeks berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Gizi kurang dan gizi buruk didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Gizi buruk didefinisikan sebagai keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi

dan atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 0 - 59 bulan. Berikut merupakan grafik prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang.

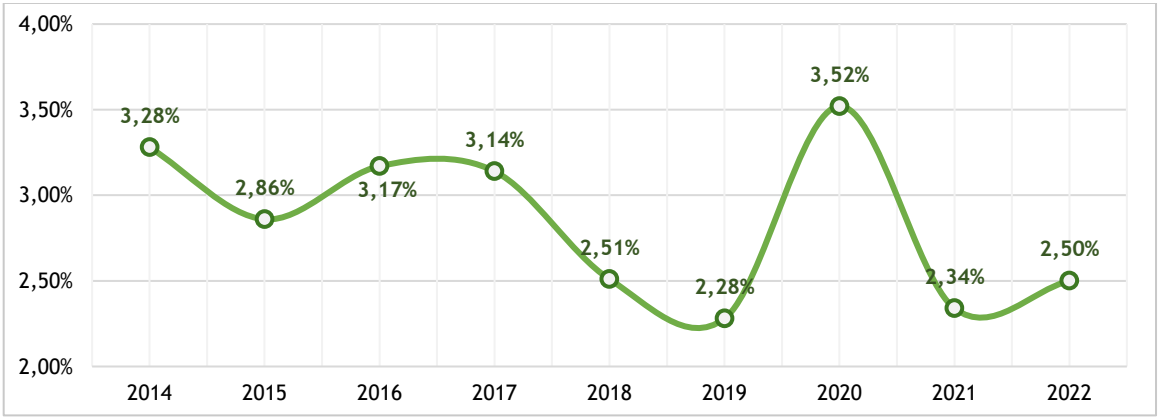


Gambar 2. 35
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2022
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Peningkatan prevalensi balita gizi buruk terlihat sangat jelas pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh pandemic COVID-19 yang berdampak pada tantangan akses menuju fasilitas Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi yang sesuai yang juga bisa disebabkan oleh kemampuan perekonomian masyarakat yang tidak baik pada saat pandemi.

2) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang merupakan keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai -3 standar deviasi, dan atau lingkar lengan 11,5 - 12,5 cm pada anak usia 0 - 59 bulan. Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk digunakan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga perlu menjadi prioritas dalam upaya perbaikan pangan dan gizi.



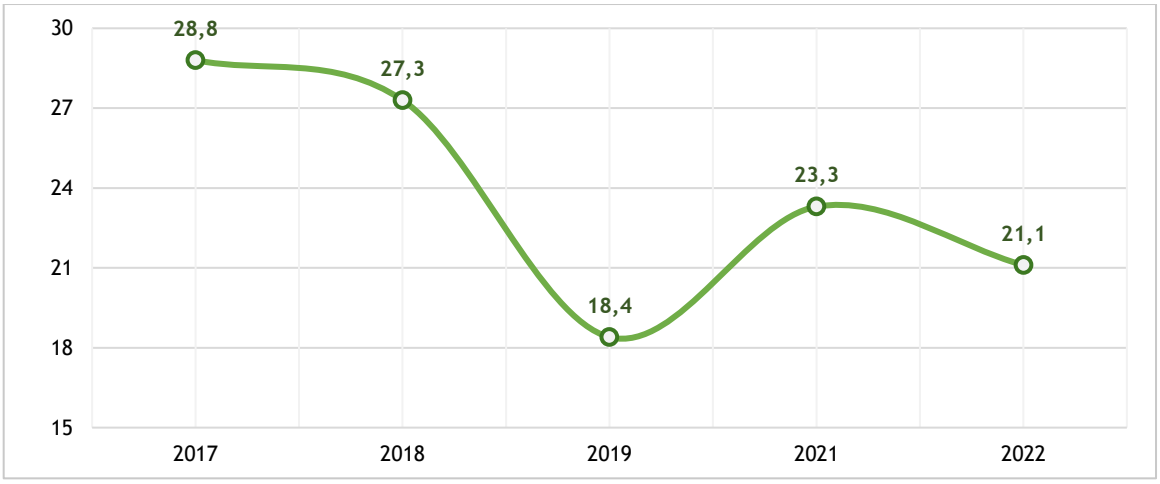
Gambar 2. 36
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2022

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Tren prevalensi balita gizi kurang cenderung menurun dari tahun 2014 – 2019 dan meningkat pada tahun 2020 kemudian kembali menurun mendekati capaian tahun sebelum pandemic pada tahun 2021 dan pada meningkat lagi pada tahun 2022.

3) Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting diukur menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur bila Z-Score TB/U atau PB/U kurang dari -2 SD. Menurut Ruswati (2021) penyebab dari stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan.



Gambar 2. 37
Prevalensi Stunting di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2022
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Angka Stunting di Kabupaten Tangerang cenderung menurun pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2017. Angka stunting tertinggi ada di tahun 2021 dengan 23,3%. Kementerian Kesehatan di lain sisi menargetkan prevalensi stunting untuk ditekan menuju angka 14% pada tahun 2024 dengan laju penurunan 3,8% per tahunnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 – 2022 di Kabupaten Tangerang adalah sebesar 2,2% dan untuk mencapai target dari nasional perlu diturunkan sebesar kurang lebih 3,55% tiap tahunnya selama 2022-2024.

C. Pertanahan

1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Legalitas aset tanah melalui sertifikat memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tanah, memberikan rasa aman masyarakat atas kepemilikan tanah, dan meningkatkan

akses masyarakat pada lembaga keuangan. Sehingga, tanah bersertifikat dapat berdampak untuk meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Mardiana, Siregar, & Juanda, 2016). Statistik menunjukkan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Tangerang selalu mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2012, bidang tanah bersertifikat di Kabupaten Tangerang diketahui seluas 351.647.197 m^2, angka ini meningkat hingga mencapai 805.777.901 m^2 pada tahun 2023. Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Tangerang diperlihatkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 9
Luas Bidang Tanah Bersertifikat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kota/ Kab.	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Kab. Serang	315.052.282	324.821.095	330.598.887	342.036.978	352.185.187	382.733.718	454.252.308	510.083.027	522.091.680	538.079.446	562.549.439	566.877.321
Kab. Pandeglang	615.486.185	631.733.398	647.753.560	661.458.625	701.609.213	737.038.323	790.256.887	899.709.147	920.461.888	977.208.302	999.909.468	1.000.140.317
Kab. Lebak	622.408.958	675.662.747	685.067.193	696.048.233	708.426.659	744.365.361	1.019.641.060	1.188.511.579	1.236.040.225	1.316.292.566	1.351.779.946	1.354.539.661
Kab. Tangerang	351.647.197	466.603.935	483.517.334	499.282.652	513.263.747	575.673.659	654.285.519	712.925.639	731.891.905	766.452.433	798.495.925	805.777.901
Kota Tangerang	161.203.703	164.630.721	168.373.714	171.694.677	174.458.465	181.032.217	191.758.851	200.197.969	205.158.781	208.376.658	211.945.706	212.317.761
Cilegon	90.181.333	91.713.401	94.117.123	97.886.640	100.100.871	107.072.142	115.417.822	121.892.064	125.764.958	127.411.702	129.328.508	129.820.752
Tangerang Selatan	101.383.257	105.079.107	108.122.750	110.909.204	113.456.476	123.524.795	142.078.340	152.112.009	155.086.435	158.131.721	160.336.693	160.756.978
Kota Serang	98.800.793	100.534.453	102.436.443	103.957.530	106.218.047	109.516.753	116.690.672	130.494.848	143.293.871	152.883.631	156.668.624	156.987.568
Provinsi Banten	2.356.163.708	2.560.778.857	2.619.987.004	2.683.274.539	2.769.718.665	2.960.956.968	3.484.381.459	3.915.926.282	4.039.789.743	4.244.836.459	4.371.014.309	4.387.218.259

Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, 2023

2) Penyelesaian Izin Lokasi

Mengadaptasi dari Peraturan Menteri Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha atau perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk syarat izin usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Izin Lokasi diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan tanah untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki atau menguasai tanah sebagai syarat terbitnya Izin Usaha. Menurut data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Banten, diketahui sebanyak 238 usaha mengajukan permohonan izin lokasi pada Tahun 2021.

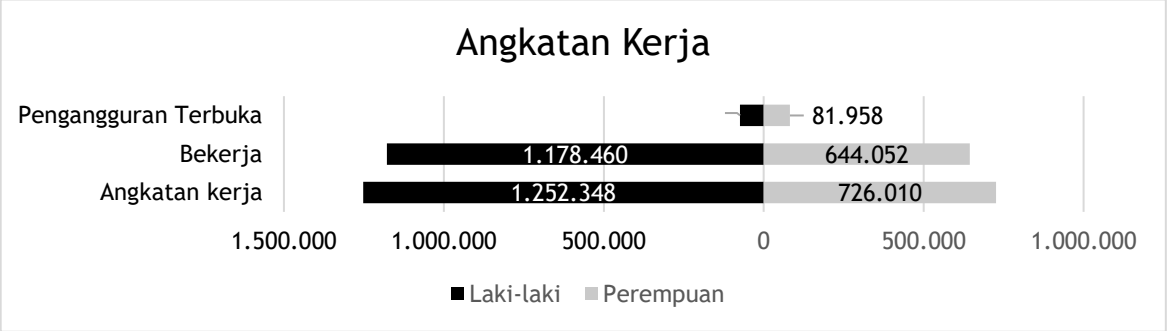
Tabel 2. 10
Jumlah Izin Lokasi Provinsi Banten Tahun 2021

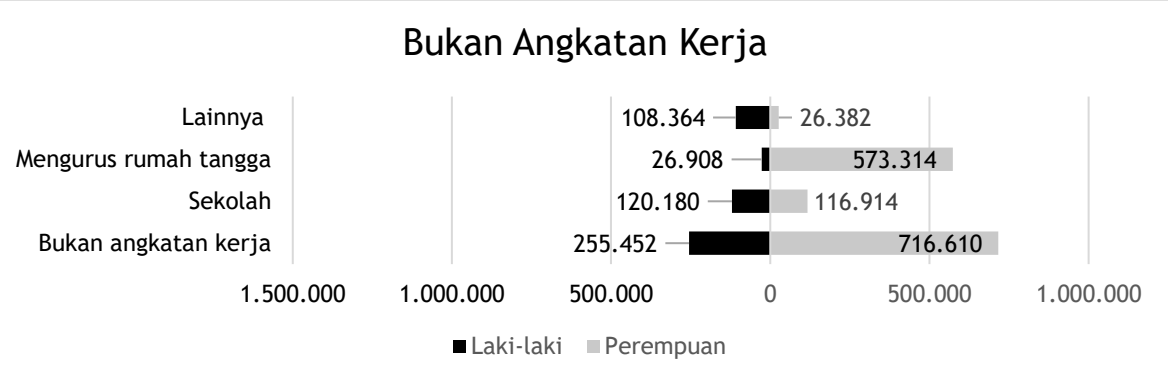
No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kota Tangerang Selatan	53
2	Kabupaten Serang	-
3	Kabupaten Tangerang	238
4	Kabupaten Pandeglang	-
5	Kabupaten Lebak	15
6	Kota Tangerang	99
7	Kota Cilegon	59

Sumber: Kanwil BPN Provinsi Banten, 2023

D. Ketenagakerjaan

1) Profil ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang

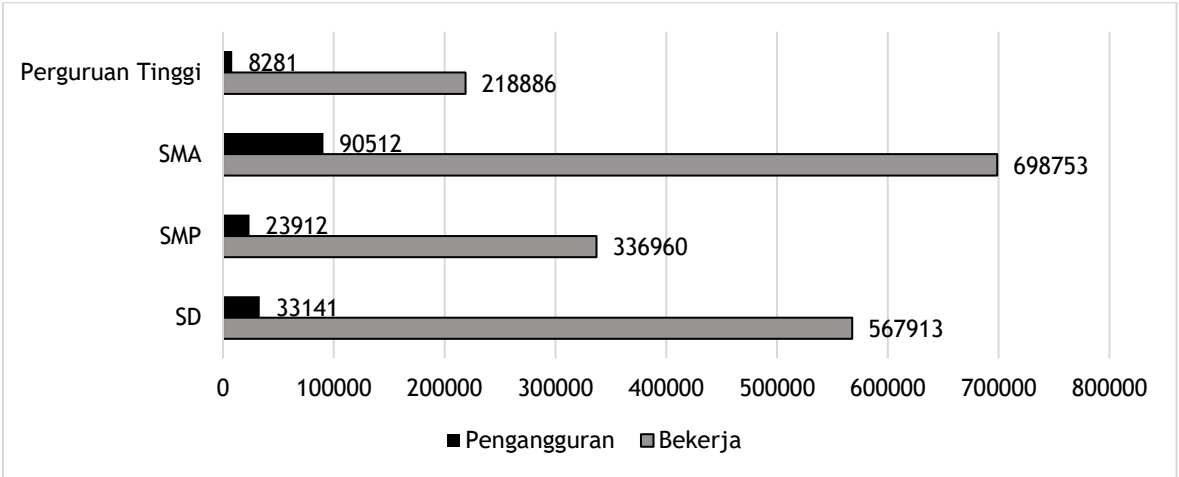




Gambar 2. 38
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Diagram diatas menunjukkan profil penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Tangerang tahun 2022. Berdasarkan diagram diatas bahwa sebesar 63,3% angkatan kerja dengan jenis kelamin laki-laki sedangkan 73,3% bukan angkatan kerja dengan jenis kelamin perempuan.

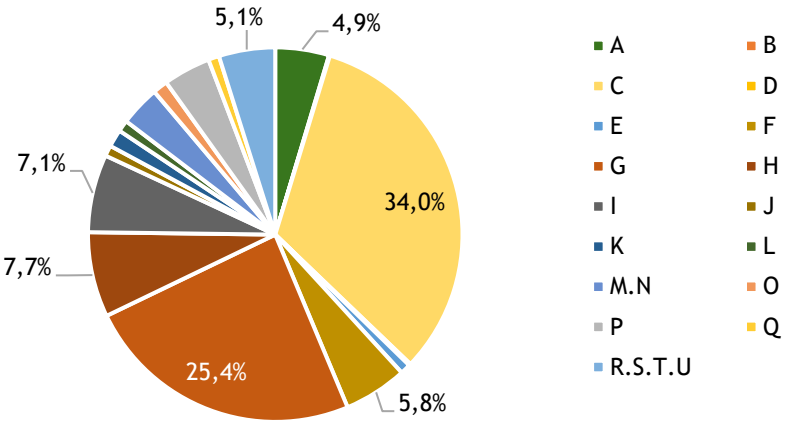
- Penduduk bekerja menurut jenjang pendidikan



Gambar 2. 39
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Diagram di atas menunjukkan profil angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tangerang tahun 2022. Berdasarkan diagram diatas, sebesar 38,3% angkatan kerja bekerja dengan pendidikan tamat SMA dan 58,1% angkatan kerja pengangguran dengan pendidikan tamat SMA.

- Penduduk bekerja menurut lapangan usaha



	Lapangan Usaha	Jumlah
A	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	77350
B	Pertambangan dan Penggalian	1295
C	Industri Pengolahan	540077
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2508
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	14792
F	Konstruksi	91403
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	402534
H	Transportasi dan Pergudangan	122384
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112021

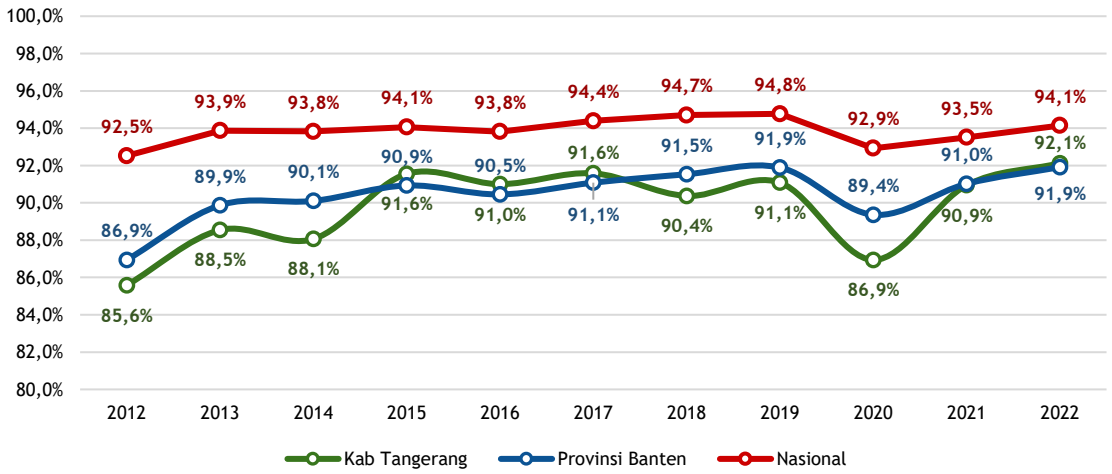
	Lapangan Usaha	Jumlah
J	Informasi dan Komunikasi	15376
K	Jasa Keuangan	25118
L	Real Estate	16441
M.N	Jasa Perusahaan	57784
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan	21405
P	Jasa Pendidikan	68136
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15638
R.S.T.U	Jasa lainnya	80929

Gambar 2. 40
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang Tahun 2021
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Diagram di atas menunjukkan jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan diagram tersebut bahwa persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha terbesar berturut-turut yaitu (1) lapangan usaha industri pengolahan sebesar 550.077 jiwa (34,0%); (2) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 402.534 jiwa (25,4%); dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 122.384 jiwa (7,7%).

2) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk yang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja dimaknai sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

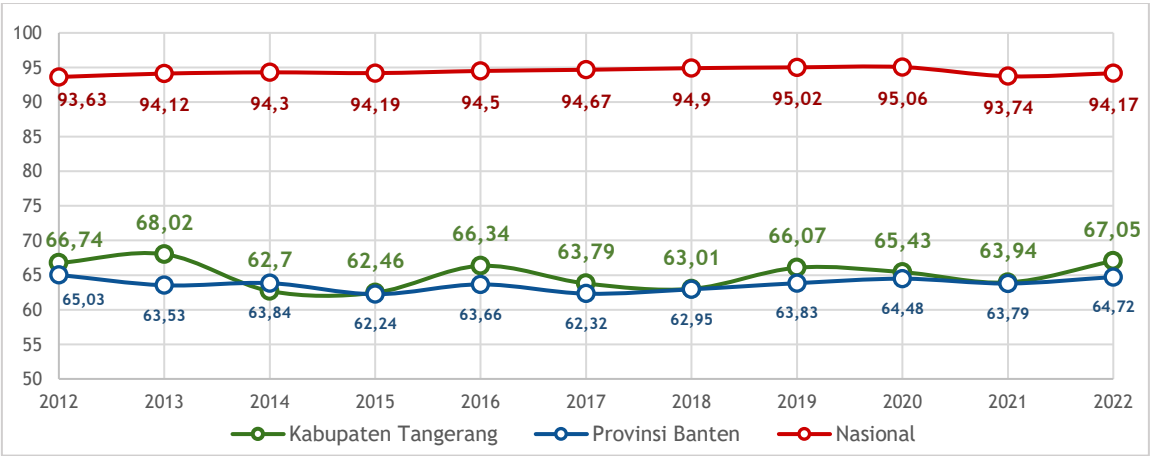


Gambar 2. 41
Perbandingan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional (diolah)

Pada tahun 2022, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Tangerang sebesar 92,1% yang berada di atas Provinsi Banten dengan capaian 91,9%. Namun, capaian tersebut masih di bawah nasional dengan TKK sebesar 94,1%.

3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikasi besaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian wilayah.

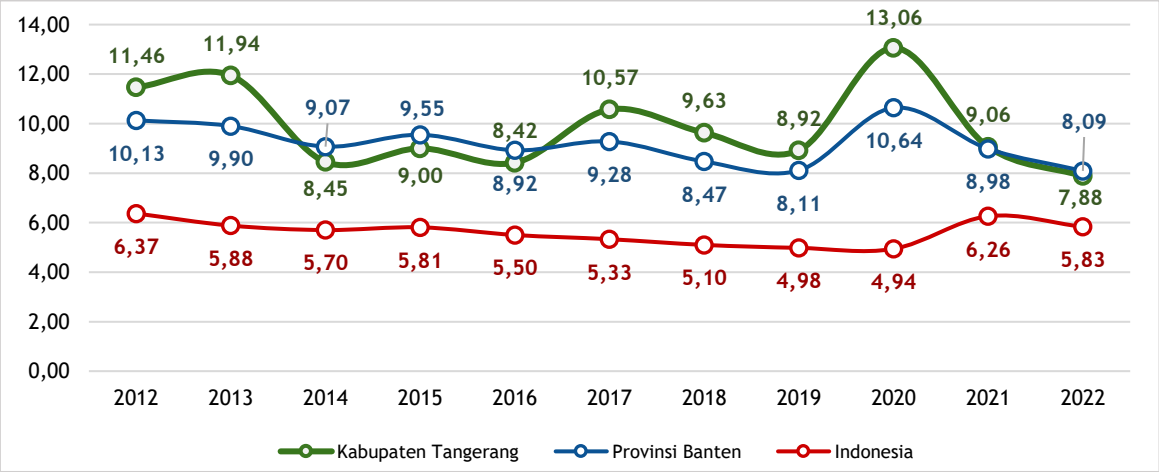


Gambar 2. 42
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional (diolah)

Pada tahun 2022, TPAK Kabupaten Tangerang sebesar 67,05% yang berada diatas Provinsi Banten dengan capaian 67,72%. Namun, capaian tersebut masih jauh dibawah nasional dengan TPAK sebesar 94,17%.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

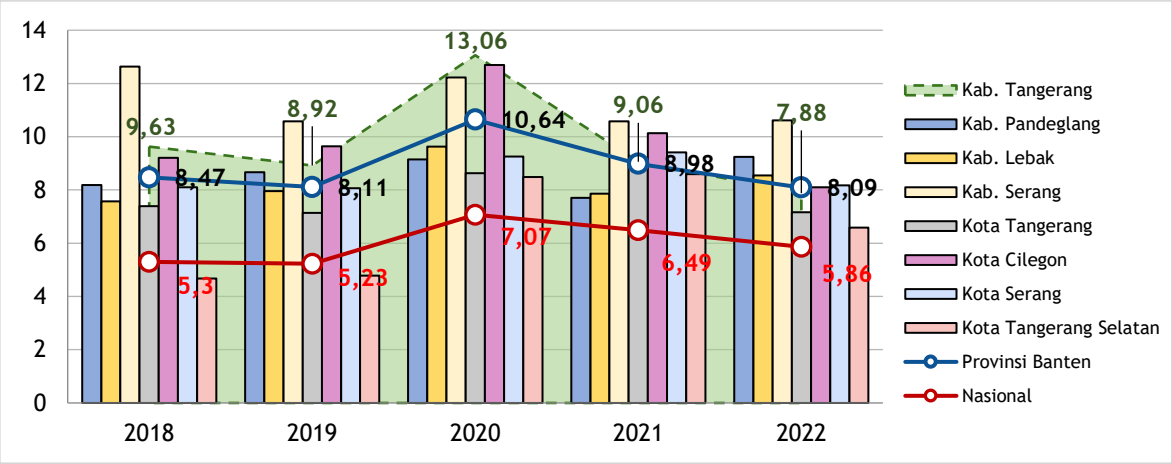
Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Secara umum, dalam sepuluh tahun terakhir, capaian TPT Kabupaten Tangerang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,68% per tahun.



Gambar 2. 43
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang tahun 2012 hingga 2022 mengalami penurunan dari 11,46% menjadi 7,88%, namun pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 13,06%. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, tingginya TPT Kab. Tangerang yaitu karakter investasi padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja serta ketidakmampuan kompetensi SDM penduduk Kab, Tangerang untuk mengakses tenaga kerja.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2017 hingga 2021) Kabupaten Tangerang menempati TPT yang lebih tinggi daripada Provinsi Banten dan termasuk 3 tertinggi bersama dengan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon (TPT yang tinggi berarti tingkat penyerapan tenaga kerja rendah).

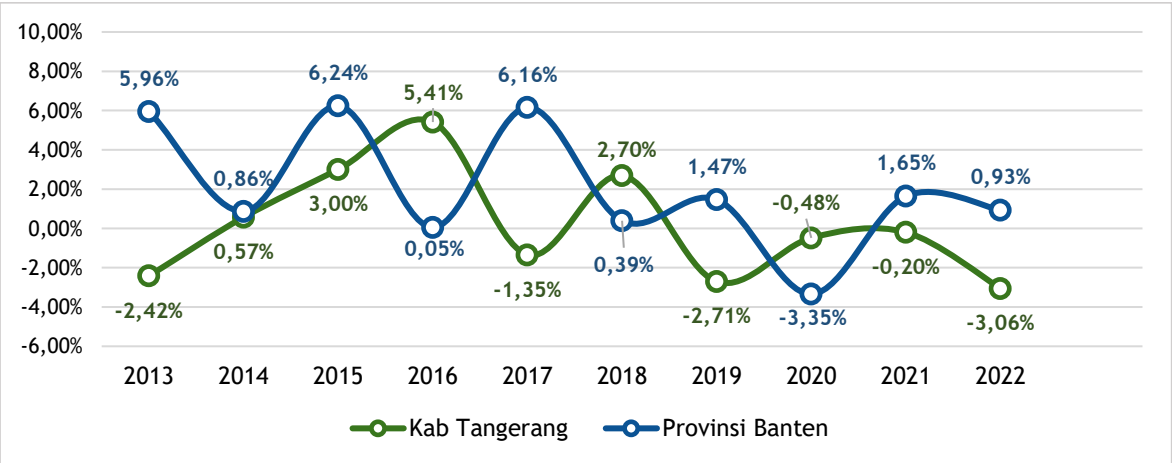


Gambar 2. 44
Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Dengan Masing - Masing Kabupaten/Kota 2018 - 2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Seiring dengan dilaksanakannya program-program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, pada tahun 2022 indikator TPT di kabupaten ini kembali membaik. Meskipun demikian, capaian TPT di Kabupaten Tangerang masih berada di atas (lebih buruk) capaian nasional. Berdasarkan peringkat secara nasional, TPT di Provinsi Banten menempati posisi kedua tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia yang menunjukkan adanya permasalahan terkait tingkat pengangguran yang dialami oleh penduduk di Provinsi Banten. TPT Kabupaten Tangerang yang tinggi harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemangku kepentingan.

5) Laju pertumbuhan PDRB terhadap tenaga kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja digunakan untuk memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi suatu daerah (Badan Pusat Statistik, 2023). Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja dihitung dengan persentase produk domestik regional bruto terhadap jumlah tenaga kerja.



Gambar 2. 45
Perbandingan Laju PDRB per Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2013-2022
Sumber: Hasil Olahan, 2023

Diagram di atas menunjukkan perbandingan laju PDRB per tenaga kerja di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten. Pada tahun 2021-2022, laju PDRB per tenaga kerja Kabupaten Tangerang sebesar -3.06% dan capaian ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten yang sebesar 0,93%.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Seni Budaya

Seni budaya masyarakat dapat berjalan melalui langkah pembangunan yang tepat. Fasilitas fisik dan kelembagaan perlu diperhatikan untuk mendukung hal tersebut. Berdasarkan renstra Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Tangerang tahun 2018-2023, disebutkan bahwa Kabupaten Tangerang belum memiliki Gedung Kesenian. Sementara itu Gedung Kesenian dapat menjadi pusat urusan seni budaya yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pengelolaan kelembagaan seni budaya yang tepat dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni budaya. Minat masyarakat pada seni budaya dapat dilihat pada persentase kelompok kesenian yang berjalan aktif. Semakin besar persentase tersebut, maka kesejahteraan masyarakat pada seni budaya dapat dikatakan semakin baik.

Tabel 2. 11
Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kelompok kesenian yang aktif (%)	50,68	56,16	n/a	n/a	n/a	n/a

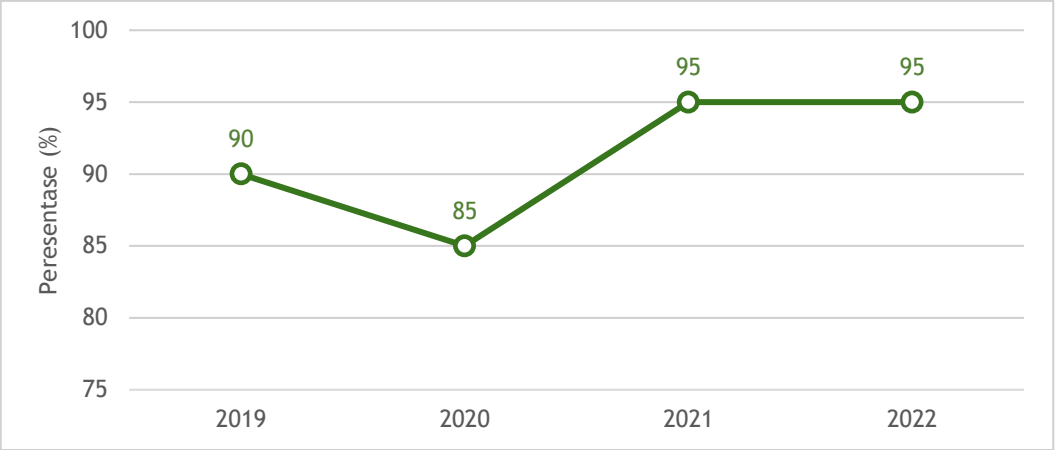
Sumber: Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023

Persentase kelompok kesenian Kabupaten Tangerang tahun 2018 meningkat sebesar 5,48% dari tahun 2017. Peningkatan tersebut merupakan capaian yang baik. Namun di tahun-tahun berikutnya data tersebut tidak ditemukan lagi.

B. Olahraga

Fasilitas dan aktivitas Olahraga dapat dilihat sebagai indikator kesejahteraan masyarakat pada bagian Olahraga. Fasilitas Olahraga dapat berupa lapangan dan gedung. Pada tahun 2023, di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang memiliki 1 stadion mini (28 stadion mini dan 1 *sport center*).

Masyarakat Kabupaten Tangerang memiliki minat yang cukup tinggi terhadap aktivitas Olahraga. Persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam berolahraga pada tahun 2019 sampai tahun 2022 berada di atas 85%. Pada tahun 2021 dan 2022, persentasenya mencapai 95%.



Gambar 2. 46
Persentase Kelompok Masyarakat yang Berperan Aktif dalam Berolahraga
- *Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022*

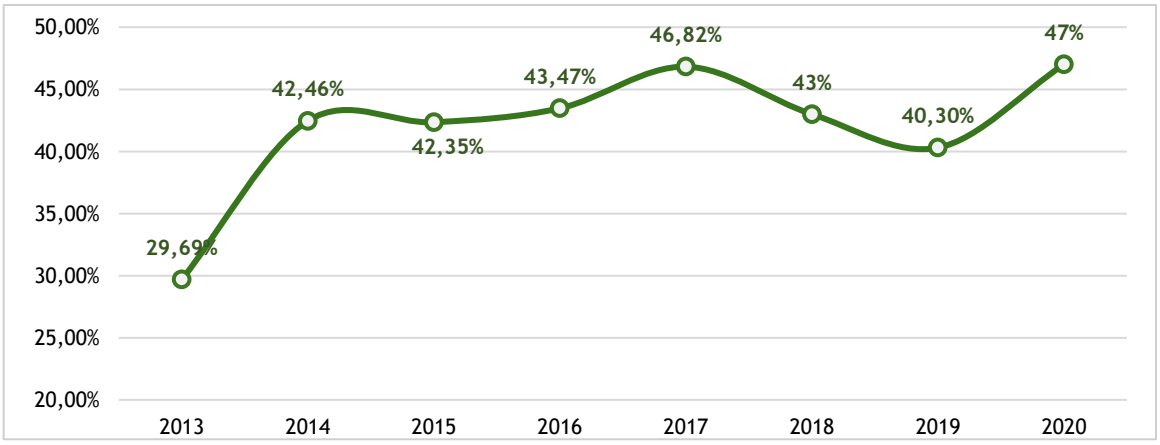
2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Cakupan PAUD adalah persentase siswa berusia 3-6 tahun yang menerima Pendidikan Anak Usia Dini. Upaya serius pemerintah dalam mengatasi isu anak diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). PAUD HI memiliki empat tujuan khusus yang mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan, serta koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga mewajibkan pelaksanaan PAUD selama setahun sebelum masuk Sekolah Dasar (SD), yaitu untuk anak usia 5 hingga 6 tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. PAUD penting untuk pengembangan anak dan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.Berikut adalah grafik angka cakupan pendidikan PAUD di Kabupaten Tangerang.

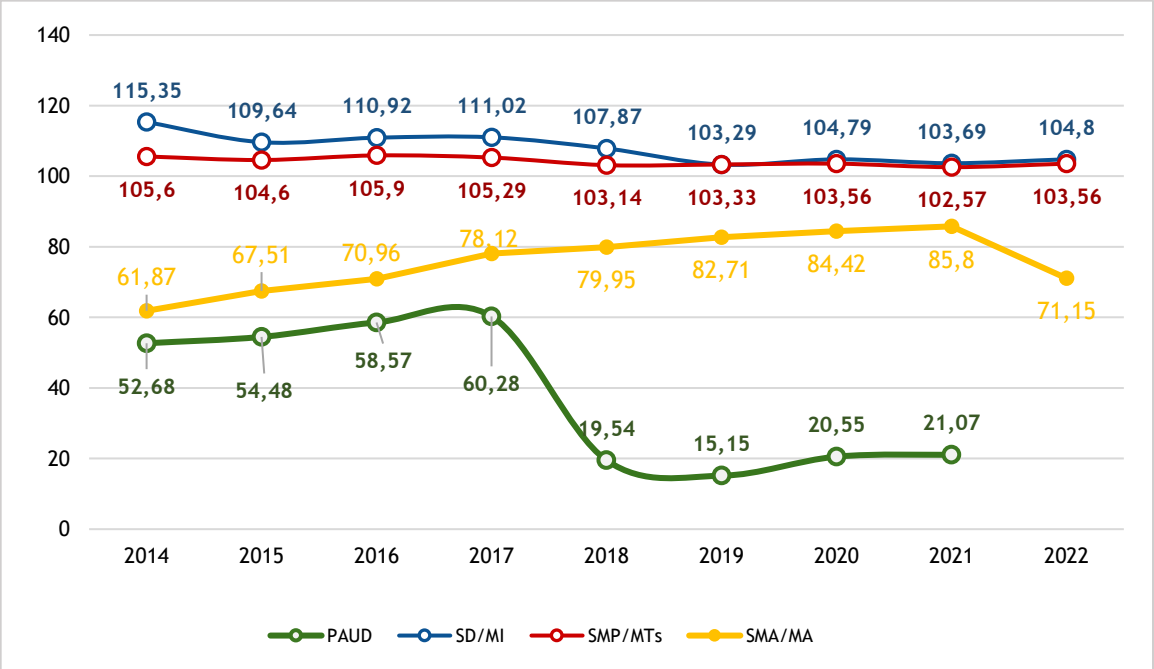


Gambar 2. 47
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tangerang tahun 2013 - 2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 2021 dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Thaun 2019-2023

Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2013. Namun hanya 47% dari seluruh anak 3-6 tahun menerima pendidikan anak usia dini. Pada tahun 2022 terdapat 49.469 murid PAUD di Kabupaten Tangerang dengan status sekolah negeri untuk 701 siswa dan sekolah swasta untuk 48.768 siswa. Cakupan ini dapat dipengaruhi oleh keengganan orang tua untuk mengarahkan anaknya mengikuti pendidikan anak usia dini dan kurang optimalnya pelayanan pendidikan bagi anak usia dini.

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Sejak tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APK mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setarSMP/MTs dan paket C setara SMA/SMK/MA).



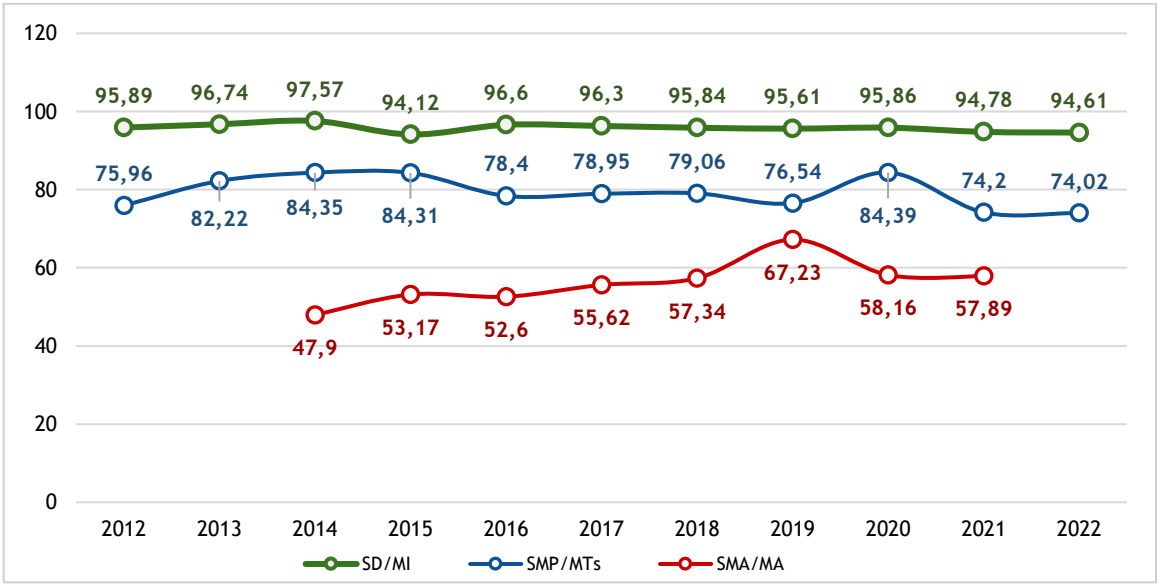
Gambar 2. 48
Grafik Perbandingan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012 - 2022
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2023

Secara umum, APK dapat dijadikan indikator keberhasilan sektor pendidikan. APK juga digunakan, untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi masyarakat secara umum di suatu tingkat pendidikan. Secara keseluruhan angka partisipasi kasar seluruh SD, SMP dan PAUD di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan untuk SMA/MA mengalami peningkatan sedikit. Motivasi dari remaja untuk menempuh pendidikan serta kurangnya bimbingan orang tua untuk mengarahkan anaknya menempuh pendidikan yang lebih tinggi dapat

menjadi salah satu penyebab mengapa partisipasi menurun. Penyebab lainnya juga dapat disebabkan oleh keputusan untuk bekerja ketika sudah mencapai umur yang cukup untuk bekerja yang menyebabkan tidak berpartisipasi pada pendidikan yang lebih tinggi.

3) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengindikasikan proporsi anak-anak dalam suatu kelompok usia yang bersekolah di tingkat yang sesuai dengan rentang usia mereka. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya dibandingkan dengan jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

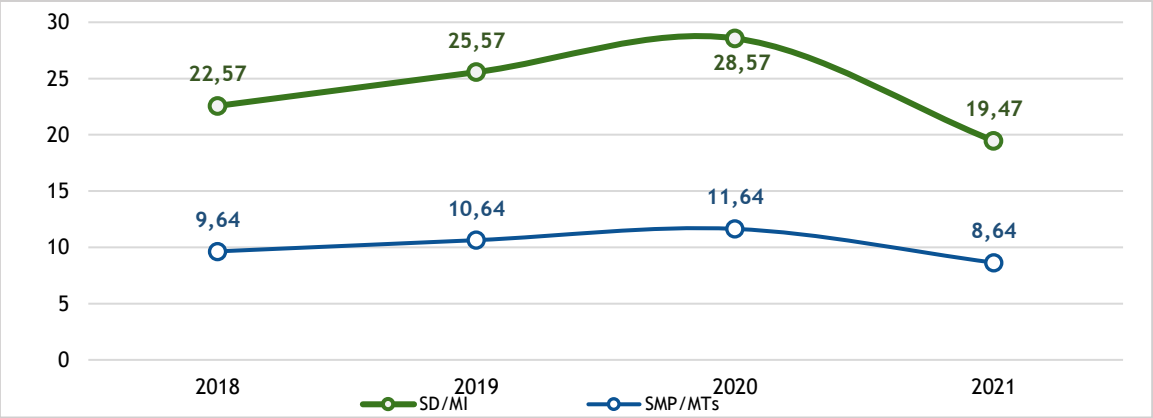


Gambar 2. 49
Grafik Perbandingan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012 - 2022
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2023

Secara keseluruhan APM di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan SMP/MTS. Sedangkan APM SMA/MA mengalami peingkatan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2014. Angka Partisipasi Murni jenjang SMP dan jenjang SMA di Kabupaten Tangerang lebih rendah daripada APM di Indonesia pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2022. Pada tahun 2022, APM SMP sederajat di Indonesia berada di nilai 80,89 dan APM SMA sederajat adalah 61,99. Hal ini menunjukkan diperlukan adanya peningkatan partisipasi penduduk untuk menempuh pendidikan. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa APM SMA di Kabupaten Tangerang paling rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya akses menuju pendidikan atau pandangan penduduk terhadap pendidikan yang menganggap bahwa pendidikan lebih lanjut kurang bernilai.

4) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

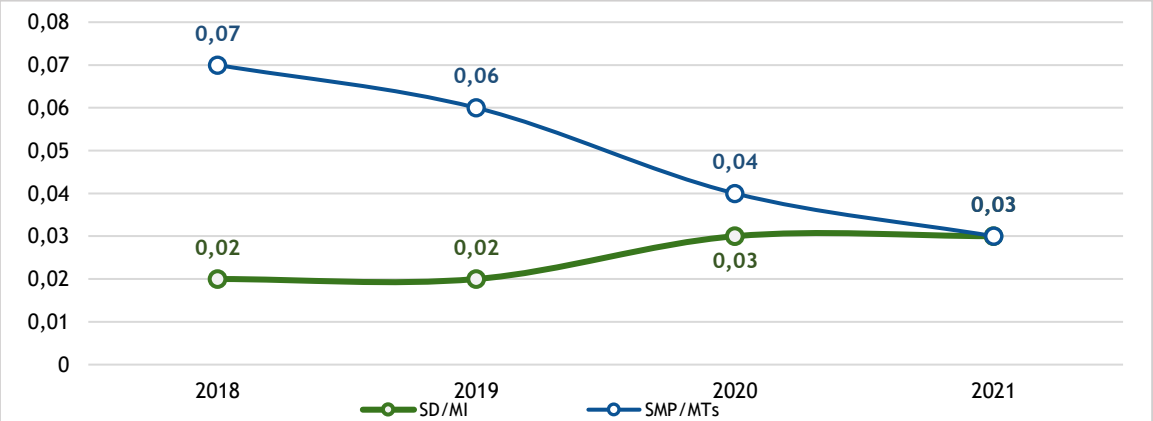
Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) mencerminkan persentase penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dibandingkan dengan penduduk dengan jumlah penduduk. Indikator ini memiliki fungsi penting untuk menggambarkan pencapaian dalam pembangunan pendidikan di suatu wilayah, dan juga membantu dalam perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama dalam mengukur kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dan permintaan pasar kerja.



Gambar 2. 50
Angka Pendidikan yang ditamatkan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tangerang (%) Tahun 2018 - 2021
Sumber: Dinas Pendidikan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026

5) Angka Putus Sekolah

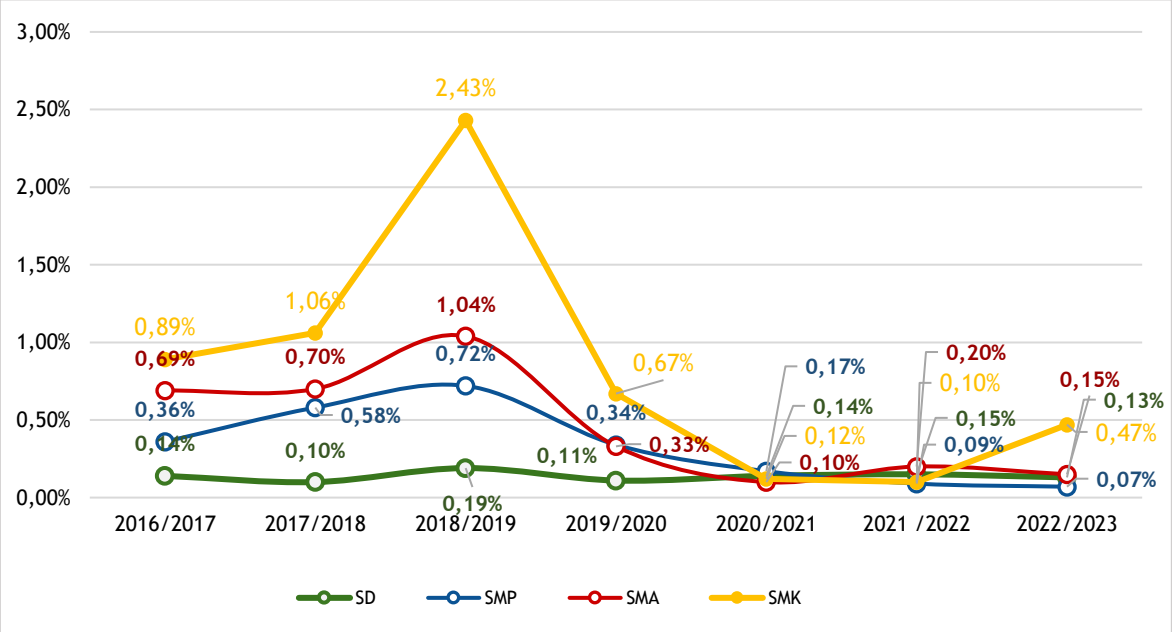
Angka Putus Sekolah (APS) merupakan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat menurut jenjang pendidikan tersebut. Angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tangerang tahun 2021 adalah 0,03% dan mengalami penurunan dibandingkan pada atahun 2018.



Gambar 2. 51
Angka Putus Sekolah Kabupaten Tangerang (%) Tahun 2018 - 2021
Sumber: Dinas Pendidikan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026

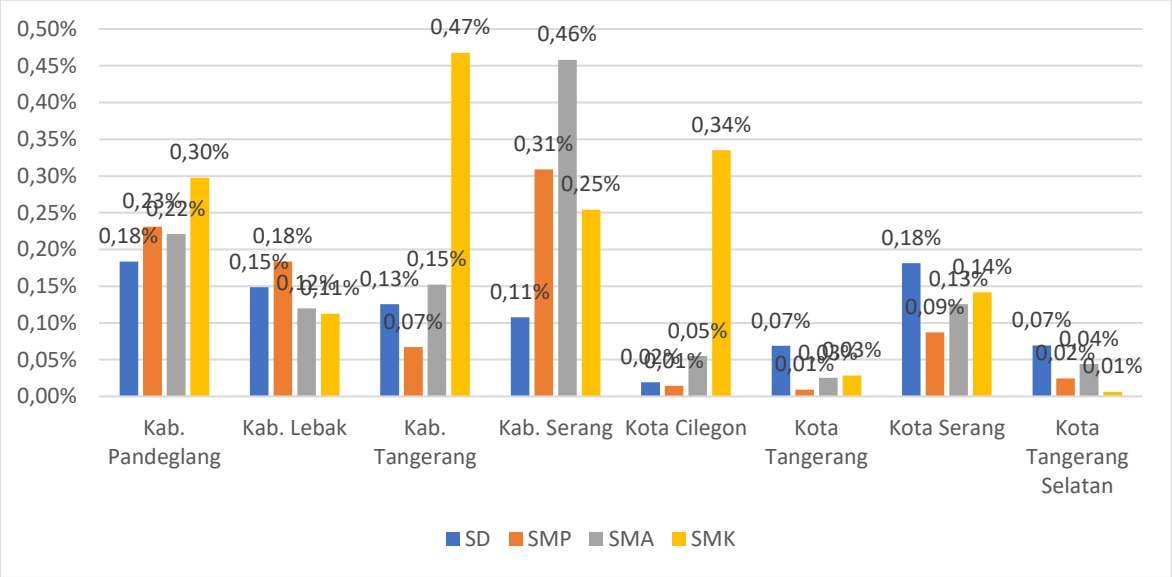
Menurut data dari Kemendikbud dengan membandingkan siswa yang putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu

berikut merupakan angka putus sekolah Kabupaten Tangerang pada tahun ajaran 2016/2017 hingga tahun ajaran 2022/2023



Gambar 2. 52
Angka Putus Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun Ajaran 2016/2017 hingga 2022/2023
Sumber : Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Pada tahun 2022/2023 Kabupaten Tangerang memiliki angka putus sekolah SMK paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten.

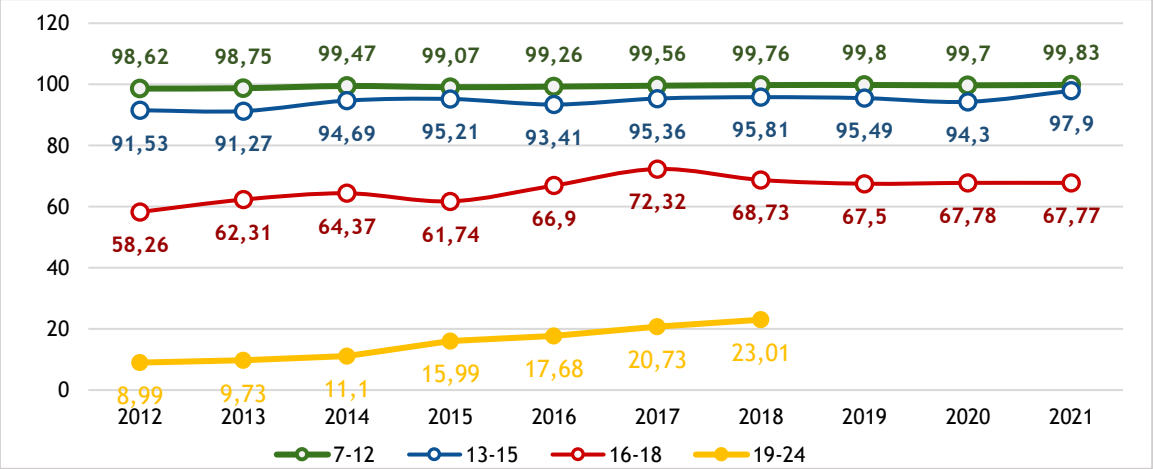


Gambar 2. 53
Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun Ajaran 2022/2023
Sumber : Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Menurut grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Putus Sekolah SMK di Kabupaten Tangerang paling tinggi dan APS SMA tertinggi ketiga di Provinsi Banten pada tahun ajaran 2022/2023. Sedangkan angka putus SD di Kabupaten Tangerang juga masih berada di atas capaian provinsi.

6) Angka Partisipasi Sekolah

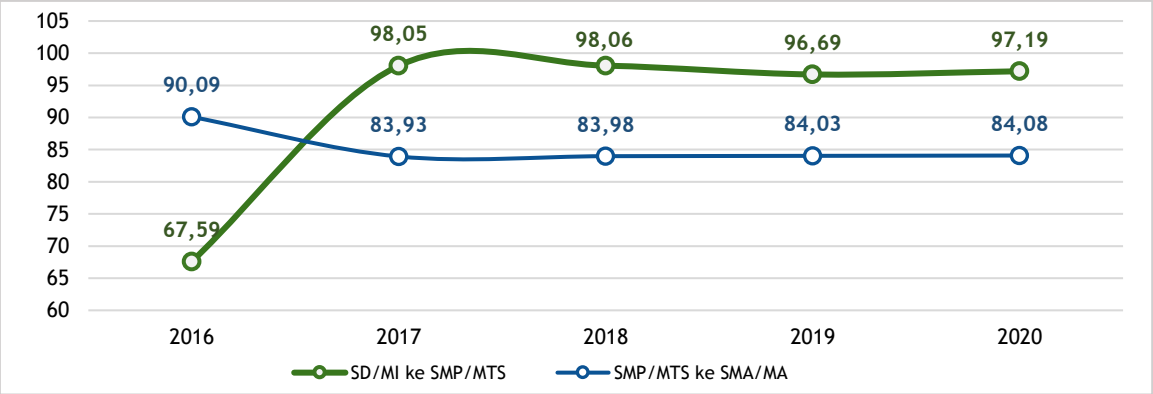
Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi Sekolah berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Berikut adalah angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2021.



Gambar 2. 54
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tangerang Menurut Usia Tahun 2012 - 2021
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

7) Angka Melanjutkan Sekolah

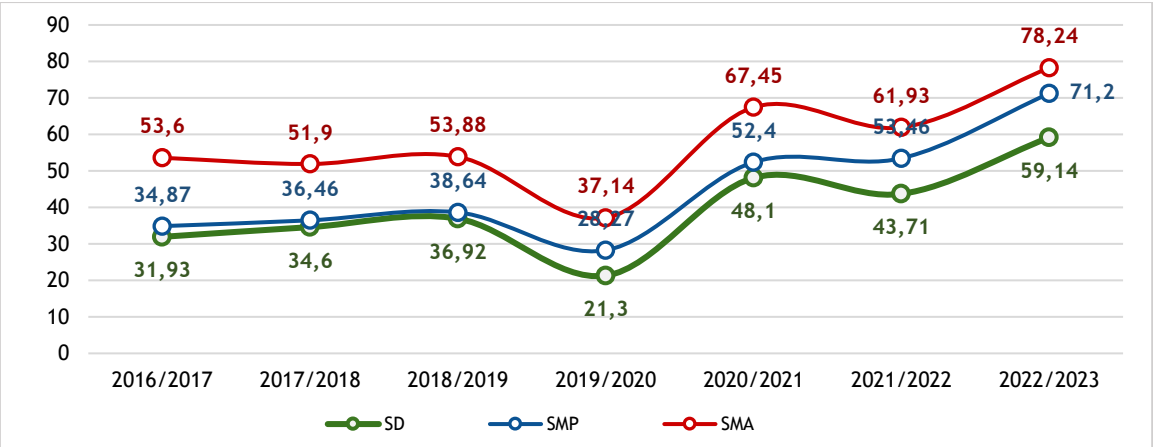
Angka melanjutkan digunakan untuk menggambarkan banyaknya siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dibagi menjadi dua, yaitu melanjutkan pendidikan ke SMP/sederajat serta melanjutkan pendidikan ke SMA/sederajat. Angka Melanjutkan (AM) adalah Perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Tangerang sebesar 97,19%. Sedangkan, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 84,08%.



Gambar 2. 55
Angka Melanjutkan Sekolah (%) Kabupaten Tangerang Tahun 2016 – 2020
Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

8) Kondisi Bangunan Pendidikan

Kualitas fasilitas pendidikan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Kondisi ruang kelas untuk jenjang sekolah dasar/sederajat dan sekolah menengah pertama/sederajat di Kabupaten Tangerang masih banyak yang mengalami kerusakan. Berikut adalah persentase kondisi kelas dengan kondisi bangunan baik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Tangerang pada tahun ajaran 2016/2017 hingga tahun 2022/2023.



Gambar 2. 56
Persentase Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kabupaten Tangerang Tahun Ajaran 2016/2017 hingga Tahun Ajaran 2022/2023
Sumber: Statistik Pendidikan Kemendikbud, 2023

Menurut data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kualitas bangunan kelas di tiap jenjang pendidikan dengan tren yang serupa. Berikut rincian kondisi bangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

Tabel 2. 12
Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Jenis Sarpras	SD		SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Ruang Kelas					
Kondisi Baik	4.055	2.289	1.292	1.663	9.299
Kondisi Rusak Ringan	2.313	850	647	1.167	4.977
Kondisi Rusak Sedang	1.022		123		1.145
Kondisi Rusak Berat	455		37		492
Total	7.845	3.139	2.099	2.830	15.913

Sumber : Dinas Pendidikan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026

Berdasarkan data masih terdapat 42 persen ruang kelas SD dan SMP yang memiliki kondisi rusak. Sedangkan dengan kondisi rusak berat adalah 3,1 persen dari seluruh ruang kelas SD dan SMP.

9) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 1.000 murid pendidikan dasar. Rasio guru terhadap murid digunakan untuk melihat besaran beban mengajar guru. Berikut merupakan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 13
Rasio Guru/Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

Uraian	Rasio Guru/Murid		
	2018	2019	2020
Pendidikan Dasar	0,003	0,004	0,004
Pendidikan Menengah	0,003	0,004	0,004

Sumber: Dinas Pendidikan dalam Dokumen RPJMD 2019-2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, standar rasio guru terhadap murid sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama adalah 1:20 sementara rasio guru terhadap murid Madrasah Ibtidaiah (MI) dan Madrasah Sanawiah (MTs) adalah 1:15. Rasio ini berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mempertimbangkan beban pengajaran yang dilakukan oleh guru. Berikut merupakan perbandingan guru terhadap murid menurut kategori Pendidikan.

Tabel 2. 14
Perbandingan Guru dan Murid Menurut Jenis Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

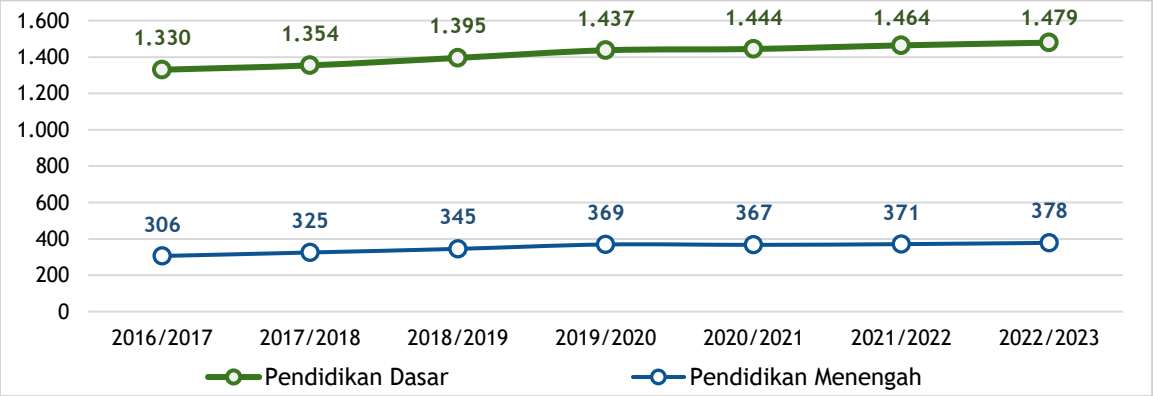
Uraian	Rasio Guru/Murid				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendidikan Dasar	1:24	1:24	1:22	1:21	1:21
SD	1:25	1:25	1:24	1:22	1:24
MI	1:19	1:19	1:19	1:19	1:17
SMP	1:25	1:25	1:23	1:22	1:22
MTS	1:15	1:12	1:12	1:12	1:10

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2018-2022 (diolah)

Dalam rentang tahun 2017 hingga 2021 rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tangerang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk pendidikan dasar, SD, dan SMP.

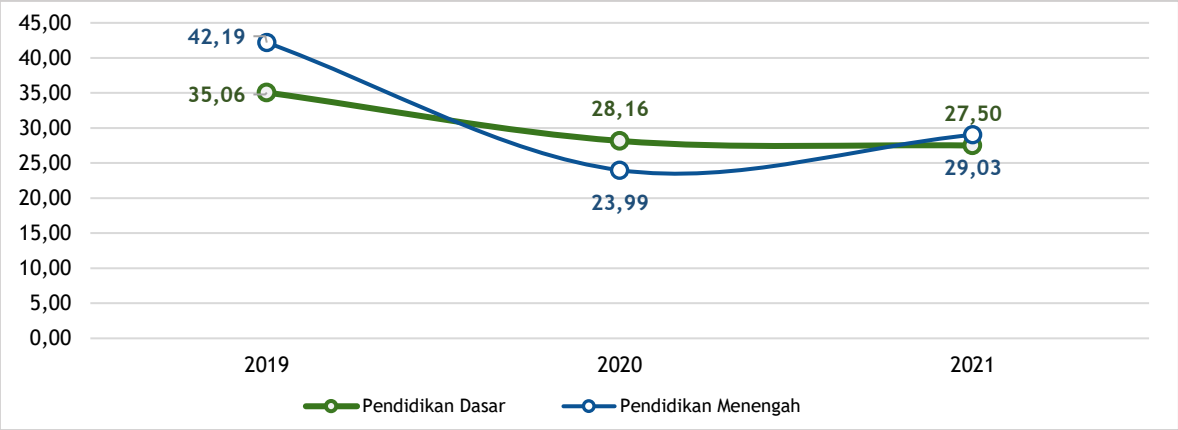
10) Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah perbandingan jumlah sekolah dengan 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar adalah perbandingan antara jumlah SD dan SMP dibandingkan dengan 10.000 penduduk berusia 7-12 dan 13 – 15 tahun sedangkan untuk pendidikan menengah adalah perbandingan SMA dan SMK dibandingkan dengan 10.000 penduduk usia 16-19 tahun. Indikator ini digunakan untuk analisis kemampuan fasilitas sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, maka semakin baik kesempatan untuk bersekolah. Berikut merupakan rincian jumlah skeolah untuk pendidikan dasar yaitu SD dan SMP serta pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK.



Gambar 2. 57
Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Sumber: Statistik Pendidikan Kemendikbud

Menurut data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Tangerang terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data di bawah dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rasio. Rasio ketersediaan sekolah yang semakin tinggi berarti semakin banyak sekolah yang dapat melayani jumlah penduduk. Rincian untuk capaian rasio dapat dilihat dari gambar berikut:

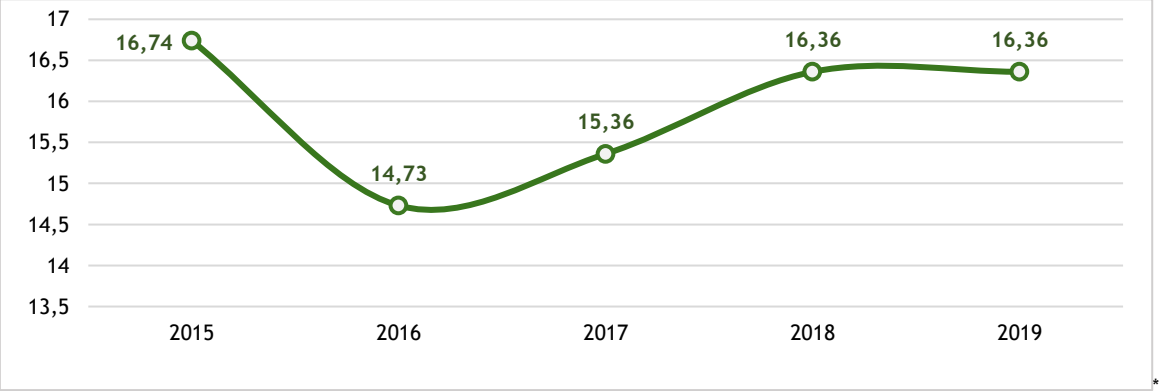


*data yang digunakan adalah jumlah sekolah saat tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022

Gambar 2. 58
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Sumber: Statistik Pendidikan Kemendikbud dan Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang

11) Proporsi Murid Kelas I Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar didapatkan dengan menghitung persentase antara banyaknya lulusan SD dengan banyaknya penduduk usia 12 tahun. Menurut grafik di bawah terlihat terdapat peningkatan proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan pendidikan dasar. Hal ini akan mempengaruhi capaian kualitas pendidikan Kabupaten Tangerang karena semakin banyak murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar menunjukkan keberhasilan mengikuti pendidikan dasar.

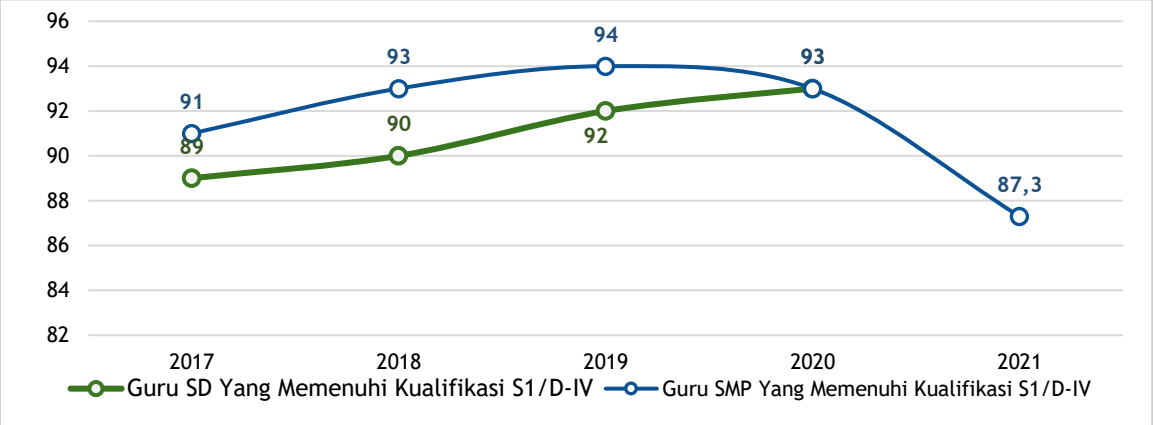


Gambar 2. 59
Proporsi Murid Kelas I yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang (%) Tahun 2015-2019
Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

12) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai pendidik diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik didapatkan melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV didapat dengan menghitung persentase antara guru dengan lulusan minimal S1 dengan seluruh

guru yang ada di jenjang pendidikan tertentu. Berikut merupakan rincian persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.



Gambar 2. 60
Persentase Guru Sekolah Dasar (SD) dan Persentase Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Berdasarkan data di atas persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV cukup tinggi dan mengalami peningkatan tiap tahunnya untuk guru sekolah dasar dan mengalami penurunan untuk guru sekolah menengah pertama. Pada tahun 2021 di Provinsi Banten persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah 97% sehingga capaian Kabupaten Tangerang pada angka ini masih lebih rendah daripada rata-rata provinsi.

B. Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi

Salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. Kabupaten Tangerang adalah kabupaten/kota dengan jumlah kematian bayi paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 227 kasus.

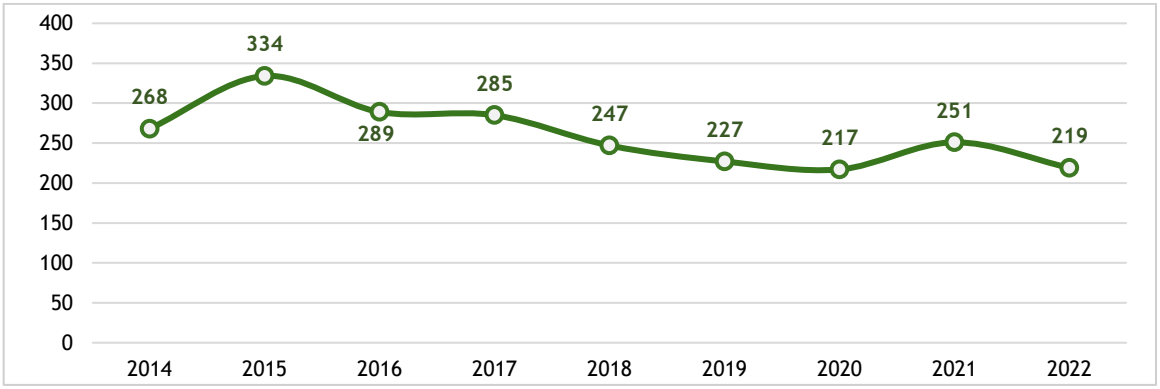
Tabel 2. 15
Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2017-2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Bayi			
	2017	2018	2019	2020
Kab Pandeglang	32	N/A	33	22
Kab Lebak	N/A	100	98	96
Kab Tangerang	227	217	251	227
Kab Serang	246	228	30	50
Kota Tangerang	54	49	44	44
Kota Cilegon	18	36	20	23
Kota Serang	22	21	28	N/A

Kota Tangerang Selatan	48	60	47	19
Provinsi Banten	437	523	316	505

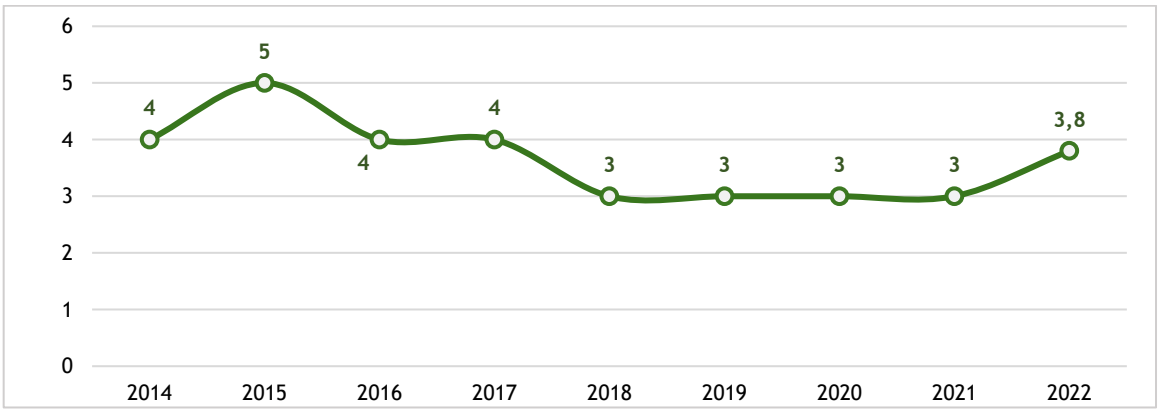
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten 2018-2021 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026

Berikut merupakan grafik jumlah kejadian kematian bayi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 – 2022.



Gambar 2. 61
Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022
Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 20124- 2026

Melalui grafik di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah kasus kejadian kematian bayi di Kabupaten Tangerang. Pada diagram di atas dapat dilihat bahwa terdapat tren penurunan jumlah kematian bayi dari tahun 2015 hingga 2020. Salah satu faktor yang dapat berkontribusi pada tren ini adalah padanya peningkatan jumlah fasilitas layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Sedangkan angka kematian bayi di Kabupaten Tangerang dapat dilihat di gambar berikut.



Gambar 2. 62
Angka Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022
Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 20124- 2026

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya untuk mengatasi isu kematian ibu dan bayi mengeluarkan regulasi kebijakan melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 128 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Kabupaten Tangerang. Peraturan itu disebut memiliki tujuan untuk menciptakan layanan fasilitas kesekhatan bagi ibu dan anak yang

lebih memenuhi tata kelola klinis yang sesuai standar. Penyebab kematian bayi pada tahun 2014 hingga tahun 2020 dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16
Tabel Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2020

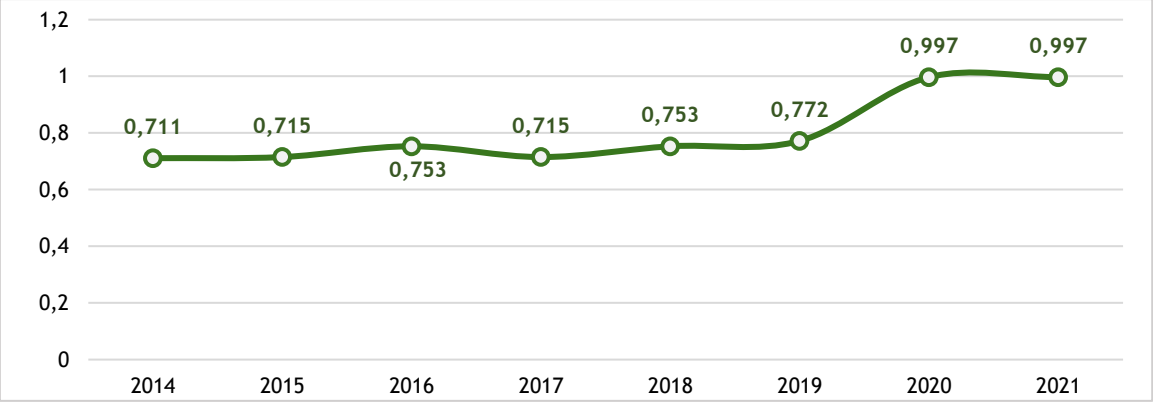
No	Penyebab Kematian Bayi	Jumlah (dalam jiwa)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	BBLR	127	195	138	120	122	42	84
2	Asfiksia	81	68	65	70	42	67	50
3	Tetanus	2	3	2	3	2	1	1
4	Sepsis	13	22	23	22	16	39	24
5	Kelainan konginetal	22	21	26	49	37	20	34
6	Ikterus	1			1	1	2	1
7	Perdarahan intrakranial				1			
8	Pneumonia	4			2	4	2	
9	Diare	1			4	2	0	
10	Lain-lain	17	25	35	13	21	54	9
Jumlah		268	334	289	285	247	227	203

Sumber: Kesga -Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2020 dalam Dokumen RPJMD 2019-2023 Kabupaten Tangerang

Penyebab kematian yang paling banyak ditemukan di kasus kematian bayi di Kabupaten Tangerang adalah kondisi BBLR atau bayi berat lahir rendah. Pendampingan terhadap ibu saat hamil perlu ditingkatkan untuk menekan angka kematian bayi.

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi menggambarkan banyaknya bayi yang hidup dalam setiap 1000 kelahiran. Dibawah ini merupakan grafik angka kelangsungan hidup bayi Kabupaten Tangerang tahun 2014-2021. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan kenaikan angka kelangsungan hidup bayi dan pada tahun 2021 menyentuh angka 0,997.



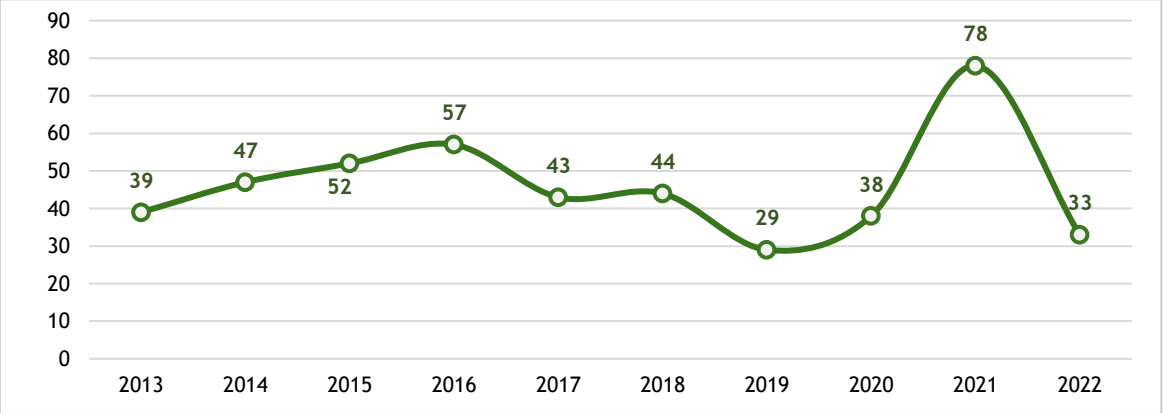
Gambar 2. 63
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

3) Angka Kematian Ibu

Salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi

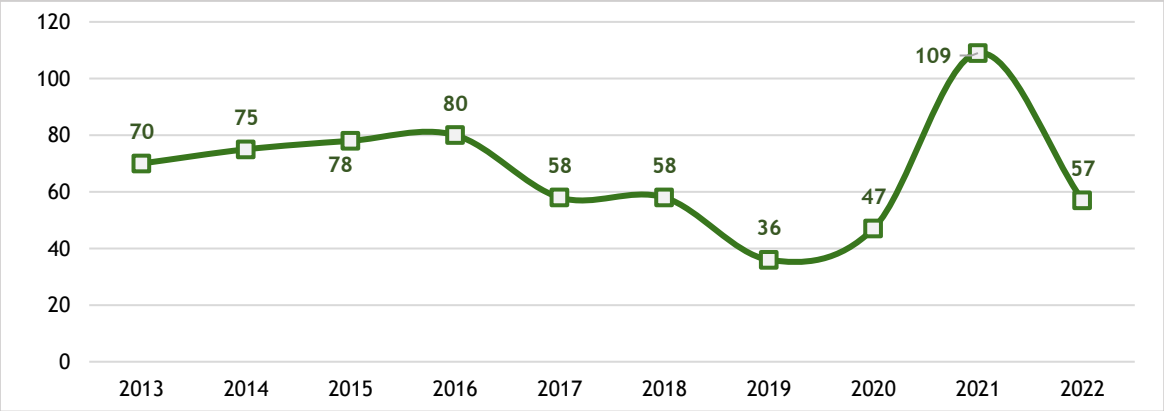
ibu-ibu selama kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Kabupaten Tangerang adalah kabupaten/kota dengan jumlah kasus kematian ibu tertinggi Tahun 2021 di Provinsi Banten dengan jumlah 78 kasus. Berikut adalah grafik jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 64
Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang ahun 2013-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2023

Berikut adalah grafik angka kematian ibu di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 65
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2023

Angka kematian ibu tersebar di berbagai beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 17
Angka Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2021

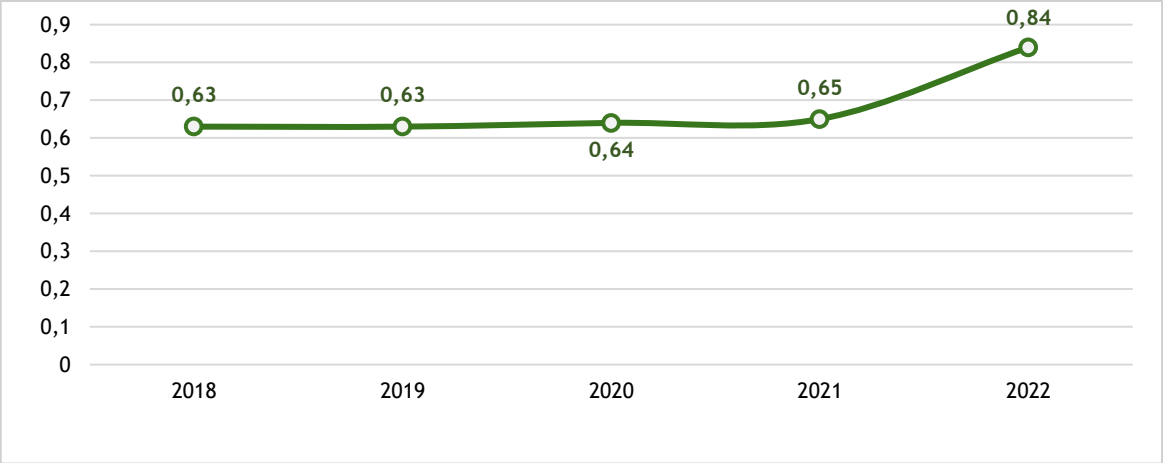
No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	**Balaraja**	**99,9**	**67,1**	**75,7**
2	Jayanti	0	0	414,7
3	Tigaraksa	27,9	25	291,5
4	Jambe	391,8	96,2	298,5
5	Cisoka	0	92,7	105,9
6	Kresek	74,7	72,5	159,2
7	Kronjo	72,4	73,6	166,9
8	Mauk	108	108,9	0
9	Kemiri	0	187,3	218,8
10	Sukadiri	0	0	0
11	Rajeg	47,6	145	104,2
12	Pasar Kemis	0	12,2	57,3
13	Teluknaga	0	27,7	31,3
14	Kosambi	0	0	61,2
15	Pakuhaji	40	0	89,4
16	Sepatan	0	37,2	0
17	Curug	0	82,4	45,7
18	Cikupa	62,2	63,1	121
19	Panongan	29,8	29,9	132,9
20	Legok	73,9	73,4	437,9
21	Pagedangan	0	36,9	106
22	Cisauk	49,8	0	0
23	Sukamulya	0	61,3	0
24	Kelapa Dua	38,6	0	64,5
25	Sindang Jaya	48,3	55,4	52,8
26	Sepatan Timur	0	0	52,7
27	Solear	46,1	139,6	161,2
28	Gunung Kaler	175,1	83,8	196,3
29	Mekar Baru	0	0	0
Kabupaten Tangerang		36,5	49	109,4

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 dalam Website Open Data Kabupaten Tangerang

Jika dilihat dari kecamatan di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Legok, Kecamatan Jayanti, dan Kecamatan Jambe adalah tiga kecamatan dengan angka kematian ibu tertinggi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021. Pada sektor kesehatan sasaran penting tahun 2024 menurut pemerintahan Joko Widodo adalah melalui pemenuhan layanan dasar Kesehatan dengan salah satunya penurunan Angka Kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan sudah mencapai target yang ditentukan namun beberapa kecamatan masih belum mencapai target tersebut yaitu Kecamatan Legok, Jayanti, Jambe, Tigaraksa, Kronjo, Kemiri, dan Gunung Kaler.

4) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya lima program prioritas (KIA, KB, Gizi, Imunisasi, Penanggulangan Diare, dan ISPA) dengan tujuan mempercepat penurunan angka kematian bayi dan ibu.

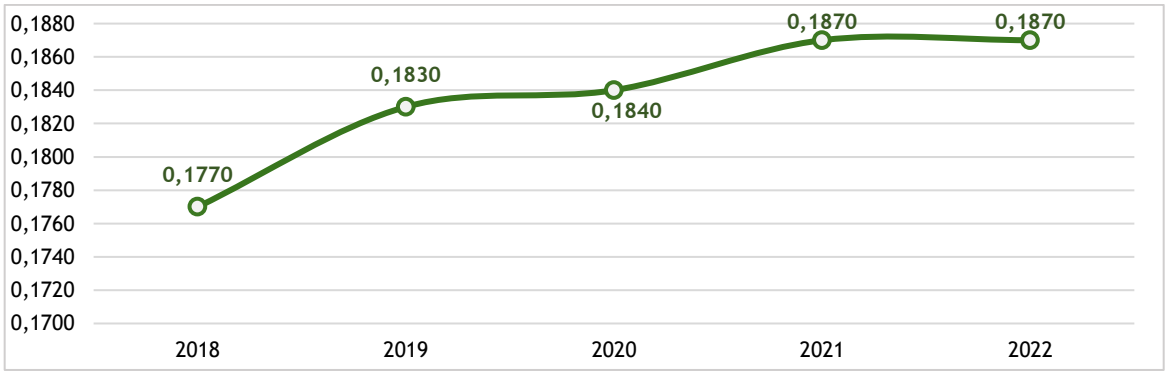


Gambar 2. 66
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Tangerang tahun 2018 -2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang di Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk setiap 1000 orang balita. Pada tahun 2022 telah terbentuk 2.341 posyandu di Kabupaten Tangerang. Menurut Departemen Kesehatan RI (2006), idealnya satu posyandu adalah melayani ± 100 balita. Dengan rasio 0,84 di tahun 2022 maka 1 posyandu di Kabupaten Tangerang melayani ± 1.190 balita. Angka ini tentu belum merupakan kondisi yang ideal.

5) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk adalah ketersediaan layanan puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu untuk setiap 1000 orang penduduk. Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas, bahkan di kecamatan telah memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit. Jumlah ini terdiri dari puskesmas rawat inap 37 unit dan non rawat inap 7 unit. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat kesehatan Masyarakat, puskesmas harus didirikan di masing-masing kecamatan. Meskipun begitu, pada kondisi tertentu dalam satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu kecamatan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas

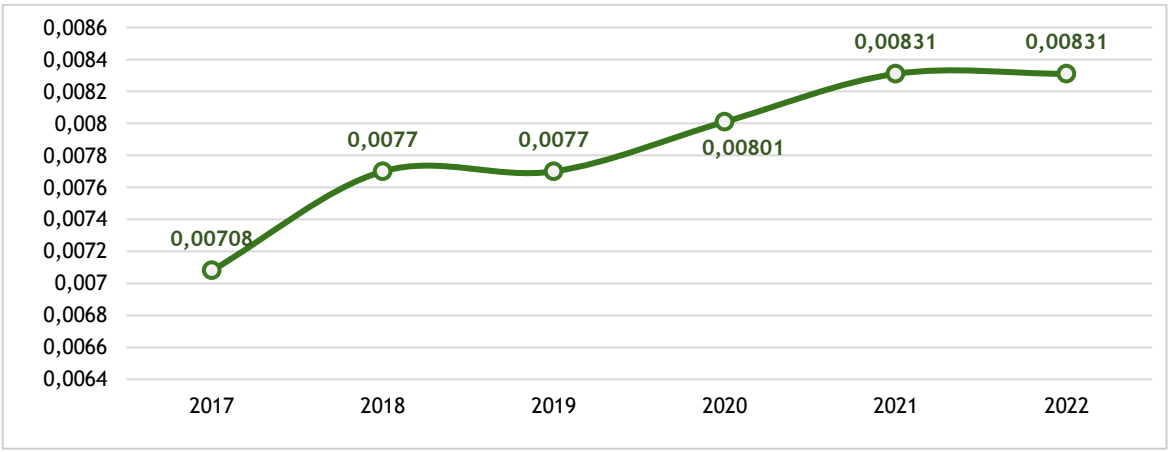


Gambar 2. 67
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan
Penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2018 -2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan total jumlah unit adalah 570 unit.

6) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah ketersediaan rumah sakit untuk setiap 1000 orang penduduk. Jumlah rumah sakit dan rasio ketersediaannya per 1000 penduduk di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 68
Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2017 -2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang di Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Kabupaten Tangerang memiliki rumah sakit sejumlah 20 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 27 rumah sakit pada tahun 2021 dengan 21 rumah sakit umum dan 6 rumah sakit khusus. Kepemilikan dari rumah sakit tersebut adalah 3 unit dimiliki oleh pemerintah daerah, 18 unit milik swasta serta 6 unit rumah sakit khusus seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah 0,00831 yang berarti satu rumah sakit melayani kurang lebih 124.000 penduduk di Tahun 2022 hal ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 18
Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah RSU Pemerintah	2	2	2	2	3	3
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	19	19	20	23	24	23
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.157.780	3.264.776	3.362.720	3.477.495	3.584.770	3.245.619
Perbandingan jumlah rumah sakit dan jumlah penduduk	1 : 150.370	1 : 155.466	1 : 152.851	1:151.195	1:149.365	1:162.281
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,00602	0,00582	0,00595	0,00661	0,00669	0,00709

Sumber : Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPJMD 2019 – 2023

7) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan jumlah ketersediaan dokter untuk setiap 1000 orang penduduk. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah dokter dengan rasio ketersediaannya:

Tabel 2. 19
Rasio Dokter Per Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Dokter (spesialis dan umum) per jumlah penduduk	1 : 4.687	1 : 8.515	1 : 3.414	1 : 3.484	1 : 1.727	1 : 1.942
Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis) per jumlah penduduk	1 : 29.470	1 : 18.671	1 : 20.139	1 : 20.883	1 : 17.392	1 : 20.109
Rasio Dokter per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	0,21	0,12	0,29	0,29	0,58	0,51
Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	0,03	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
Rasio dokter per 100.000 penduduk	21,34	11,74	29,29	28, 2170	57,9	51,49
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	3,39	5,36	4,97	4,79	5,75	4,97

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 (diolah)

Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang memiliki jumlah dokter paling banyak yaitu 1.942 dokter dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2021. Menurut *World Health Organization*, kondisi ideal suatu wilayah adalah ketika rasio dokter per satuan penduduk adalah 1:1.000 yang berarti 1 dokter melayani 1.000 penduduk. Kabupaten Tangerang belum memenuhi standar dengan rasio 1 dokter melayani kurang lebih 1.942 penduduk pada tahun 2021. Namun rasio ini membaik dibandingkan dengan tahun 2016. Di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui keputusan menteri menetapkan target rasio dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2019 sebanyak 45 sementara untuk tahun 2025 sebanyak 50. Berdasarkan keputusan tersebut, Kabupaten Tangerang telah mencapai target dengan rasio dokter per 100.000 penduduk sebesar 51,49.

8) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk berguna untuk menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan untuk setiap 1000 orang penduduk. Rasio ini juga berguna

untuk mengevaluasi cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi penduduk. Berikut data yang tersedia merupakan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk di Kabupaten Tangerang:

Tabel 2. 20
Rasio Tenaga Medis di Kabupaten Tangerang Tahun 2016 - 2020

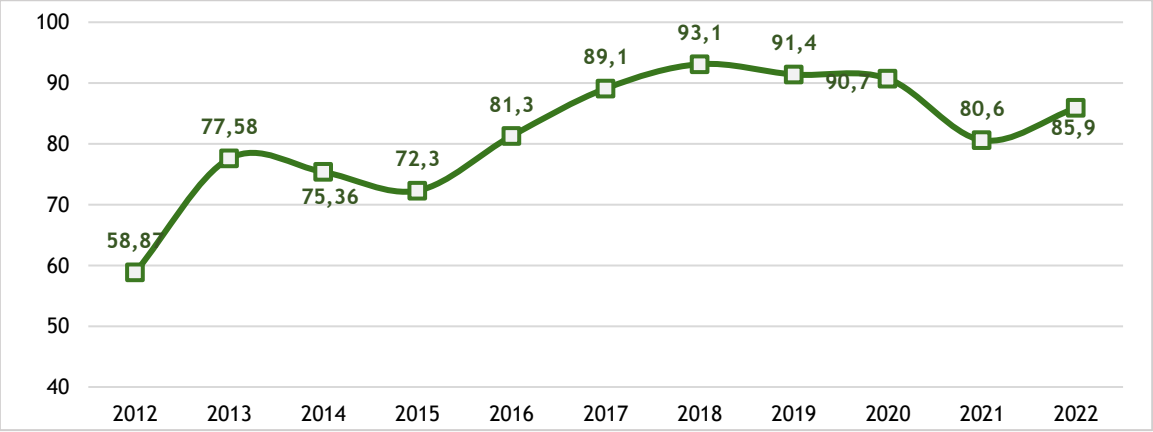
Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Tenaga medis bidan/ 100.000 penduduk	44,98	N/A	73,95	46,33	35,65
Rasio tenaga medis perawat/ 100.000 penduduk	47,62	N/A	61,57	60,46	91,32

Sumber: Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPJMD 2019-2023

Pada tahun 2020 Kabupaten Tangerang rasio tenaga medis adalah 91,32 untuk perawat dan 35,65 untuk bidan. Angka tersebut menggambarkan jumlah tenaga medis yang melayani 100.000 penduduk adalah 35 tenaga medis bidan dan 91 perawat pada tahun 2020. Menurut sasaran strategis yang diuraikan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 pada tahun 2019 diharapkan ketersediaan perawat adalah sejumlah 158 perawat per 100.000 penduduk dan 75 bidan per 100.000 penduduk. Capaian rasio di Kabupaten Tangerang hingga tahun 2020 masih belum mencapai sasaran strategis tersebut.

9) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah cakupan ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun 2017-2022 digambarkan pada grafik dibawah ini.



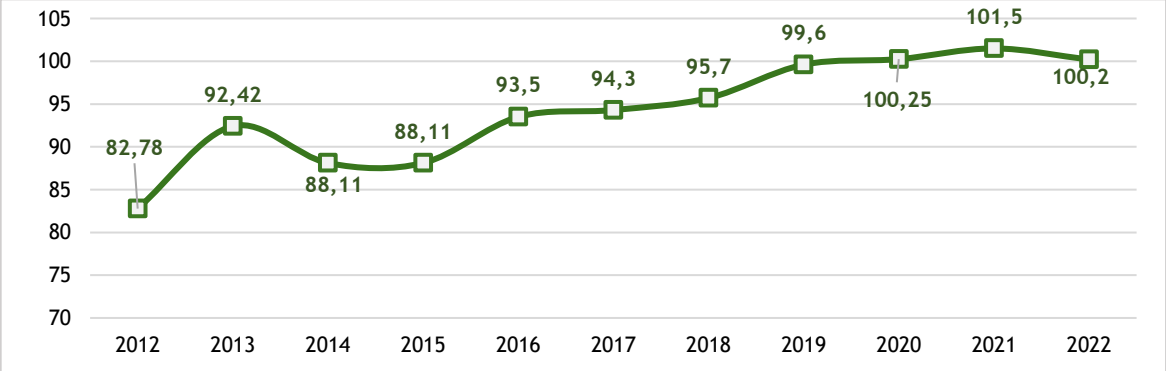
Gambar 2. 69
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan 2019-2023

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dan kemudian meningkat pada tahun 2022. Cakupan ini meningkat pada tahun 2022 dibandingkan dengan pada tahun 2012. Pada tahun 2021, Kabupaten

Tangerang memiliki jumlah kasus komplikasi kebidanan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, sehingga peningkatan kapasitas penanganan harus ditingkatkan.

10) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

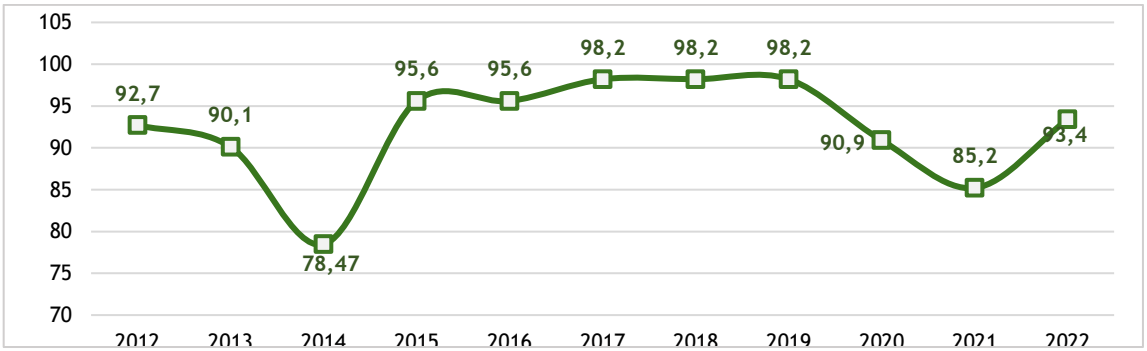
Cakupan persalinan merupakan cakupan ibu bersalin yang mendapatkam pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, di suatu wilayah kerja dalam waktu tertentu. Meningkatnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB. Dari data dibawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tangerang mengalami trend peningkatan hingga tahun 2021 namun mengalami penurunan di tahun 2022.



Gambar 2. 70
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan 2019-2023

11) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Desa atau kelurahan *Universal Child Immunization* merupakan keadaan tercapainya imunisasi dasar lengkap pada semua bayi (anak di bawah umur 1 tahun). Setiap desa diharapkan mampu mencapai minimal 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Cakupan desa atau kelurahan UCI merupakan indikator dari keberhasilan program imunisasi. Adanya imunisasi dasar lengkap bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok *(herd immunity)*. Selain itu imunisasi merupakan intervensi kesehatan yang paling murah, karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit.



Gambar 2. 71
Cakupan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi trend cakupan yang meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2018 kemudian menurun hingga tahun 2021 dan kembali ke nilai yang lebih tinggi di tahun 2022 daripada tahun 2012. Sejak tahun 2020, istilah Universal Child Immunization (UCI) tidak lagi digunakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan untuk periode 2020-2024. Saat ini, ukuran yang digunakan adalah persentase bayi yang berusia 0-11 bulan yang telah menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 2020-2024.

12) Imunisasi Dasar Bayi

Program Imunisasi merupakan salah satu upaya intervensi bidang kesehatan untuk melindungi penduduk dari penyakit tertentu. Adanya imunisasi dasar lengkap bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok *(herd immunity)*. Selain itu imunisasi merupakan intervensi kesehatan yang paling murah, karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit. Imunisasi dasar lengkap perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sejak balita. Sistem kekebalan tubuh yang terbentuk dengan baik mampu mengurangi risiko terpaparnya penyakit dengan gejala yang lebih serius. Dengan begitu usia hidup dapat meningkat. Imunisasi dasar lengkap terdiri dari vaksin hepatitis B sekali, vaksin BCG sekali, vaksin DPT-HiB tiga kali, OPV empat kali + 1 IPV atau IPV tiga kali dan campak sekali.

Tabel 2. 21
Cakupan Imunisasi Dasar pada bayi 0-11 bulan Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 (%)

No.	Jenis Imunisasi	Cakupan (%)							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	BCG	97,7	91,3	97,2	104,7	101,8	107,5	99,66	96,6
2	Hepatitis BO	93,6	92,1	94,9	97	99,7	106,7	100,52	102,3
3	DPT-HB III	96,7	98,8	96,4	102,6	99,8	100,9	108	95,6
4	Polio IV	96,6	92,4	96,1	103,3	101,1	100,9	100,52	95,6
5	Campak	95,5	86,1	95,5	101,9	89,9	100	N/A	96,5

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2020 dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tangerang (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa cakupan dari semua jenis imunisasi cukup tinggi dan beberapa mengalami kenaikan.

Tabel 2. 22
Cakupan Imunisasi dasar pada Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2020 (%)

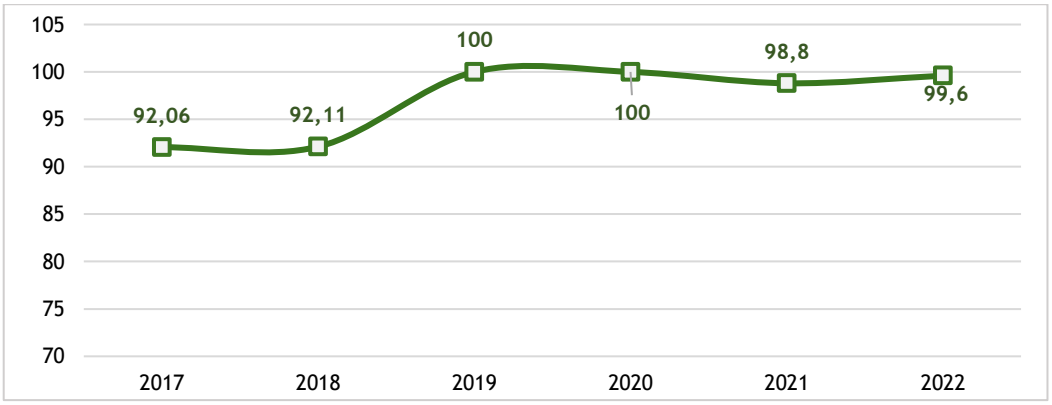
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Cakupan (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 Antigen	93,5	92,2	93,4	94,3	98,5	94,7

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020

Capaian dari program imunisasi dapat diamati melalui pencapaian indikator imunisasi dasar yang komprehensif. Pada tahun 2020, tingkat pencapaian imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Tangerang mencapai 94,7%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan angka pada tahun 2019 yang mencapai 98,5%, hal ini terjadi karena dampak pandemi COVID-19.

13) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan didapatkan dengan menghitung persentase antara jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.



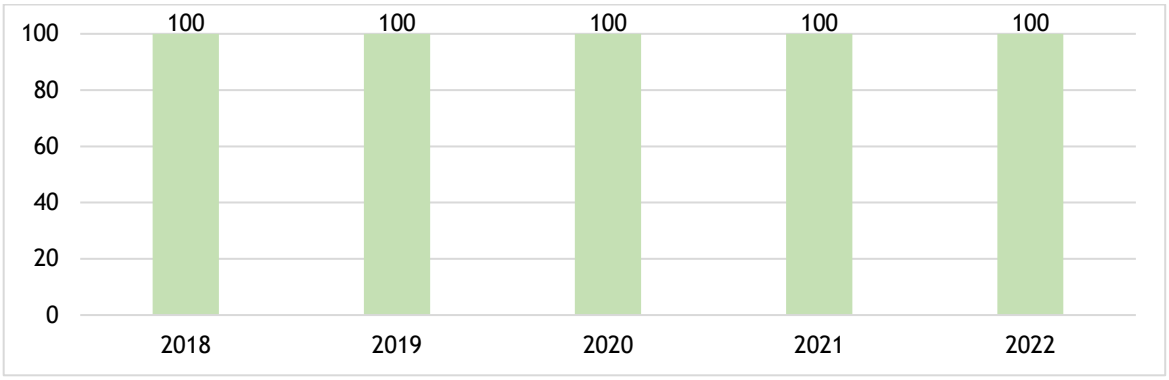
Gambar 2. 72
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan 2019-2023

Terjadi penurunan cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan. Untuk meningkatkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan perlunya komitmen dari Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait untuk melakukan upaya seperti upaya penyuluhan gizi.

14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *Dengue* dan ditularkan oleh vektor nyamuk *Aedes Aegypti*. Penyakit ini sebagian besar menyerang anak berumur <15 tahun, namun dapat juga menyerang orang dewasa. Indikator yang

digunakan untuk memantau dan mengendalikan penyakit DBD adalah *incident rate* atau angka kesakitan dan *case fatality rate* atau proporsi kematian pada kasus DBD.

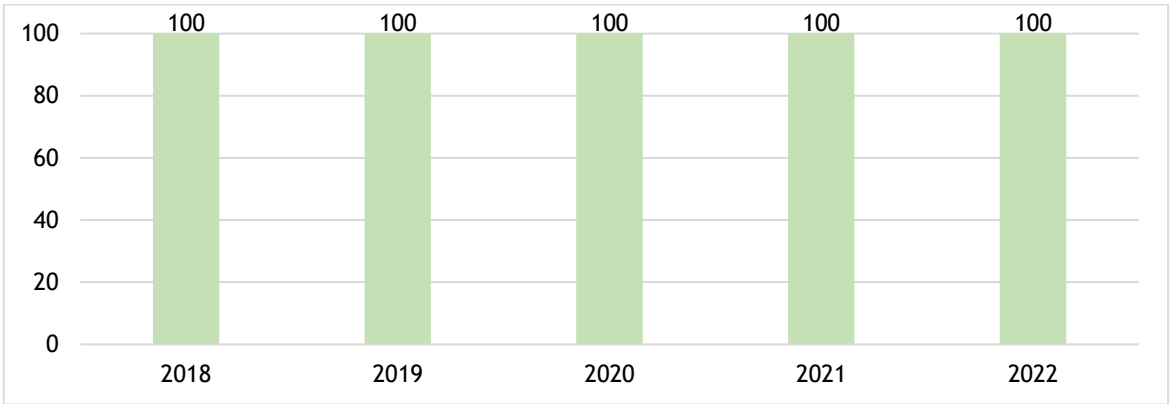


Gambar 2. 73
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD 2023-2026 Kabupaten Tangerang

Pada gambar diatas terlihat bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100% di tahun 2018 hingga 2022.

15) Penderita Diare Yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani dihitung dari persentase jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama. Menurut data dari dinas Kesehatan di bawah seluruh penderita diare telah ditangani dari tahun 2018 hingga tahun 2022.



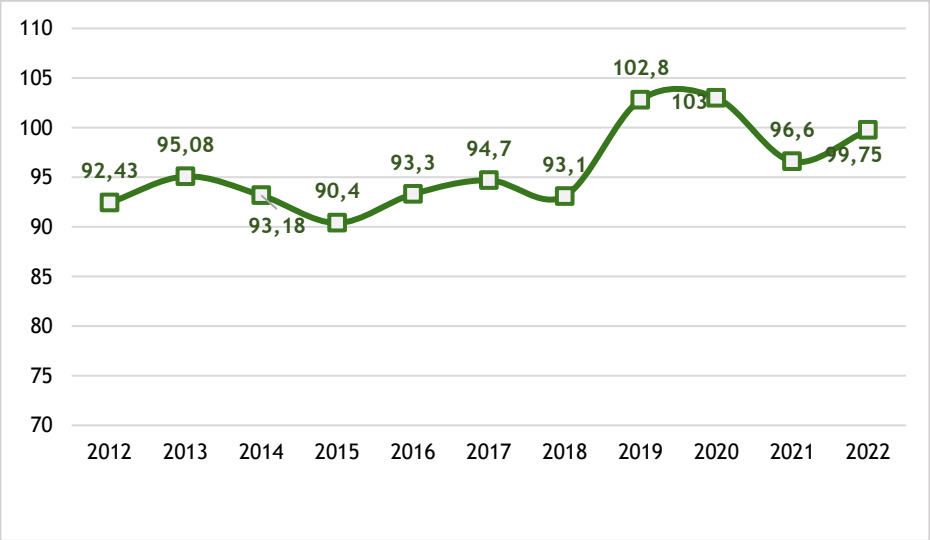
Gambar 2. 74
Penderita Diare Yang Ditangani (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD 2023-2026 Kabupaten Tangerang

16) Angka Kejadian Malaria

Penyakit Malaria adalah suatu jenis infeksi menular yang tersebar melalui gigitan nyamuk. Pada tahun 2018 – 2022 tidak ditemukan kejadian malaria di Kabupaten Tangerang menurut data dari Dinas Kesehatan. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah bebas dari kejadian malaria.

17) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merujuk pada persentase bayi yang menerima perawatan kesehatan sesuai dengan standar yang diberikan oleh dokter, bidan, atau perawat dengan kompetensi klinis di suatu wilayah kerja setidaknya sebanyak 4 kali dalam periode tertentu. Kunjungan bayi ini mencakup pelayanan kesehatan rutin seperti tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI eksklusif dan dini, serta pencegahan infeksi melalui perawatan mata, tali pusat, kulit, dan imunisasi. Cakupan kunjungan bayi ini mencakup bayi yang berusia antara 29 hari hingga 11 bulan, dan dapat dilakukan di berbagai tempat seperti sarana pelayanan kesehatan (seperti polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit), atau melalui kunjungan petugas ke rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan, dan sejenisnya.

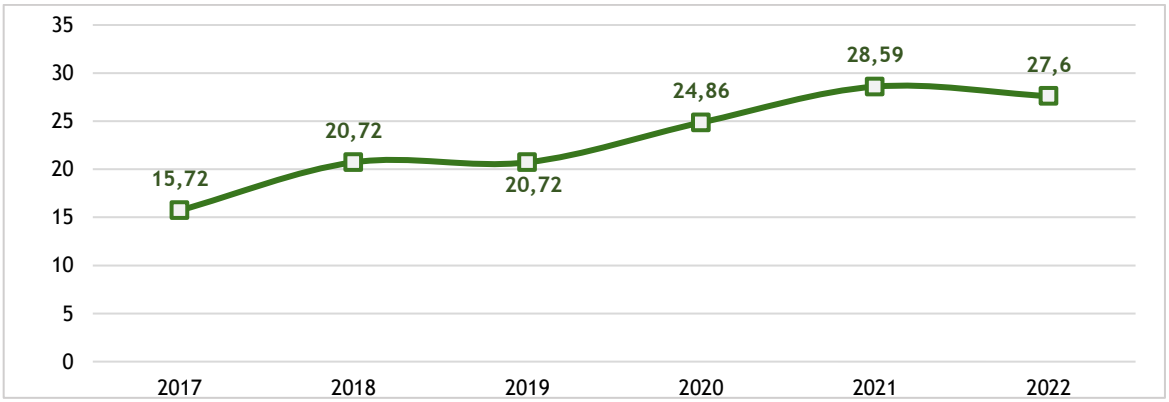


Gambar 2. 75
Cakupan Kunjungan Bayi (%)
*Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018, R*PD Kabupaten Tangerang 2023-2026, dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Cakupan kunjugan bayi cenderung fluktuatif pada 10 tahun terakhir dengan capaian terakhir mendekati 100 persen pada tahun 2022. Peningkatan cakupan kunjungan bayi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan bayi.

18) Cakupan Puskesmas

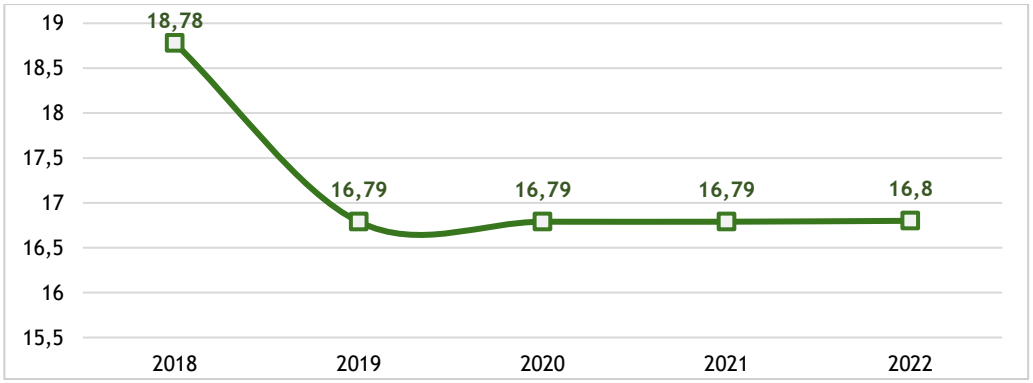
Cakupan puskesmas merupakan persentase perbandingan antara jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Peningkatan cakupan puskesmas perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap layanan Kesehatan. Pada tahun 2022 cakupan puskesmas di Kabupaten Tangerang adalah 27,6% dengan kecenderungan cakupan meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut adalah rincian cakupan puskesmas pada tahun 2017-2022.



Gambar 2. 76
Cakupan Puskesmas (%) Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022 (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan 2019-2023 dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

19) Cakupan Pembantu Puskesmas

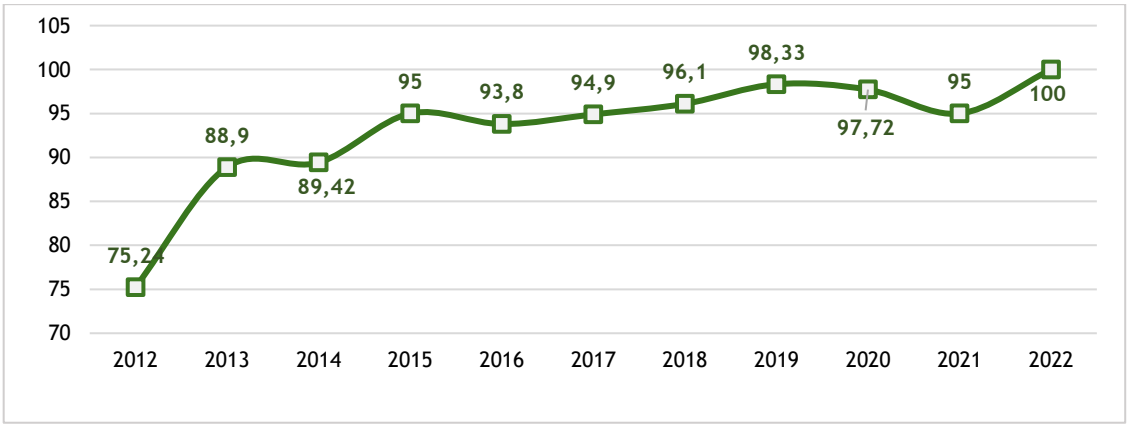
Cakupan pembantu puskesmas merupakan persentase perbandingan antara jumlah puskesmas pembantu terhadap jumlah seluruh desa. Cakupan pembantu puskesmas merujuk pada jumlah penduduk atau wilayah yang mendapat pelayanan dari seorang tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan dokter untuk melaksanakan tugas medis di puskesmas. Cakupan pembantu puskesmas cenderung stagnan dalam 4 tahun terakhir yang dapat disebabkan kecenderungan jumlah petugas pembantu puskesmas yang tidak bertambah. Grafik di bawah merupakan persentase cakupan pelayanan pembantu puskesmas di Kabupaten Tangerang Tahun 2018 – 2022.



Gambar 2. 77
Cakupan Pembantu Puskesma Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

20) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 merupakan persentase perbandingan antara jumlah ibu hamil yang memperoleh antenatal K4 (4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan) terhadap jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini penting untuk mengukur upaya peningkatan Kesehatan ibu dan bayi. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sudah mencapai 100 persen pada tahun 2022. Berikut merupakan grafik perkembangan cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2012 – 2022.



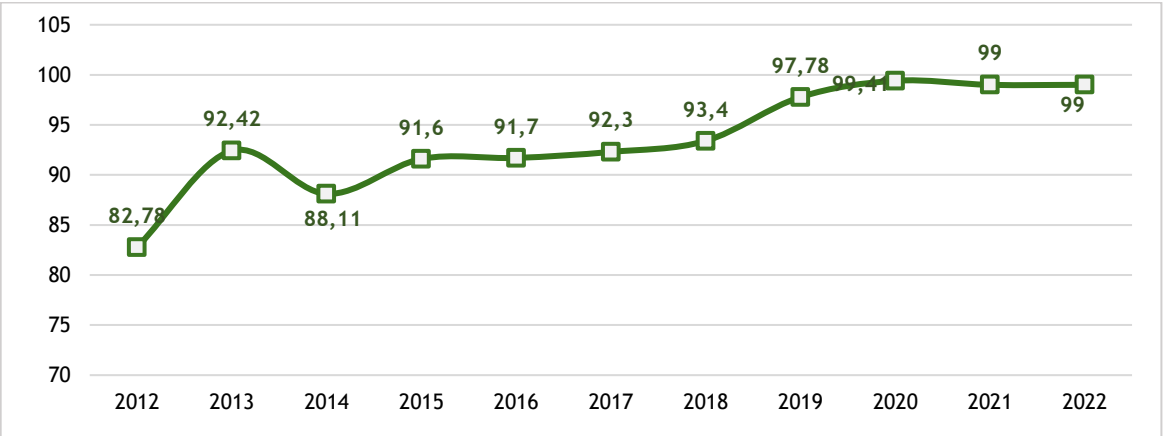
Gambar 2. 78
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026

21) Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang- kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan (Kemenkes RI, 2017). Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal 3 kali dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. KF 1 : Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan
2. KF 2 : Kunjungan nifas kedua dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8- 14 hari)
3. KF 3 : Kunjungan nifas ketiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36-42 hari)

Berikut adalah capaian pelayanan nifas di Kabupaten Tangerang pada tahun tahun 2012 – 2022.



Gambar 2. 79
Cakupan Pelayanan Nifas
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026

Pelayanan nifas meningkat dalam kurun waktu sepuluh waktu terakhir dengan 99 persen nifas sudah terlayani. Cakupan pelayanan ini juga memiliki pencapaian dengan tren yang cenderung meningkat tiap tahunnya.

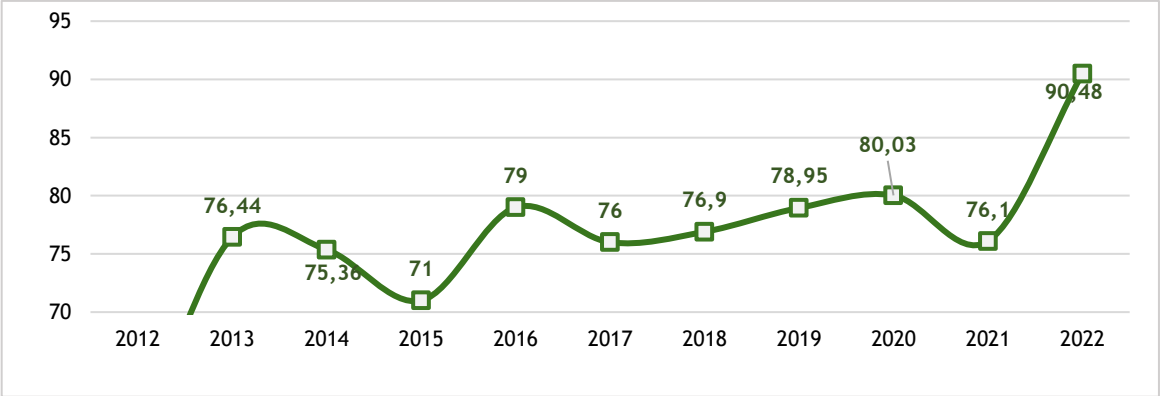
22) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Yang Ditangani

Neonatus adalah bayi yang baru lahir 28 hari pertama kehidupan (Rudolph,. 2015). Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat lahir < 2.500 gram), sindrom gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).

Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbesar adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Komplikasi ini sebetulnya dapat dicegah dan ditangani. Namun terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan, keadaan sosial ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik, terlambatnya deteksi dini dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan.

Penanganan neonatal dengan komplikasi adalah penanganan terhadap neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/kegawatdaruratan yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) terlatih baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan standar MTBM, manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, manajemen Bayi Berat Lahir Rendah, pedoman pelayanan neonatal esensial di tingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya.

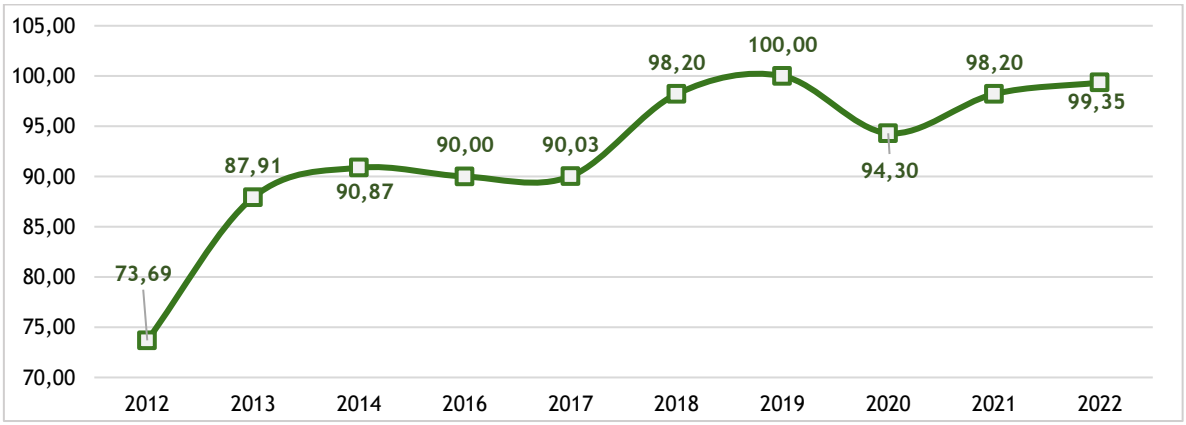
Cakupan penanganan neonatal dengan komplikasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2021-2022 menjadi sebesar 90,48 persen. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani merupakan neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi dihitung berdasarkan 15 persen dari jumlah bayi baru lahir. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Peningkatan cakupan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 -2022.



Gambar 2. 80
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Yang Ditangani
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026

23) Cakupan Pelayanan Anak Balita

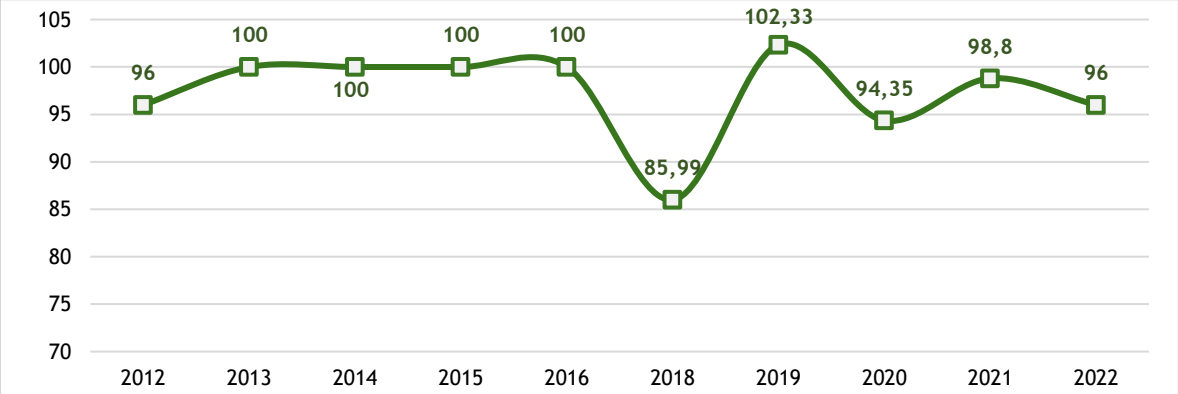
Anak balita adalah anak berumur 12–59 bulan. Setiap anak umur 12–59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per tinggi/panjang badan (BB/TB). Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase atau proporsi anak-anak yang berusia antara 1 hingga 5 tahun yang menerima layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk di dalamnya pelayanan imunisasi, pemeriksaan kesehatan penyaringan (skrining), dan perawatan untuk masalah kesehatan yang mungkin terjadi. Maksud dari pencapaian cakupan anak balita adalah untuk menjamin bahwa anak-anak balita memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan yang sesuai dan efektif, sambil membantu mengawasi pertumbuhan serta perkembangan mereka. Ini juga berkontribusi dalam menilai persyaratan akan tenaga medis dan sumber daya lain yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang cocok dan bermanfaat bagi anak-anak balita.



Gambar 2. 81
Cakupan Pelayanan Anak Balita (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026

24) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin. Berikut merupakan capaian pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang:

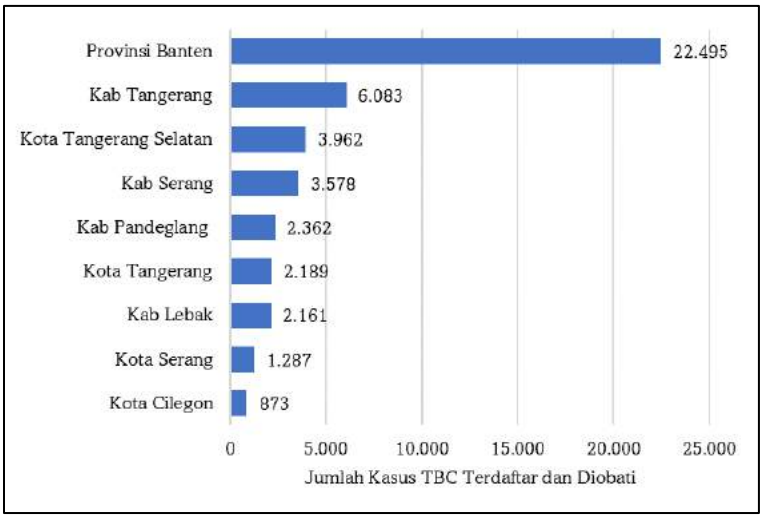


Gambar 2. 82
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026

Angka pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang adalah fluktuatif dengan capaian yang sama pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2012.

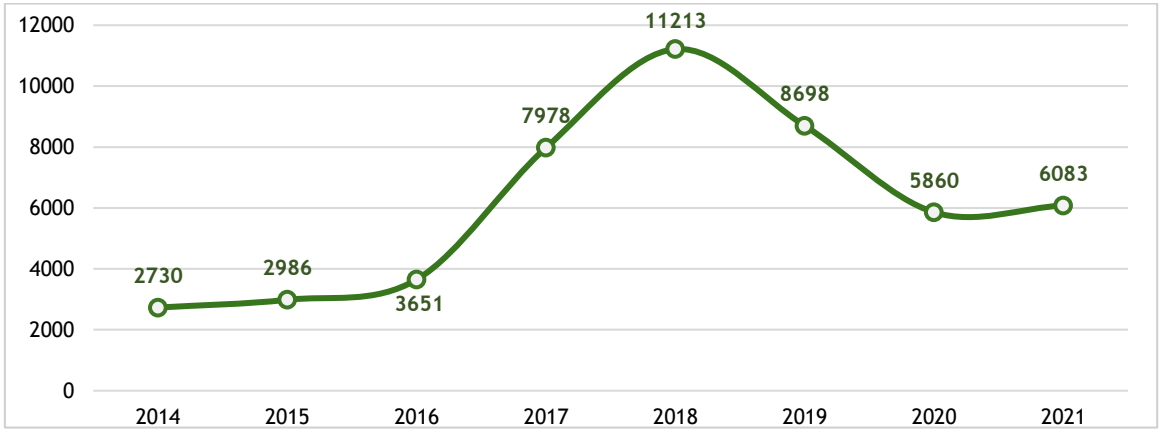
25) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang bagian paru-paru manusia, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif. Untuk mengetahui capaian daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis adalah melalui Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA atau Case Detection Rate dan Treatment Success Rate. Indikator lain adalah Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk); tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk (case fatality rate); Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS; dan Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS.



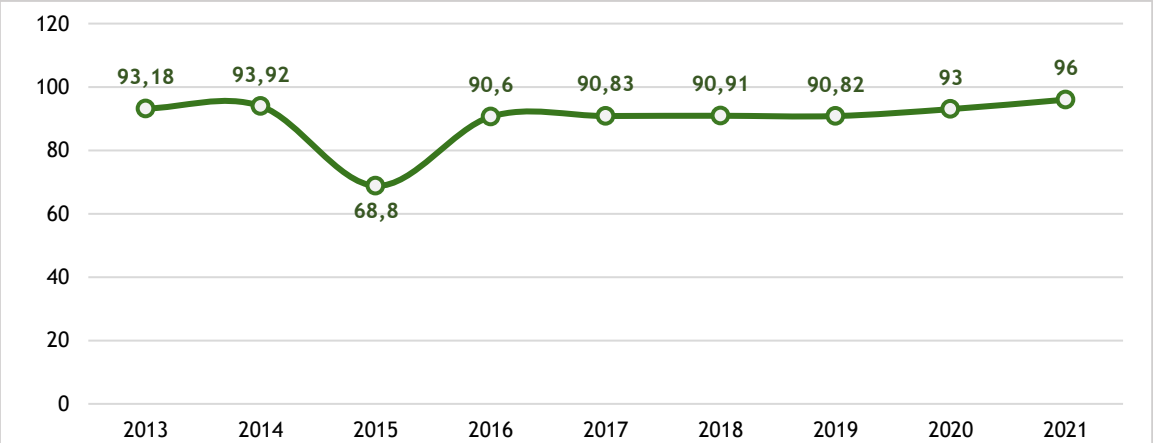
Gambar 2. 83
Perbandingan Jumlah Kasus TBC Terdaftar dan Diobati Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2021

Jumlah kasus TBC terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang (27,04%). Jumlah kasus TBC di Kabupaten Tangerang yang tercatat dan diobati pada tahun 2021 adalah sejumlah 6.083 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian Jumlah Kasus Tuberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 – 2021.



Gambar 2. 84
Jumlah Kasus Tuberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 – 2021.
Sumber: Bid P2P Dinas Kesehatan dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Terjadi peningkatan kasus TBC di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Angka kesembuhan dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan treatment success rate dari penderita TBC di Kabupaten Tangerang. Berikut rincian Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021



Gambar 2. 85
Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021
Sumber: Bid P2P Dinas Kesehatan dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

26) HIV dan AIDS

Prevalensi HIV/AIDS merupakan persentase jumlah pasien HIV/AIDS terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Tabel di bawah ini menunjukkan kasus penyakit HIV/AIDS tahun 2017-2021 menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten. Menurut tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah penambahan kasus baru dan kasus kumulatif penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang adalah paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten di tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini harus menjadi perhatian karena salah satu target Indonesia yang ditetapkan Kementerian Kesehatan adalah menuju three zero HIV/AIDS 2030 yakni nol kasus infeksi baru HIV, nol kasus kematian terkait AIDS dan nol stigma-diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Berikut merupakan rincian penambahan kasus baru dan kasus kumulatif HIV/AIDS di Provinsi Banten.

Tabel 2. 23
Jumlah Penambahan Kasus Baru dan Kasus Kumulatif Penyakit HIV/AIDS Tahun 2017-2021

Kabupaten Kota	Jumlah Penambahan Kasus Baru dan Kasus Kumulatif Penyakit HIV/AIDS						
	2017	2018	2019	2020		2021	
				(+)	Kumulatif	(+)	Kumulatif
Kab. Pandeglang	166	173	175	37	212	8	220
Kab. Lebak	124	133	139	89	228	40	268
Kab. Tangerang	413	480	532	618	1150	88	1238
Kab. Serang	213	245	245	76	321	24	345
Kota Tangerang	186	209	627	386	1013	56	1069
Kota Cilegon	512	567	209	80	289	19	308
Kota Serang	145	156	183	54	237	10	247
Kota Tangerang Selatan	180	183	163	194	357	26	383
Provinsi Banten	1939	2146	2273	1534	3807	271	4078

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2018-2022 (diolah)

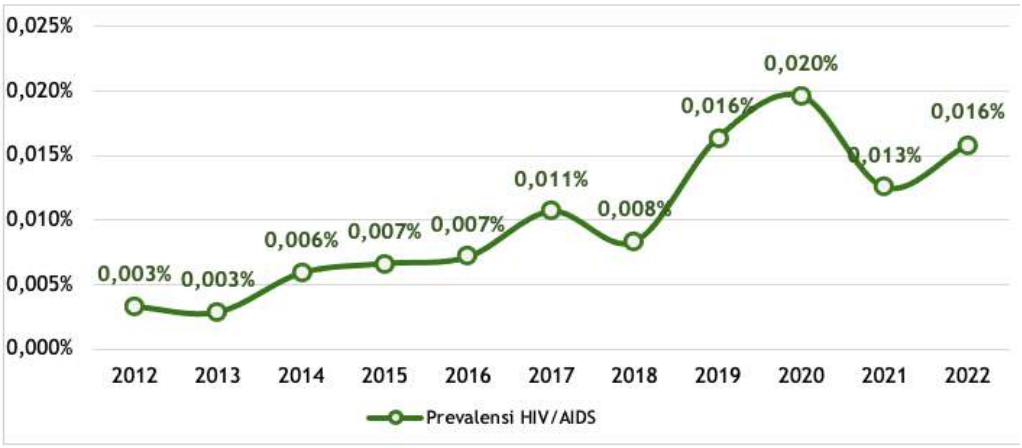
Prevalensi penderita HIV/AIDS adalah jumlah penderita HIV/AIDS dibandingkan dengan total jumlah populasi di wilayah tersebut pada kurun waktu tertentu. Prevalensi ini menjadi indikator kualitas Kesehatan masyarakat. Kabupaten Tangerang mengalami

peningkatan prevalensi tiap Berikut merupakan rincian prevalensi HIV/AIDS menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2021.

Tabel 2. 24
Prevalensi HIV/AIDS dari Populasi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Prevalensi HIV/AIDS dari Populasi (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Pandeglang	0,014%	0,014%	0,014%	0,017%	0,017%
Kab. Lebak	0,010%	0,010%	0,011%	0,016%	0,019%
Kab. Tangerang	0,012%	0,013%	0,014%	0,035%	0,038%
Kab. Serang	0,014%	0,016%	0,016%	0,020%	0,021%
Kota Tangerang	0,009%	0,010%	0,028%	0,053%	0,056%
Kota Cilegon	0,120%	0,131%	0,048%	0,066%	0,070%
Kota Serang	0,022%	0,023%	0,027%	0,034%	0,035%
Kota Tangerang Selatan	0,011%	0,011%	0,009%	0,026%	0,028%
Provinsi Banten	0,016%	0,017%	0,018%	0,032%	0,034%

Sumber: Hasil olahan, 2023



Gambar 2. 86
Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022
Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026, diolah

27) Universal Health Coverage

Data yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan hingga akhir Desember 2021 menunjukkan bahwa dari total penduduk Kabupaten Tangerang yang mencapai 3.105.042 jiwa, sekitar 83,21%, atau sekitar 2.583.755 jiwa, telah bergabung sebagai peserta dalam program JKN KIS/BPJS Kesehatan (RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023)

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Tingkat kemantapan jalan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa tinggi kesiapan jalan dan kondisi jalan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga, kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan.
b. Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.

c. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan jalan.
d. Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak dalam ukuran besar, dan terkelupas cukup dalam, disertai dengan kerusakan lapis fondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

Proporsi jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tangerang diperlihatkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 25
Proporsi dan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (km)	566,21	569,27	770,77	723
Panjang Jalan Total (km)	992,61	992,61	992,61	992,61
Persentase (%)	57%	57,3%	77,7%	72,9%

Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2023

Proporsi panjang jalan di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren yang meningkat. Jika dilihat dari presentase, jalan yang baik berhasil naik dari 57% pada tahun 2019 menuju 72,9% pada tahun 2022. Angka proporsi jalan dalam kondisi baik memperlihatkan seberapa panjang jalan yang sudah mencapai kelayakan. Jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat harus mendapatkan perbaikan segera demi menjaga keselamatan berkendara.

2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan penduduk memperlihatkan seberapa besar kapasitas jalan dalam menampung jumlah pergerakan. Rasio ini menghitung panjang jalan dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Tangerang. Hasilnya akan menjelaskan kemampuan 1 km jalan untuk memberikan layanan kepada sejumlah penduduk Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Angka rasio di Kabupaten Tangerang meningkat dari 2,61 pada tahun 2019 hingga 2,96 pada tahun 2022, hal ini menunjukkan adanya peningkatan layanan aksesibilitas jalan bagi masyarakat.

Tabel 2. 26
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Total (km)	992,61	992,61	992,61	992,61
Jumlah Penduduk	3.800.787	3.245.619	3.293.533	3.352.472
Rasio	1:3.829	1:3.270	1:3.318	1:3.377

Sumber: opendata.tangerangkab.go.id; Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2023 (diolah)

3) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang

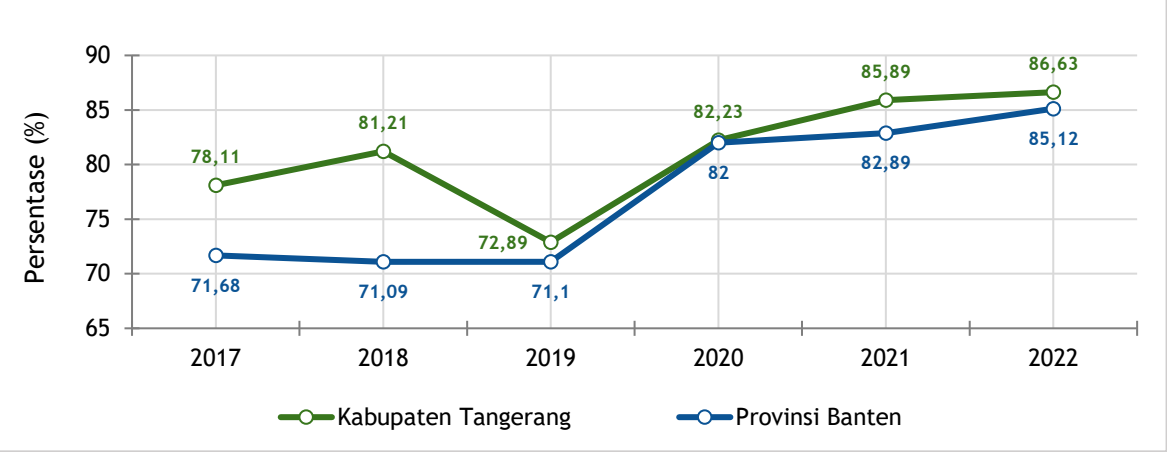
memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga yang dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik di perkotaan maupun perdesaan. Angka yang tercatat dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang baik dalam pemenuhan akses sanitasi layak bagi rumah tangga. Dengan angka persentase sebesar 86,63 pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang sudah berada di atas angka persentase Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan hampir semua rumah tangga di Kabupaten Tangerang sudah terlayani oleh fasilitas sanitasi yang layak. Upaya pemerintah di masa mendatang adalah bagaimana pemerintah dapat meningkatkan layanan rumah tangga secara penuh (100%).

Tabel 2. 27
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	15,23	23,42	19,89	50,15	49,11	62,14
Kabupaten Lebak	23,90	20,07	32,39	63,35	56,82	67,40
Kabupaten Tangerang	78,11	81,21	72,89	82,23	85,89	86,63
Kabupaten Serang	66,99	59,42	59,50	77,57	80,34	82,38
Kota Tangerang	93,26	93,77	95,40	95,10	94,94	94,43
Kota Cilegon	91,77	90,72	95,17	94,38	97,07	87,72
Kota Serang	77,07	78,15	81,99	87,34	90,76	91,55
Kota Tangerang Selatan	96,56	94,68	97,30	97,45	98,84	97,56
Provinsi Banten	71,68	71,09	71,10	82,00	82,89	85,12

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka, 2023



Gambar 2. 87
Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

4) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, definisi irigasi disebutkan sebagai usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M.2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi daerah. Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam menjaga kualitas sistem irigasi daerah. Pada tahun 2020, tercatat hanya ada 6,05% persentase irigasi kabupaten yang berada dalam kondisi baik. Persentase ini kemudian meningkat pesat menjadi 27,7% pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 69,94 pada tahun 2022.

Tabel 2. 28
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	6,05%	27,70%	69,94%

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

5) Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak

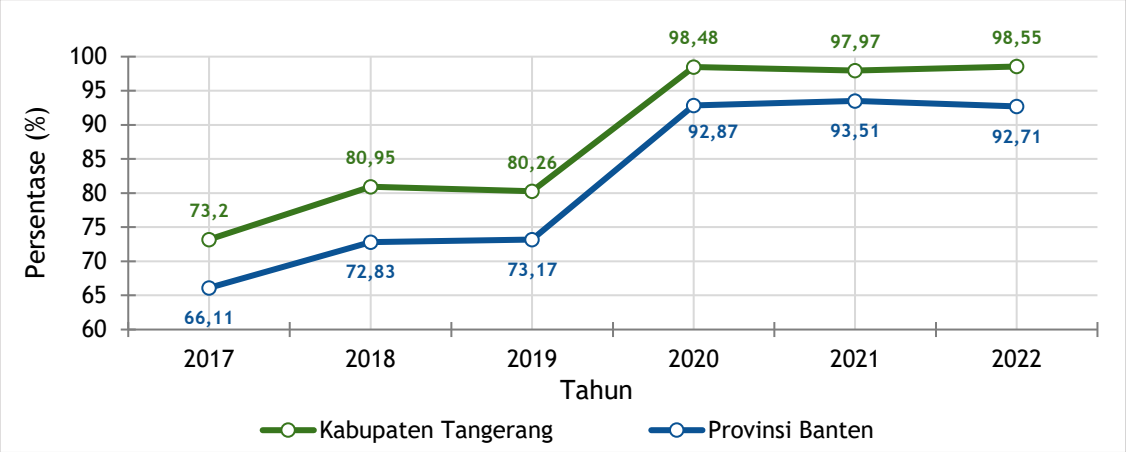
Menurut Badan Pusat Statistik, air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang sejalan dengan Provinsi Banten dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Dengan persentase sebesar 98,55 pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dalam pemenuhan air minum layak di Provinsi Banten setelah Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang Selatan. Dengan hasil angka tersebut diketahui hampir semua rumah tangga di Kabupaten Tangerang sudah terlayani oleh fasilitas sanitasi yang layak. Upaya pemerintah di masa mendatang adalah bagaimana pemerintah dapat meningkatkan layanan rumah tangga terhadap air minum layak secara penuh (100%).

Tabel 2. 29
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Pandeglang	39,50	41,93	45,96	75,83	82,01	77,27
Kab. Lebak	35,38	44,09	37,97	73,49	73,32	73,27
Kab. Tangerang	73,20	80,95	80,26	98,48	97,97	98,55
Kab. Serang	59,20	65,73	68,34	89,95	92,33	91,91
Kota Tangerang	78,93	88,64	89,60	98,37	98,00	95,58
Kota Cilegon	80,85	83,23	88,85	94,98	98,72	99,08
Kota Serang	70,92	71,97	80,96	99,10	98,38	97,61
Kota Tangerang Selatan	77,46	81,85	78,33	99,08	99,22	98,64
Provinsi Banten	66,11	72,83	73,17	92,87	93,51	92,71

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka, 2023



Gambar 2. 88
Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022
Sumber: Provinsi Banten dalam Angka, 2023

6) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam suatu wilayah. Amanat Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa luasan ruang terbuka hijau adalah minimal 30 persen dari luas wilayah, meliputi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Rasio RTH per satuan wilayah beserta hak-haknya memperlihatkan seberapa besar pemerintah dapat memenuhi minimal kebutuhan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Kabupaten Tangerang sendiri saat ini telah memenuhi sekitar 17,05% rasio ruang terbuka pada tahun 2021. Angka ini meningkat dari 3 tahun sebelumnya yang hanya mencapai 13% pada tahun 2018. Pemerintah perlu meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau masyarakat sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah.

Tabel 2. 30
Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB	13	16,61	16,61	17,05

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

7) Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebuah perizinan yang harus diajukan dan dimiliki oleh pemilik resmi bangunan untuk mendirikan dan mengolah bangunan sesuai dengan berbagai persyaratan tertentu. Rasio bangunan ber-IMB per jumlah bangunan menunjukkan seberapa banyak bangunan yang sudah memiliki izin terbangun di suatu wilayah. Apabila rasio daerah mencapai 100%, maka dapat diketahui bahwa seluruh bangunan yang terbangun di daerah sudah memiliki izin terbangun. Kabupaten Tangerang telah mencapai rasio sebesar 99,35% pada tahun 2022. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang mengalami stagnansi di angka 99,11%.

Tabel 2. 31
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan (%)	99,11	99,11	99,11	99,11	99,35

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

8) Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW memperlihatkan seberapa besar realisasi RTRW yang dibandingkan dengan rencana peruntukannya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan dengan berbagai persyaratan dan tujuan tertentu. Nilai ketaatan memperlihatkan bagaimana keseusaian realisasi pembangunan dengan apa yang sudah direncakanan sebelumnya. Kabupaten Tangerang memiliki capaian dengan nilai 85-90 ketaatan terhadap dokumen RTRW-nya.

Tabel 2. 32
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ketaatan Terhadap RTRW	90	85	90	90	90

Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2023

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Menurut Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2019, rumah tangga yang diklasifikasikan sebagai hunian/rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni yang dinilai dari 4 (empat) kriteria, yaitu:

a. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per kapita (*sufficient living space*)
b. Memiliki akses terhadap air minum layak
c. Memiliki akses terhadap sanitasi layak
d. Ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/ seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/ parket/vinyl/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semen/bata merah.

Angka rumah layak huni di Kabupaten Tangerang menjadi urusan yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2020 diketahui hanya ada 63% rumah layak huni, yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sekitar 71%. Tren peningkatan ini harus dipertahankan demi mencapai target 100% rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 33
Persentase Kelayakan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Kabupaten/ kota	Status Perumahan									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Layak Huni	Tidak Layak Huni
Kab. Pandeglang	82,58	0,43	90,00	0,28	90,33	9,67	27,53	72,47	29,88	70,12
Kab. Lebak	85,17	0,08	90,29	0,83	89,52	10,48	40,57	59,43	34,89	65,11
Kab. Tangerang	97,46	0,00	98,56	0,55	98,17	1,83	63,38	36,62	71,80	28,20
Kab. Serang	92,73	0,11	96,97	0,00	96,08	3,92	64,00	36,00	70,02	29,98
Kota Tangerang	99,38	0,00	99,32	0,00	99,53	0,47	44,05	55,95	51,57	48,43
Kota Cilegon	99,42	0,00	99,61	0,00	99,90	0,10	82,93	17,07	88,42	11,58
Kota Serang	97,72	0,15	98,67	0,00	97,90	2,10	80,67	19,33	84,05	15,95
Kota Tangerang Selatan	99,89	0,00	99,68	0,00	99,44	0,56	67,56	32,44	68,73	31,27
Provinsi Banten	94,94	0,07	97,01	0,18	96,80	3,20	56,21	43,79	60,78	39,22

Sumber: Statistik Perumahan Provinsi Banten 2017 hingga 2021

Rumah layak huni di Kabupaten Tangerang selalu meningkat dari 2017 menuju 2019. Kemudian angka ini turun dengan pesat menjadi 63,38% pada tahun 2020 sebelum naik kembali pada tahun 2021 dengan angka 71,80%. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Tangerang di posisi ketiga persentase rumah layak huni di Provinsi Banten. Turunnya angka persentase pada tahun 2019-2020 diasumsikan terjadi karena adanya perubahan metode pengukuran dan klasifikasi rumah layak huni.

2) Persentase Areal Kawasan Kumuh

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pencegahan, penanganan, dan pengendalian kawasan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menciptakan ruang hidup dan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat.

Tabel 2. 34
Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Persentase Kawasan Kumuh	13,30%	30,71%	30,16%	29,66%

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2020, persentase kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang mengalami perubahan yang cukup besar. Persentase luasan

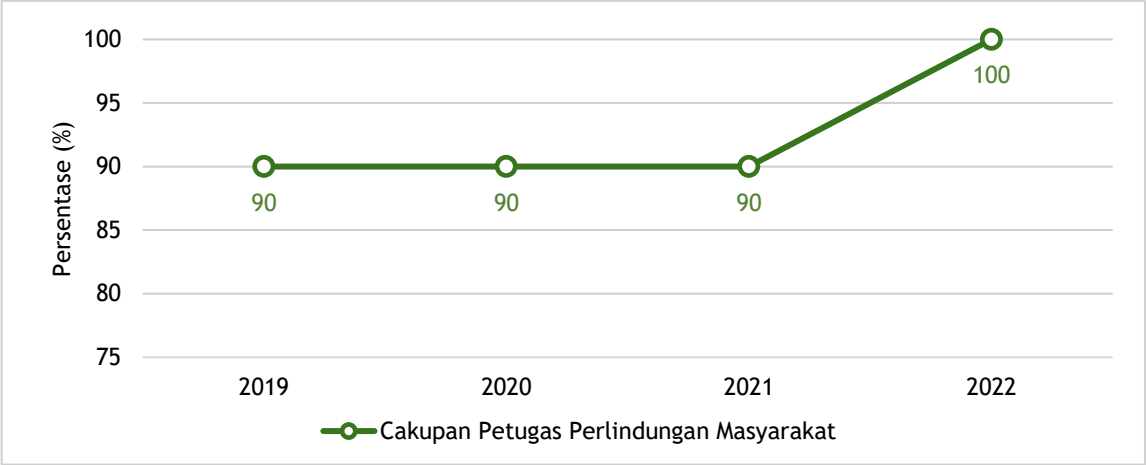
kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 tercatat sebesar 13,3% dan meningkat cukup tajam pada tahun 2019 menjadi 30,71%. Namun, angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 30,16% dan menjadi 29,66% pada tahun 2021.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dijabarkan melalui beberapa indikator: cakupan petugas perlindungan masyarakat, tingkat penyelesaian pelanggaran K3, cakupan pelayanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran, dan persentase penegakan perda. Indikator utama pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah Indeks Ketentraman dan Ketertiban. Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah 2,02. Capain tersebut meningkat 0,99 dari tahun 2017 yang capaian indeksnya adalah 1,03.

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

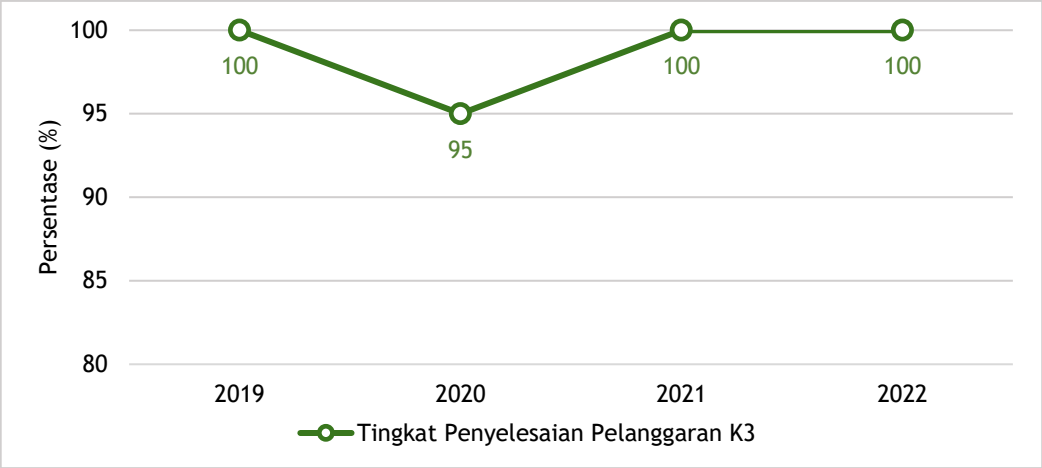
Cakupan petugas perlindungan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan petugas linmas di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2019 sampai tahun 2021, cakupan perlindungan masyarakat Kabupaten Tangeran adalah 90%. Perolehan angka tersebut disebabkan karena Kecamatan Pasar Kemis, Panongan, dan Gunung Kaler tidak memiliki petugas linmas. Saat tahun berikutnya (tahun 2022), tiga kecamatan tersebut telah memiliki petugas linmas, sehingga cakupan pelayanan petugas linmas menjadi 100%.



Gambar 2. 89
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang

2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)

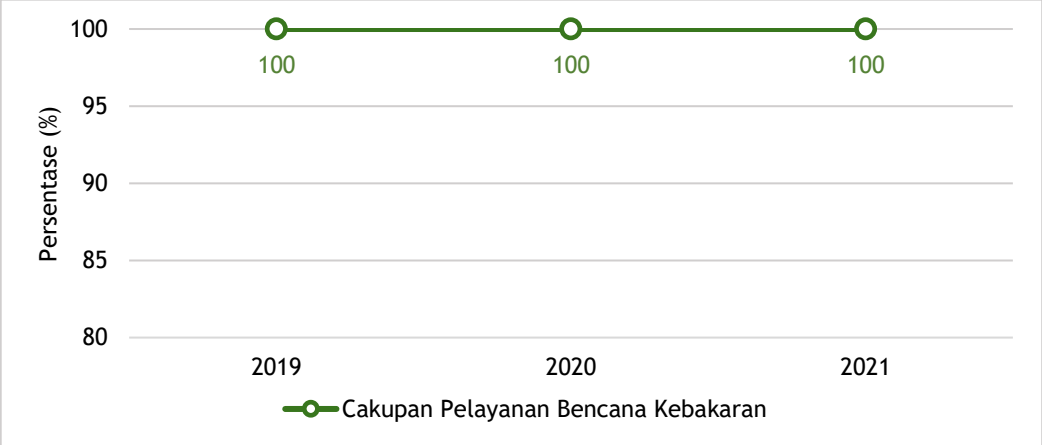
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Tangerang setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai tahun 2022 semuanya adalah 100%, kecuali di tahun 2020 (95%). Data tersebut bersumber dari LKPJ Bupati Kabupaten Tangerang dan Opendata Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 90
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Tangerang dan Opendata Kabupaten Tangerang

3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran di Kabupaten Tangerang hampir terjadi setiap tahunnya. Data dari Opendata Kabupaten Tangerang memperlihatkan bahwa kasus kebakaran di setiap kecamatan berhasil dipadamkan yang artinya cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah 100%.



Gambar 2. 91
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang

4) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajeman Kebakaran

Waktu yang dianggap tanggap dalam menyelesaikan kasus kebakaran adalah maksimal 15 menit. Dari semua kasus kebakaran yang tertangani tidak semuanya dapat ditangani dalam kurun waktu 15 menit. Tingkat waktu tanggap/persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit pada tahun 2019 adalah 0,08%. Hal tersebut terjadi karena banyaknya kasus kebakaran di tahun tersebut. Dua tahun berikutnya, waktu tanggap meningkat menjadi 100%.

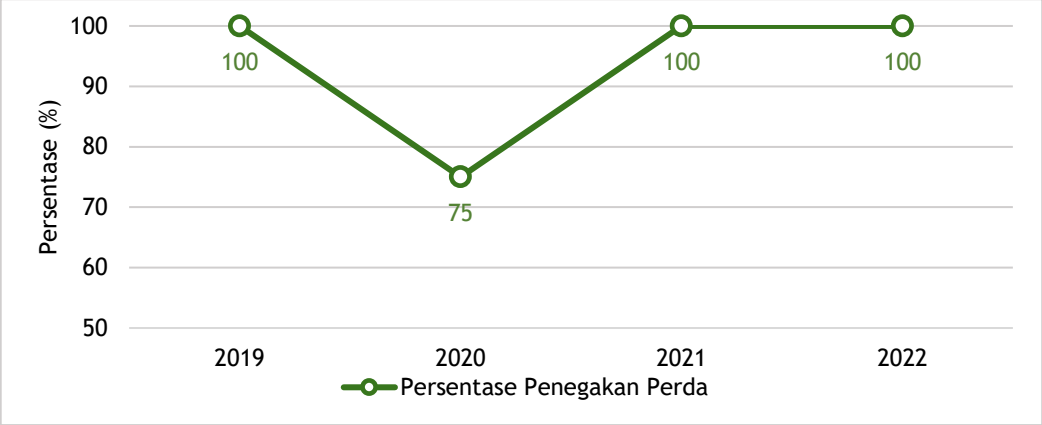
Tabel 2. 35
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Kebakaran (a)	304	86	46
Jumlah Kasus Kebakaran yang tertangani dalam Waktu Maksimal 15 menit (b)	23	24	46
Tingkat waktu tanggap (response time rate) ((b)/(a)) (%)	0,08	28	100

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang

5) Persentase Penegakan Perda

Perda yang telah disahkan tentunya harus ditegakan. Persentase penegakan Perda di Kabupaten Tangerang setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah 100%, kecuali di tahun 2020 (75%).



Gambar 2. 92
Persentase Penegakan Perda Tahun 2019-2022
Sumber: LKPJ Bupati Tangerang Tahun 2019-2022

F. Sosial

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

1) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial adalah persentase dari total jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga swasta. Bantuan sosial adalah bantuan finansial atau non-finansial yang diberikan kepada PMKS untuk membantu mereka mengatasi kesulitan

ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Berikut adalah data capaian penanganan PMKS di Kabupaten Tangerang tahun 2017 - 2021.

Tabel 2. 36
Capaian Penanganan PMKS di Kabupaten Tangerang Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PMKS	100.219	100.219	102.533	89.647	216.447
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial	42.700	129.470	131.555	172.370	549.619
Jumlah PMKS yang tertangani	41.079	122.858	127.343	124.841	21.396
Persentase PMKS yang Tertangani	96%	95%	97%	72%	4%
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial	42.700	129.470	131.555	172.370	549.619
Jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial	41.079	122.858	127.343	124.841	427.486
Persentase PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial yang menerima bantuan sosial	96%	95%	97%	72%	78%

Sumber: Data Sektoral Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Buku Statistik Sektoral dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2025

Capaian dari Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2017 namun trennya fluktuatif. Sedangkan presentase PMKS yang tertangani mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 yaitu hanya 4% dari PMKS yang tertangani sedangkan pada saat yang sama jumlah PMKS cenderung meningkat tiap tahunnya. Penanganan PMKS perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta upaya pemulihan sosial dari PMKS. Berikut merupakan sebaran PMKS di Kabupaten Tangerang menurut kecamatan di tahun 2021.

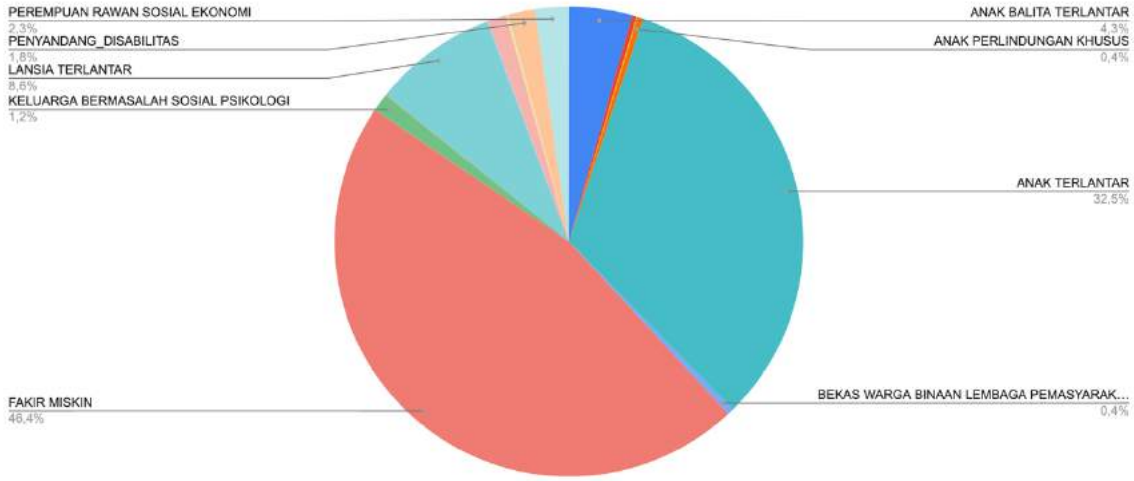
Tabel 2. 37
Jumlah PMKS dan Persentase Jumlah PMKS Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah PMKS	Persentase
Balaraja	4.782	2,52%
Cikupa	2.292	1,21%
Cisauk	4.135	2,18%
Cisoka	8.684	4,57%
Curug	1.726	0,91%
Gunung Kaler	8.994	4,73%
Jambe	3.775	1,99%
Jayanti	4.182	2,20%
Kelapa Dua	1.013	0,53%
Kemiri	8.327	4,38%
Kosambi	6.582	3,46%
Kresek	6.257	3,29%
Kronjo	8.172	4,30%
Legok	5.767	3,03%
Mauk	7.904	4,16%
Mekar Baru	8.416	4,43%
Mekarbaru	403	0,21%
Pagedangan	4.166	2,19%
Pakuhaji	14.343	7,54%
Panongan	4.378	2,30%
Pasar Kemis	3.607	1,90%
Pasarkemis	251	0,13%
Rajeg	12.860	6,76%
Sepatan	4.722	2,48%
Sepatan Timur	7.631	4,01%
Sindang Jaya	7.168	3,77%

Kecamatan	Jumlah PMKS	Persentase
Sindangjaya	371	0,20%
Solear	7.795	4,10%
Sukadiri	4.200	2,21%
Sukamulya	7.006	3,69%
Teluknaga	12.992	6,83%
Tigaraksa	7.207	3,79%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2022

Menurut tabel di atas, Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga, dan Rajeg adalah kecamatan dengan cakupan PMKS paling tinggi yaitu lebih dari 5% dari total PMKS dengan jumlah PMKS paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan berikut adalah rincian persentase dari PMKS menurut kategori PMKS



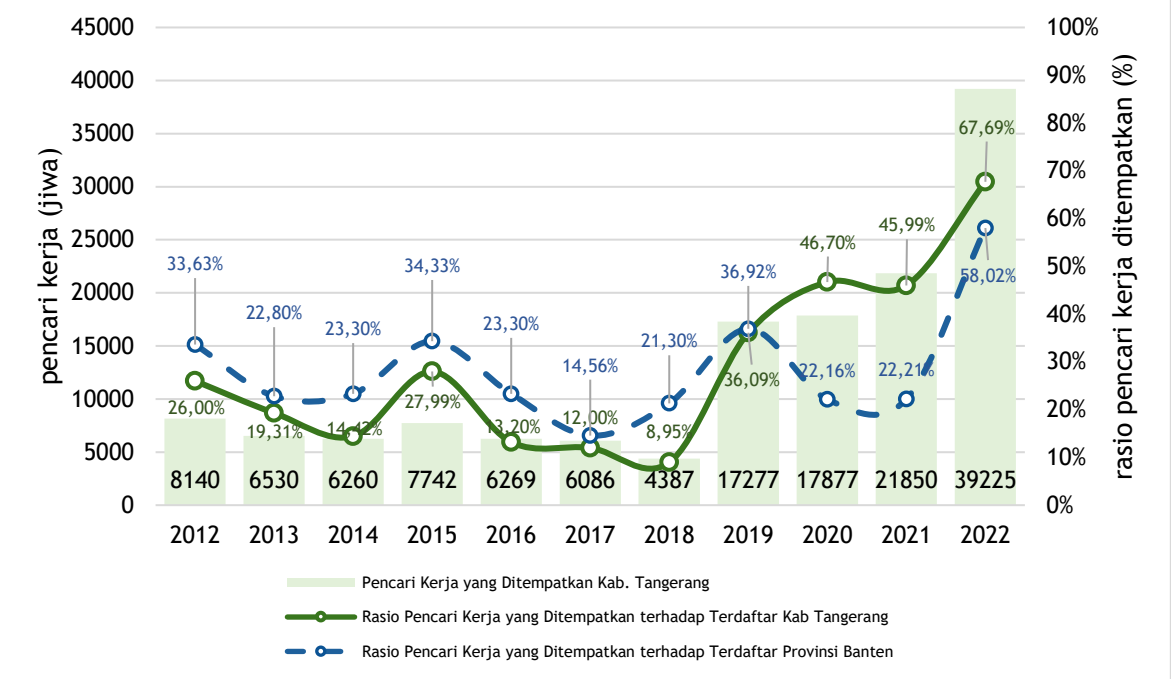
Gambar 2. 93
Persentase PMKS Menurut Kategori PMKS di Kabupaten Tangerang Tahun 2021
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Menurut grafik di atas maka dapat dilihat bahwa PMKS kategori keluarga fakir miskin mendominasi di Kabupaten Tangerang dengan meliputi 46,4% dari total PMKS yang ada kemudian diikuti dengan anak terlantar di angka 32,5%. Penanganan anak terlantar perlu untuk ditingkatkan karena akan berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak terhadap anak.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Pencari kerja yang ditempatkan



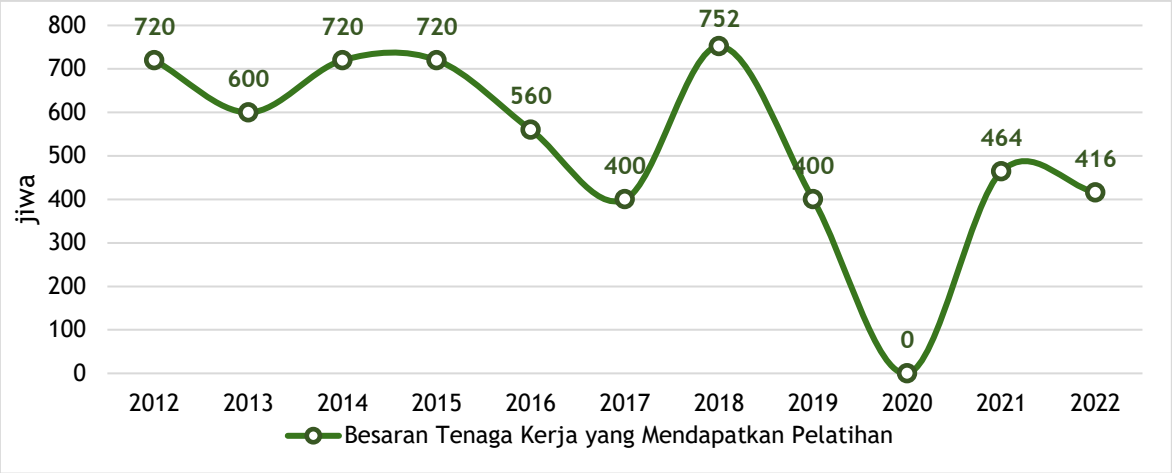
Gambar 2. 94
Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Tangerang dan Perbandingan Rasio Pencari Kerja Ditempatkan terhadap Terdaftar di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Diagram di atas menunjukkan pencari kerja yang ditempatkan dan rasio pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2021 di mana pencari kerja di Kabupaten Tangerang yang ditempatkan sebesar 39.225 jiwa dengan rasio ditempatkan sebesar 67,69%. Capaian tersebut di atas Provinsi Banten dengan rasio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 58,02%.

2) Kesejahteraan dan kompetensi tenaga kerja

Jaminan kesejahteraan dan pelatihan kompetensi tenaga kerja berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang (2017), jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2016 sebanyak 180.851 orang atau 34,85% dari total tenaga kerja yang ada sebanyak 518.876 orang.

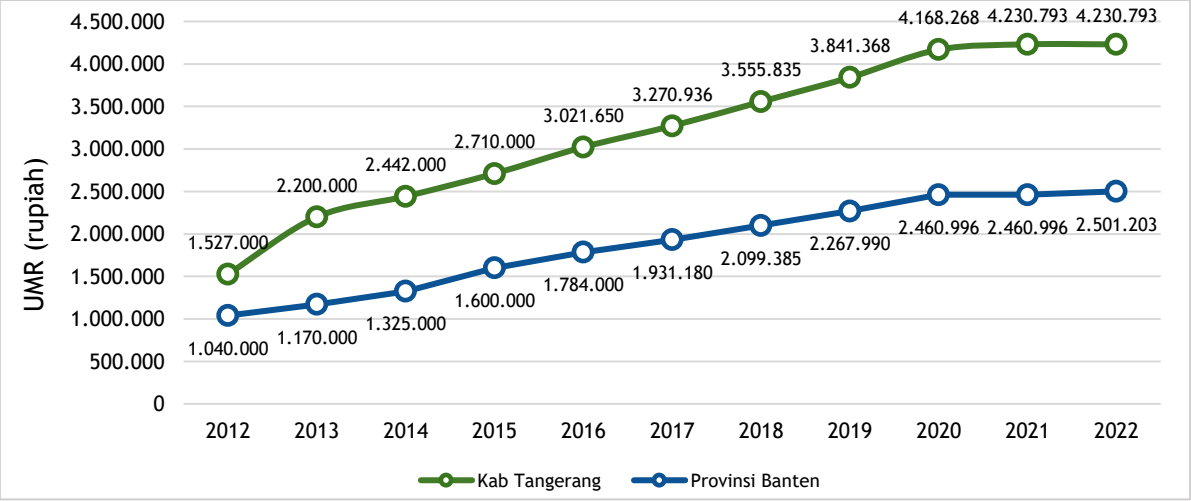


Gambar 2. 95
Besaran Tenga Kerja yang Dilatih di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2019
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang (diolah)

Jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2019 sebesar 400 orang. Capaian tersebut menurun dari tahun 2018 yang sebesar 752 orang. Capaian pada tahun 2022, tenaga kerja yang dilatih sebesar 416 orang. Maka dari itu diperlukan strategi untuk meningkatkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan.

3) Upah minimum regional

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan standar minimum oleh para pengusaha dalam pemberian upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar UMR ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi wilayah dan ketenagakerjaan, seperti tingkat inflasi, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya.



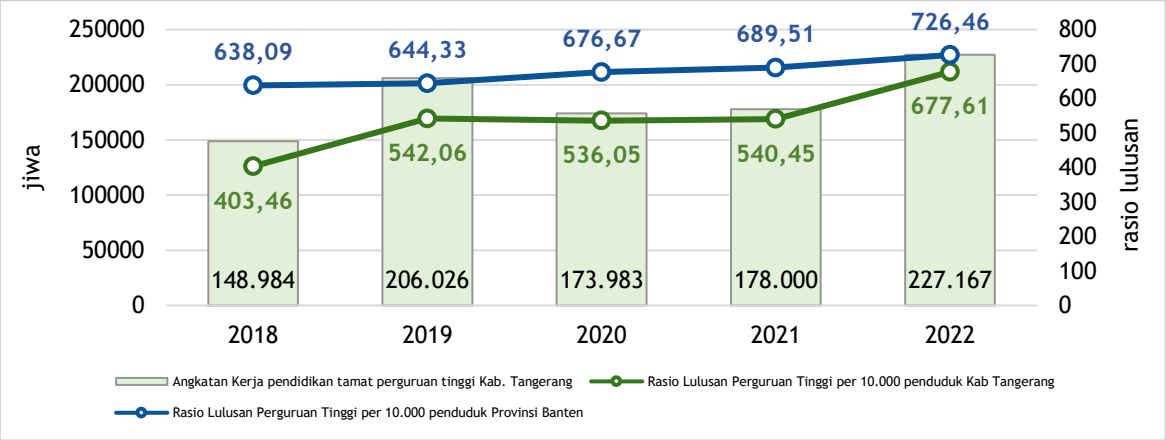
Gambar 2. 96
Perbandingan Upah Minimum Regional Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar di atas menunjukkan perbandingan UMR Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2022, UMR Kabupaten Tangerang

sebesar Rp4.230.793 dan lebih tinggi dibanding UMR Provinsi Banten yang sebesar Rp2.501.203. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Tangerang menjadi tertinggi keempat setelah Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

4) Rasio lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kualitas ketenagakerjaan yang diukur melalui perbandingan jumlah lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk per 10.000 penduduk.



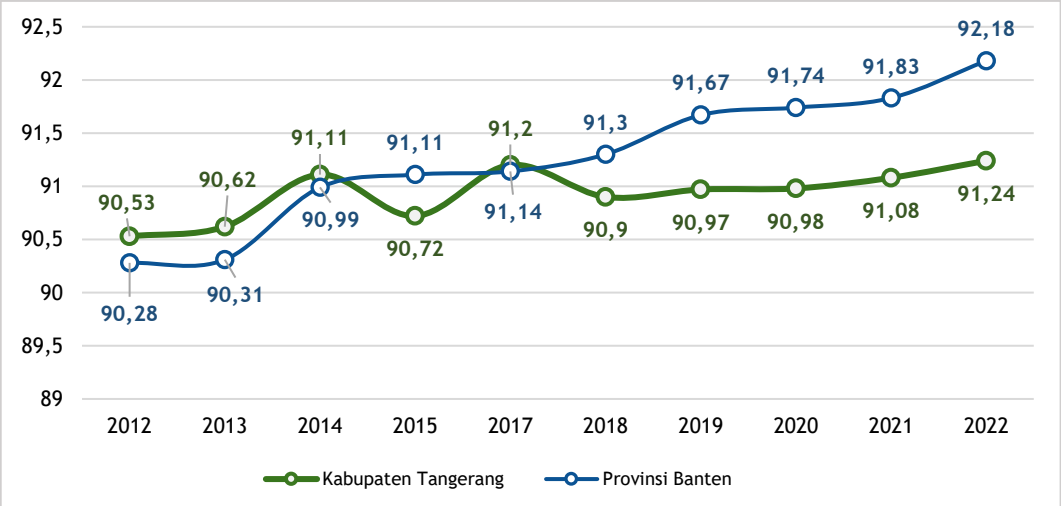
Gambar 2. 97
Angkatan Kerja Tamat Perguruan Tinggi dan Rasio Lulusan Perguruan Tinggi per 10.000 penduduk di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar di atas menunjukkan jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tamat perguruan tinggi serta rasio lulusan perguruan tinggi per 10.000 penduduk di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten tahun 2019-2022. Pada tahun 2022, rasio lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang mencapai 677,61 tiap 10.000 penduduk dan capaian ini lebih rendah dibanding Provinsi Banten yang mencapai 726,46 tiap 10.000 penduduk.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki

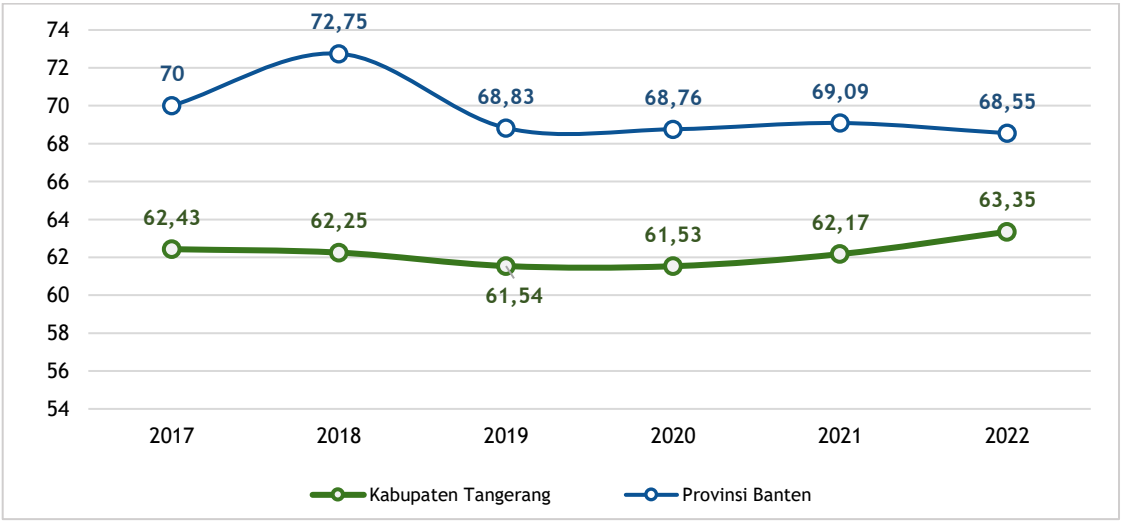


Gambar 2. 98
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012 – 2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2023

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang mengalami trend peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2018. Namun meskipun demikian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang selalu berada di bawah Provinsi Banten pada tahun 2012-2022.

2) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi dan politik. IDG fokus pada tingkat partisipasi dengan cara mengukur kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan.

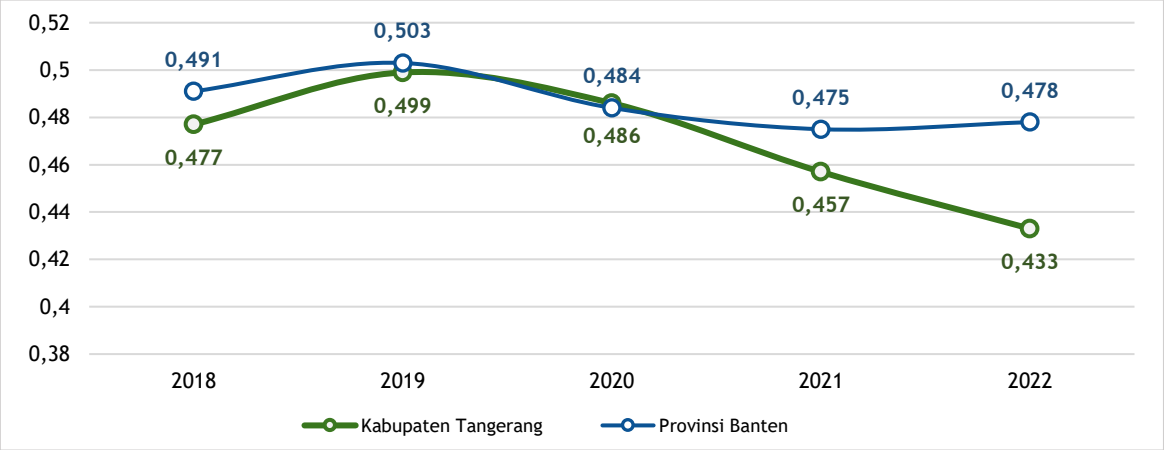


Gambar 2. 99
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2017 – 2022

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

3) Indeks Ketimpangan Gender

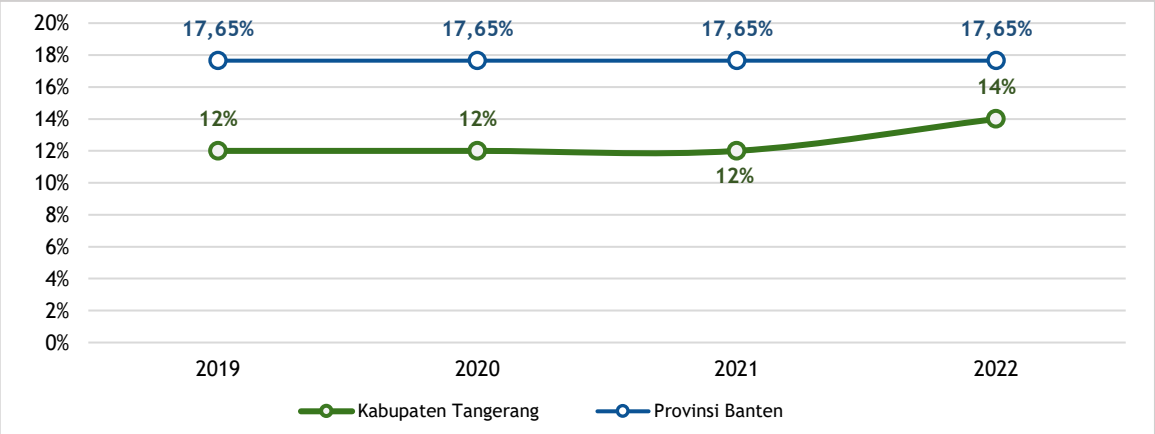
Indeks ketimpangan gender menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks ketimpangan gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja.



Gambar 2. 100
Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangaerang Tahun 2018 - 2022
Sumber : BPS Kabupaten Tagnerang

4) Keterlibatan Perempuan di Parlemen

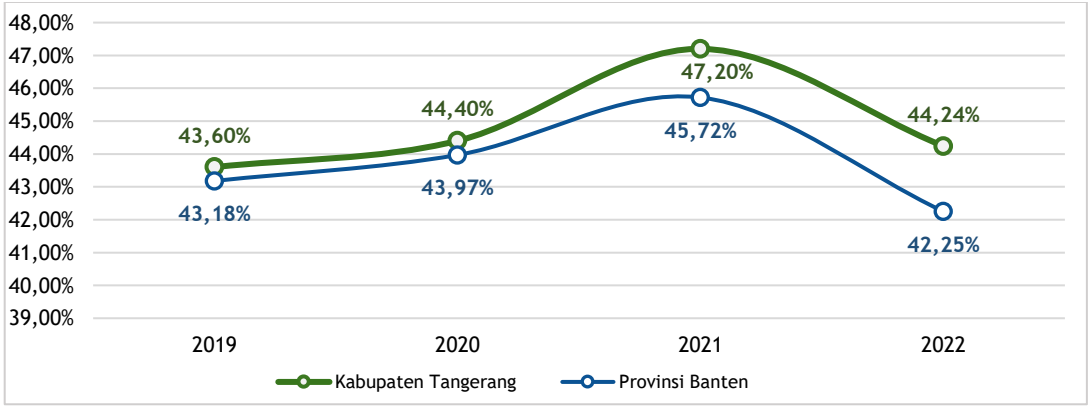
Partisipasi perempuan dalam komposisi parlemen merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai partisipasi perempuan dalam arena politik. Kehadiran aktif perempuan dalam ranah politik diharapkan dapat mendorong pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, dan upaya pembangunan yang lebih peka terhadap isu gender serta mengedepankan perlindungan anak.



Gambar 2. 101
Persentase Keterlibatan Perempuan di Parleen
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

5) Keterlibatan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan

Salah satu dimensi penyusun indeks pemberdayaan gender adalah pengambilan keputusan. Dimensi tersebut menggunakan indikator proporsi manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Salah satu dimensi penyusun indeks pemberdayaan gender adalah pengambilan keputusan. Dimensi tersebut menggunakan indikator proporsi manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Proporsi perempuan yang berperan aktif sebagai pengambil keputusan di Kabupaten Tangerang terus meningkat dari 43,6% pada tahun 2019 ke 47,2%% pada tahun 2021 kemudian menurun pada tahun 2022 di angka 44,24%.

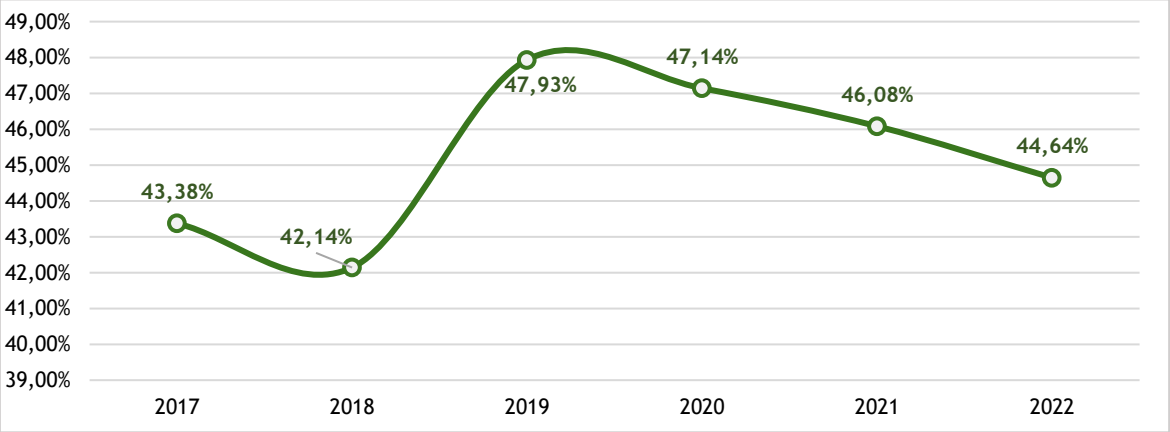


Gambar 2. 102
Proporsi Posisi Manajer, Administrasi, Profesional, dan Teknisi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2022
Sumber : BPS kabupaten Tangerang

6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Pembangunan sumber daya manusia juga berkaitan dengan peningkatan peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaaan karena perempuan dan laki – laki memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian seperti laki-laki (Melis, 2017). TPAK Perempuan menunjukkan kontribusi perempuan

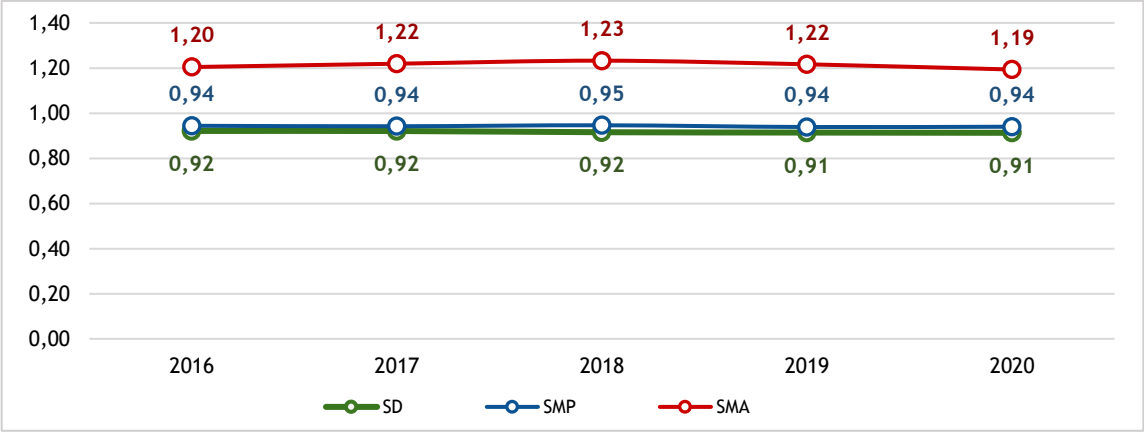
terhadap pertumbuhan ekonomi dan gambaran kesempatan kerja bagi perempuan. Berikut adalah rincian TPAK Perempuan di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 103
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022
Sumber : Kabupaten Tangerang dalam AngkaTPAK Perempuan di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan partisipasi yang cukup rendah yaitu di bawah angka lima pulh persen. Hal ini dapat berkaitan dengan pilihan perempuan untuk tidak bekerja atau kesempatan kerja perempuan yang masih kurang. Tingkat partisipasi perempuan di angkatan kerja juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan pendidikan perempuan dan kesetaraan gender dalam dunia kerja.Sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan partisipasi kerja oleh perempuan baik dari segi ketenagakerjaan, pendidikan, maupun kesetaraan gender.

7) Rasio APM Perempuan/Laki-laki menurut jenjang pendidikan

Rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan Terhadap Laki – laki menurut jenjang pendidikan menunjukkan perbedaan partisipasi pendidikan oleh perempuan dan laki – laki. Pengukuran kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan dapat dilihat dari rasio APM, yang mencerminkan peluang pendidikan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan manusia. Mengurangi ketidaksetaraan gender di semua tingkatan pendidikan akan meningkatkan posisi dan potensi baik perempuan maupun laki-laki. Berikut merupakan rincian rasio APM perempuan terhadap laki – laki di tingkat SD, SMP, dan SMA pada tahun 2016-2020.



Gambar 2. 104
Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020
Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Rasio APM perempuan dan laki – laki cenderung sama pada tahun 2016 – 2020 dengan APM perempuan lebih tinggi daripada laki – laki di tingkatan SMP dan SMA dengan perbedaan yang cukup tinggi daripada jenjang pendidikan lainnya. Rasio cenderung mendekati angka satu berarti partisipasi pendidikan dan kesempatan pendidikan oleh perempuan dan laki – laki cukup setara.

C. Pangan

Salah satu tolok ukur keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah optimalnya status gizi masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Status gizi dapat dipengaruhi beberapa aspek seperti produksi pangan, distribusi, dan konsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2017, terdapat 5 pilar utama perbaikan gizi masyarakat, yaitu:

- Perbaikan gizi masyarakat
- Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam
- Mutu dan keamanan pangan
- Perilaku hidup bersih dan sehat
- Koordinasi pembangunan pangan dan gizi

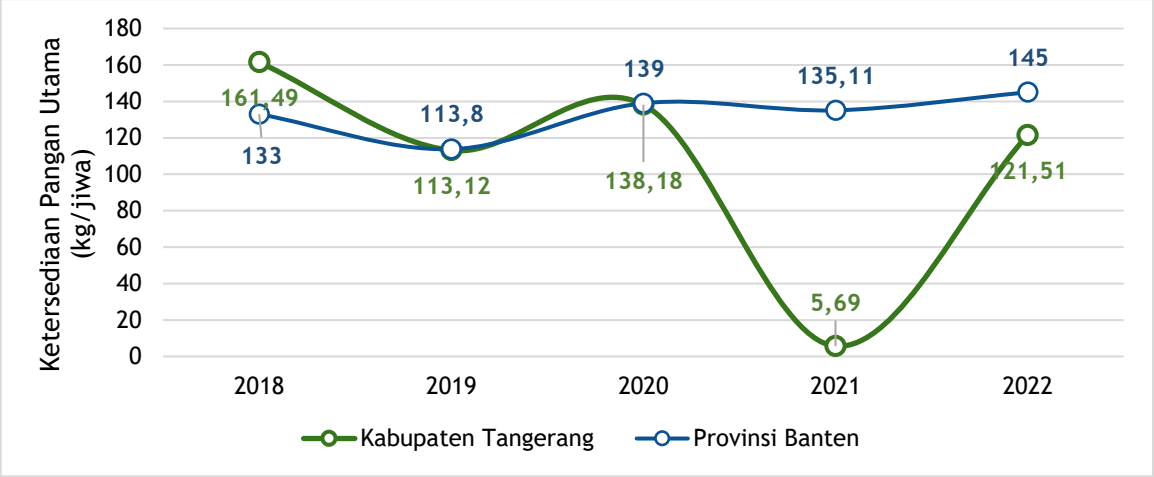
1) Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan merupakan kondisi ketersediaan Pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nilai ketersediaan pangan utama diketahui dari perbandingan antara rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun dengan jumlah penduduk.

Tabel 2. 38
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan (kg)	596.351.000	429.941.000	448.491.000	18.725.000	407.362.000
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.692.693	3.800.787	3.245.619	3.293.533	3.352.472
Ketersediaan Pangan Utama (kg/jiwa)	161,4949	113,1189	138,1835	5,685384	121,5109

Sumber: Hasil Olahan, 2023

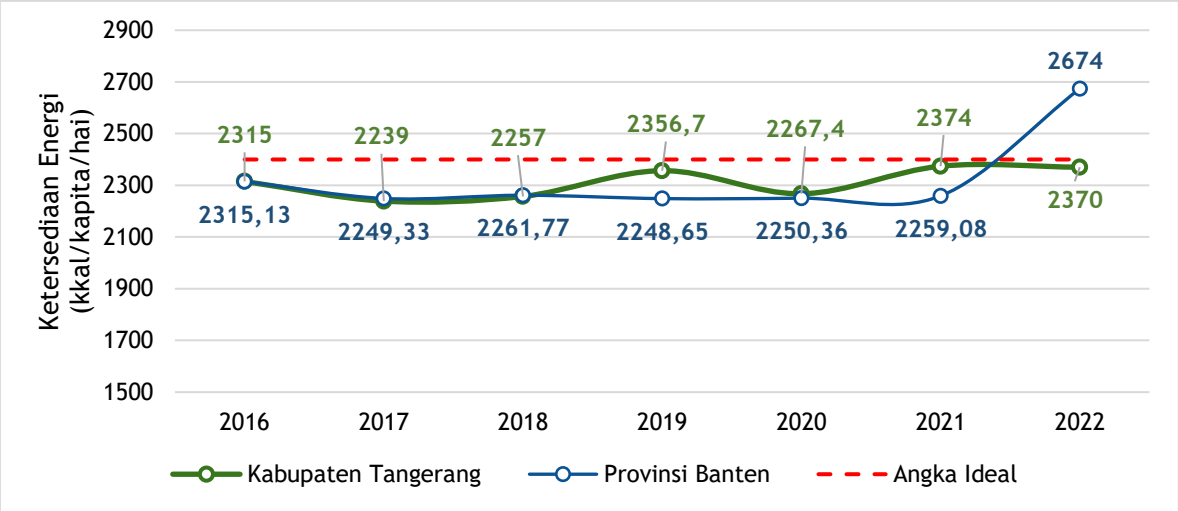


Gambar 2. 105
Perbandingan Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022
Sumber: Hasil Olahan, 2023

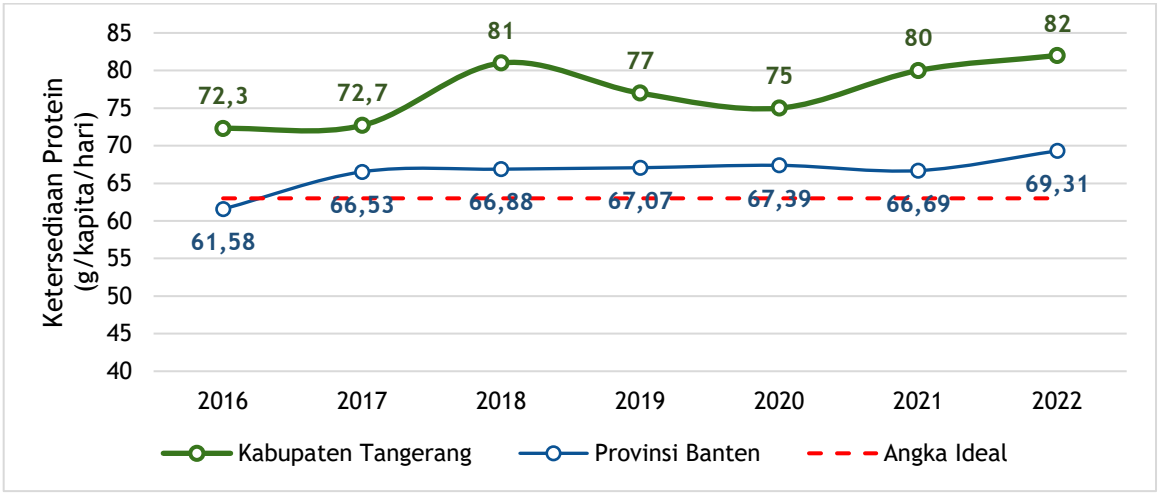
Dalam 5 tahun terakhir, ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan terutama secara drastis di tahun 2021 sebesar 429.766 ton dari tahun sebelumnya. Hal ini kemudian memengaruhi nilai ketersediaan pangan utama yang juga mengalami penurunan sebesar 132,49 kg/jiwa pada tahun 2021. Angka penurunan yang drastis berkaitan dengan anomali musim yang memengaruhi produktivitas pangan.

2) Ketersediaan Energi dan Protein Masyarakat

Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan tersedia di pasar yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kkal/kapita/hari, protein per g/kapita/hari, serta lemak per g/kapita/hari. Angka ketersediaan ini menggambarkan energi dan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat.



Gambar 2. 106
Perbandingan Nilai Ketersediaan Energi Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2016-2022
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan BPS Provinsi Banten 2016-2022

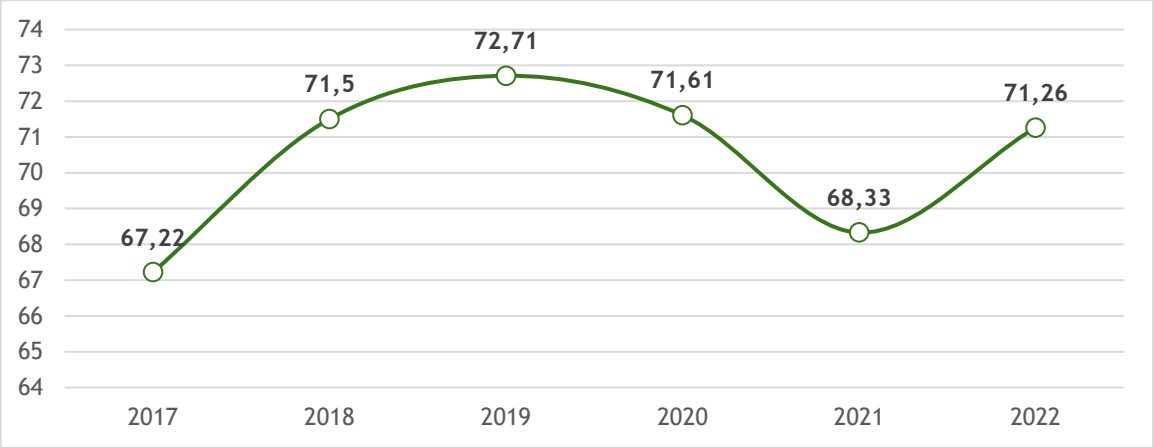


Gambar 2. 107
Perbandingan Nilai Ketersediaan Protein Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2016-2022
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan BPS Provinsi Banten 2016-2022

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua grafik tersebut menunjukkan angka yang bersifat fluktuatif. Angka ketersediaan energi di Kabupaten Tangerang memiliki kecenderungan naik yang cukup signifikan meskipun terjadi penurunan di tahun 2022 sebesar 4 kkal/kapita/hari. Nilai tersebut terhitung lebih kecil dibanding penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, angka ketersediaan protein di Kabupaten Tangerang juga memiliki kecenderungan naik meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2019 dan 2020 sebesar masing-masing 4 g/kapita/hari dan 2 g/kapita per hari. Kecenderungan peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa keterjangkauan masyarakat terhadap pangan meningkat. Meskipun telah terjadi kecenderungan

meningkat, angka ketersediaan energi di Kabupaten Tangerang masih berada di bawah nilai ideal angka ketersediaan energi sebesar 2400 kkal/kapita/hari. Sementara itu, angka ketersediaan protein di Kabupaten Tangerang sudah lebih besar dari nilai ideal ketersediaan protein sebesar 63 gram/kapita/hari.

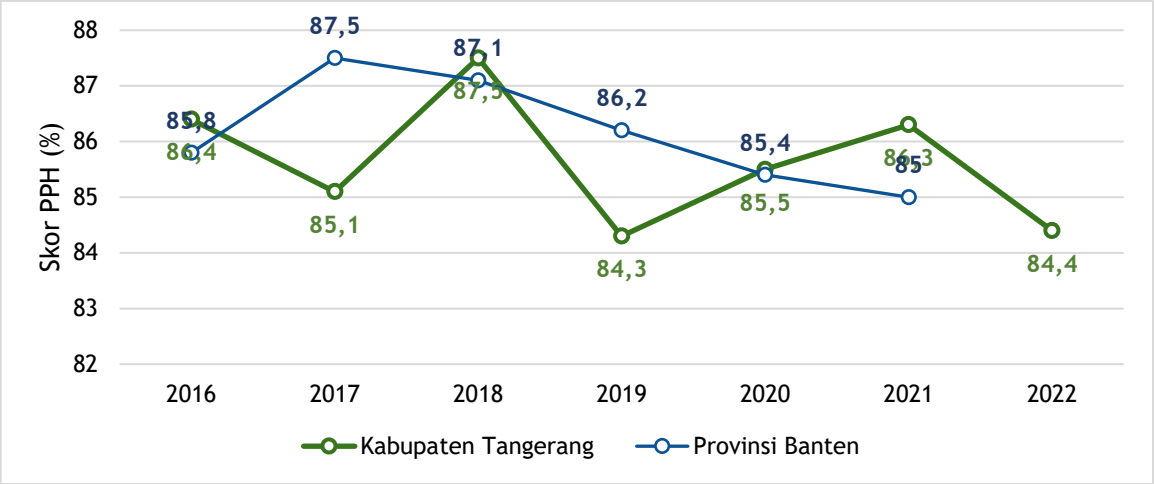
Angka ketersediaan protein Kabupaten Tangerang kemudian mempengaruhi rata-rata konsumsi protein yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selama 6 tahun terakhir, angka rata-rata konsumsi protein cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan konsumsi sebesar masing-masing 1,1 dan 3,28 gram/kapita/hari.



Gambar 2. 108
Rata-Rata Konsumsi Protein di Kabupaten Tangerang tahun 2017-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022

3) Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* merupakan susunan keragaman pangan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan pangan serta konsumsi pangan. Skor PPH dapat digunakan sebagai instrumen dalam menilai situasi konsumsi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah yang membantu penyusunan rencana kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan pertimbangan aspek sosial, ekonomi, budaya serta preferensi konsumsi pangan oleh masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat menjadi acuan dalam menentukan sasaran perencanaan dan evaluasi penyediaan, khususnya produksi pangan.

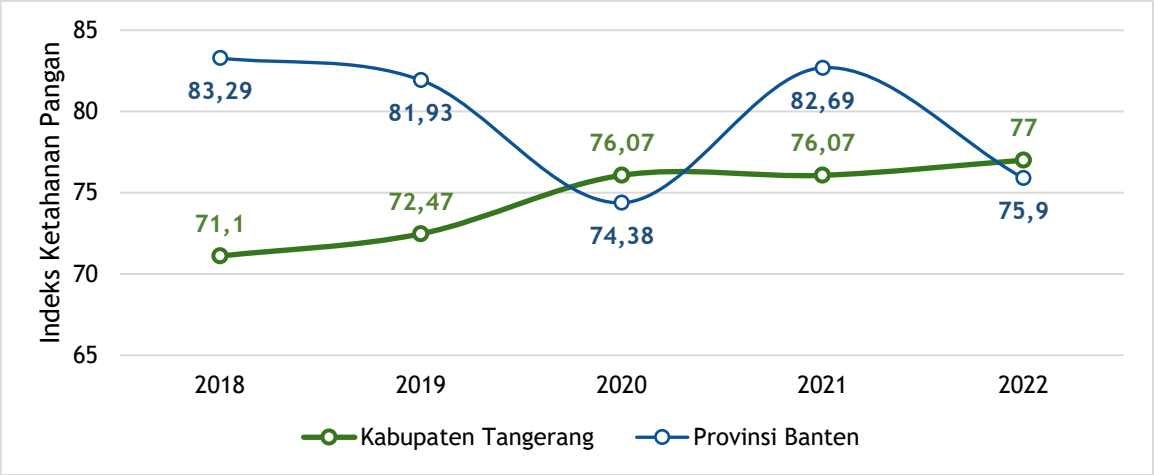


Gambar 2. 109
Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2016-2022
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan BPS Provinsi Banten 2016-2022

Selama 6 tahun terakhir, skor pola pangan harapan di Kabupaten Tangerang memiliki dinamika yang fluktuatif. Di tahun 2019, skor PPH mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya sebesar 3,2%, dari 87,5% menjadi 84,3%. Angka tersebut kemudian terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi sebesar 86,3%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa angka kecukupan gizi masyarakat menurun dan belum memiliki pertumbuhan yang stabil. Kemudian, skor PPH kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan standar perhitungan dari Badan Pangan Nasional. Meskipun angkanya tidak memiliki selisih yang cukup jauh dengan Provinsi Banten, skor PPH Kabupaten Tangerang masih berada di bawah target nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target skor PPH adalah 95,2%. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman.

4) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di wilayah tertentu. Angka IKP terdiri dari beberapa dimensi penyusun yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan.

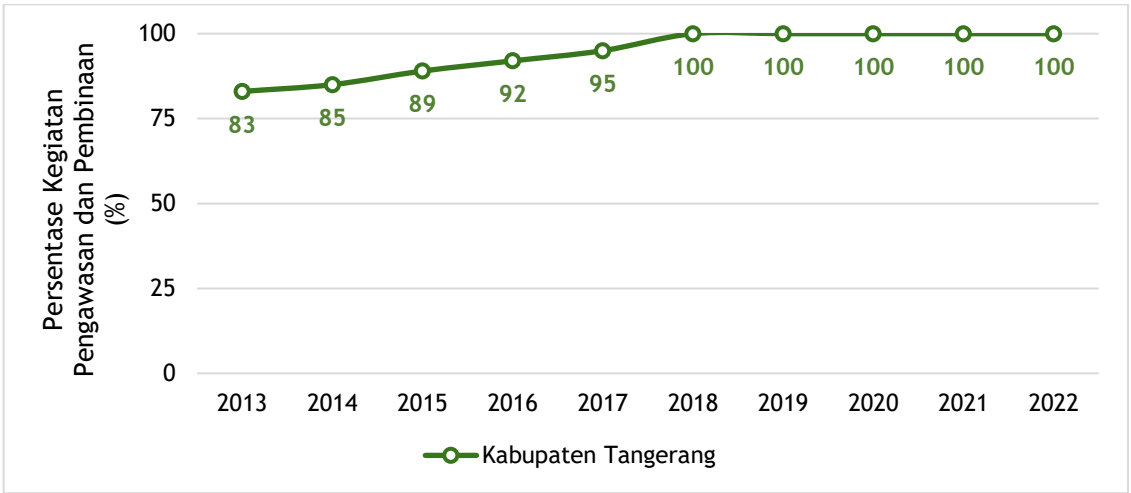


Gambar 2. 110
Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022
Sumber: Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian Tahun 2021-2022

Berdasarkan grafik di atas, selama 5 tahun, indeks ketahanan pangan Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan. Artinya setiap tahun kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang semakin membaik, dengan kondisi stagnan di tahun 2021.

5) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pangan segar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat tanpa adanya risiko bahaya dari cemaran kimia maupun mikroba. Dengan adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat meminimalisir hal yang dapat mengganggu, merugikan, membawa dampak negatif bagi kesehatan, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya sehingga dapat mendukung perkembangan kesehatan serta kecerdasan masyarakat.



Gambar 2. 111
Persentase Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022
Sumber: LKPJ AMJ 2013 2018 Bupati Tangerang kepada DPRD Kabupaten Tangerang, 2018; DPKP, 2022 (diolah)

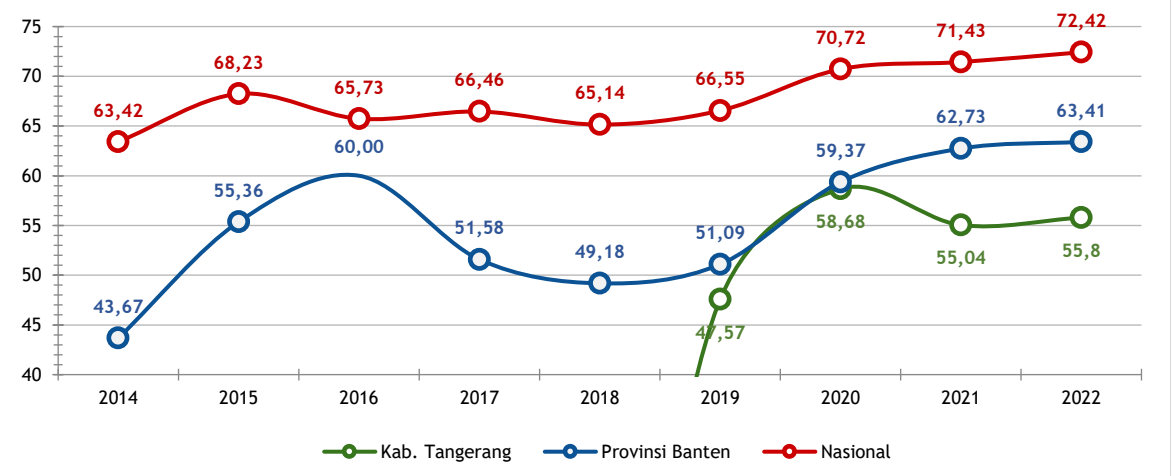
Selama 10 tahun terakhir, grafik di atas menunjukkan kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Selain itu, sejak tahun 2018 pelaksanaannya telah dilakukan secara optimal dan konsisten.

D. Lingkungan Hidup

1) Kondisi lingkungan hidup

Wilayah Kabupaten Tangerang dilalui oleh beberapa sungai besar yaitu Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri, dan Sungai Cirarab. Kualitas sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh aktivitas sektor permukiman, industri, pertanian, dan berbagai aktivitas lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kab. Tangerang tahun 2018 bahwa Sungai Cimanceuri mempunyai status 2 titik cemar ringan, 7 titik cemar sedang dan 2 titik cemar berat. Selain itu, Sungai Cidurian mempunyai status 3 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat, serta Sungai Cisadane mempunyai status 4 titik cemar ringan, 6 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat. Kondisi air sungai ini juga mempengaruhi kuantitas air baku bagi penyediaan air minum untuk masyarakat. Maka dari itu diperlukan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sungai dalam menjaga kualitas ekosistem dan ketersediaaan air di Kabupaten Tangerang.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana indeks ini digunakan secara nasional dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



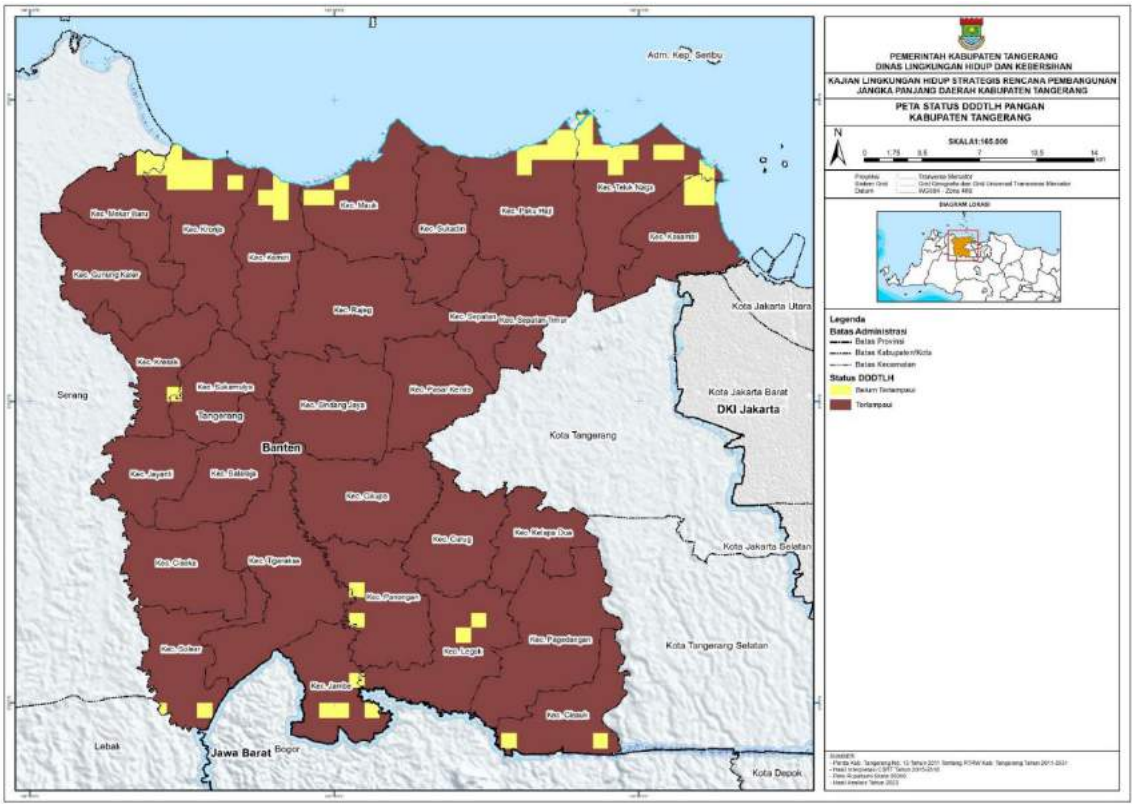
Gambar 2. 112
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional

Sumber: Buku IKLH Menteri KLHK 2015, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dan Tangerang Satu Data (diolah)

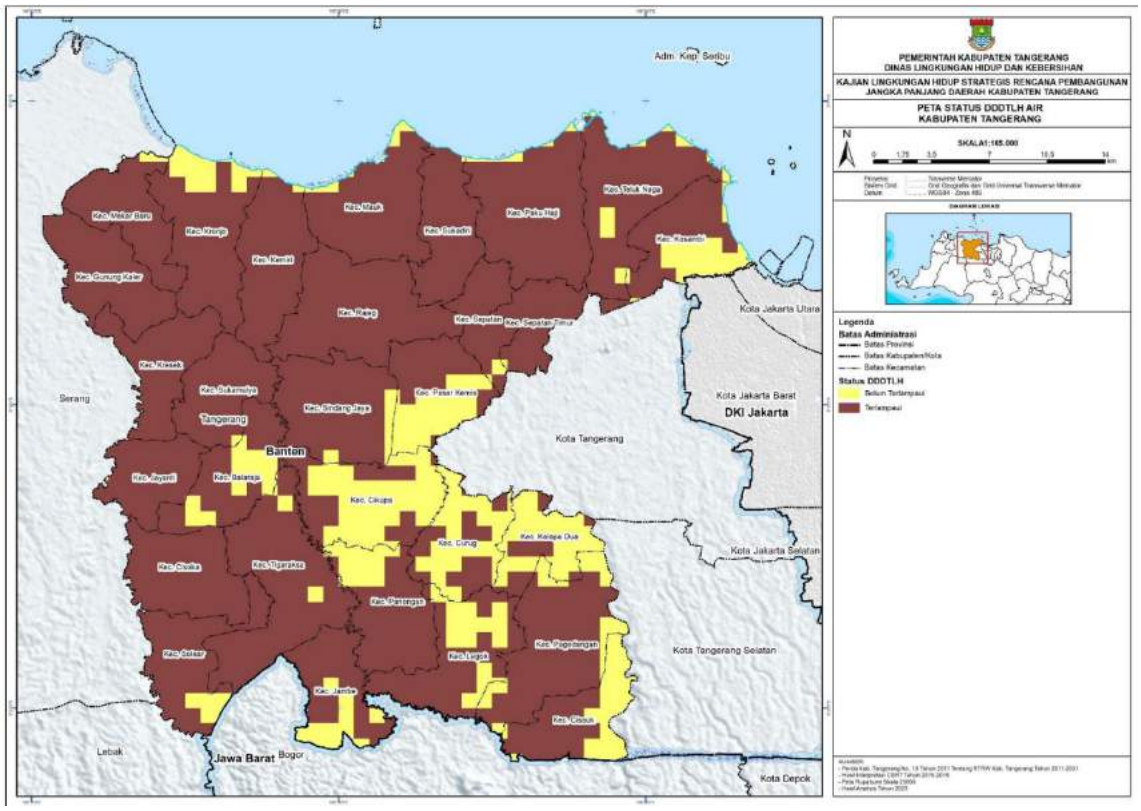
Pada tahun 2022, capaian IKLH Kabupaten Tangerang sebesar 55,8 (kategori sedang) dengan komponen IKU sebesar 71.06 (kategori baik), IKA sebesar 58,89 (kategori sedang), dan IKL sebesar 22,67 (kategori sangat kurang). Masih rendahnya capaian IKL perlu mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan. Berdasarkan dokumen Profil IKLH 2022, dijabarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian IKLH Kab. Tangerang yaitu peningkatan pemantauan kualitas udara, meningkatkan pelayanan IPAL domestik dan industri, pemeliharaan tanaman mangrove, dan lain sebagainya.

2) Daya dukung dan daya tampung

Berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung merupakan kemampuan dari lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup. Sementara itu, daya tampung merupakan kemampuan lingkungan hidup dalam menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalammnya. Substansi D3TLH tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi dasar dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Dalam KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045 dijabarkan kapasitas daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan dan air di Kabupaten Tangerang.



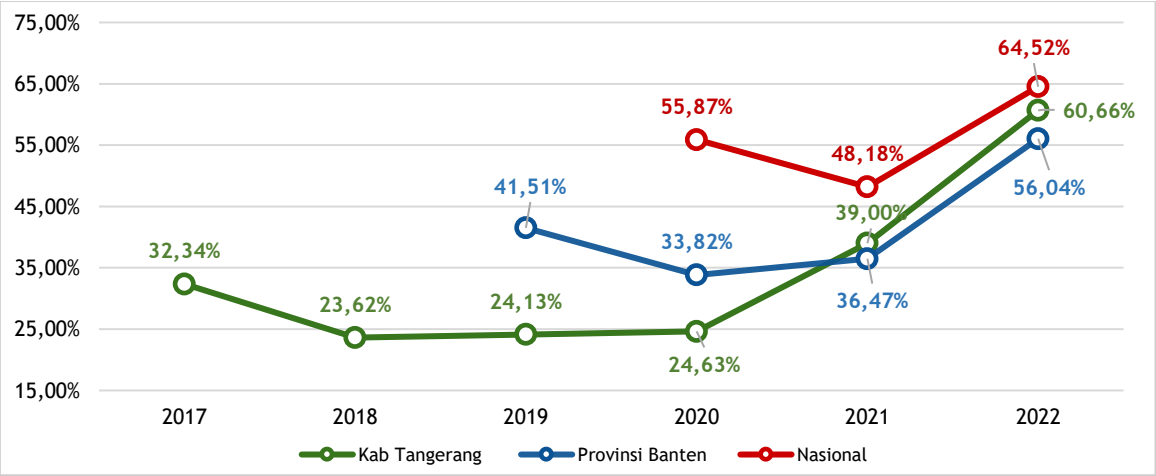
Gambar 2. 113
Peta Status DDDTLH Pangan Kabupaten Tangerang
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045



Gambar 2. 114
Peta Status DDDTLH Air Kabupaten Tangerang
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045

Kabupaten Tangerang saat ini memiliki status daya dukung dan daya tampung lahan sebesar 4% belum terlampaui, sementara 96% lahan terlampaui. Sementara itu, dalam penyediaan air di Kabupaten Tangerang saat ini terdapat 17% lahan belum terlampaui, sementara 83% lahan terlampaui, artinya pada 84.338,35 Ha merupakan lahan dengan kategori krisis air.

3) Cakupan pelayanan persampahan



Gambar 2. 115
Perbandingan Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2017-2022

Sumber: Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Dalam pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022, capaian persentase timbulan sampah yang dikelola Kabupaten Tangerang sebesar 60,66% dengan timbulan sampah sebesar 841.497,68 ton, timbulan yang terkelola sebesar 510.448,98 ton, dan daur ulang sampah sebesar 11.858,98 ton. Capaian ini lebih tinggi dibanding Provinsi Banten yang sebesar 56,04%, tetapi masih di bawah nasional dengan capaian 64,52%. Di bawah ini merupakan fasilitas pengelolaan persampahan di Kabupaten Tangerang berdasarkan data KLHK (2022).

Tabel 2. 39
Fasilitas Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (unit)	Timbulan Sampah yang Dikelola (ton/tahun)
Bank Sampah	102	732,46
TPST 3R	36	22.985,58
TPA (TPA Jatiwaringin)	1	498.590,00
Jumlah		522.308,04

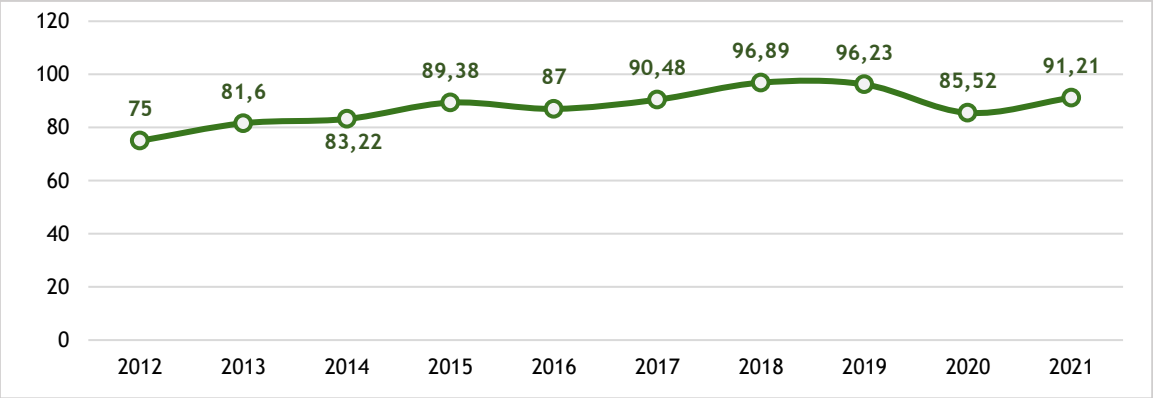
Sumber: Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Dalam dokumen KLHS RPPD Kab. Tangerang dijelaskan bahwa rendahnya jumlah sampah yang ditangani disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah (tahun 2017-2019) stagnan pada angka 941 km^2. Sementara itu dari sisi armada sampah yang dapat mengangkut 2.925 ton/hari atau 51% dari total sampah yang ada. Maka dari itu diperlukan langkah dalam penanganan sampah dari tingkat rumah tangga, TPS 3R, hingga layanan persampahan skala regional yaitu TPA.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatatan Sipil

1) Rasio Kepemilikan KTP

Rasio penduduk dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per unit penduduk merupakan perbandingan antara jumlah individu yang memiliki KTP dengan jumlah total penduduk dalam suatu area tertentu. Rasio ini berfungsi sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana KTP telah menyebar di wilayah tersebut. Tingkat penyebaran yang tinggi mencerminkan kesuksesan pemerintah dalam menyelenggarakan penerbitan KTP serta memastikan kepemilikan KTP oleh masyarakat.



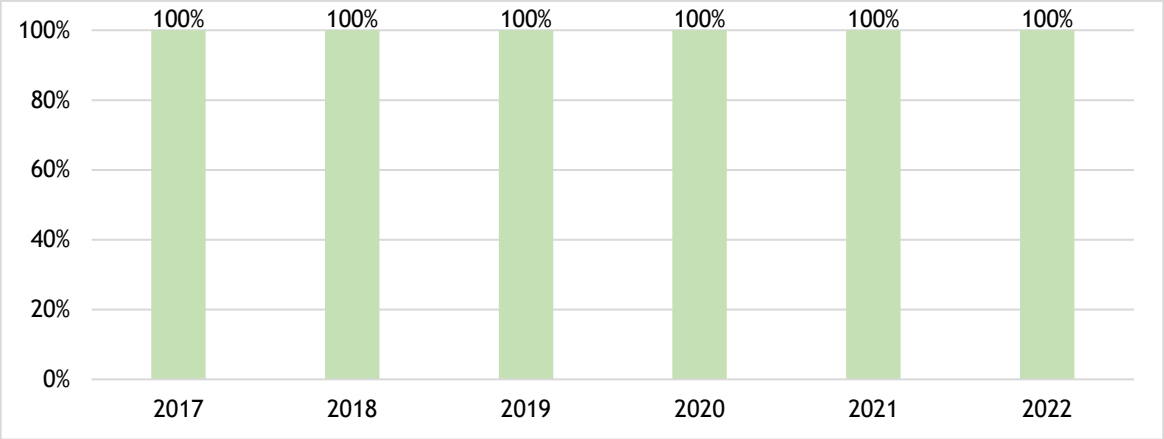
Gambar 2. 116
Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2021
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Tangerang, 2023

Data grafik di atas mencerminkan tingkat penetrasi KTP di Kabupaten Tangerang. Rasio penduduk yang ber- KTP di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat menunjukkan Kabupaten memfasilitasi penerbitan dan kepemilikan KTP oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini dapat terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Peningkatan yang signifikan kembali terlihat pada tahun 2021 dengan angka penetrasi mencapai 91,21%, mengindikasikan perbaikan fasilitasi penerbitan KTP bagi penduduk.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sebuah organisasi sosial yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta dalam upaya pembangunan di Indonesia. Persentase partisipasi aktif dalam PKK mencerminkan efektivitas dari program ini. Tingkat partisipasi yang tinggi mengindikasikan berhasilnya program PKK serta antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan peran organisasi ini dalam memberdayakan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Di sisi lain, tingkat partisipasi yang rendah menggambarkan adanya tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan program, atau mungkin ada kendala yang menghalangi masyarakat untuk mengambil manfaat dari layanan yang diberikan oleh PKK



Gambar 2. 117
Persentase PKK Aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022
Sumber: DPMPD 2022

Kabupaten Tangerang memiliki 274 PKK dan tidak ada peningkatan jumlah PKK setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Namun persentase PKK yang aktif adalah 100% dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa semua unit organisasi PKK di wilayah tersebut aktif dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta aktif berperan dalam berbagai inisiatif pembangunan.

2) Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) aktif adalah pusat pelayanan kesehatan primer yang secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan utama setiap bulan, seperti pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare, serta Keluarga Berencana (KB), dengan tingkat cakupan minimal 50% untuk masing-masing layanan tersebut. Selain itu, posyandu ini juga melaksanakan kegiatan tambahan sebagai bagian dari komitmennya. Tingkat kinerja Posyandu aktif diukur melalui persentase keterlibatan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Angka yang tinggi dalam persentase posyandu aktif mengindikasikan bahwa posyandu berfungsi secara efektif dan masyarakat secara optimal memanfaatkan layanan yang disediakan di dalamnya.

Tabel 2. 40
Jumlah Posyandu dan Posyandu Aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

Indikator	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Posyandu (Unit)	2.181	2.207	2.241	2.173	2.279	2.233	2.233	2.331	2.380	2.341
Posyandu Aktif (Unit)	677	1.191	969	1.084	1.167	2.093	2.093	1.263	1.180	1.310
Persentase Posyandu Aktif (%)	31,04	53,96	43,23	49,88	51,21	93,73	93,73	52,7	49,57	55,96

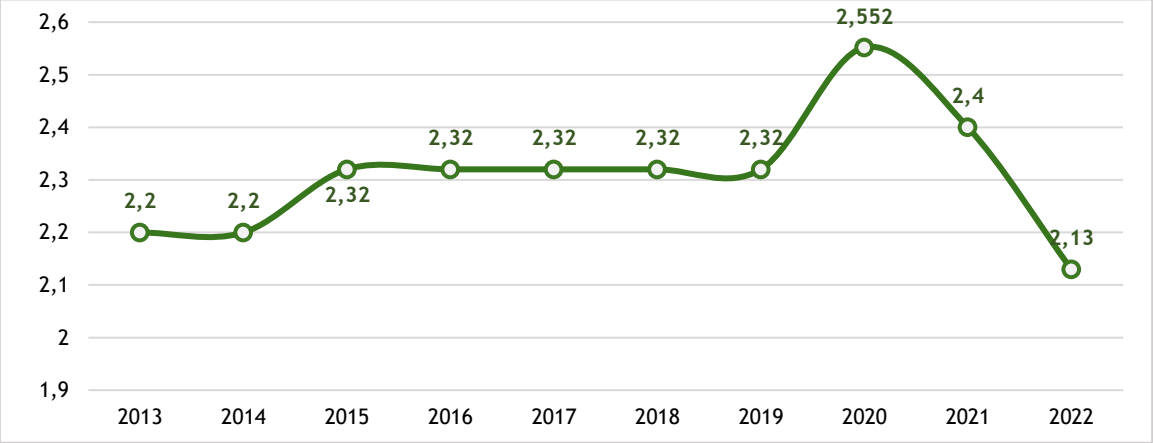
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2023

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate)*

Angka kelahiran total merupakan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya. Angka kelahiran total digunakan sebagai indikator keberhasilan program KB, membantu pengambilan kebijakan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin,

meningkatkan program pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

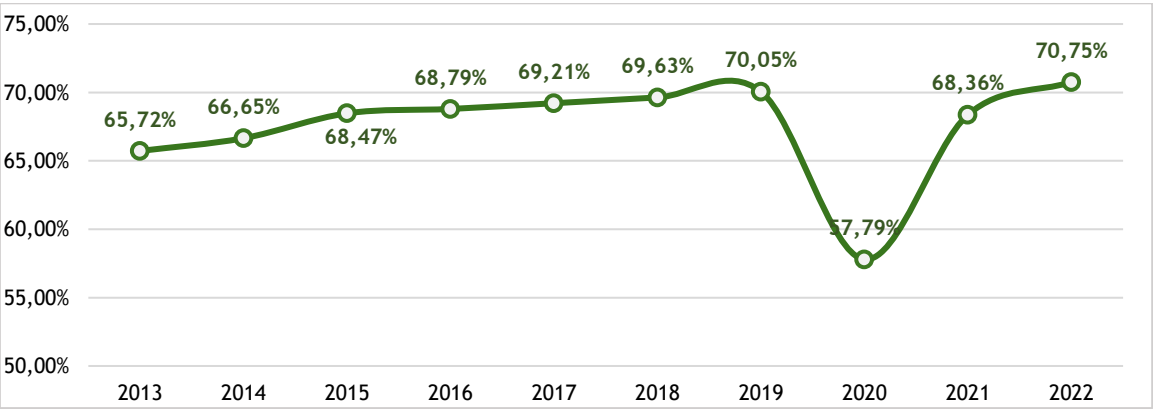


Gambar 2. 118
Angka Kelahiran Total Kabupaten Tangerang Tahun 2013 - 2022
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Kabupaten Tangerang, 2023

Dari grafik di atas didapatkan rata-rata wanita usia 15 hingga 49 tahun di Kabupaten Tangerang memiliki 2-3 anak selama masa usia suburnya. Selama kurun waktu 9 tahun total *fertility rate* cenderung stagnan dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan mencapai angka terendahnya pada tahun 2022.

2) Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif atau *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pengendalian penduduk. Cakupan peserta KB aktif dihitung dari perbandingan antara angka peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur.



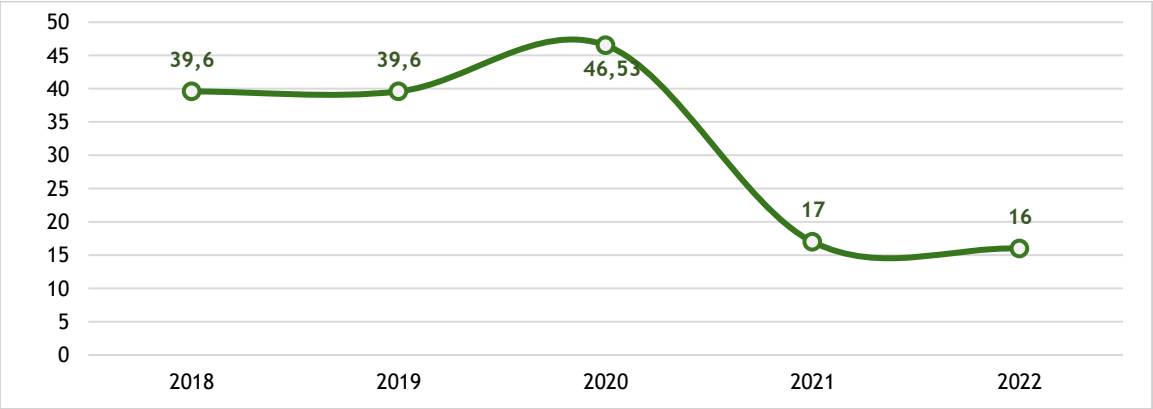
Gambar 2. 119
Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Tahun di Kabupaten Tangerang Tahun 2013 - 2022
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Kabupaten Tangerang, 2022

Cakupan peserta KB Aktif di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat pada tahun 2013 hingga tahun 2019 dan kemudian menurun pada tahun 2020 dan membaik pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dapat

disebabkan oleh pandemi. Cakupan peserta KB Aktif mengalami peningkatan sebesar 7,65%.

3) Age Specific *Fertility Rate* (ASFR) 15 – 19

ASFR 15-19 merupakan banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur 15-49 tahun. ASFR 15-19 diperoleh dari jumlah remaja perempuan melahirkan di usia 15-19 tahun dibandingkan dengan 1.000 perempuan yang berusia 15-19 tahun di Kabupaten Tangerang. Angka ini menjadi salah satu indikator penting kesehatan reproduksi dan memberikan informasi tentang tingkat pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Di Indonesia, angka kelahiran remaja masih tinggi. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2020 sekitar 27% dari total kelahiran adalah pada remaja. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja. Capaian Kabupaten Tangerang dalam angka tersebut adalah sebagai berikut.

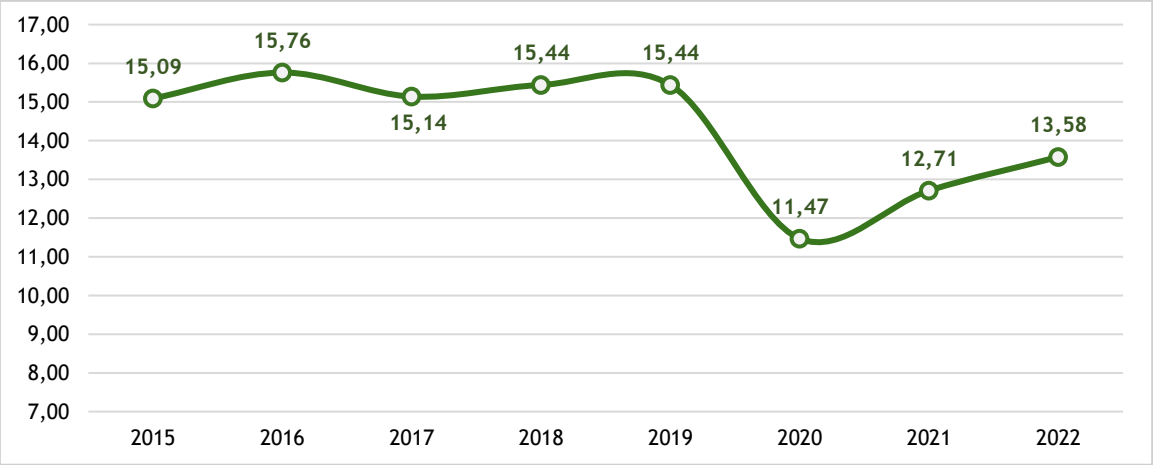


Gambar 2. 120
ASFR 15-19 Kabupaten Tangerang Tahun 2018 – 2022
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Berdasarkan gambar di atas, diketahui persentase kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun masih tergolong tinggi pada tahun 2020 yaitu mencapai 46,53 kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok usia remaja. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 16 kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok usia remaja pada tahun 2022. Terdapat kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi angka kejadian kehamilan pada remaja. Kurangnya optimalnya promosi dan peningkatan layanan keluarga berencana menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan tingginya angka kelahiran remaja.

4) Unmet Need KB

Unmet need KB merupakan pasangan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KBCakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah persentase pasangan usia subur (wanita dan pria berusia 15-49 tahun) yang ingin membatasi atau memutuskan kehamilan, tetapi belum memiliki akses atau belum menggunakan layanan keluarga berencana. *Unmet need* merupakan indikator penting untuk mengukur keterbatasan akses layanan keluarga berencana dan memahami kebutuhan dan permintaan masyarakat. Tingginya *unmet need* dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses layanan, stigma, dan kendala ekonomi.



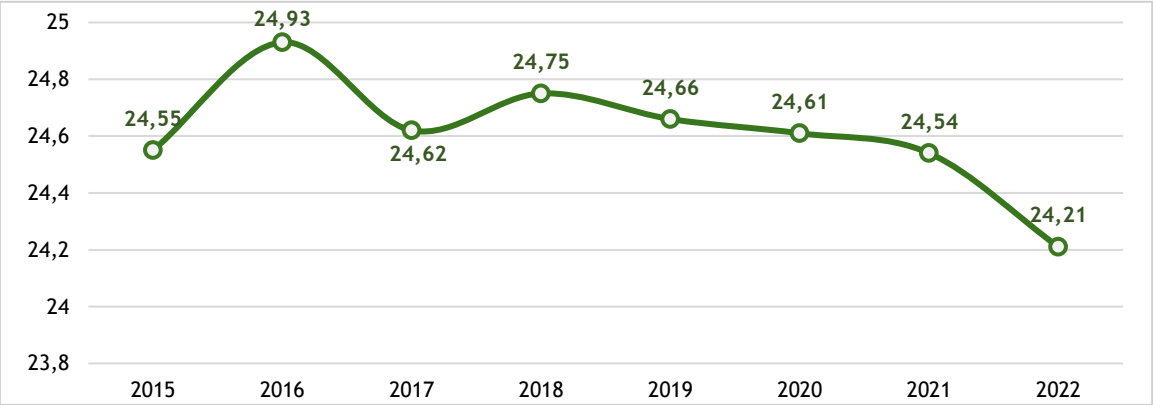
Gambar 2. 121
***Unmet Need* Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022 (%)**
Sumber : DPPKB, 2023

Persentase *Unmet Need* KB mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan 7 tahun sebelumnya pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses bagi PUS yang tadinya tidak terlayani KB padahal ingin ber-KB. Unmet need pada tahun 2022 mencapai 13,58% . Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 13,58% atau sekitar 502.606 PUS yang memiliki keinginan untuk ber-KB namun belum mendapatkan layanan yang memadai dikarenakan kendala dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Angka ini mengindikasikan bahwa program keluarga berencana belum sepenuhnya mencapai semua segmen masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat mengupayakan fasilitasi akses bagi pasangan usia subur yang ingin mengendalikan kehamilan di Kabupaten Tangerang.

5) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MJKP)

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pemakaian alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik, implan, dan IUD (*Intra Uterine Device*). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan memerlukan pemasangan yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari. Di Indonesia, pemakaian MKJP masih terbilang

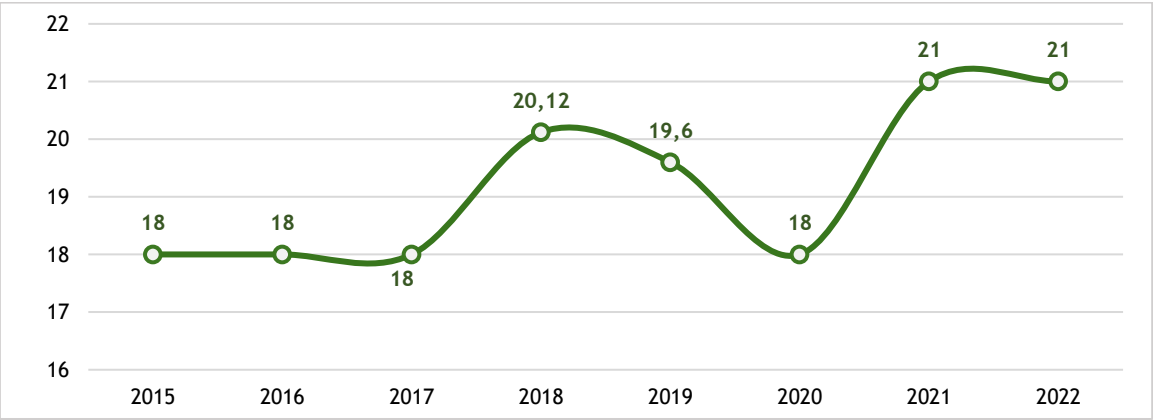
rendah, sekitar 20% dari seluruh pengguna kontrasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.



Gambar 2. 122
Persentase Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2022 (%)
Sumber : DPPKB, 2023

6) Rata – rata Usia Kawin Pertama Oleh Perempuan

Usia kawin pertama menjadi salah satu indikator yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan menekan laju pertumbuhan. Hubungan usia kawin pertama dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda usia kawin pertama, maka masa reproduksinya akan semakin panjang atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Berdasarkan data World Bank pada tahun 2020, rata-rata usia kawin pertama wanita di Indonesia adalah 22.7 tahun. Namun, perlu dicatat bahwa data ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi di suatu negara atau wilayah



Gambar 2. 123
Rata – Rata Usia Kawin Pertama Perempuan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022 (Tahun)
Sumber : DPPKB, 2023

Grafik di atas menggambarkan perubahan usia rata-rata pernikahan pertama wanita di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa usia

rata-rata pernikahan pertama wanita di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, usia rata-rata pernikahan pertama wanita mencapai 21 tahun. Penyebab dari tren ini melibatkan beberapa faktor, termasuk peningkatan jumlah wanita yang mengejar pendidikan tinggi, yang kemudian membuat mereka lebih cenderung untuk menunda pernikahan. Banyak wanita yang ingin mengembangkan karier sebelum memutuskan untuk menikah, dan adanya perubahan nilai-nilai sosial juga turut memengaruhi keputusan untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Faktor lain yang ikut memainkan peran adalah ketidakpastian ekonomi yang mendorong mereka untuk lebih memilih menunda atau bahkan tidak menikah dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

H. Perhubungan

1) Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri dari jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, dan jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil/bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan, lintasan, dan jadwal yang tetap. Rasio ijin trayek memperlihatkan seberapa besar jumlah trayek yang tersedia dengan jumlah penduduk suatu daerah. Rasio ijin trayek Kabupaten Tangerang diperlihatkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 41
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

Variabel	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Ijin Trayek	2.083	3.445	1.408
Jumlah Penduduk	3.692.693	3.800.787	3.245.619
Rasio	5,64	9,06	4,34

Sumber: opendata.tangerangkab.go.id; Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2023 (diolah)

2) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR Angkatan umum memperlihatkan berapa jumlah angkutan yang sudah layak untuk dimanfaatkan di jalan raya. Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 53, pengujian ini bersifat wajib bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pengujian berkala ini meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan dan pengesahan hasil uji. Jumlah uji KIR angkutan umum Kabupaten Tangerang diperlihatkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 42
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2021 dan 2022

Jenis Angkutan	Jenis Kendaraan	Tahun			
		2021		2022	
		Jumlah Kendaraan	Jumlah Uji KIR	Jumlah Kendaraan	Jumlah Uji KIR

Mobil Penumpang	Angkutan Kota	69.754	913	69.758	102
	Taksi	3.876	34	3.876	646
	Mobil Belajar	84	-	84	-
Mobil Bis	*Mini*	-	-	-	-
	Micro	12.405	562	36.798	788
	Bis	2.113	103	3.338	216
Mobil Barang	*Light Truck*	141.795	23.485	147.690	25.020
	TR Head	1.590	187	1.990	16
	Pickup	456.608	23.464	479.336	23.960
	Truck	141.795	7018	254.661	7.107
Jumlah		830.020	55.766	997.531	57.885

Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2023

3) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kabupaten Tangerang memiliki sebuah bandara, dua (2) pelabuhan dan dermaga, serta dua (2) terminal bus. Satu-satunya bandar udara di Kabupaten Tangerang adalah Bandar Udara Budiarto yang terletak di Kecamatan Curug. Bandar udara Budiarto diklasifikasikan sebagai bandar udara kelas I pada tahun 2014. Bandara ini merupakan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda yang difungsikan menjadikan tempat pendidikan penerbangan bernama "Akademi Penerbangan Indonesia" (API), yang merupakan pusat pendidikan penerbangan terbesar di Asia Tenggara. Lokasi ini digunakan oleh para penerbang (pilot), teknisi, dan petugas operasi penerbangan termasuk beberapa penerbangan dari Negara tetangga. Nama "Bandar Udara Budiarto" sendiri ditetapkan sejak tahun 1967, disematkan sebagai penghargaan terhadap Bapak Budiarto (Direktur API ke IV) yang gugur di Manila-Filipina.



Gambar 2. 124
Pintu Masuk Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto
Sumber: upbubudiarto.id, 2023

Kabupaten Tangerang memilik dua (2) buah pelabuhan yaitu Pelabuhan Tanjung Pasir yang terletak di Kecamatan Teluknaga dan Pelabuhan Cituis yang terletak di Kecamatan Pakuhaji. Selain itu, terdapat juga sebuah dermaga di Kecamatan Kronjo yang menjadi lokasi pelelangan ikan. Pelabuhan Tanjung Pasir melayani berbagai keperluan mulai dari pengiriman barang, tempat pelelangan ikan, hingga layanan pariwisata menuju

kawasan wisata Kepulauan Seribu. Sementara pelabuhan Cituis merupakan kawasan perkampungan nelayan dan menjadi pusat labuh kapal perikanan di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 125
Dermaga Kapal Pelabuhan Tanjung Pasir
Sumber: Tempo, 2018

Sebagai fasilitas transportasi darat, Kabupaten Tangerang menyediakan 2 terminal bus tipe C yaitu Terminal Kampung Melayu dan Terminal Balaraja. Terminal ini menjadi tempat pemberhentian bagi bus bagi kawasan Jabodetabek dan Provinsi Banten. Selain itu, terdapat juga terminal shuttle bus yang terletak di kawasan Lippo Karawaci.

I. Komunikasi dan Informatika

Dalam menjalankan pemerintahan,terutama pada urusan komunikasi dan informatika, pemerintah daerah perlu melakukan digitalisasi agar dapat mewujudkan kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Indeks SIstem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat digunakan untuk mengukur usaha pemerintah mencapai digitalisasi yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, capaian Indeks SPBE Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah 2,66 dengan predikat “baik”. Meskipun sama-sama berpredikat “baik”, nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 yang memiliki capaian 2,99. Selain Indeks SPBE, indikator lain pada urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut.

1) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi daerah di Kabupaten Tangerang diperlihatkan oleh jumlah desa yang terlayani oleh jaringan komunikasi dan jumlah kecamatan yang terlayani oleh menara BTS. Apabila dilihat dari jumlah desa yang terlayani oleh jaringan komunikasi, diketahui bahwa daerah telah menunjukkan capaian yang optimal karena sebanyak 246 desa atau 100% desa di Kabupaten Tangerang sudah terlayani oleh jaringan

komunikasi. Sebagai dukungan jaringan telekomunikasi, infrastruktur seperti menara BTS juga sudah dibangun di seluruh 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Jumlah menara menurut kecamatan ditampilkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 43
Jumlah Menara BTS Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Tahun		Kecamatan	Tahun	
	2020	2021		2020	2021
Balaraja	65	65	Mekar Baru	13	13
Cikupa	163	163	Pagedangan	104	104
Cisauk	61	61	Pakuhaji	24	24
Cisoka	35	35	Panongan	49	49
Curug	126	126	Pasar Kemis	84	84
Gunung Kaler	11	11	Rajeg	44	44
Jambe	18	18	Sepatan	46	46
Jayanti	22	22	Sepatan Timur	16	16
Kelapa Dua	88	88	Sindang Jaya	30	30
Kemiri	16	16	Solear	13	13
Kosambi	52	52	Sukadiri	16	16
Kresek	28	28	Sukamulya	12	12
Kronjo	18	18	Teluknaga	58	58
Legok	47	47	Tigaraksa	81	81
Mauk	31	31			

Sumber: *opendata.tangerangkab.go.id*, 2023

2) Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Pengguna telepon genggam di Provinsi Banten cenderung menurun pada kurun tahun 2017-2020. Persentase yang sudah mencapai angka 70,6% turun menjadi 64,40% tiga tahun kemudian. Kabupaten Tangerang juga mengalami tren menurun dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020, dari angka 71,46% turun menuju 63,50%.

Tabel 2. 44
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Pandeglang	45,35	47,23	57,37	47,93	53,20	50,23
Kab. Lebak	43,57	43,08	60,18	46,51	49,01	47,07
Kab. Tangerang	59,68	60,59	71,46	64,69	63,98	63,50
Kab. Serang	49,79	50,64	60,97	58,21	59,61	56,71
Kota Tangerang	74,98	74,17	78,20	74,92	74,86	76,26
Kota Cilegon	67,60	68,74	78,66	72,34	71,54	74,63
Kota Serang	57,95	61,40	71,84	59,71	64,70	65,93
Kota Tangerang Selatan	77,60	76,01	82,81	79,76	79,35	76,79
Provinsi Banten	60,49	60,92	70,60	64,25	65,21	64,40

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2022*

3) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Pengguna internet terbanyak ada di Kota Tangerang Selatan dengan angka 79,17% sedangkan Kabupaten Pandeglang menjadi kabupaten dengan pengguna akses internet paling sedikit dengan hanya 34,65% penduduk. Kabupaten Tangerang sendiri memperlihatkan tren yang positif dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020. Dalam hal ini, pengguna internet di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga terbanyak di Provinsi Banten di bawah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

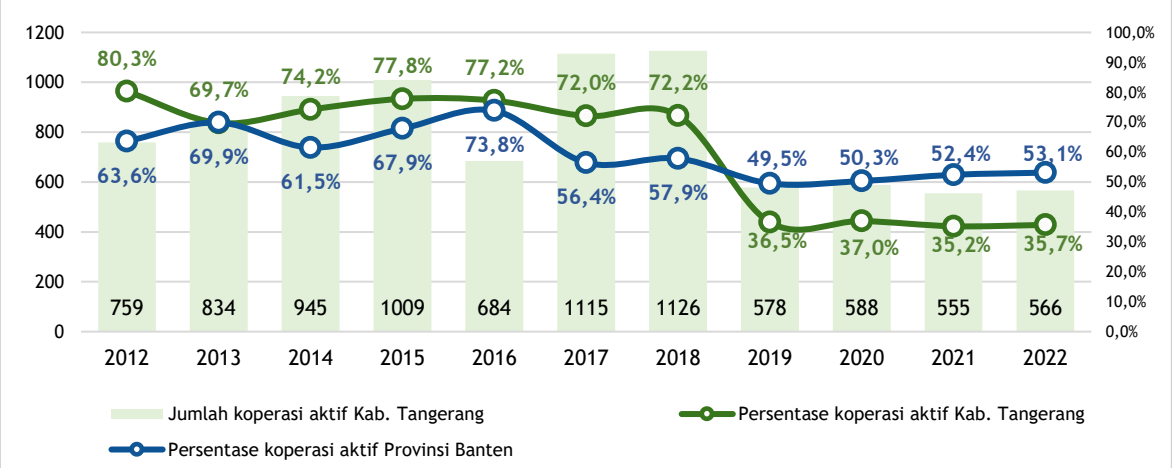
Tabel 2. 45
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Kab. Pandeglang	17,64	22,71	30,62	34,65
Kab. Lebak	13,78	24,67	28,72	35,29
Kab. Tangerang	35,53	50,33	58,67	58,49
Kab. Serang	25,34	33,79	47,47	45,85
Kota Tangerang	51,49	63,32	71,49	76,03
Kota Cilegon	41,27	53,53	58,75	66,12
Kota Serang	36,15	41,26	51,98	57,91
Kota Tangerang Selatan	66,84	72,03	78,35	79,17
Provinsi Banten	37,46	47,90	56,25	58,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

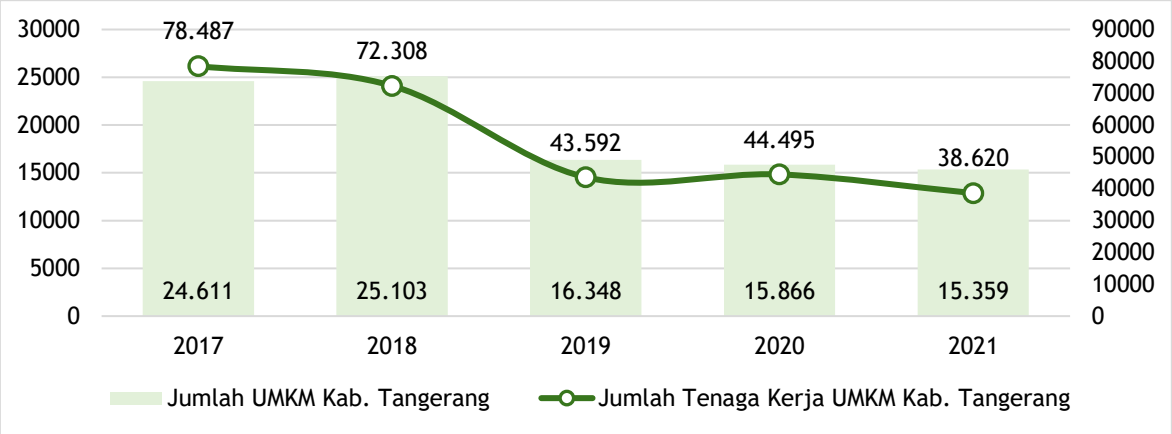
1) Jumlah koperasi aktif



Gambar 2. ~~0.~~126
Jumlah Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Persentase koperasi aktif menunjukkan kinerja eksistensi, layanan, dan produktivitas koperasi. Gambar di atas menunjukkan jumlah dan persentase koperasi aktif di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2022, koperasi di Kabupaten Tangerang sebesar 1.587 unit koperasi dan yang aktif hanya 566 unit koperasi (atau 35,7% dari total unit usaha koperasi). Jika dilihat berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tangerang, kecamatan dengan koperasi aktif terbanyak yaitu (1) Kecamatan Cikupa sebanyak 45 unit koperasi; (2) Kecamatan Kelapa Dua sebanyak 43 unit koperasi; dan (3) Kecamatan Tigaraksa sebanyak 42 unit koperasi.

2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Gambar 2. ~~0.~~127
Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja UMKM di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

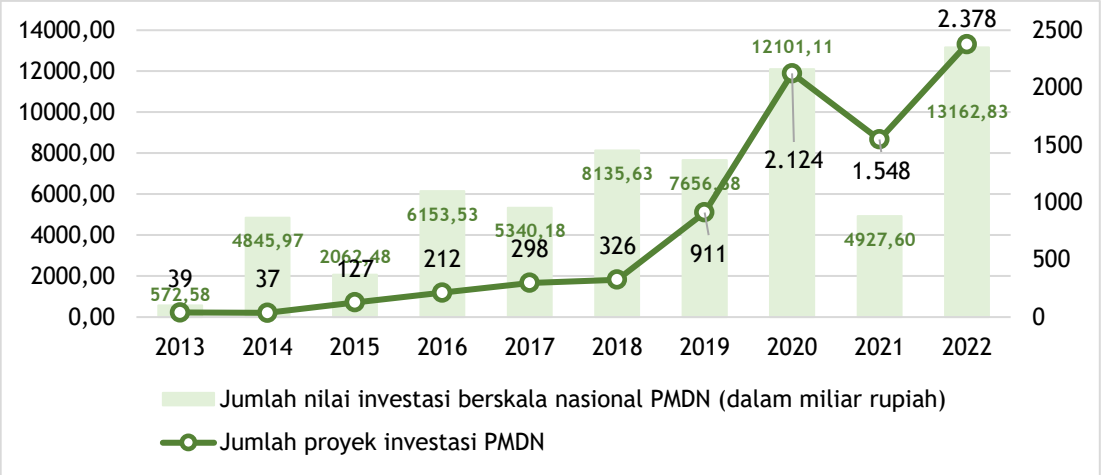
Gambar di atas menunjukkan jumlah usaha dan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Tangerang berdasarkan data Provinsi Banten dalam Angka. Dalam lima tahun terakhir terlihat adanya penurunan jumlah usaha dan tenaga kerja UMKM di Kab. Tangerang. Pada tahun 2021 sebesar 15.359 unit usaha dengan penurunan 3,20% dari tahun 2020. Namun, berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Tangerang (*website open data)* jumlah usaha mikro kecil tahun 2021 mencapai 25.918 unit usaha. Berdasarkan data tersebut kecamatan dengan jumlah UMK terbanyak yaitu (1) Kecamatan Teluknaga sebanyak 1.833 unit usaha (7,07% dari total UMK); (2) Kecamatan Mauk sebanyak 1.701 unit usaha (6,56% dari total UMK); (3) Kecamatan Cikupa sebanyak 1.638 unit usaha (6,32% dari total UMK).

Dalam dokumen RPJMD Kab. Tangerang 2019-2023 dijabarkan bahwa permasalahan di bidang koperasi dan UMKM adalah belum optimalnya aspek permodalan dan promosi. Belum optimalnya koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk permodalan UKM mengakibatkan pemanfaatan dana modal belum efisien.

K. Penanaman Modal

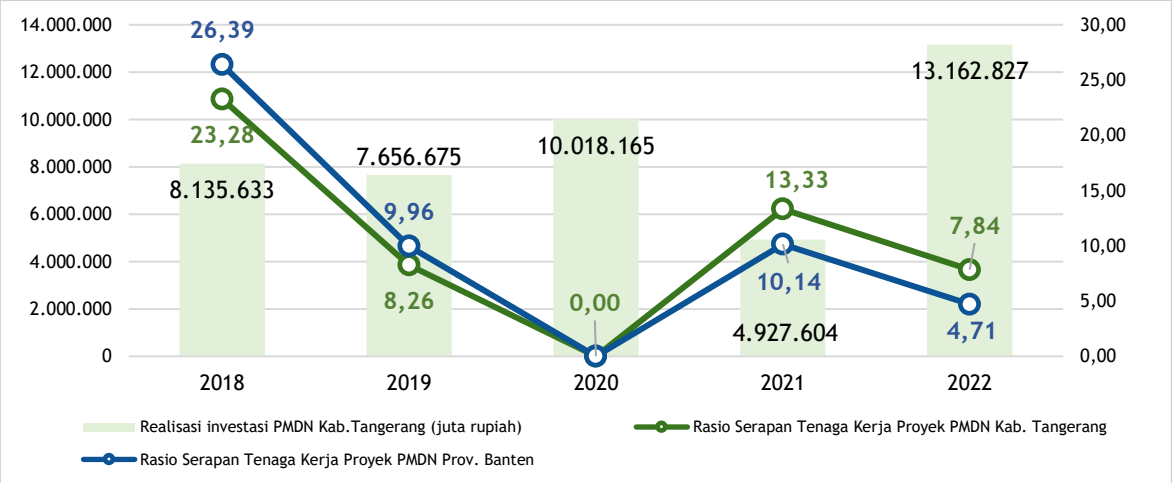
1) Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam penanaman modal kegiatan berusaha terbagi menjadi dua status permodalan, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.



Gambar 2. ~~0.~~128
Realisasi PMDN dan Jumlah Proyek PMDN di Kabupaten Tangerang tahun 2013-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, realisasi dan jumlah proyek PMDN di Kabupaten Tangerang dalam 10 tahun terakhir cenderung meningkat dan meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan tahun 2020-2021 sebagai dampak dari pandemi, namun dapat kembali membaik pada tahun 2022.



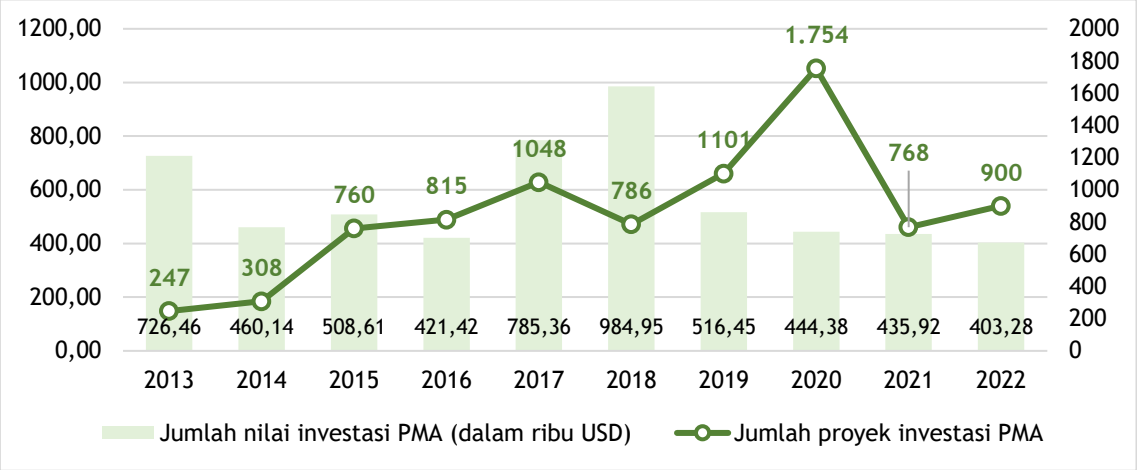
Gambar 2. ~~0.~~
129
Realisasi PMDN dan Rasio Serapan Tenaga Kerja PMDN di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, serapan tenaga kerja Kab. Tangerang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten. Akan tetapi, serapan tenaga kerja indonesia terhadap proyek PMDN cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Maka dari itu diperlukan strategi untuk optimalisasi kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

2) Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

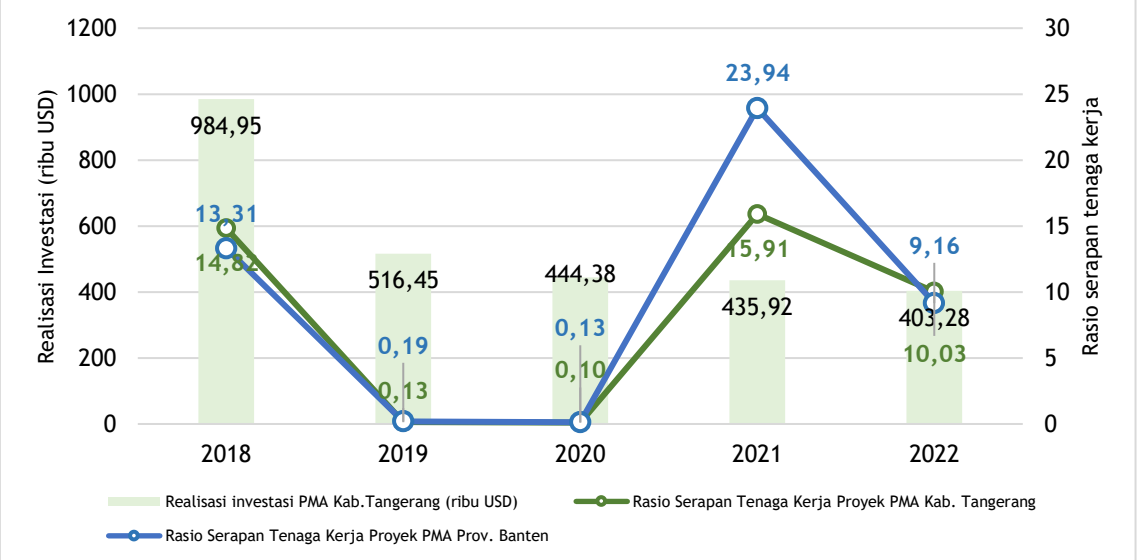
Berdasarkan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.



130Gambar 2. 131
Realisasi PMA dan Jumlah Proyek PMA di Kabupaten Tangerang tahun 2012-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, dalam 10 tahun terakhir realisasi PMA Kab. Tangerang cenderung fluktuatif dimana periode peningkatan signifikan pada tahun 2016-2018 dan menurun dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, jumlah proyek PMA mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018-2020 lalu menurun dalam dua tahun terakhir.



132Gambar 2. 133
Realisasi PMA dan Rasio Serapan Tenaga Kerja PMA di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

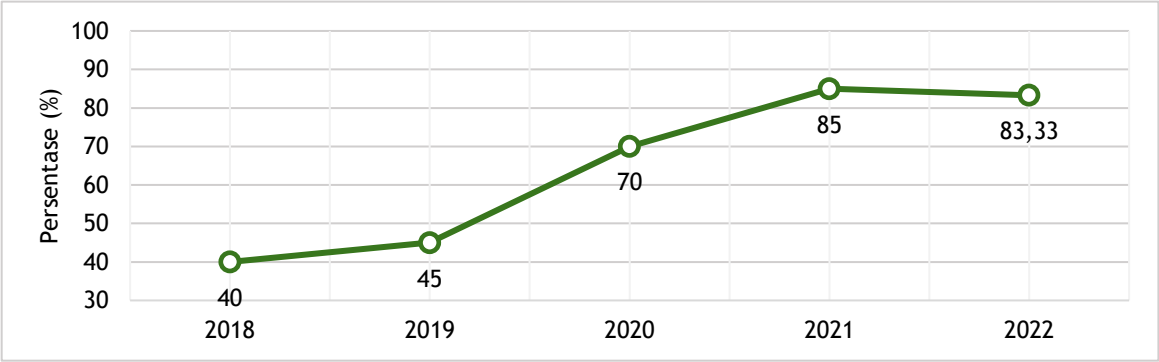
Berdasarkan grafik di atas, dalam lima tahun terakhir rasio serapan tenaga kerja indonesia PMA cenderung fluktuatif dan peningkatan signifikan pada tahun 2020-2021. Sementara itu rasio serapan tenaga kerja proyek PMA Kab. Tangerang pada tahun 2022

sebesar 10,03 yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja 9.026 orang dengan 900 proyek PMA.

L. Kepemudaan dan Olahraga

1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Indikator persentase organisasi pemuda yang akitf memberikan gambaran seberapa besar keaktifan organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Tangerang. Organisasi pemuda dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan daerah. Semakin besar persentasenya, maka peluang dalam mendukung pembangunan daerah semakin besar.

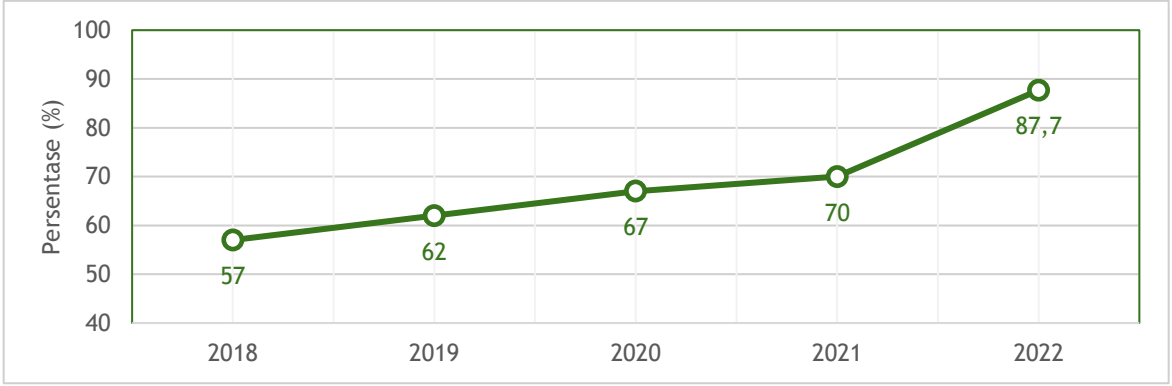


134Gambar 2. 135
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2019-2022
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Dari gambar di atas, organisasi pemuda di Kabupaten Tangerang yang aktif dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami tren yang meningkat, dari 40% menjadi 83,33%. Untuk kedepannya, angka yang cukup besar ini dapat dikelola pemerintah agar dapat mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang.

2) Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha muda adalah satu bentuk representasi kesehatan ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini Kabupaten Tangerang menganalisis melalui pertumbuhan wirausaha muda yang turut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi generasi muda dalam perekonomian dan membantu memotivasi lebih banyak orang muda untuk menjadi wirausaha.

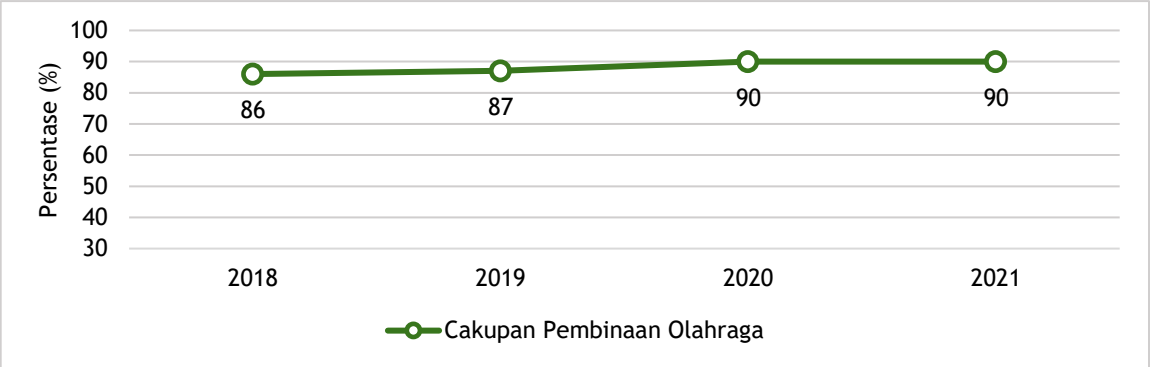


136Gambar 2. 137
Persentase Wirausaha Muda
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Berdasarkan grafik di atas, angka persentase wirausaha muda selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka persentase wirausaha muda mencapai 87.7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 wirausaha di Kabupaten Tangerang, 88 di antaranya berusia muda. Hal ini memberi arti bahwa dunia wirausaha di Kabupaten Tangerang memiliki peluang untuk terus berkembang karena didominasi oleh generasi muda.

3) Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda. serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan olahraga ini penting untuk mengembangkan atlet muda yang berprestasi dan menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat nasional. Cakupan pembinaan olahraga mencakup beberapa aspek seperti pelatihan atlet muda, pengembangan program pelatihan fisik, hingga pemberian fasilitas olahraga yang memadai dan dukungan finansial.

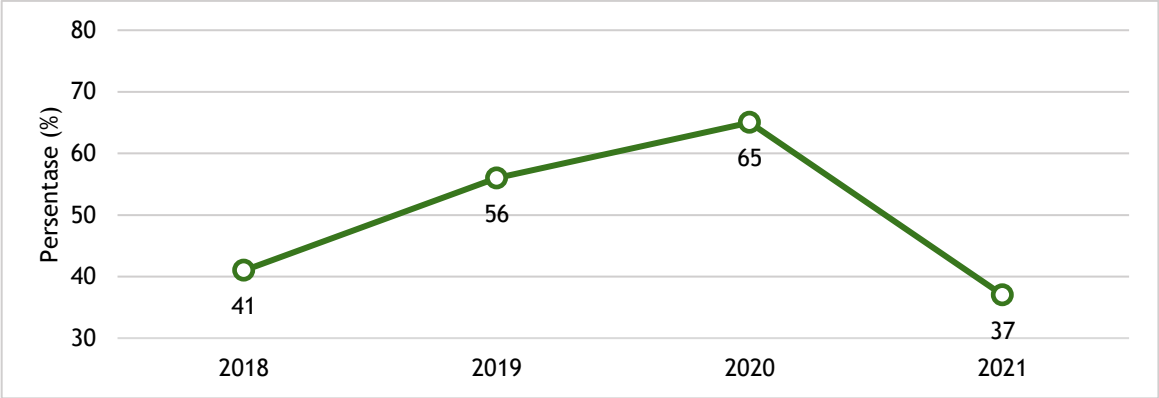


138Gambar 2. 139
Cakupan Pembinaan Olahraga
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang

Berdasarkan gambar di atas, cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2022 yang mencapai angka 90%. Angka tersebut dibentuk beberapa faktor seperti mulai dilaksanakannya berbagai pelatihan pembentukan atlet, penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan berbagai kompetisi lokal. Keseriusan pemerintah dalam membina olahraga di Kabupaten Tangerang diharapkan dapat berjalan konsisten dan memberikan hasil terbaik bagi sektor olahraga di Kabupaten Tangerang.

4) Cakupan Pelatih yang Bersetifikasi

Pembina atau pelatih olahraga yang kompeten dapat membentuk atlet-atlet yang kompetan pula. Sertifikat pelatih olahraga menjadi alat untuk memferifikasi kekompetenan tersebut.

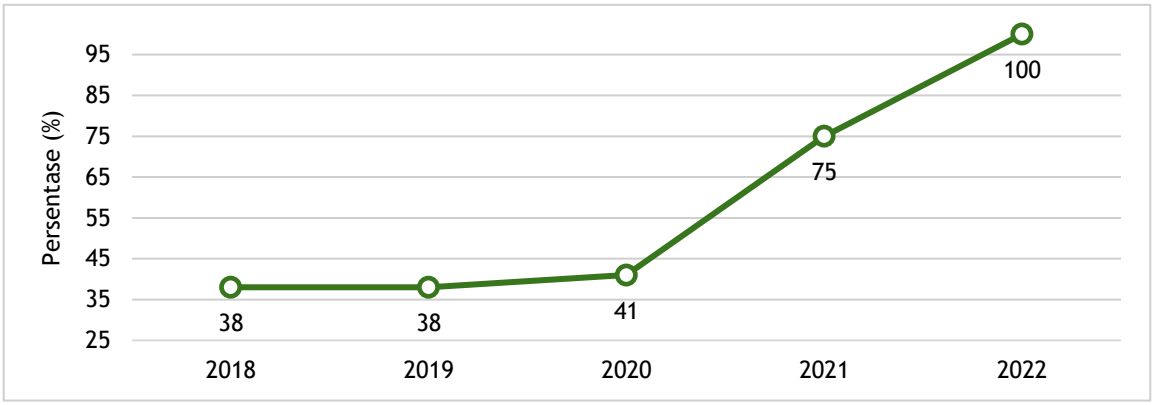


140Gambar 2. 141
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang

Gambar di atas menunjukan tren cakupan pelatih bersertifikasi yang meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Namun, di tahun 2021 cakupan tersebut mengalami penurunan drastis (65% di tahun 2020 menjadi 37% di tahun berikutnya).

5) Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda meliputi berbagai hal yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah. Dalam pengembangan olahraga. cakupan pembinaan atlet muda ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat daerah serta mencetak atlet muda yang berprestasi.

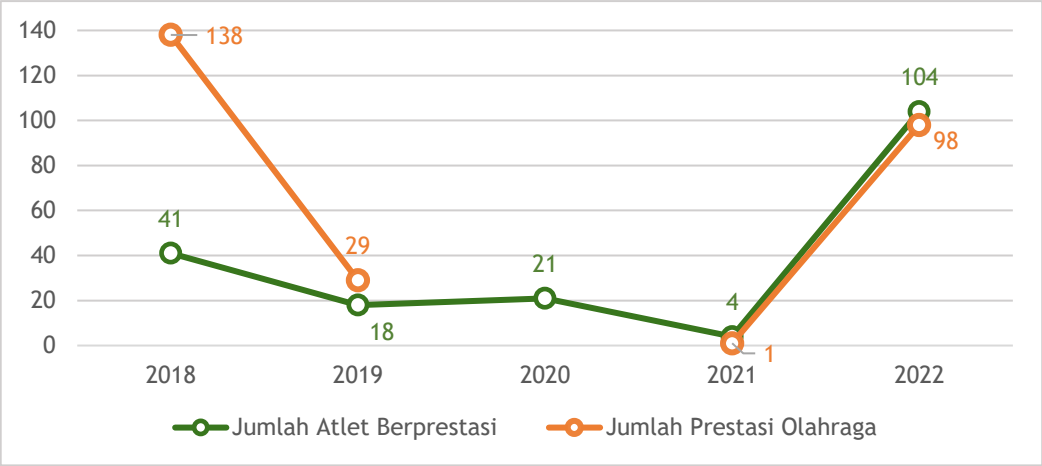


142Gambar 2. 143
Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Grafik di atas menunjukkan angka cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data di atas, cakupan pembinaan atlet muda mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 angka cakupan pembinaan atlet muda mencapai 100%. angka tersebut menunjukkan bahwa pembinaan atlet muda mulai diperhatikan oleh pemerintah. Pembinaan atlet muda yang bermuara pada terciptanya atlet berbakat daerah yang berprestasi.

6) Prestasi Olahraga

Muara dari upaya pengelolaan urusan olahraga adalah prestasi. Prestasi yang terus meningkat menunjukan bahwa urusan olahraga dikelola dengan baik. Prestasi dapat dinilai dari jumlah atle berprestasi dan jumlah prestasi olahraga



144Gambar 2. 145
Jumlah Atlet Berprestasi dan Prestasi Olahraga Kabupaten Tangerang
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Grafik di atas menunjukkan jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga di Kabupaten Tangerang. Jumlah prestasi mengalami penurunan pada tahun. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan pembinaan olahraga yang mulai dirintis kembali setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang lalu. Pada tahun 2022 telah banyak prestasi yang diraih seiring dengan mulai normalnya berbagai kompetisi olahraga. Namun dari jumlah tersebut, hanya terdapat 22 prestasi yang bertingkat nasional (Opendata Kabupaten Tangerang, 2023).

M. Statistik

1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

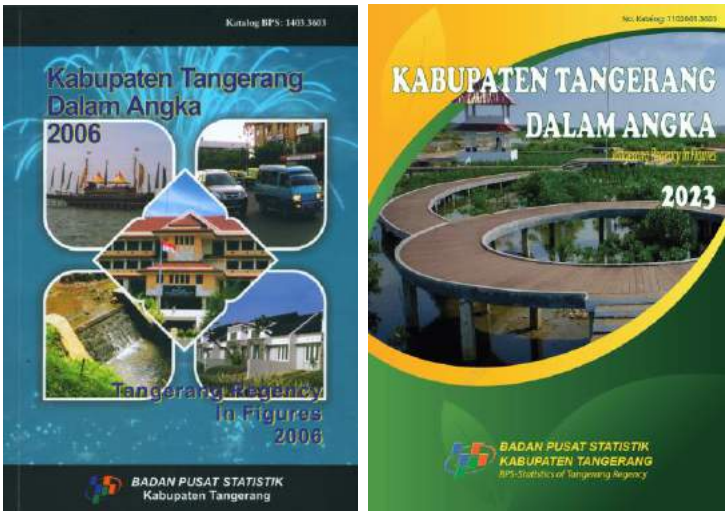
Sistem data dan statistik yang terintegrasi dimaksudkan untuk memudahkan publik dalam mendapatkan dan mengetahui segala informasi mengenai daerah. Pada saat ini, Kabupaten Tangerang memiliki sebuah laman integrasi data, yaitu Kabupaten Tangerang *Open Data*. Kabupaten Tangerang *Open Data* yang dapat diakses melalui alamat *opendata.tangerangkab.go.id* ini merupakan laman open data terintegrasi dengan fasilitas Portal Satu Data Nasional Indonesia yang menampilkan data dalam bentuk tabel, grafik, dan peta. Kedua laman tersebut diciptakan sebagai pintu data publik daerah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui, memperoleh, dan mempelajari informasi. Tersedianya akses satu atap terhadap data pemerintah kepada publik bermanfaat untuk mengkomunikasikan data dan analisis pemerintah melalui visualisasi dan artikel, menciptakan nilai dengan mendorong pengembangan aplikasi, serta memfasilitasi analisis dan penelitian (*opendata.tangerangkab.go.id*, 2023).



146Gambar 2. 147
Laman Muka Kabupaten Tangerang Open Data
Sumber: *opendata.tangerangkab.go.id*, 2023

2) Buku Kabupaten Dalam Angka

Kabupaten Tangerang telah mempublikasikan dokumen statistik Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2023 pada 28 Februari 2023 lalu. Kabupaten Tangerang Dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini menyajikan data dari berbagai bidang yang bersumber dari sensus/survei BPS maupun data dari instansi lain, yang diharapkan dapat membantu dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Tangerang. Apabila ditelusuri melalui laman badan pusat statistik, terdapat 12 dokumen Kabupaten Tangerang Dalam Angka yang sudah dipublikasikan, mulai dari tahun 2006, lalu dilanjutkan dengan tahun 2009 hingga tahun 2023 secara berurutan.



148Gambar 2. 149
Dokumen Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2006 dan 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang

3) Buku PDRB

Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang dipublikasikan ke dalam 2 jenis dokumen yaitu Buku PDRB menurut Lapangan Usaha dan

Buku PDRB menurut Pengeluaran. Dokumen terbaru yang dapat ditemukan di laman BPS memuat informasi statistik PDRB pada tahun 2014-2018, yang mana kedua dokumen dipublikasikan pada tahun 2019 lalu.



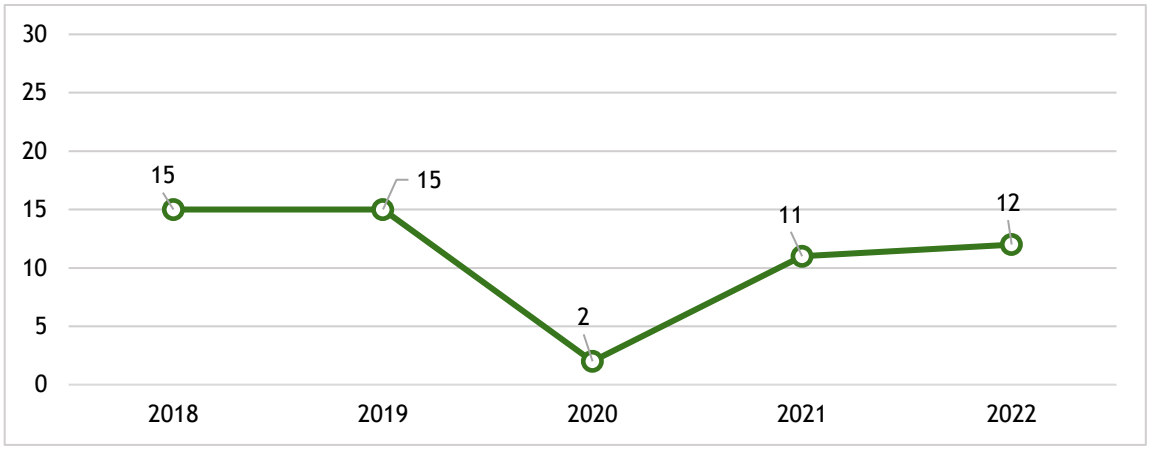
150Gambar 2. 151
Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tangerang Menurut Pengeluaran dan Lapangan Usaha Tahun 2014-2018
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

N. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil dinamika kehidupan yang ada di masyarakat. Hasil kebudayaan dari zaman dahulu cendrung dipertahankan karena memiliki nilai tersendiri dan sebagian di antaranya masih relefan dengan zama sekarang. Oleh karena itu beberapa hal yang dapat dijadikan indikator dalam urusan kebudayaan adalah penyelengaraan festival seni budaya dan pelestarian wujud-wujud kebudayaan.

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival seni budaya merupakan wujud apresiasi pada kebudayaan. Dengan mengapresiasi seni dan budaya, maka aktor-aktor yang ada di dalamnya dapat berperan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 2. 152
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Festival seni dan budaya di Kabupaten Tangerang selalu diselenggarakan setiap tahun. Walaupun masih berjumlah belasan, penyelenggraan dengan skala besar seperti festival dapat dinilai cukup banyak dalam satu tahun. Tahun 2020 dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang hanya berjumlah 2 disebabkan oleh adanya anomali kehidupan bermasyarakat, yaitu pandemi Covid-19.

2) Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Wujud-wujud kebudayaan masa lalu yang masih ada hingga saat ini dapat merepresentasikan identitas masyarakat dan karakteristik pengetahuan yang khusus. Oleh karena itu, beberapa dari wujud-wujud kebudayaan tersebut perlu dilestarikan.

Tabel 2. 46
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Tangerang yang Dilestarikan

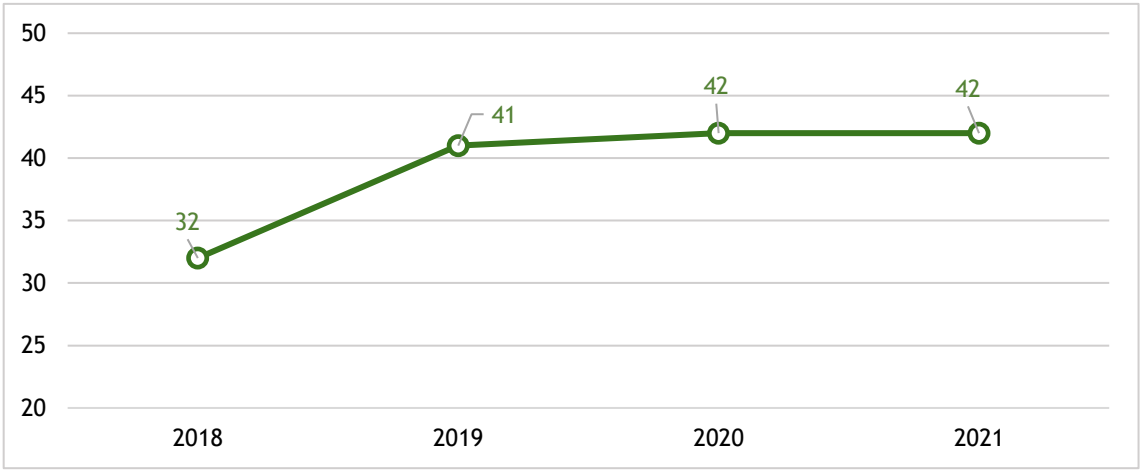
Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah (a)	90	102	113	121
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (b)	90	102	113	121
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan ((b)/(a)) (%)	100	100	100	100

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang dan Profil Statistik Kabupaten Tangerang

Pada tahun 2021 Kabupaten Tangerang memiliki 121 benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Mengalami peningkatan 34% dari tahun 2018. Setiap tahunnya semua benda, situs, dan kawasan tersebut berhasil dilestarikan terus menerus.

3) Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan revitalisasi dan inventarisasi pada sejumlah karya budaya. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021, karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi terus meningkat dari 32 karya budaya sampai 42 karya budaya.



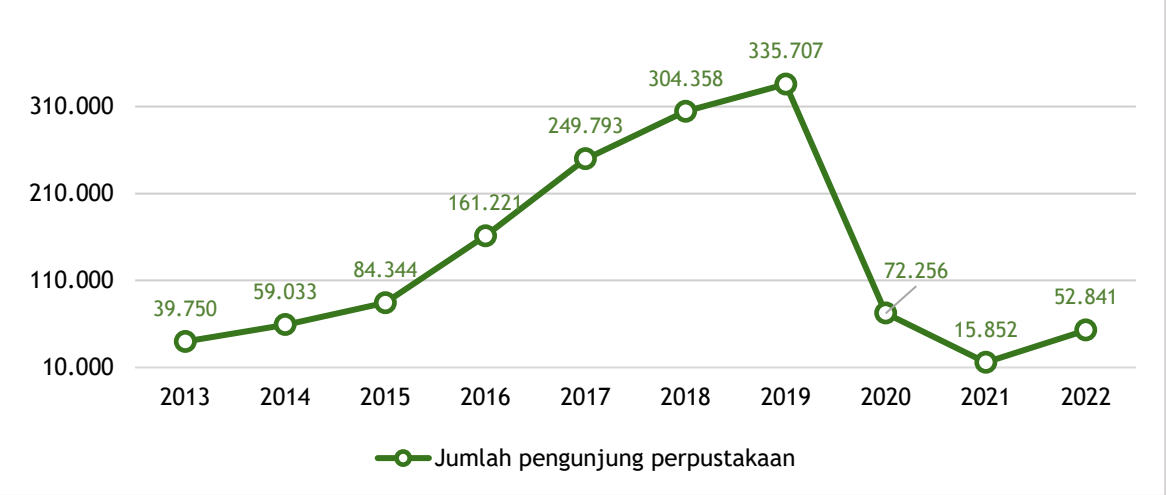
153Gambar 2. 154
Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi
Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang

O. Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat disimpannya buku-buku dan sumber bacaan. Pengelolaan perpustakaan yang baik dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi dan membaca. Hal tersebut dapat membantu pembangunan daerah melalui tambahan pengetahuan kepada masyarakat yang membaca.

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Setiap tahunnya perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang selalu menerima kunjungan. Kunjungan selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah.

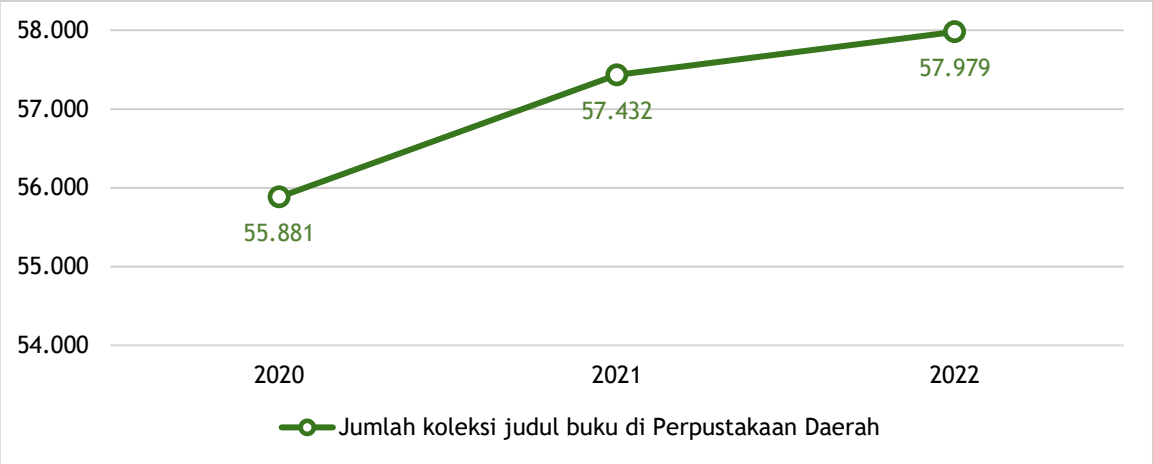


155Gambar 2. 156
Jumlah Kunjungan Perpustakaan
Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Jumlah kunjungan terbanyak terjadi tahun 2019 dengan jumlah kunjungan 334.707 pengunjung. Angka tersebut mengalami peningkatan pesat dari 6 tahun sebelumnya. Tiga tahun berikutnya jumlah kunjungan menurun drastis mendekati jumlah kunjungan tahun 2013. Saat ini teknologi telah banyak menyediakan sarana membaca secara online, oleh karena itu perlu strategi baru untuk dapat mendata masyarakat yang mengunjungi perpustakaan secara *offline* dan *online*.

2) Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah

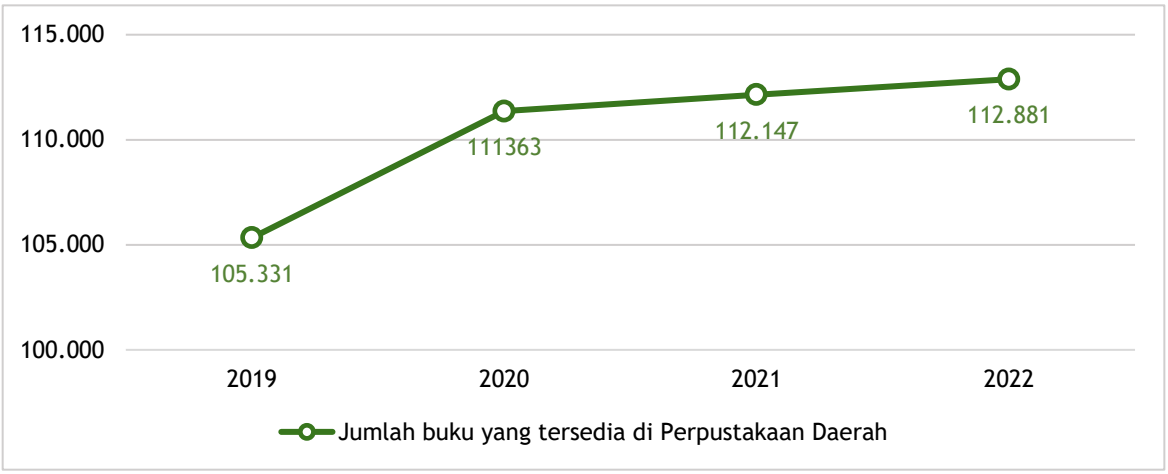
Koleksi judul buku yang banyak menandakan semakin banyaknya bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Pada tahun 2022, jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerangan adalah 57.979 judul buku (mengalami peningkatan dari tahun 2020).



157Gambar 2. 158
Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

3) Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Satu bahan bacaan mungkin sekali untuk akan dibaca oleh lebih dari satu orang pada saat yang sama. Oleh karena itu jumlah buku dari satu judul buku juga perlu untuk didata.



159Gambar 2. 160
Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Seiring meningkatnya jumlah koleksi judul buku, jumlah buku di perpustakaan daerah juga terus meningkat. Pada tahun 2022 jumlah buku yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang adalah 112.881 buku. Banyaknya jumlah buku setiap tahunnya adalah hampir dua kali lipat dari jumlah koleksi judul buku.

4) Rasio Jumlah Perpustakaan per Satuan Penduduk

Pada tahun 2022, jumlah perpustakaan terakreditasi di Kabupaten Tangerang adalah 20 perpustakaan. Jumlah tersebut berada di urutan ke-tiga di Provinsi Banten setelah Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan. Namun, jumlah tersebut perlu

dibandingkan dengan jumlah penduduknya agar terlihat daerah mana yang terlalu banyak peruntukan layananan bagi 1 perpustakaan.

Tabel 2. 47
Rasio Jumlah Perpustakaan Terakreditasi per Satuan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2022

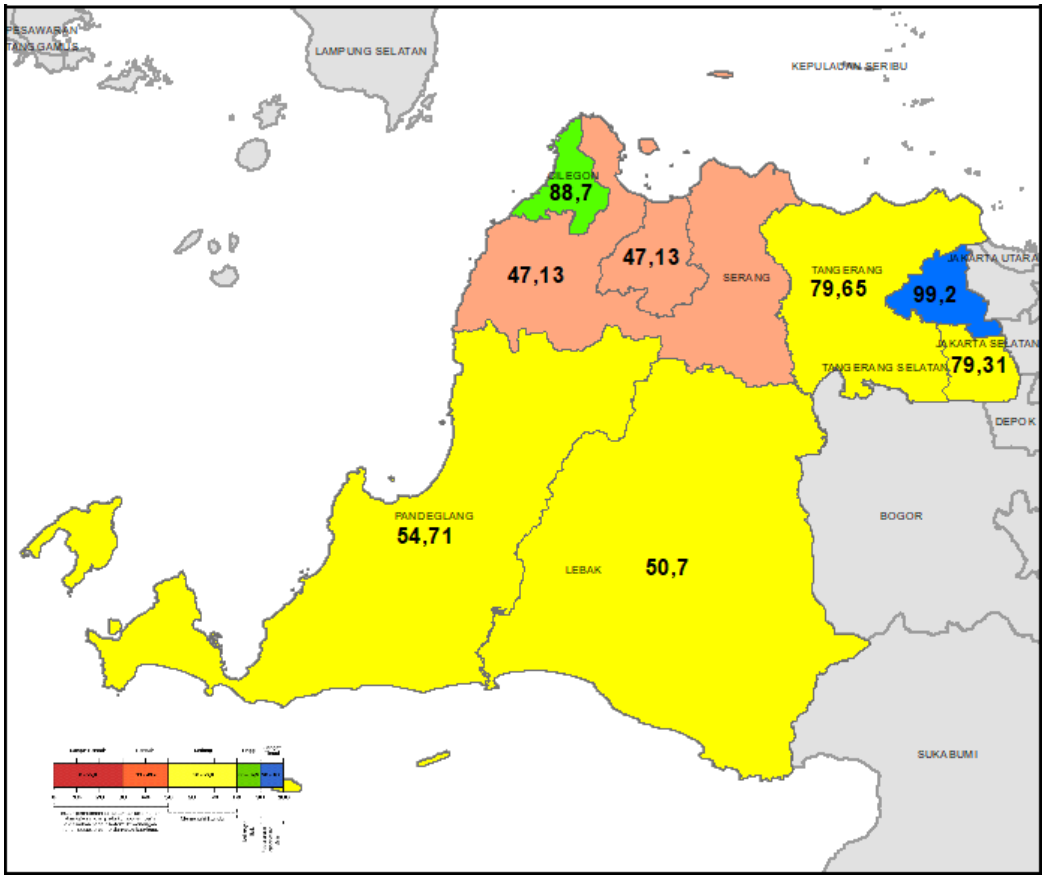
Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Penduduk	Rasio
Kab. Serang	62	1.678.915	1 : 27.079
Kota Cilegon	15	450.271	1 : 30.018
Kota Tangerang Selatan	39	1.378.466	1 : 35.345
Kota Serang	14	720.362	1 : 51.454
Kota Tangerang	20	1.930.556	1 : 96.528
Kab. Lebak	9	1.433.853	1 : 159.317
Kab. Pandeglang	7	1.307.090	1 : 186.727
Kab. Tangerang	8	3.352.472	1 : 419.059
Provinsi Banten	**174**	**12.251.985**	**1 : 70.414**

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

Peruntukan layanan terbanyak bagi satu perpustakaan di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang dengan layanan 70.414 penduduk untuk 1 perpustakaan. Hal ini merupakan kondisi yang kurang baik karena terlalu banyak penduduk yang perlu dilayani 1 perpustakaan.

5) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, indikator kunci urusan perpustakaan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2022, IPLM Kabupaten Tangerang adalah 79,65. Angka tersebut masuk dalam kategori sedang dan menempati urutan ketiga terbesar di Provinsi Banten.

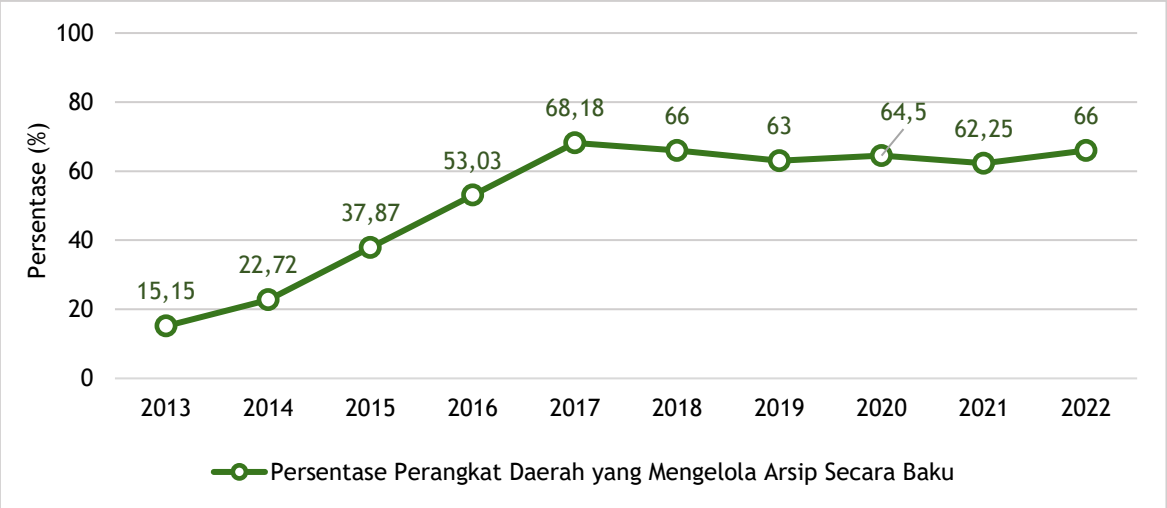


Gambar 2. 161
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (PLM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022
Sumber: Perpusnas, 2022

P. Kearsipan

1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku merujuk pada proses atau sistematisasi yang konsisten dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dengan mengikuti standar atau pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, keamanan dan aksesibilitas arsip dalam jangka waktu yang lama. Standar-standar tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi atau instansi yang melakukan pengelolaan arsip.



162Gambar 2. 163
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Pada tahun 2022, persentase perangkat daerah yang mengelola arsipnya secara baku adalah sebanyak 66%. Angka tersebut meningkat pesat dari tahun 2013 yang besarnya hanya 15,15%. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2017 dengan persentase sebesar 68,18%. Masih terdapat 30-40% perangkat daerah yang belum mengelola arsipnya secara baku.

2) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Sumber Daya manusia pengelola kearsipan perlu untuk ditingkatkan agar menunjang dan meningkatkan kualitas kinerja. Tidak tersedianya sumber daya Arsiparis yang kompeten menjadi salah satu permasalahan yang ada di di bidang urusan kearsipan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program pelatihan SDM pengelola kearsipan agar mampu mengelola arsip sesuai standar dan berkualitas.

Tabel 2. 48
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1	1	1	1	1

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

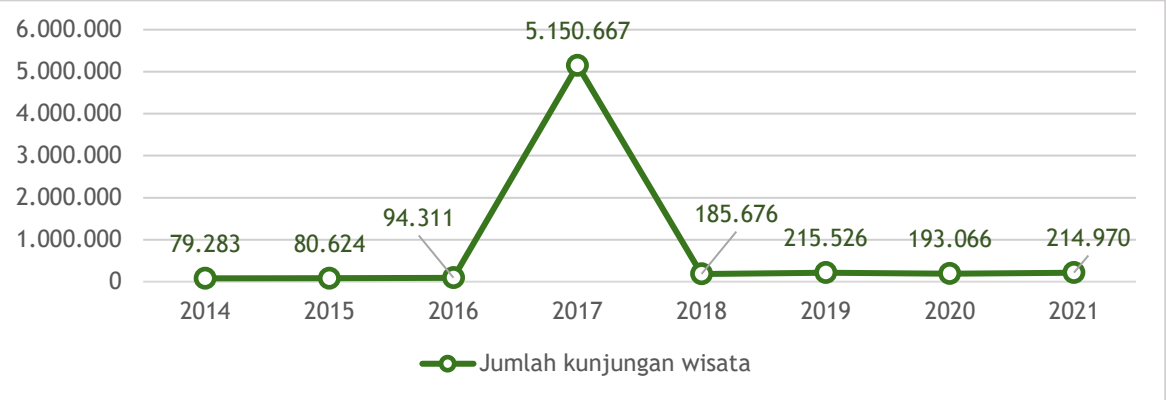
Gambar di atas menunjukkan kegiatan yang diikuti oleh SDM pengelola kearsipan. Berdasarkan grafik diatas kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan selalu diadakan minimal sekali dalam satu tahun untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan. Hal tersebut dilakukan guna menunjang pengelolaan kearsipan yang berkualitas dilingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1) Jumlah Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.



164Gambar 2. 165
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021
Sumber: RPJM Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan Profil Statistik Kabupaten Tangerang

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Tangerang pada tahun pada tahun 2021 adalah 214.970 wisatawan. Angka tersebut meningkat pesat dari tahun 2014 yang hanya terdapat 79.283 wisatawan. Berdasarkan tren tersebut, jumlah kunjungan ke depannya dapat terus meningkat lagi.

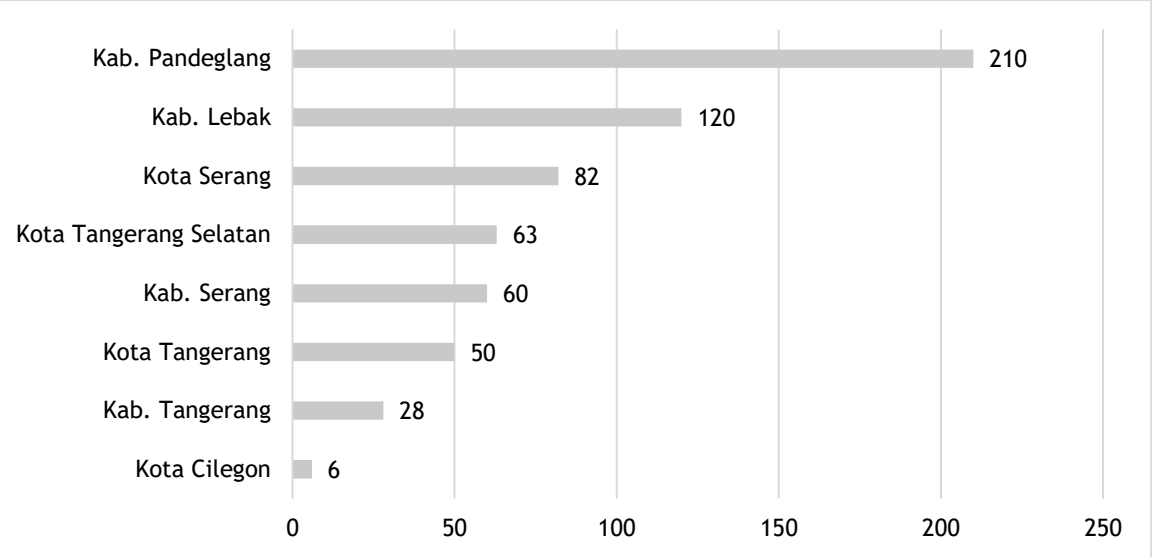
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Tangerang relatif kecil. Pada tahun 2018, secara berturut-turut, daerah dengan jumlah kunjungan wisata dari yang terbanyak adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 49
Jumlah Wisatawan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupate/Kota	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Total
Kab. Pandeglang	2.579	3.102.472	3.105.051
Kab. Lebak	357	680.102	680.459
Kab. Tangerang	28.212	74.085	102.297
Kab. Serang	1.470	8.392.828	8.394.298
Kota Tangerang	237.996	1.277.760	1.515.756
Kota Cilegon	46.182	866.772	912.954
Kota Serang	1.215	2.208.570	2.209.785
Kota Tangerang Selatan	8.992	1.379.551	1.388.543
BANTEN	327.003	17.982.140	18.309.143

Sumber: Pariwisata Banten Dalam Angka 2019

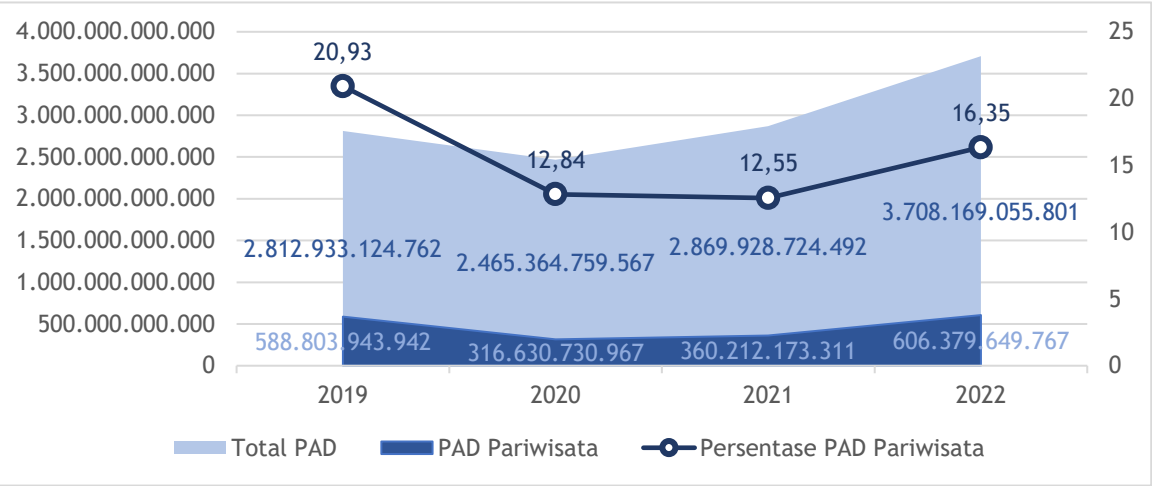
Apabila dilihat berdasarkan jumlah objek wisata, jumlah objek wisata di Kabupaten Tangerang memang relative lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Pada tahun 2022, jumlah objek wisata di Kabupaten Tangerang adalah 28 objek wisata (urutan ke-tujud dari 8 kabupaten/kota).



Gambar 2. 166
Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021
Sumber: BPS Provinsi Banten

2) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peran dalam perekonomian Kabupaten Tangerang. Kunjungan wisatawan, terutama dari luar daerah Kabupaten Tangerang, meningkatkan jumlah uang yang ada di Kabupaten Tangerang.



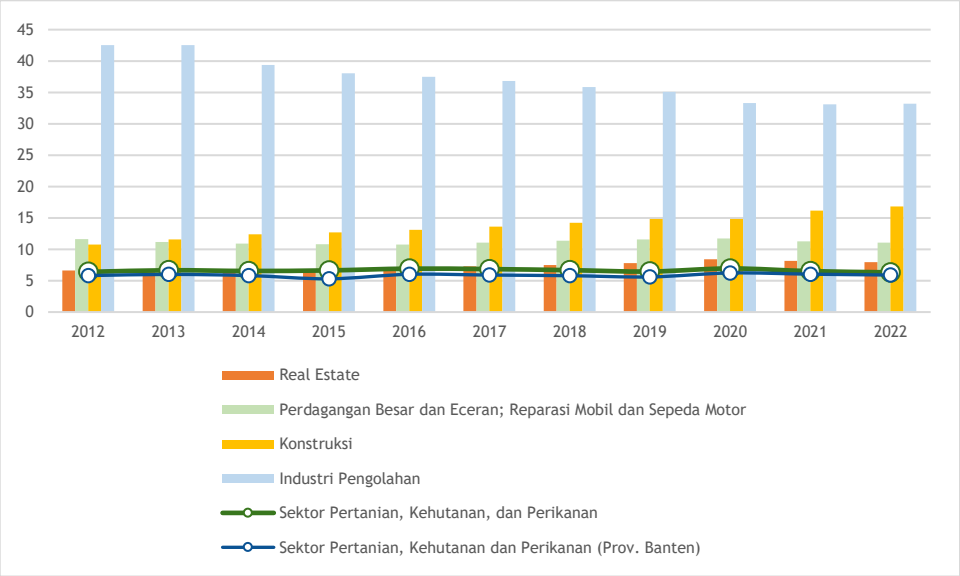
167Gambar 2. 168
Kontribusi PAD Sektor Pariwisata
Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang

Pada tahun 2022, kontribusi PAD sektor wisata terhadap PAD total adalah 16,35%. Jumlah tersebut terjadi penurunan dari tahun 2019 karena di tahun 2022 merupakan tahun pemulihan dari kondisi pandemic Covid-19.

B. Pertanian

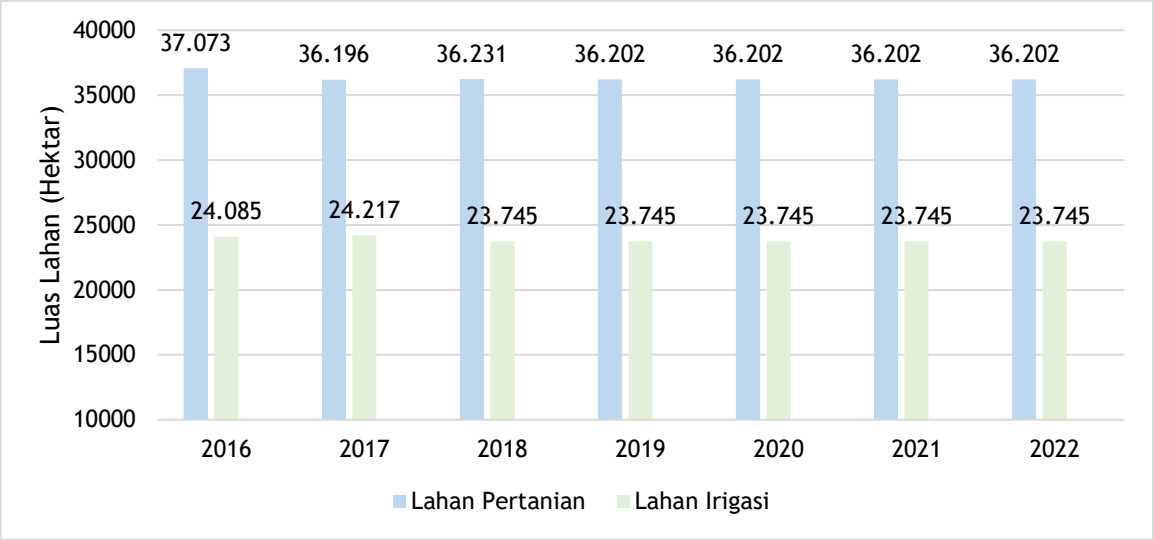
3) Kondisi Pertanian

Dalam 10 tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki angka yang lebih kecil dibandingkan sektor dominan seperti industri pengolahan; kontruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; serta real estat.



169Gambar 2. 170
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dibanding Kontribusi Sektor Lain terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2013-2023

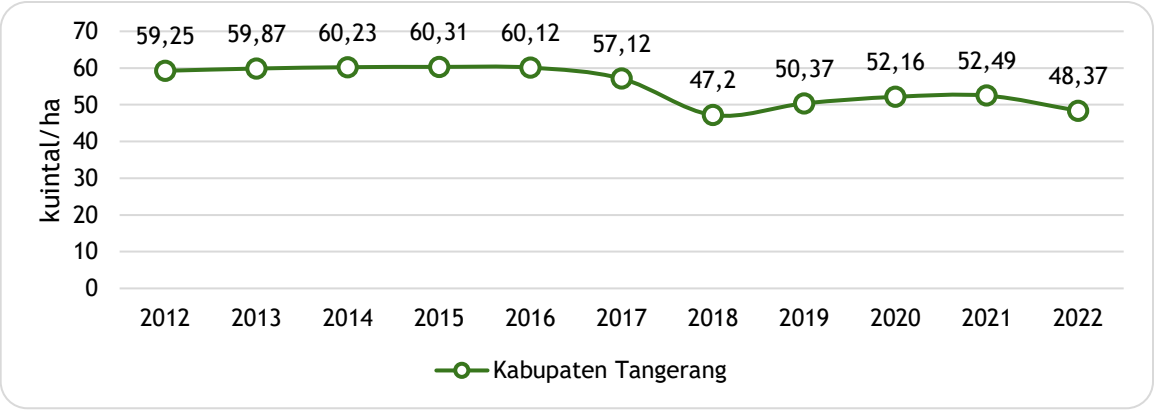
Berdasarkan RTRW Provinsi Banten tahun 2023-2024, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kabupaten yang diarahkan untuk pengembangan kawasan peruntukkan pertanian di Provinsi Banten, bersama dengan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang. Dalam beberapa tahun terakhir, luas lahan pertanian di Kabupaten Tangerang cenderung stagnan, setelah mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 29 hektar. Sementara itu, kecenderungan yang serupa juga terjadi pada luas lahan irigasi yang mengalami penurunan sebesar 472 hektar di tahun 2018 dan bersifat stagnan di tahun berikutnya.



171Gambar 2. 172
Luas Lahan Pertanian dan Lahan Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten Tahun 2016-2022

4) Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama

Produktivitas pertanian merupakan angka yang menunjukkan kemampuan lahan pertanian dalam memproduksi tanaman tertentu. Angka tersebut didapatkan dari produksi tanaman pertanian pangan dibagi luas areal lahan pertanian. Selama 10 tahun terakhir, angka produktivitas sempat mengalami penurunan secara drastis di tahun 2017 dan 2018 sebesar masing masing 3 kuintal/ha dan 9,92 kuintal/ha. Angka tersebut kemudian naik di tahun-tahun berikutnya meskipun belum melampaui angka tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Selain itu, produktivitas padi sebagai tanaman pangan utama di Kabupaten Tangerang masih berada di bawah beberapa kabupaten di Provinsi Banten. Pada tahun 2021, angka produktivitas padi tertinggi di Provinsi Banten berada di Kota Tangerang sebesar 58,89 kuintal/ha, Kota Serang sebesar 57,27 kuintal/ha, dan Kota Cilegon sebesar 54,05 kuintal/ha. Kabupaten Tangerang menempati posisi keempat tetapi masih berada di atas Provinsi Banten (51 kuintal/hektar).



173Gambar 2. 174
Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

5) Populasi dan Produksi Peternakan

Produk hasil peternakan merupakan salah satu sumber penyediaan protein hewani selain hasil perikanan. Peternakan merupakan bagian dari pertanian yang terbagi ke dalam kelompok ruminansia besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda), ruminansia kecil (kambing, domba, dan babi), dan unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila). Dalam 10 tahun, jumlah populasi dan produksi kelompok didominasi oleh jenis sapi potong untuk kelompok ruminansia besar serta domba untuk kelompok ruminansia kecil. Sementara itu, secara jumlah produksi total selama 10 tahun, jenis yang mendominasi adalah ayam ras pedaging dengan jumlah populasi terbanyak di tahun 2018. Selain produksi daging, kelompok unggas di Kabupaten Tangerang juga memproduksi telur dengan jumlah terbanyak berasal dari jenis ayam ras petelur.

Tabel 2. 50
Jumlah Populasi Ternak berdasarkan Jenis di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi Potong	43270	32.397	40.534	41.345	42.283	43.510	35.214	36.143	29.089	25.886	12.100
Sapi Perah	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerbau	12252	9.829	9.799	9.995	10.109	10.402	7.138	7.345	7.142	8.463	1.707
Kuda	19	20	35	0	0	0	0	34	34	34	34
Kambing	126822	104.431	80.296	81.902	87.715	90.259	92.849	165.920	143.038	143.589	103.055
Domba	103526	96.293	90.248	92.053	98.586	101.445	104.357	30.191	35.799	28.441	33.625
Babi	5872	4.785	3.721	3.795	4.065	4.183	4.303	4.427	7.218	4.425	4.425
Ayam Buras	2.724.983	2.602.620	2.444.000	2.492.880	2.669.812	2.747.237	2.826.082	1672901	2.838.108	1412947	1412947
Ayam Ras Petelur	2.945.804	3092244	2.800.000	2.856.000	2.727.790	5.613.792	4.713.574	6.558.000	0	0	0
Ayam Ras Pedaging	20.426.720	18215720	21.381.000	21.808.620	23.356.485	36.076.662	86.621.901	60407800	0	0	0
Itik	859.482	9140273	309.000	391.819	419.628	431.797	431.797	784580	889.139	786010	797100
Itik Manila	n/a	n/a	n/a	78.030	83.568	85.992					

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2013-2023

Tabel 2. 51
Jumlah Produksi Daging Ternak berdasarkan Jenis di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Jenis Ternak	Jumlah Produksi (ton)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi Potong	5.665	7.117	7.243	7.967	8.746	8.860	10.415	10.908	1.623	2.016	1.664
Sapi Perah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerbau	1347	116	184	203	187	189	191	183	12	13	183
Kuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kambing	1403	925	528	800	648	656	674	636	559	597	640
Domba	1310	1.247	788	1.453	957	970	996	940	1.530	923	944
Babi	145	165	179	188	182	184	186	178	9	9	180
Ayam Buras	878	1035	1314	5288	1483	1502	877	827	841	1456	853
Ayam Ras Petelur	718	33114	1767	2461	2905	2943	2588	2318	348	2707	2401
Ayam Ras Pedaging	26.785	833	20380	21396	18559	28930	34262	31080	0	0	0
Itik	622	267	205	385	164	166	109	74	99,6	203	103
Itik Manila	n/a	n/a	n/a	51,5	53	54	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2013-2023

Tabel 2. 52
Jumlah Produksi Telur Unggas berdasarkan Jenis Ternak di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Jenis Ternak	Jumlah Produksi (kg)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ayam Buras	1.354.000	1.663.000	3.260.000	3.194.502	4.442.403	4.528.540	4.646.280	4.170.155	4.128.453	4.087.163	4.522.978
Ayam petelur	34.250.000	32.127.000	26.376.000	26.908.875	36.849.329	36.867.750	37.520.110	35.867.704	35.509.027	n/a	n/a
Itik	6.865.000	3.786.000	2.902.000	3.388.385	3.448.702	3.531.470	3.623.290	3.251.991	2.812.484	3.187.276	3.232.668

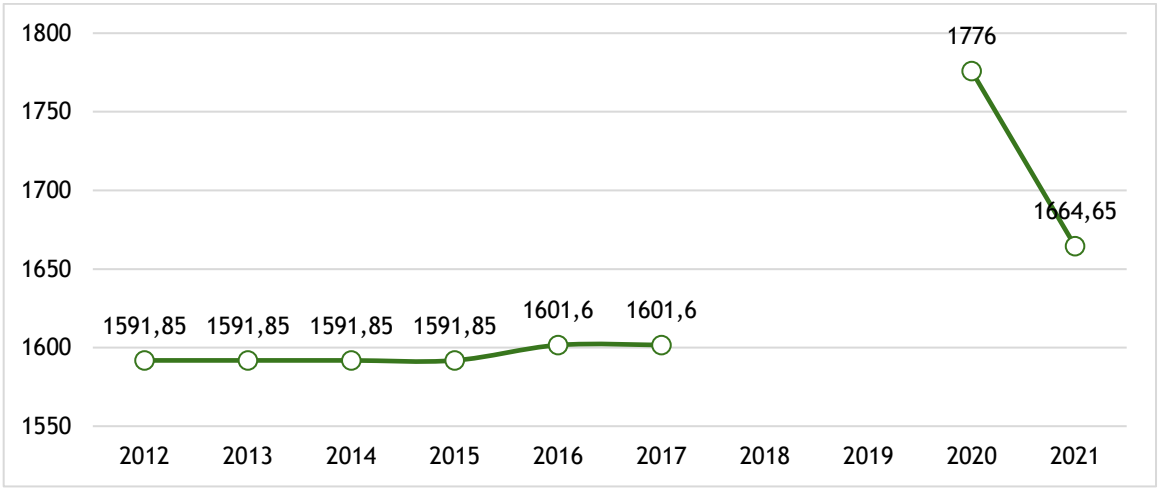
Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2013-2023

C. Kehutanan

Hutan merupakan wilayah tertentu yang ditumbuhi pepohonan lebat dan jenis tumbuhan lain, yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan secara tetap. Tujuan penetapan tersebut adalah adanya kejelasan mengenai status, letak, dan batas kawasan hutan yang terjamin secara hukum. Kawasan hutan terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu Hutan Konservasi, Hutan Produksi, serta Hutan Lindung.

6) Luas Lahan Hutan

Berdasarkan grafik berikut, luas lahan hutan di Kabupaten Tangerang cenderung stabil. Pada tahun 2016, luas lahan hutan meningkat dengan angka relatif kecil sebesar 9,75 hektar. Angka luas lahan hutan kembali naik secara signifikan pada tahun 2020 menjadi 1776 hektar meskipun data pada dua tahun sebelumnya tidak tercatat. Diasumsikan, peningkatan luas pada tahun-tahun tersebut disebabkan adanya upaya restorasi hutan atau pembaharuan data. Namun, luas lahan hutan kembali menurun di tahun 2021 sebesar 111,35 hektar. Penurunan tersebut dikaitkan dengan peningkatan aktivitas masyarakat seiring pemulihan kondisi pascapandemi yang mengakibatkan perubahan guna lahan.



Tabel 2. 53
Luas Lahan Hutan di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2021
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Persentase Jumlah Pelanggan Listrik

Persentase distribusi listrik untuk setiap rumah tangga pada tahun 2021 di Provinsi Banten termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sudah mencapai 99,3% pada tahun 2021. Rasio elektrifikasi memperlihatkan Kabupaten Tangerang sudah mencapai angka 97,31%, berada di posisi kelima di Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang juga menjadi penyumbang terbanyak

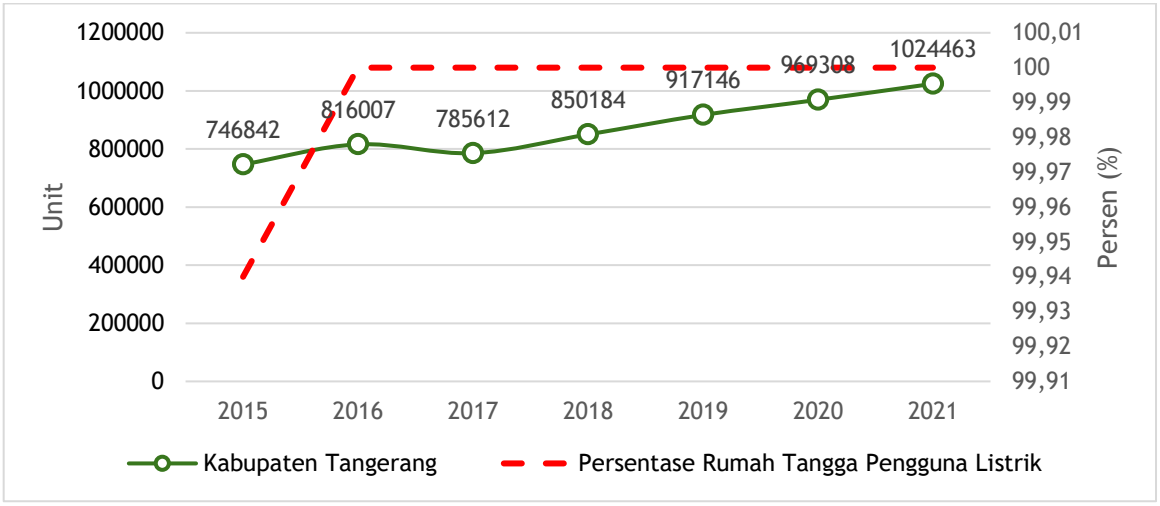
dalam jumlah rumah tangga belum berlistrik di Provinsi Banten dengan angka 27.132 rumah tangga.

Tabel 2. 54
Persentase Jumlah Pelanggan Listrik di Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (PLN)	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN	Jumlah Rumah Tangga Belum Berlistrik	Rasio Elektrifikasi (%)
Kab Pandeglang	349.747	2.534	15.687	95,75%
Kab Lebak	360.543	119	23.266	93,81%
Kab Tangerang	980.206	1.062	27.132	97,31%
Kab Serang	451.125	0	15.425	96,66%
Kota Tangerang	577.676	0	40	99,99%
Kota Cilegon	120.682	0	1.167	98,81%
Kota Serang	225.912	1.519	2.449	98,67%
Kota Tangerang Selatan	455.534	0	147	99,97%
Provinsi Banten	3.521.425	5.234	85.313	99,30%

Sumber: Laporan Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2021

Dalam kurun waktu 7 tahun, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah pelanggan listrik Kabupaten Tangerang mencapai 1.024.463 pelanggan. Hal ini memengaruhi angka persentase rumah tangga pengguna listrik yang telah mencapai 100% sejak tahun 2016.

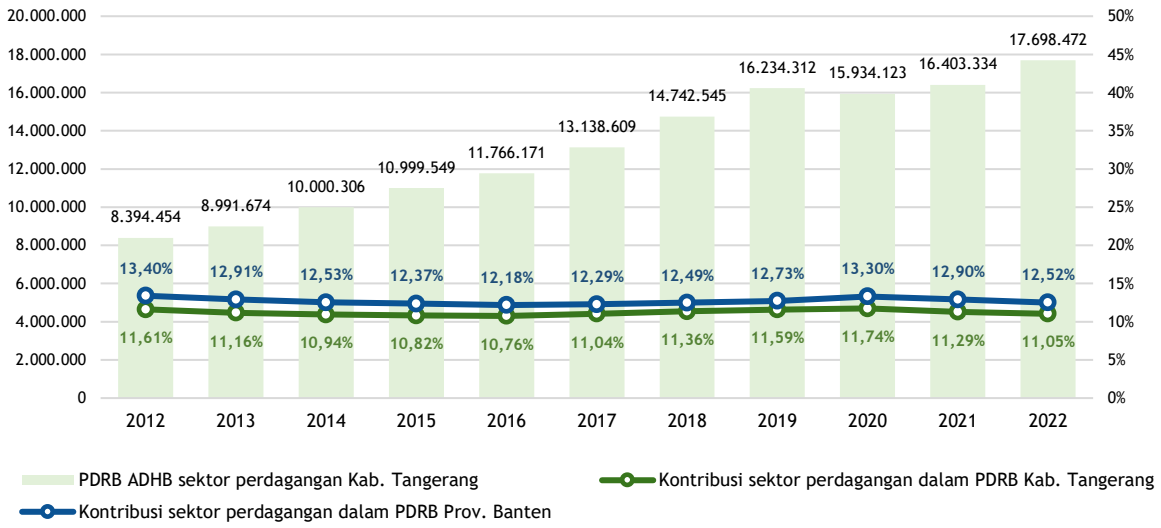


175Gambar 2. 176
Jumlah Pelanggan Listrik dan Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

E. Perdagangan

1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

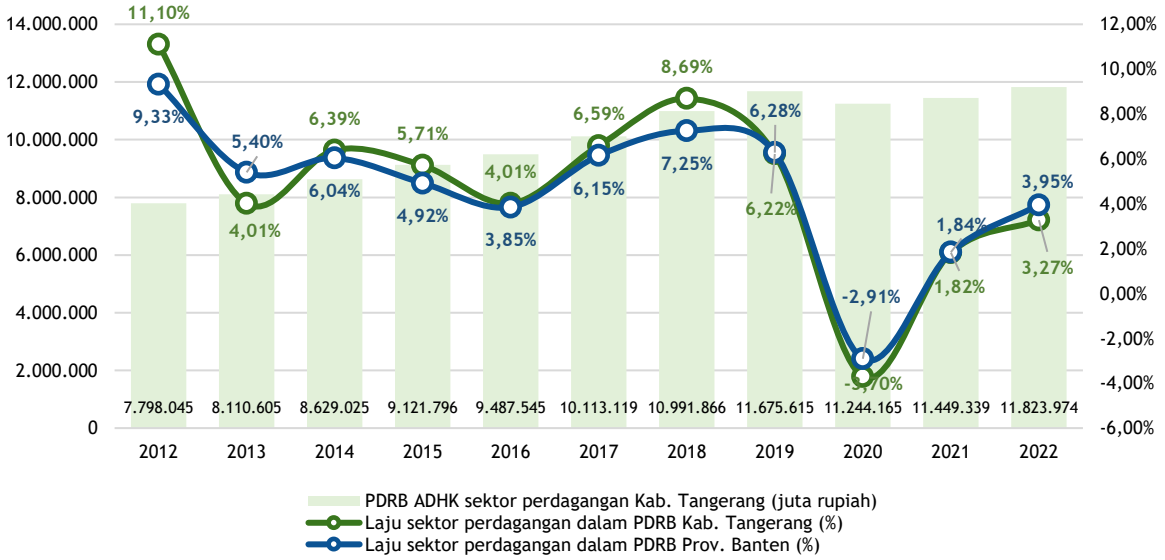
Lapangan usaha perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang menopang perekonomian Kabupaten Tangerang. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha perdagangan dalam ekonomi wilayah Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 177
Persentase Kontribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, PDRB ADHB lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar 17.698,47 miliar rupiah dengan persentase kontribusi sebesar 11,05% terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tangerang. Sementara itu, kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB ADHB Banten sebesar 12,52%.

2) Laju peningkatan PDRB sektor perdagangan



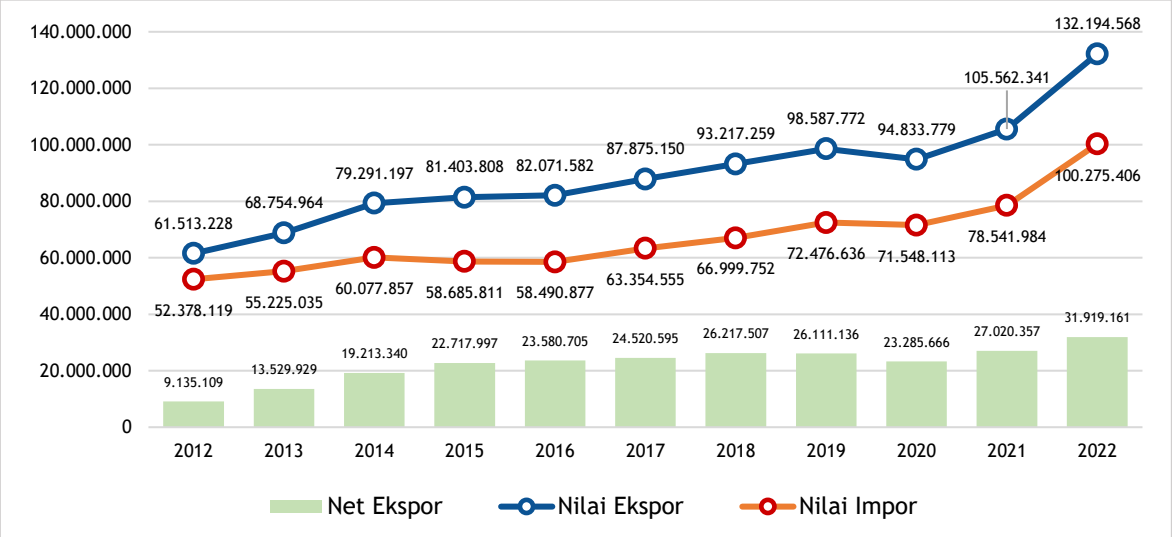
Gambar 2. 178
Laju PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, PDRB ADHK lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar

11.823,97 miliar rupiah dengan laju 3,27% dari tahun 2021. Capaian laju tersebut lebih rendah dibanding Provinsi Banten yang sebesar 3,95% dari tahun 2021.

3) Ekspor bersih perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan nilai total ekspor dikurangi nilai total impor dari wilayah tertentu. Nilai ekspor bersih positif mengindikasikan surplus perdagangan, jika sebaliknya nilai ekspor bersih negatif mengindikasikan defisit perdagangan.



179Gambar 2. 180
Nilai Ekspor, Nilai Impor, Nilai Net Ekspor PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Berdasarkan grafik di atas bahwa pada tahun 2022, nilai net ekspor Kabupaten Tangerang mencapai 31.919,16 miliar rupiah dengan nilai ekspor mencapai 132.194,57 miliar rupiah dan nilai impor mencapai 100.275,41 miliar rupiah. Berdasarkan tren dalam 10 tahun terakhir, net ekspor Kabupaten Tangerang cenderung meningkat kecuali tahun 2019-2020 sebagai dampak dari pandemi.

Tabel 2. 55
Ekspor Bersih Perdagangan Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

Jenis Usaha	Tahun		
	2018	2019	2020
(64) ALAS KAKI	64.558.677.087	49.666.470.634	36.606.634.539
(03) MOLUSKA	4.176.966.300	5.533.883.108	9.933.618.018
(52) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) Kain Tenun	892.010.264	5.788.514	7.613.624.974
(39) BARANG PLASTIK	2.100.354.359	1.583.599.265	4.247.208.005
(94) LAMPU	87.651.897	1.748.433.295	3.857.216.465
(61) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) Kapas	8.886.933.863	7.170.846.616	3.410.322.098
(72) LOGAM TIDAK MULIA DAN PRODUKNYA	106.717.379	1.379.631.499	1.473.238.391
(33) KOSMETIK	156.986.393	214.850.802	1.374.400.930
(74) TEMBAGA DAN PRODUKNYA	581.311.018	1.466.115.353	1.364.168.763
(69) PRODUK KERAMIK	1.347.674.443	1.172.879.500	1.295.786.513
(44) KAYU OLAHAN	1.797.744.854	1.560.161.027	1.235.183.375
(19) MAKANAN OLAHAN	924.479.527	981.231.185	1.109.715.227
(42) BARANG DARI USUS	81.959.486	1.798.937.618	1.087.139.365

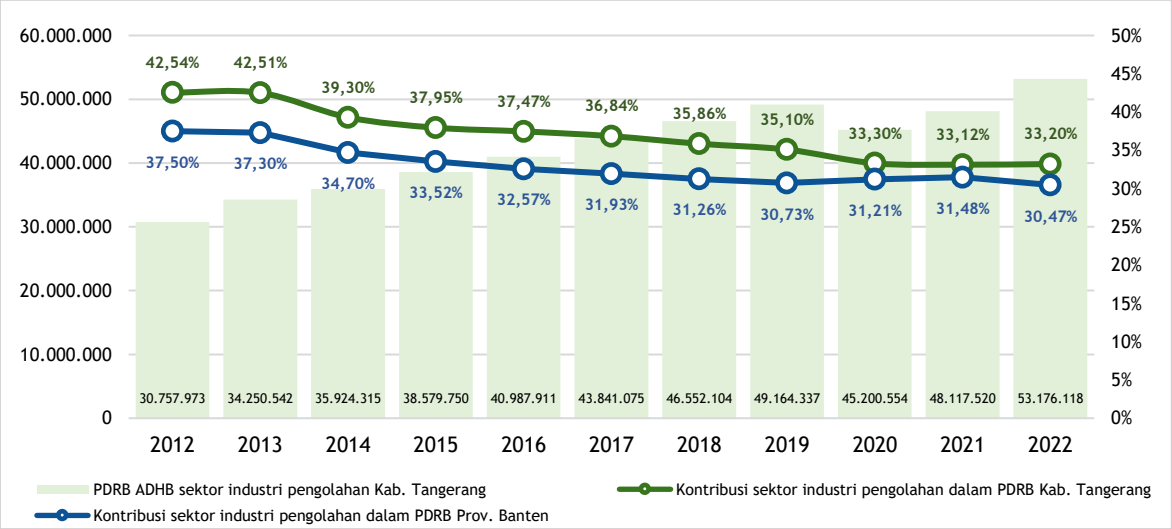
(87) KENDARAAN SELAIN YANG BERGERAK DIATAS REL DAN BAGIANNYA	1.217.021.156	1.358.602.736	970.468.267
(62) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) Wol kapas serat	2.706.688.470	2.713.970.206	894.275.840
(85) MESIN DAN PERALATAN ELEKTRIS	555.688.346	366.334.253	786.516.689
(70) GELAS	1.006.193.882	779.380.495	640.683.253
(96) TERMOS	248.326.998	246.710.201	226.585.059
(95) MAINAN DAN PERALATAN OLAH RAGA	401.036.343	581.495.478	222.966.185
(55) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) Nilon. Polyester	252.619.901	101.441.186	60.864.994
	92.087.041.966	**80.430.762.971**	**78.410.616.950**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tangerang

Tabel diatas merupakan rincian ekspor bersih perdagangan menurut jenis usaha di Kab. Tangerang. Pada tahun 2022, jenis usaha dengan kontribusi terbesar dalam ekspor bersih perdagangan adalah (1) jenis usaha Alas Kaki yaitu sebesar 36,1 miliar rupiah (46,69%); (2) jenis usaha Moluska yaitu sebesar 9,9 miliar rupiah (12,67%); dan (3) jenis usaha Tekstil dan Produk Tekstil yaitu sebesar 7,6 miliar rupiah (9,71%).

F. Perindustrian

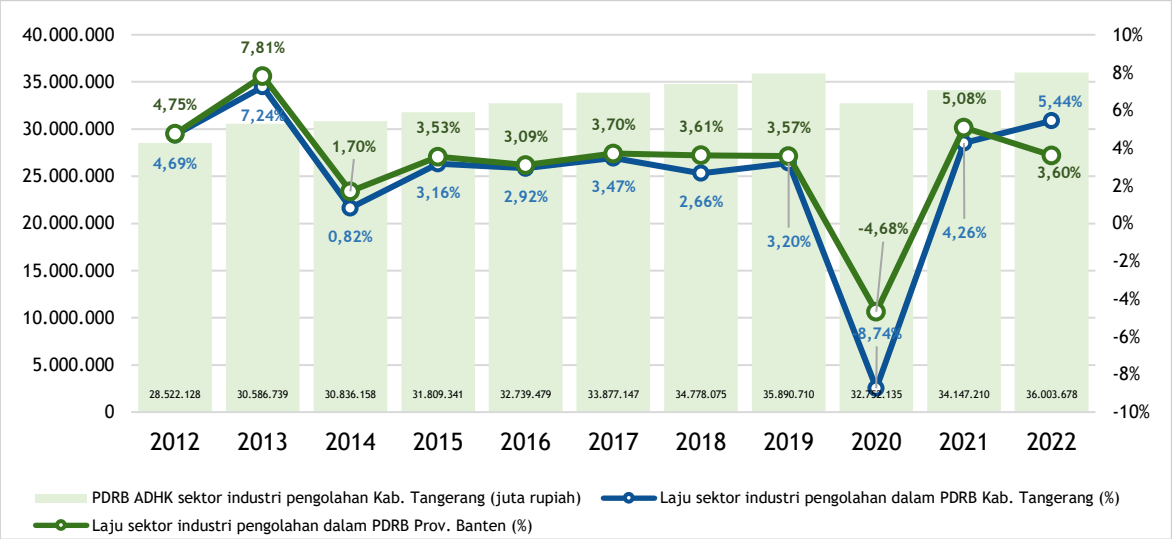
1) Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB



Gambar 2. 181
Persentase Kontribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas bahwa pada tahun 2022 PDRB ADHB lapangan usaha industri pengolahan Kab. Tangerang mencapai 53.176,12 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 33,2% terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tangerang. Berdasarkan tren dalam 10 tahun terakhir, kontribusi lapangan usaha industri pengolahan cenderung menurun. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur ekonomi Kab. Tangerang yang mengarah pada sektor tersier (jasa).

2) Laju peningkatan PDRB sektor industri pengolahan

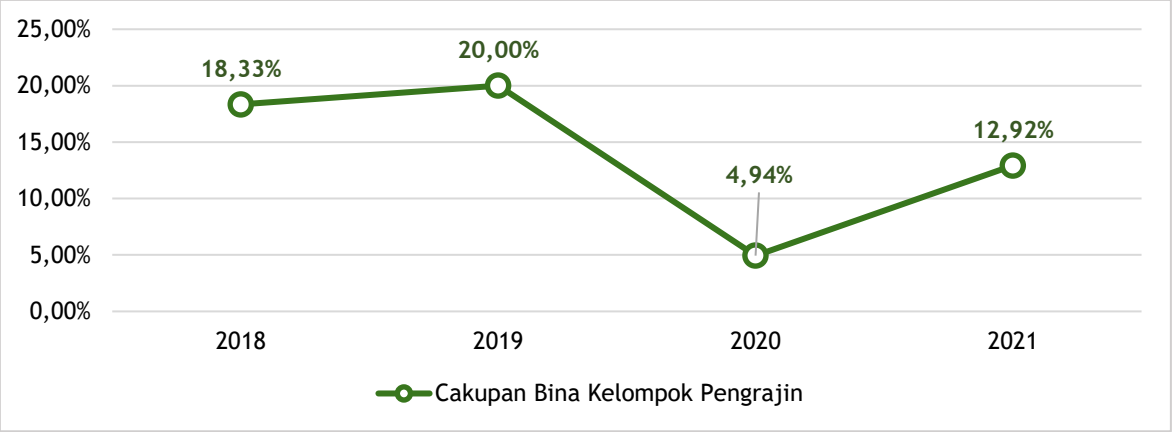


Gambar 2. 182
Laju PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas bahwa pada tahun 2022, PDRB ADHK lapangan usaha industri pengolahan Kabupaten Tangerang mencapai 36.003,68 miliar rupiah dengan laju peningkatan 5,44% dari tahun 2021. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding Provinsi Banten yang sebesar 3,60% tahun 2021-2022. Berdasarkan dokumen RPJMD Kab. Tangerang 2019-2023 bahwa permasalahan sektor perindustrian adalah kinerja dan daya saing produk industri yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan relokasi industri ke wilayah lain, ekonomi lokal yang belum berkembang, kelembagaan ekonomi yang lemah, serta dampak dari pandemi.

3) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan dari bina kelompok pengrajin adalah untuk membantu para anggotanya dalam meningkatkan keterampilan. produktivitas. dan pendapatan mereka melalui kerjasama dan akses ke berbagai sumber daya yang berkualitas.



183Gambar 2. 184
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tangerang dalam Dokumen RPD Kab. Tangerang 2024-2016 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas bahwa cakupan dari bina kelompok pengrajin Kab. Tangerang dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Maka dari itu, diperlukan strategi optimalisasi pembinaan pelaku kelompok pengrajin.

G. Transmigrasi

Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang memiliki Program Transmigrasi Regional yang dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja urusan Transmigrasi. Kegiatan transmigrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan penduduk. Tabel dibawah ini merupakan jumlah dan lokasi penempatan transmigrasi.

Tabel 2. 56
Jumlah Transmigran Berdasarkan Daerah Penempatan Tahun 2015-2018

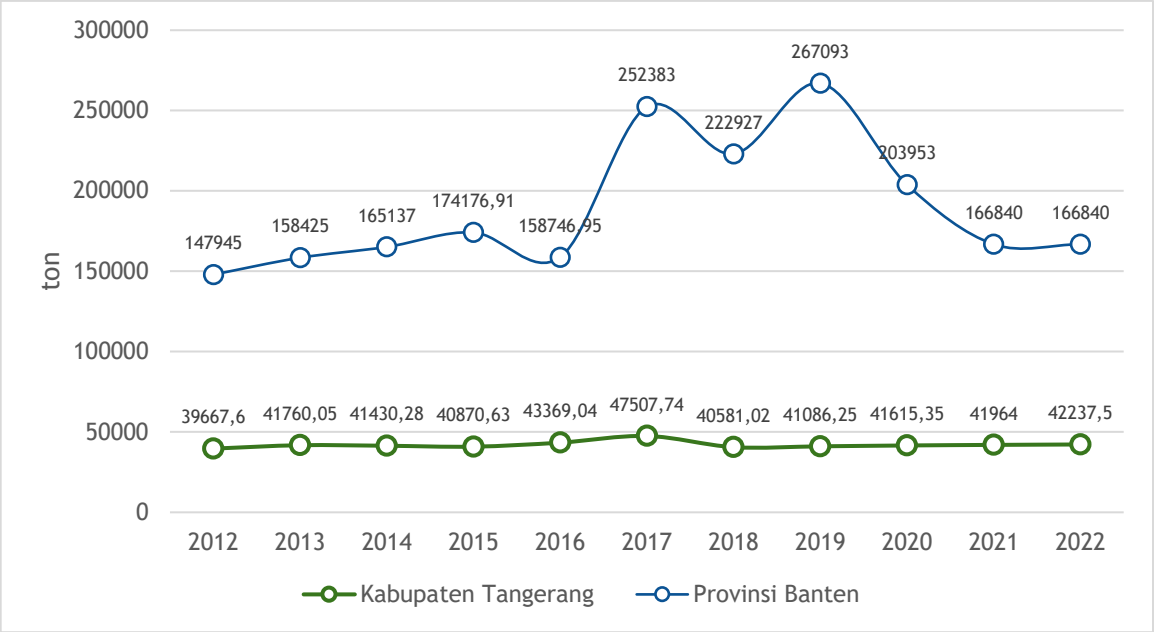
Daerah Penempatan	Jumlah		Keterangan
	KK	Jiwa	
UPT Tokala Atas Ds. Tokala Atas Kec Bungku Utara Kab, Morowali Utara Sulawesi Tengah	25	86	Tahun 2015
UPT Tokala Atas Ds. Tokala Atas Kec Bungku Utara Kab, Morowali Utara Sulawesi Tengah	10	40	Tahun 2016
UPT Kabera Ds. Bahoe Reko-Reko Kec Bungku Barat Kab Morowali Sulawesi Tengah	5	22	Tahun 2017
UPT Janja Kawasan Basidondo Ds. Janja Kec. Lampasio Kab. Toi-Toli Sulawesi Tengah	5	21	Tahun 2018
Jumlah	**45**	**168**	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabpaten Tangerang dalam Dokumen Renstra Tahun 2019-2023

H. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah bagian dari industri yang termasuk di dalamnya kegiatan mendapatkan dan mengolah hasil laut dan air tawar di antara ikan, udang, dan hasil perikanan lain. Hasil produksi perikanan berasal dari kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum, serta kegiatan budidaya di tambak, kolam, sawah, jaring apung maupun budidaya laut. Perikanan tidak hanya berkontribusi sebagai sumber protein masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian.



185Gambar 2. 186
Produksi Perikanan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten Tahun 2012-2022

Produksi perikanan di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan sebesar hampir dua kali lipat di tahun 2017, sebesar 68014,48 ton. Namun, di tahun-tahun berikutnya angka tersebut mengalami penurunan dan mulai tahun 2020 terjadi pertumbuhan dengan angka yang tidak signifikan.

Produksi perikanan di Kabupaten Tangerang juga dikelompokkan berdasarkan jenis ikan sesuai lokasi tangkap. Meskipun data yang tersedia tidak lengkap selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data, terdapat beberapa jenis ikan yang berpotensi menjadi komoditas unggulan. Jenis ikan budidaya dan ikan perairan umum dengan angka produksi yang besar setiap tahunnya adalah bandeng, mujair, dan lele. Sementara itu, komoditi ikan laut dengan jumlah produksi tahunan yang tinggi di Kabupaten Tangerang adalah teri, kembung, kerang darah, selar, dan kerang bulu.

Tabel 2. 57
Produksi Ikan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Ikan sesuai Lokasi Budidaya Tahun 2012-2022

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (ton)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tambak (Air Payau)											
Bandeng	5659	6234,9	6402,9	6381		7697,63	7899,33	7555,84	7115,31		7409,3
Belanak	529,5	481	481	184,4		174,7	181,24	212,4	215,99		212,75
Udang Windu	17,7	24,8	26,7	25,1		30,54	33,34	31,71	27,35		26,51
Udang Putih	331	370,8	477	463		378,48	390,13	155,5	157,99		260,38
Udang Api Api	394	440,1	458,5	463,9		418,6	431,47	393,5	358,79		260,38
Mujair	1775	1953,5	1722	1671		2159,75	2097,35	2764,4	2743,2		2762,43
Udang Vaname/Udang Lainnya	8,9	58,2	55,2	72,8		103,1	60,56	17,9	16,3		
Kerang Hijau											
Kerapu	5,5	13	13,4	14,6		24,5	27,11	26,33	26,76		21,98
Rumput Laut	140,8	576300	948,4	905		829,14	851,47	972,16	962,86		1014,52
Kakap						4,5	6,62	7,53	8,21		7,96

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (ton)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kolam											
Mujair	595	628,5	593,5	586,4		614,6	549,64	652,81	845,69		822,41
Ikan Lainnya	68										
Mas	126	71,8	74,8	88,3		73,66	77,26	79,03	80,13		73,52
Nila	75	131	204,3	178,8		164,29	170,35	153,57	140,53		136,71
Patin	43	60	60	54,3		70,64	74,28	84,63	40,21		39,28
Gurame	3160	54	54	54,7		57,1	60,37	66,41	54,3		52,9
Lele		3867	4156,3	3852,2		6312,66	6439	6500,21	7318,79		7370,62
Jaring Apung											
Mujair				100		182,9	164	147	260		133,63
Ikan Lainnya											
Mas	708	125	67	66		71,6	73,4	73,77	84,69		73,43
Nila	1160	395	288	274,1		416,8	299	392,65	256,04		394,49
Budidaya Laut											
Kerang Hijau	3052,2			4848		6679,76	16147,3				
Nilem	3358										

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2012-2023

Tabel 2. 58
Produksi Ikan Perairan Umum di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2012-2022

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (ton)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujair/Nila	32,42	23,04	37,32	27,85		25,36	18,86				
Ikan Lainnya	15,82	11,67	28,8	15,98				51,85	36,3		
Lele	24,58	14,69	22,6	17,95		16	14,36	56,15	30,77		
Tawes	10,77	7,02	11,37	8,94		6,5	6,93	45,09			
Gabus	9,86	7,5	11,15	8,9		8	7,91	22,54	12,92		
Sepat Siam	8,76	4,97	8,05	6,86		5,5	5,48	32,35	7,91		
Udang Lainnya	5,69	4,46	7,23	5,73		5,7	4,19				
Nilem							11,98				

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2012-2023

Tabel 2. 59
Produksi Ikan Laut di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2012-2022

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (ton)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Peperek	660	655	2094,5	360		625	537,8	487,33	491,22		521
Manyung	1026	1085	285,7	1982		1100	950,9	860,93	870,04		879
Biji Nangka	432	432	1715,2	36,8		465	388.5	363,11	366,33		370
Bambangan	0	627,5	116,5			650	583,2	489,58	495,38		501
Kerapu	409	449	453,2	853,3		500	401,4	364,8	368,41		372
Kakap	310	288	249,6	263,6		305	254,8	235,89	239,36		242
Kurisi	385	258	711,7	517,5		270	236,6	213,59	216,47		219
Ekor Kuning	876	935,5	199,1	736,3		955	1033	916,21	926,24		936
Tiga Waja	270	316	616,2	80,8		220	300,2	257,44	260,18		263
Cucut	469	500	277,2	338,4		575,8	523,8	432,62	437,1		442
Pari	451	452	452,7	368,6		462	391,8	364,61	368,41		372
Selar	1452	1551	304,4	1815		1562	1672,5	2081,61	210,22		212
Kuwe	580	594	306,1	304,8		602	523,8	473,09	478,73		484
Tetengkek	638	628,5	387,2	309,8		619,9	755,1	999,02	1009,49		1020
Belanak	388	401	76,7	223,2		515,2	480,3	428,87	432,94		438
Teri	1610	1590	441,1	999,6		1457	1650,3	1761,21	1779,62		1799
Japuh	280	322	271,4	434,4		335	309,4	269,24	272,67		276
Tembang	477	485	1329,9	329,8		480	475,5	468,97	474,57		480
Kembung	1072	1120	2882,6	2163,7		1186	1179,3	1113,87	1126,05		1138
Tenggiri	902	906	266,8	903,6		909	806	722,1	730,58		738
Layur	613	635	236,9	381		612,9	548,9	498,76	503,71		509
Ikan Lainnya	783	783	177,8	865,2		702	850,6	983,33	2033,56		2055
Rajungan	663	568	219,8	3509,9		570	640,8	477,4	482,89		488
Udang Putih	588	541	1439,1	3,8		455	553,4	473,47	478,73		484
Udang Lainnya	650	614		149,8		655	538,5	486,58	1323,79		1338
Kerang Bulu	1386	1423	312	275		1035	1416,1	1604,58	1471,57		1487
Kerang Darah	1418	1665		444,5		1605	1510,2	1513,71	1529,85		1546
Cumi	903	956	408,5	946		1078	1112,4	1246,59	1436,19		1451

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2012-2023

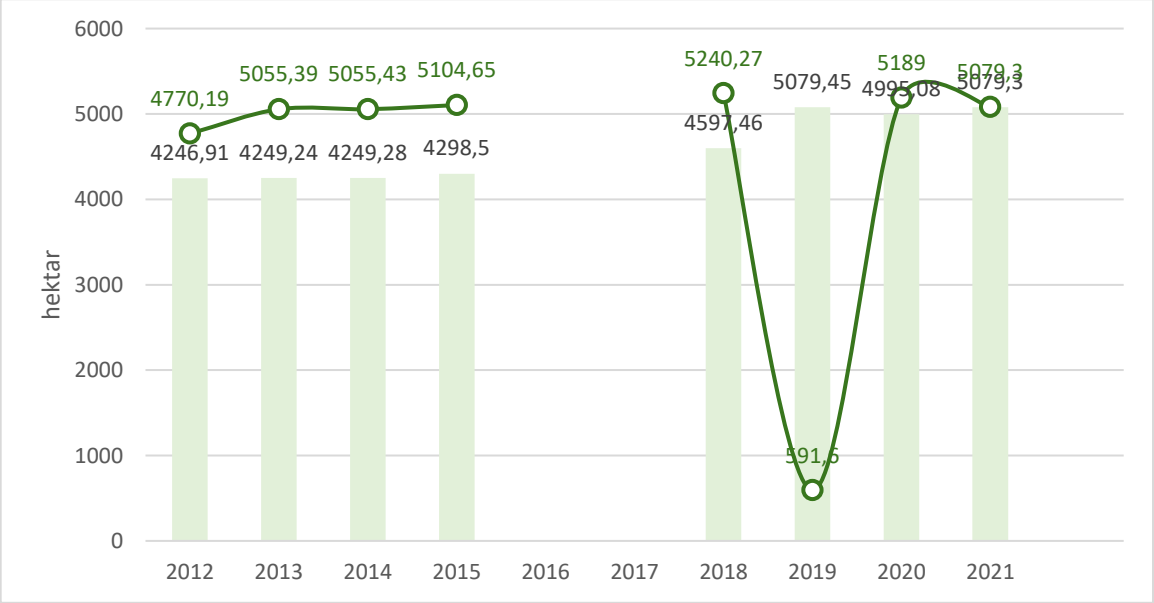
2) Luas Lahan Perikanan

Secara umum, lahan perikanan di Kabupaten Tangerang terbagi ke dalam 2 jenis berdasarkan jenis usaha perikanan, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan di area laut dengan garis pantai sepanjang 51,2 km, dan area perairan umum seperti rawa, situ, bekas galian pasir, maupun sungai. Sementara itu, perikanan budidaya dilakukan di area tambak, kolam, sawah, jaring apung, dan budidaya laut.

Tabel 2. 60
Luas Lahan Perikanan berdasarkan Jenis Usaha Perikanan di Kabupaten Tangerang tahun 2012-2022

Jenis Usaha Perikanan	Luas Lahan Perikanan (hektar)									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perikanan Tangkap										
Laut	-	-	-	-	N/A	51,2	51,2	51,2	51,2	-
Perairan Umum (Rawa & Situ, Bekas Galian Pasir, Sungai)	555,88	806,15	806,15	806,15	N/A	193,997	591,6	591,6	193,9	-
Perikanan Budidaya										
Tambak	4115,9	4115,93	4115,93	4115,93	N/A	-	4466,5		4466,5	4466,5
Kolam	131,01	130,97	131,01	130,97	N/A	-	130,97		130,97	130,9
Sawah	-	-	-	-	N/A	-	-		-	-
Japung	-	0,74	0,74	50	N/A	-	-		397,617	481,981
Budidaya Laut	-	1,6	1,6	1,6	N/A	-	-		-	-
Jumlah	4770,19	5055,39	5055,43	5104,65	N/A	N/A	5240,27	591,6	5189	5079,3

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2013-2022 (diolah)



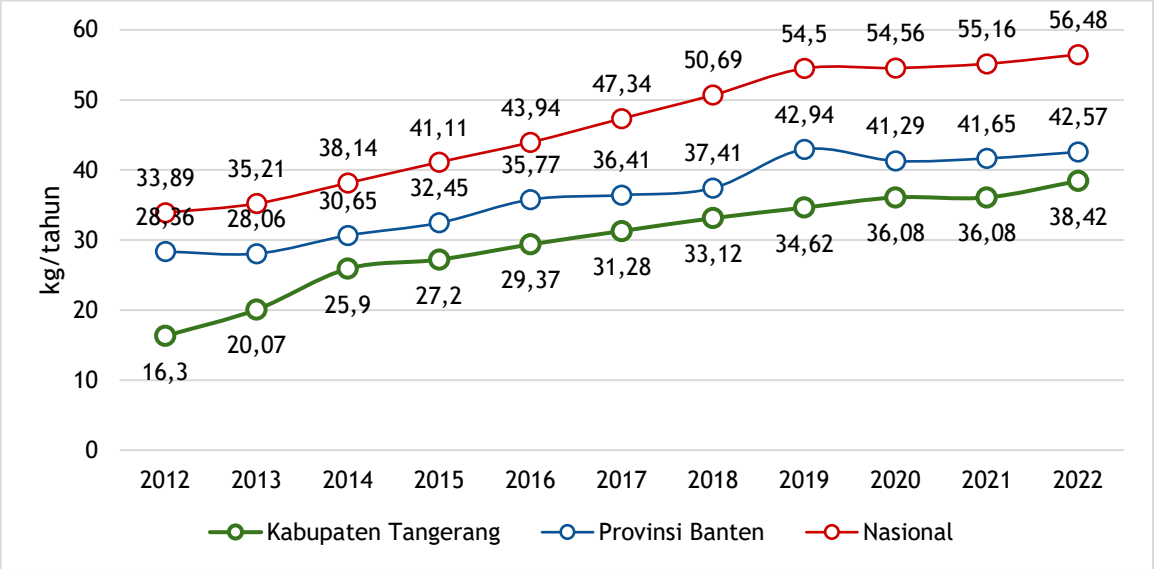
Gambar 2. 187
Luas Lahan Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022
Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2013-2022 (diolah)

Luas lahan perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 tidak ditemukan data yang mencatat luas lahan perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Sementara itu di tahun 2019 terjadi penurunan luas lahan perikanan yang sangat drastis

karena tidak tercatatnya luas lahan perikanan budidaya. Kemudian di tahun 2020 angka luas lahan perikanan kembali naik dan cenderung stabil hingga tahun 2021.

3) Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun

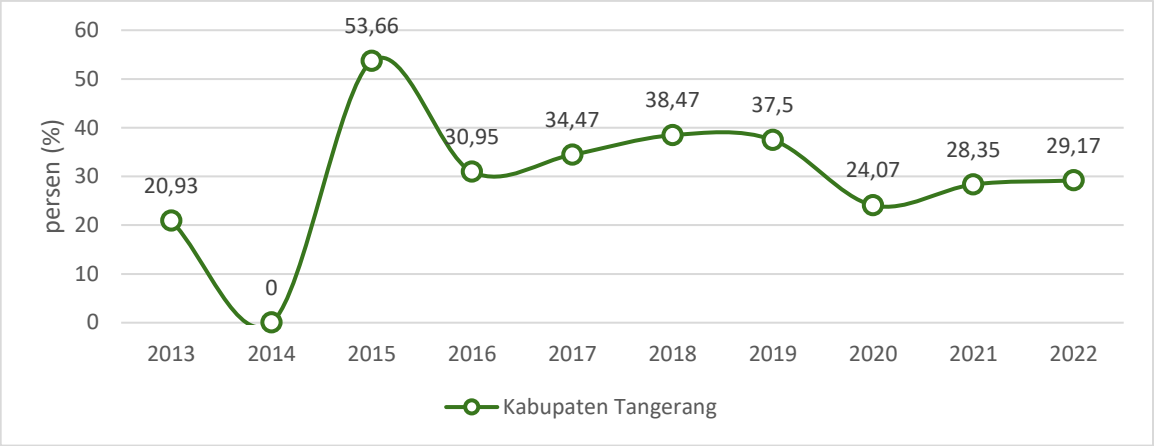
Angka konsumsi ikan adalah nilai konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam kg per-kapita setiap tahun. Dalam 10 tahun, angka konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat juga naik. Namun, nilainya masih cukup jauh di bawah angka konsumsi ikan Provinsi Banten maupun target konsumsi ikan nasional sebesar 62,5 kg perkapita/tahun.



Gambar 2. 188
Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, Kementerian Kelautan dan Perikanan

4) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Bina Kelompok Nelayan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam membantu dan memfasilitasi pengembangan kelompok masyarakat nelayan tradisional maupun modern, dengan tujuan mendapatkan manfaat dan penguatan posisi di pasar.

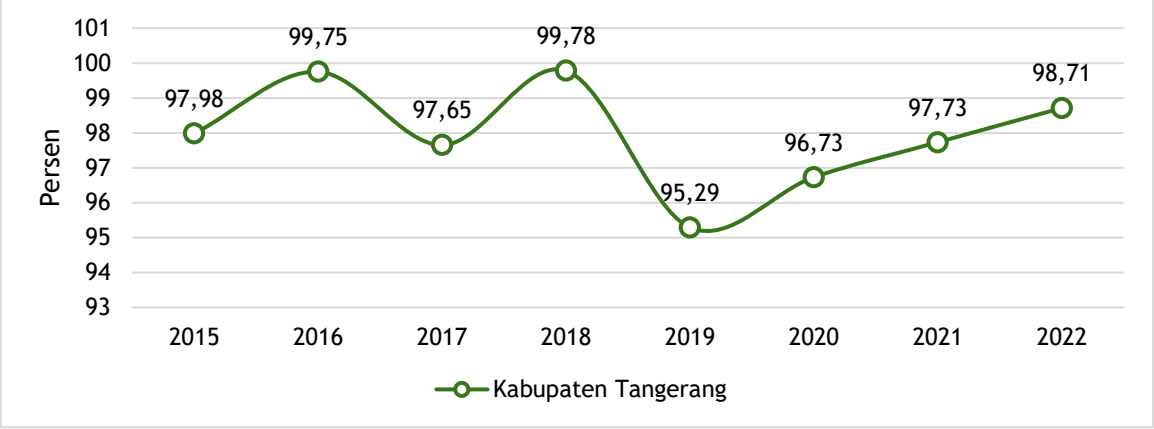


189Gambar 2. 190
Cakupan Kelompok Bina Nelayan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Berdasarkan grafik di atas, cakupan bina nelayan bersifat fluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan, terutama pada tahun 2014 dengan nilai 0% dan tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 22,71%. Pada tahun 2020, angka tersebut juga mengalami penurunan menjadi sebesar 24,07%. Hingga tahun 2022, peningkatan cakupan kelompok bina nelayan di Kabupaten Tangerang belum mampu mencapai angka tertinggi yang di tahun 2015. Penurunan tersebut menunjukkan melemahnya upaya yang dilakukan berkaitan dengan kesejahteraan nelayan.

5) Proporsi Tangkapan Ikan Produksi

Menurut Badan Pusat Statistik, proporsi tangkapan yang berada dalam batasan biologis aman merupakan persentase perbandingan antara jumlah total tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama. Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan ikan <100%. Sementara, angka tangkapan yang diperbolehkan per tahun sebesar 80% dari jumlah tangkapan lestari (*maximum sustainable yield – MSY).*

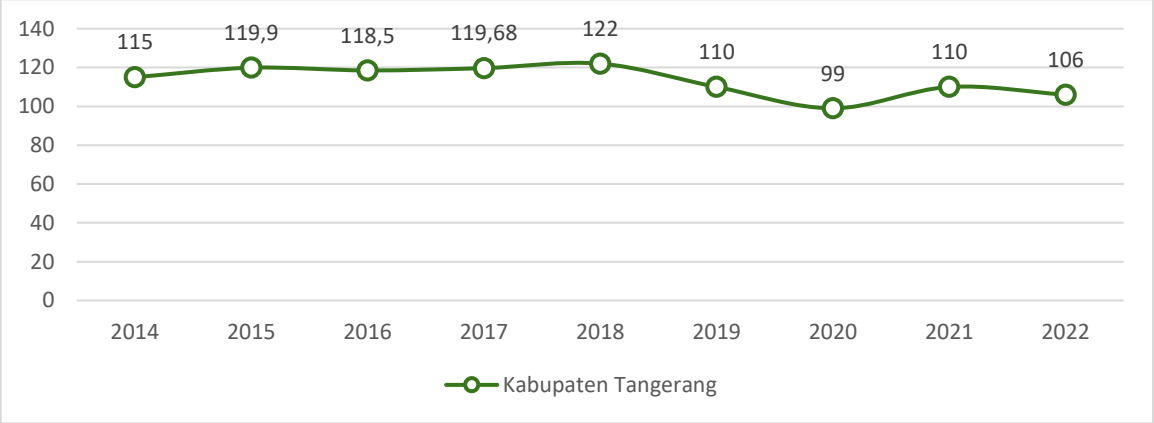


191Gambar 2. 192
Proporsi Tangkapan Ikan Produksi di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Berdasarkan grafik di atas, dalam kurun waktu 2015 hingga 2022, proporsi tangkapan ikan bersifat fluktuatif dengan rentang nilai perubahan yang cenderung kecil dan masih relatif stabil. Nilai yang cukup stabil menunjukkan bahwa telah ada upaya dan kesadaran mengenai kegiatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan maupun penurunan yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang bersifat alami seperti perubahan lingkungan, perubahan suhu perairan, maupun interaksi antar spesies.

6) Nilai Tukar Nelayan

Nilai tukar nelayan merupakan persentase perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Angka yang ditunjukan menjadi alar ukur kesejahteraan nelayan, dengan nilai yang rendah mengindikasikan bahwa sektor perikanan belum mampu menjadi sumber penghasilan berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tukar nelayan adalah peningkatan aksesibilitas nelayan terhadap pasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas produk.



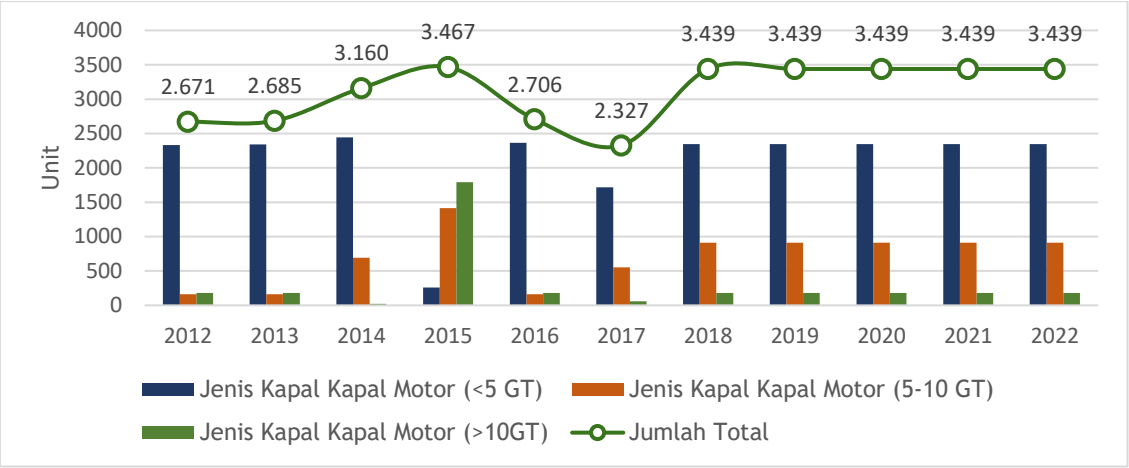
193Gambar 2. 194
Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Data di atas menunjukkan adanya fluktuasi nilai tukar nelayan di Kabupaten tangerang selama 8 tahun. Di tahun 2014 hingga 2018, terjadi peningkatan angka nilai tukar nelayan. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan permintaan dan harga ikan. Namun, di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan drastis sebesar masing-masing 12 dan 11, yang diasumsikan terjadi akibat adanya Covid-19, fluktuasi harga komoditas, perubahan permintaan, maupun faktor ekonomi lain. Sejak tahun 2021, angka nilai tukar nelayan kembali naik dan cukup stabil, menunjukkan telah adanya upaya untuk memulihkan kondisi sebelumnya.

7) Armada Penangkapan Ikan

Armada penangkapan ikan merupakan sarana yang digunakan nelayan/rumah tangga perikanan dalam kegiataan pemanfaatan sumber daya perikanan. Jenis armada

yang terdapat di Kabupaten Tangerang adalah kapal motor dengan beberapa jenis yaitu kapal motor <5 GT (*gross-tonage*), kapal motor 5-10 GT, dan kapal motor >10 GT. Dari tahun ke tahun, jenis kapal motor yang mendominasi sebagai armada penangkapan ikan adalah kapal motor <5 GT.

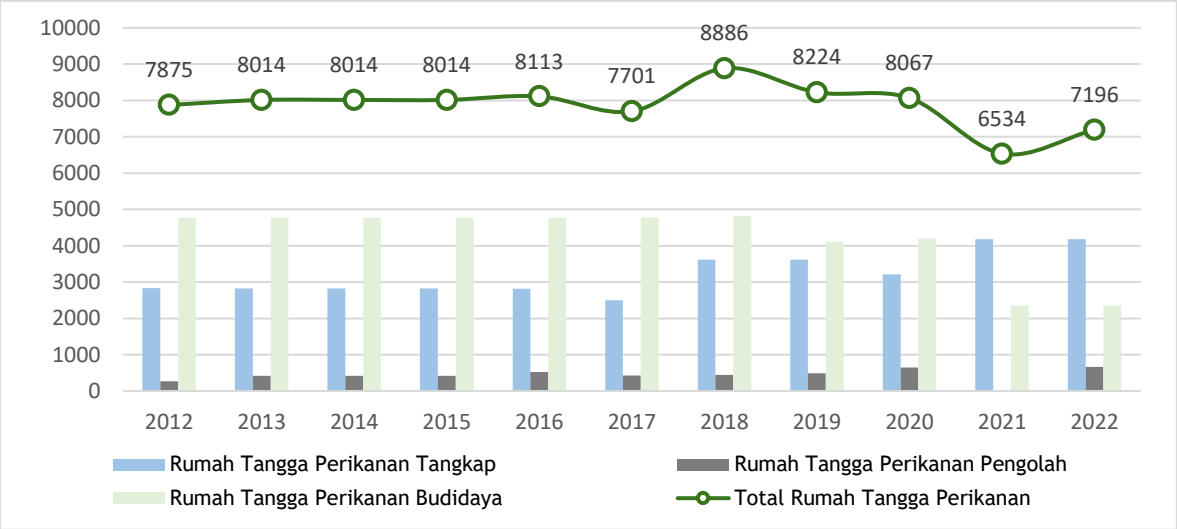


195Gambar 2. 196
Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Pada tahun 2012-2015 terjadi peningkatan jumlah armada penangkapan ikan dari 2.671 unit hingga mencapai 3.467 unit kapal. Hal ini diasumsikan memiliki hubungan paralel dengan tingkat konsumsi ikan dan permintaan yang naik di tahun-tahun tersebut. Di tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan jumlah unit cukup sebesar masing-masing 751 unit dan 379 unit. Namun, mulai tahun 2018, jumlah kapal kembali naik dan bersifat stabil.

8) Rumah Tangga Perikanan

Rumah tangga perikanan adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan budidaya/binatang air/tanaman air dengan tujuan mendapatkan profit melalui penjualan sebagian/seluruh hasilnya.



197Gambar 2. 198
Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif. Pada rentang 2012 hingga 2016, terjadi peningkatan jumlah rumah tangga perikanan dengan jumlah yang kecil. Kemudian di tahun 2017, angka tersebut mengalami fluktuasi yang signifikan hingga tahun 2022. Hal tersebut diasumsikan terjadi karena perubahan preferensi pekerjaan oleh masyarakat, perubahan ekonomi, maupun adanya perluasan sektor lain yang dinilai lebih prospektif. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perikanan di Kabupaten Tangerang memiliki nilai yang sangat kecil, sebesar 4,9%, bersama dengan bidang pertanian dan kehutanan.

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

Fokus layanan urusan penunjung berisi urusan-urusan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Indikator makro yang dapat digunakan pada penilaian tata Kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB adalah suatu penilaian atas upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pada tahun 2022, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang adalah 62,74 dengan kategori BB/baik, perlu sedikit perbaikan. Nilai tersebut meningkat 7% dari tahun 2020 yang capaian IRB-nya adalah 58,39 dengan predikat CC/Cukup memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

Tabel 2. 61
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2022
A	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20	9,37	10,29	11,16
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	7,26	3,97	6,88
	III. Reform	30	11,11	14,17	14,79

Total Komponen Pengungkit		60	27,74	28,43	32,83
B	Komponen Hasil				
	1. Akuntabilitas	10	7,91	7,95	8,09
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10	8,45	8,18	8,59
	3. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10	8,9	7,01	7,51
	4. Kinerja organisasi	10	5,39	7,27	5,72
Total Komponen Hasil		40	30,65	30,41	29,91
Indeks Reformasi Birokrasi		100	58,39	58,84	62,74

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Laporan Akhir Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang 2023

A. Perencanaan Pembangunan

1) Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD), rencana kerja tahunan (RKPD), serta rencana tata ruang (RTRW). Dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Tangerang yaitu RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tangerang akan berakhir tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Tangerang yang berakhir tahun 2023 akan ditetapkan menjadi Perda pada Tahun 2025. Dokumen rencana kerja tahunan RKPD yang ditetapkan dalam Perkada menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD setiap tahun. Dokumen rencana tata ruang Kab.Tangerang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.

Tabel 2. 62
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

Indikator	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

2) Konsistensi Penjabaran Dokumen Perencanaan

Perencanaan pembangunan memiliki sistem hierarki tertentu. Hierarki tersebut dapat dilihat dari skala dan rentang tahun perencanaannya. Dengan adanya hierarki tersebut maka perencanaan yang hierarkinya ada di bawah harus memiliki kekonsistensi terhadap hierarki perencanaan lain di atasnya.

Tabel 2. 63
Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

	Tahun

Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan	2018	2019	2020	2021	2022
Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD	99,07%	100%	100%	91,87%	95,12%
Konsistensi Program RKPD dalam APBD	99,07%	100%	100%	91,87%	95,12%

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 (diolah)

Berdasarkan data diatas bahwa Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD serta program RKPD dalam APBD pada tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif dan di atas 90%. Ketidaksinkornan ini disebabkan oleh kegiatan mandatori seperti DAK yang banyak menggunakan program diluar yang sudah dialokasikan pada RKPD, adanya kebijakan dalam penganggaran yang baru muncul pada saat terbitnya Pedoman Penyusunan APBD tahun bersangkutan, serta adanya kegiatan mandatori seperti DAK yang sudah ditentukan sub kegiatan, kegiatan dan programnya sehingga menyesuaikan dengan yang telah disusun dalam RKPD.

B. Keuangan

Urusan keuangan dapat dinilai dari nilai SAKIP dan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Penilaian SAKIP bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) (Kemenpan RB, 2023). Sementara itu, IKF digunakan untuk menilai tingkat kemandirian daerah dalam menyuplai fiscal (sumber keuangannya) sendiri.

Pada tahun 2022, nilai SAKIP Kabupaten Tangerang adalah 72,52 (meningkat 17% dari tahun 2018). Nilai tersebut berpredikat BB (sangat baik) yang mengartikan bahwa dua dari tiga unit kerja pemerintahan telah memiliki akuntabilitas yang sangat baik. Di tahun yang sama, capaian Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Tangerang adalah 0,505. Nilai tersebut berada pada predikat mandiri (0,50 ≤ IKF < 0,75). Selain dua indikator tersebut, terdapat indikator lain yang digunakan dalam meninjau urusan keuangan.

1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk menilai pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah, diperlukan penilaian dan/atau opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK menjadi salah satu parameter kualitas pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga maupun di level pemerintah daerah. Berdasarkan capaian indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2013-2022 selalu WTP.

Tabel 2. 64
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

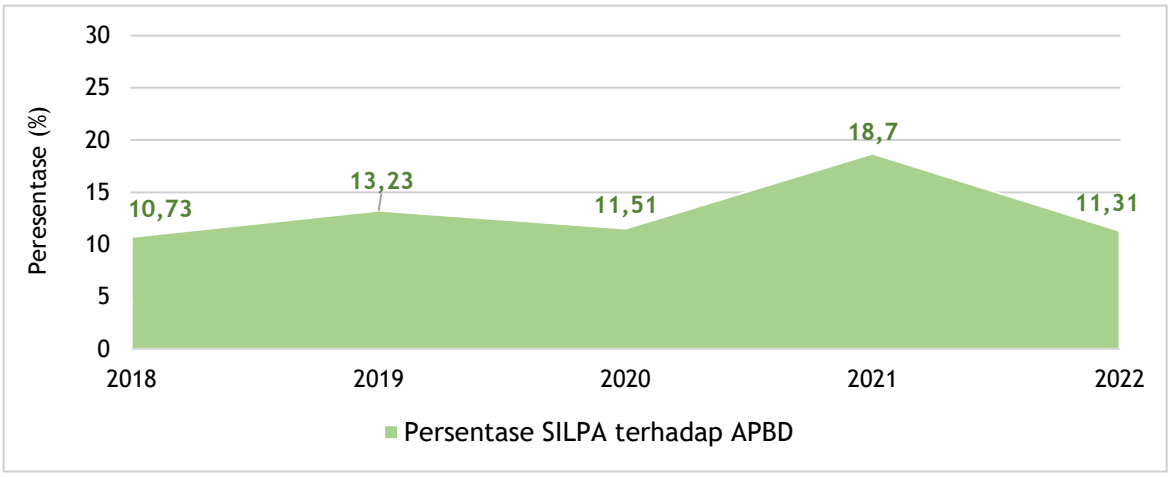
Indikator	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

2) Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.



Gambar 2. 199
Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2018-2022
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Gambar diatas menunjukkan grafik persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang tahun 2018-2022. Berdasarkan gambar diatas bahwa persentase SILPA terhadap APBD dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif dan menurun dari tahun 2021-2022.

3) Persentase Belanja Pendidikan dan Kesehatan

Urusan-urusan tertentu dalam perencanaan daerah telah memiliki arahan penganggaran minimal. Anggaran belanja pendidikan adalah minimal 20% dan anggaran belanja kesehatan adalah minimal 10%.

Tabel 2. 65
Indikator Kinerja Daerah Urusan Keuangan Kabupaten Tangerang

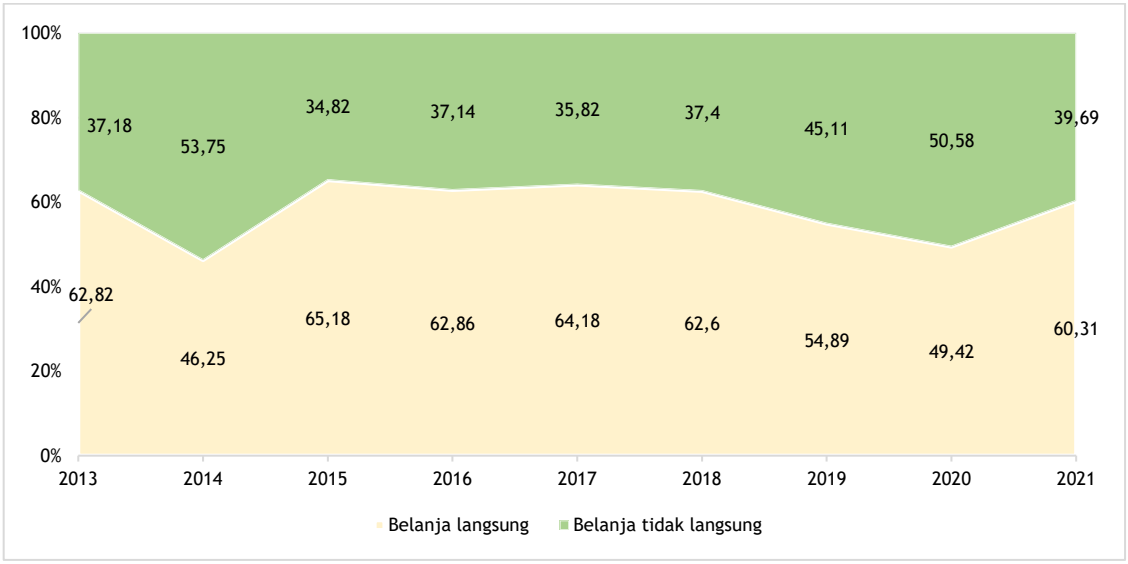
Keterangan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Belanja Pendidikan (20%)	22,31	21,82	23,05	22,46	22,77	25,20
Persentase Belanja Kesehatan (10%)	18,49	20,95	20,59	21,11	21,27	22,86
Persentase Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (0,16%)	0,08	0,07	0,01	0,16	0,07	0,10
Persentase Belanja Pengawasan Penyelenggaranaan Pemerintahan (0,50%)	0,47	0,52	0,37	0,43	0,50	0,52

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang Priode Tahun 2018-2023

Berdasarkan data di atas, persentase belanja pendidikan dalam enam tahun terakhir selalu di atas *mandatory spending* (20%). Belanja kesehatan Kabupaten Tangerang, walaupun mengalami tren yang fluktuatif, selama enam tahun terakhir telah

memenuhi arahan alokasi minimal (10%). Alokasi Belanja Pendidikan dan pelatihan pegawai pemerintah Kab. Tangerang pada tahun anggaran 2022 dan 2023 belum memenuhi anggaran minimal (0,16%) dari Belanja APBD. Alokasi belanja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 dan 2023 telah memenuhi *mandatory spending* (0,50%).

4) Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

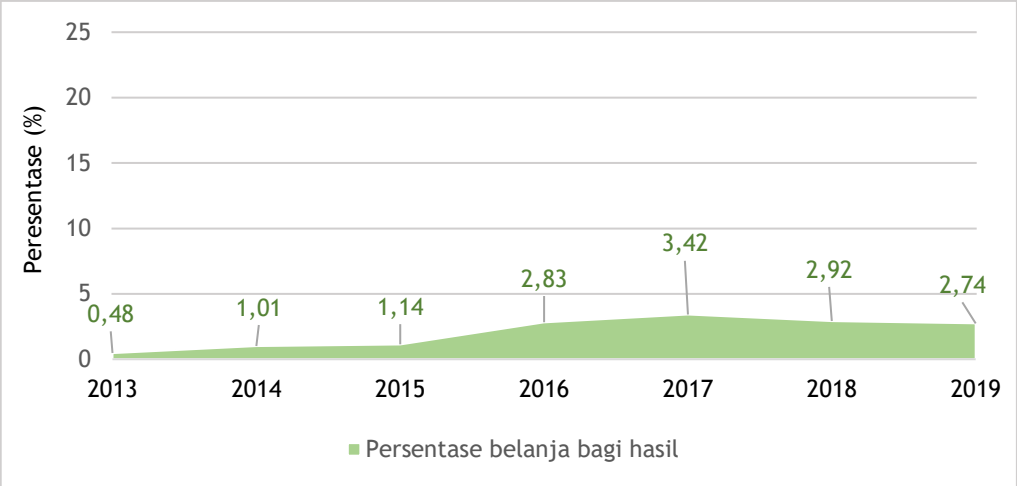


200Gambar 2. 201
Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Analisis proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung bertujuan untuk melihat manajemen keuangan internal pemerintah daerah dalam pengendalian biaya dan anggaran. Dalam 10 tahun terakhir, tren menunjukkan bahwa rasio belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung.

5) Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dan Desa

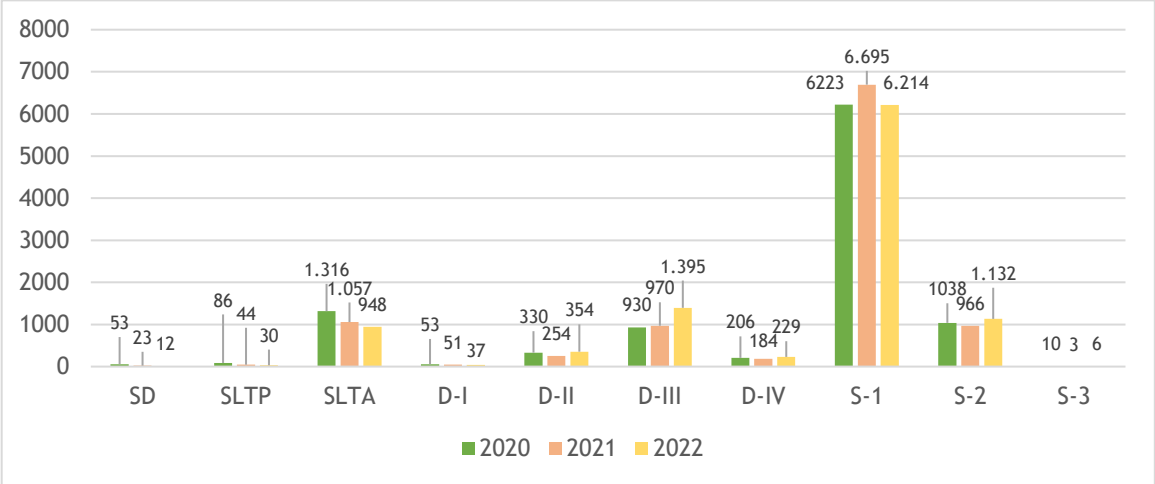
Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan angka peresentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Grafik di bawah menunjukan bahwa persentase belanja bagi hasil kabupaten/kota cenderung meningkat namun menurun di tahun 2018-2019.



202Gambar 2. 203
Persentase Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dan Desa
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

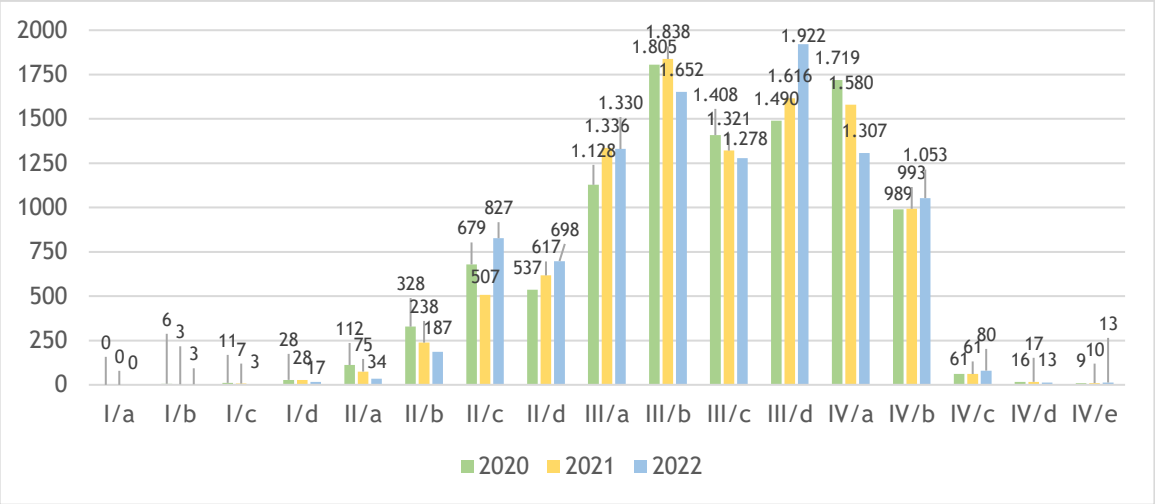
C. Kepegawaian

Faktor pendukung yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sumber daya manusia aparatur pemerintah. Kualitas SDM aparatur menjadi hal penting dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.



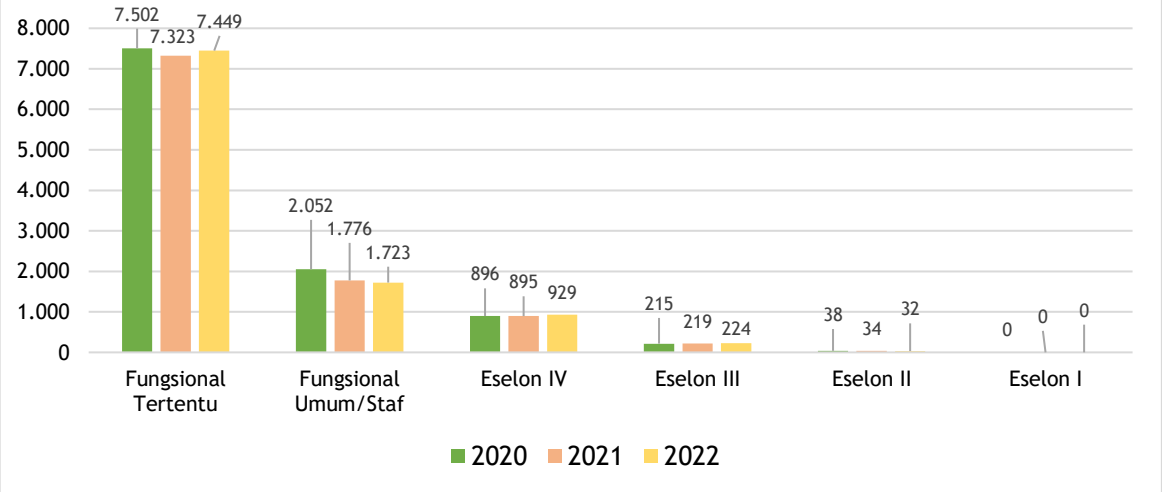
204Gambar 2. 205
ASN Kabupaten Tangerang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2022
Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2023

Gambar di atas merupakan grafik ASN menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan gambar diatas terihat bahwa tingkat pendidikan ASN didominasi oleh jenjang pendidikan S-1 yaitu sebanyak 6.124 ASN pada tahun 2022.



206Gambar 2. 207
ASN Kabupaten Tangerang Menurut Golongan Tahun 2020-2022
Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2023

Gambar di atas merupakan grafik ASN di Kabupaten Tangerang menurut golongan. Berdasarkan gambar di atas terihat bahwa setiap tahunnya ASN Kabupaten Tangerang didominasi oleh ASN golongan III/b, III/d, dan IV/a.



208Gambar 2. 209
ASN Kabupaten Tangerang Menurut Jabatan Tahun 2020-2022
Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2023

Gambar di atas merupakan grafik ASN di Kabupaten Tangerang menurut jabatan. Berdasarkan gambar diatas terihat bahwa setiap tahunnya, jabatan fungsional tertentu memiliki jumlah yang lebih banyak dari jabatan lainnya.

Dari berbagai kategori di atas, PNS Fungsional Kabupaten Tangerang yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) berjumlah 351 atau sekitar 82%, sedangkan pegawai yang belum bersertifikat sebanyak 77 pegawai atau sebanyak 17%. Penilaian umum terhadap PNS dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. Berikut adalah capaian Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sitem Merit Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 66
Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tangerang

Indikator	Tahun	
	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	41,44	56,80
Indeks Sitem Merit	276,00	296,50

Sumber: Laporan Akhir Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang 2023

Pada tahun 2022, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tangerang adalah 56,80. Capaian tersebut meningkat 15,38 dari tahun 2021 yang capaian indeksnya adalah 41,44. Meskipun mengalami peningkatan, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tangerang masih berada pada kategori sangat rendah (<60). Capaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2022 adalah 296,50. Capaian tersebut meningkat 20,5 dari tahun sebelumnya dan masuk pada kategori III/baik (250-324). Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Capaian Indeks Sitem

D. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatkan inovasi daerah. Inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi daerah yang dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak Tahun 2019.

Tabel 2. 67
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2022

Indikator	2020		2021		2022	
	Skor Indeks	Kategori	Skor Indeks	Kategori	Skor Indeks	Kategori
Kota Serang	232	Kurang Inovativ	49,71	Inovativ	60,56	Sangat Inovativ
Kota Tangerang Selatan	3.793	Sangat Inovativ	51,66	Inovativ	59,88	Inovativ
Kabupaten Tangerang	**2.274**	**Sangat Inovativ**	**41,16**	**Inovativ**	**54,70**	**Inovativ**
Kabupaten Lebak	1.390	Sangat Inovativ	46,46	Inovativ	53,88	Inovativ
Kota Tangerang	10.762	Sangat Inovativ	62,7	Sangat Inovativ	53,23	Inovativ
Kabupaten Pandeglang	1.831	Sangat Inovativ	50,83	Inovativ	47,56	Inovativ
Kabupaten Serang	1.839	Sangat Inovativ	35,77	Inovativ	41,44	Inovativ
Kota Cilegon	340	Kurang Inovativ	17,16	Kurang Inovativ	37,06	Inovativ
Provinsi Banten	8.191	Sangat Inovativ	60,52	Sangat Inovativ	50,41	Inovativ

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri

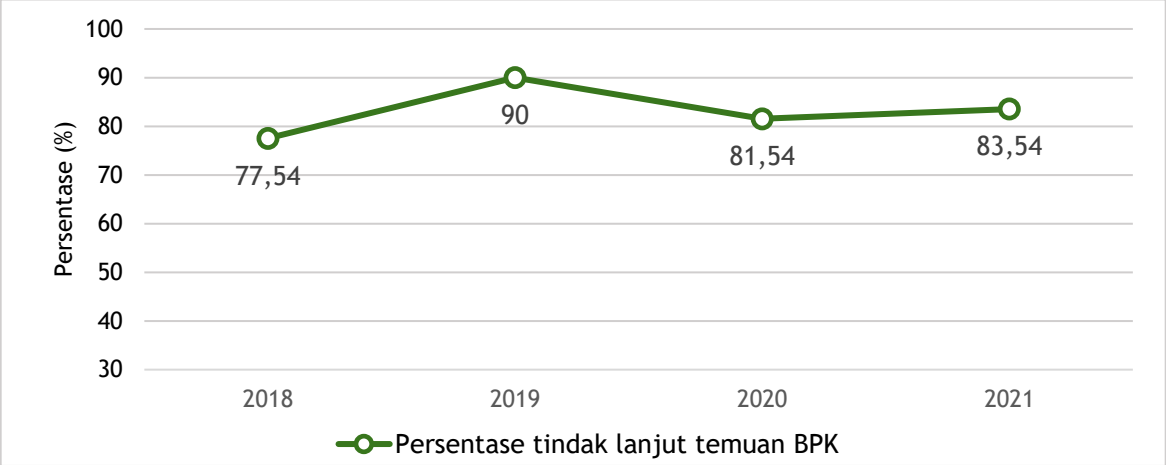
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah 54,70 dengan kategori Inovativ. Jika dibandingkan dengan semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang berada di urutan ke 3. Pada tahun yang sama, Indeks Inovasi Daerah memiliki skor yang lebih besar dari skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Banten.

E. Pengawasan

1) Tindak Lanjut Temuan BPK

Tindak lanjut temuan BPK merupakan proses untuk pengentasan permasalahan dalam pemeriksaan di BPK dengan tujuan untuk memastikan permasalahan telah teratasi dan mencegah permasalahan tersebut terulang kembali. Gambar diatas menunjukkan persentase tindak lanjut temuan BPK di Kab. Tangerang yang dalam tren lima tahun

terakhir cenderung fluktuatif. Adanya peningkatan di tahun 2020-2021 menunjukkan peran APIP semakin optimal dalam menjalankan tugasnya.



Gambar 2. 210
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

2) Nilai Maturitas SPIP

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat dijadikan alat ukur pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam mengukurnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan besar dalam mensukseskan usaha pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2. 68
Indikator Urusan Pengawasan

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Maturitas SPIP	1,3	1,3	3,06	3	3
Nilai Kapabilitas APIP	n/a	n/a	n/a	3	3

Sumber: RPJM Kabupaten Tangerang 2019-2023, RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026, dan : Laporan Akhir Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang 2023

Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3 (BPKP, 2023). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP Kabupaten Tangerang adalah 3 dengan kategori terdefinisi. Walaupun dapat dinilai baik, nilai tersebut berada di KKM dan masih dapat ditingkatkan.

F. Layanan Masyarakat

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IPP diukur berdasarkan enam aspek, yaitu (1) kebijakan pelayanan; (2) profesionalisme SDM; (3) sarana dan prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) konsultasi dan pengaduan; serta (6) inovasi pelayanan. Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah sebesar 4,12 (A-) dalam kategori ‘Sangat Baik’ (4,10-4,50).

Capaian tersebut meningkat 0,21 dari tahun 2021 yang capaian indeksnya adalah 3,91 dengan kategori 'Baik' (3,51-4,00).

Tabel 2. 69
Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Tahun	
	2021	2022
Indeks Pelayanan Publik	3,91	4,12

Sumber: Laporan Akhir Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang 2023

Selaian Indeks Pelayanan Publik, kinerja bidang layanan masyarakat juga dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM). Capaian IKM Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 adalah 86,36 dengan kategori sangat baik. Selama 6 tahun ke belakang, angka tersebut mengalam tren peningkatan.

Tabel 2. 70
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	71,25	76,39	75,05	81,45	83,66	86,36

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

G. Sekretariat Dewan

1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Penyediaan RKT ini penting untuk memastikan bahwa Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. RKT juga akan membantu Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adalah ada.

2) Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Penyusunan dan integrasi program-program kerja DPRD dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKPD) merupakan hal yang penting agar program-program kerja DPRD memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur. RPJM dan RKPD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan bahwa program-program kerja DPRD dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adalah ada

3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memastikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan sudah terintegrasi dan terukur. Hal ini akan membantu DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal adanya temuan bahwa program-program DPRD belum terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD, maka hal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan memastikan bahwa program-program DPRD sudah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD. Tindak lanjut ini akan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2022 yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Kabupaten/Kota	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12
Kabupaten Pandeglang	4,05	2,36	2,54	2,45	3,46	2,44	3,12	1,86	0,99	1,32	**5,00**	0,86
Kabupaten Lebak	4,41	1,66	2,72	2,43	3,62	2,17	3,22	1,64	0,93	1,39	**5,00**	0,95
Kabupaten Tangerang	4,31	**3,57**	3,41	3,53	3,85	2,82	2,81	2,77	0,88	**5,00**	**5,00**	3,42
Kabupaten Serang	4,19	2,56	3,02	3,20	3,46	2,57	2,09	2,57	0,93	3,61	**5,00**	1,95
Kota Tangerang	**4,49**	-	3,71	3,64	**4,00**	**3,86**	3,45	**3,40**	1,22	**5,00**	**5,00**	**4,09**
Kota Cilegon	4,16	2,01	3,54	**4,01**	3,62	3,53	1,91	2,33	**1,59**	**5,00**	**5,00**	1,29
Kota Serang	-	2,44	**4,63**	2,73	3,69	3,24	4,74	3,16	1,19	1,53	**5,00**	2,40
Kota Tangerang Selatan	4,28	-	3,88	3,78	**4,00**	3,79	**5,00**	3,21	1,14	4,09	**5,00**	3,92
Rata-rata kab/kota di Provinsi Banten	4,27	2,43	3,43	3,22	3,71	3,05	3,29	2,62	1,11	3,37	5,00	2,36
Provinsi Banten	4,32	2,96	4,26	3,31	3,75	3,44	2,09	3,79	3,2	3,84	5,00	3,53
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62

Sumber : Indeks Daya Saing Daerah 2022

Pilar 1 : Institusi
Pilar 2 : Infrastruktur
Pilar 3 : Adopsi TIK
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro
Pilar 5 : Kesehatan
Pilar 6 : Keterampilan
Pilar 7 : Pasar produk
Pilar 8: Pasar tenaga kerja
Pilar 9 : Sistem keuangan
Pilar 10 : Ukuran pasar
Pilar 11 : Dinamisme bisnis
Pilar 12 : Kapabilitas inovasi

Ket.:
Bold = paling unggul dibandingkan kabupaten/kota lainnya
Bold = meskipun paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, skor tersebut masih lebih rendah dibandingkan skor Provinsi Banten dan Nasional

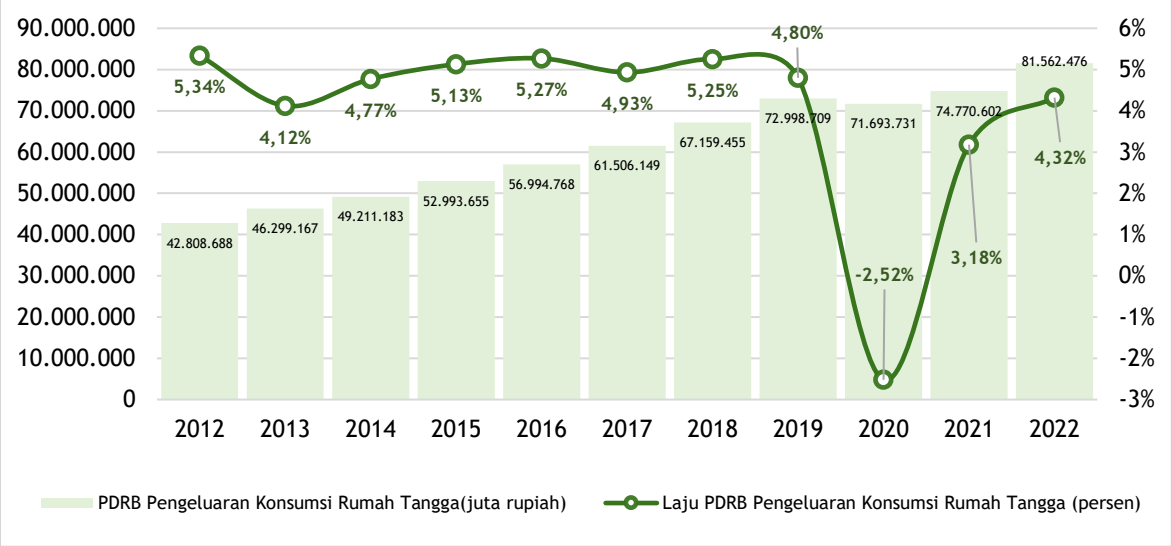
Gambar 2. 211
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/kota, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2022
Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022 (BRIN, 2022), komponen pilar yang unggul di Kabupaten Tangerang adalah Pilar 10 “Ukuran Pasar” dan Pilar 11 “Dinamisme Bisnis”. Sementara itu, komponen pilar yang terendah adalah Pilar 9 “Sistem Keuangan” dan Pilar 7 “Pasar Produk”.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

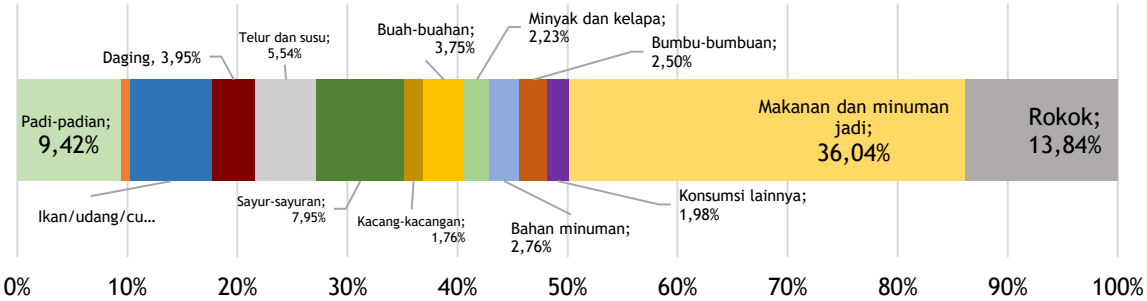
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup.

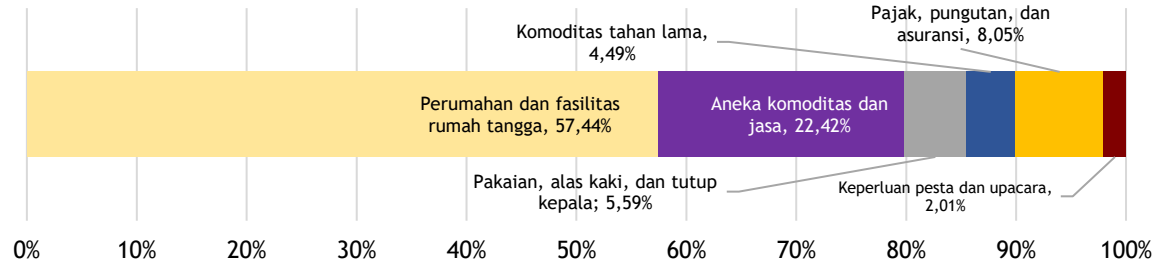


212Gambar 2. 213
PDRB dan Laju PDRB Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Berdasarkan grafik di atas bahwa PDRB ADHB pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar 81.562,48 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan mencapai 4,32% dari tahun 2021 dan kontribusinya mencapai 50,92% terhadap PDRB pengeluaran Kab. Tangerang. Pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan drastis laju PDRB pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari pandemi terjadi penurunan pendapatan masyarakat.



Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan



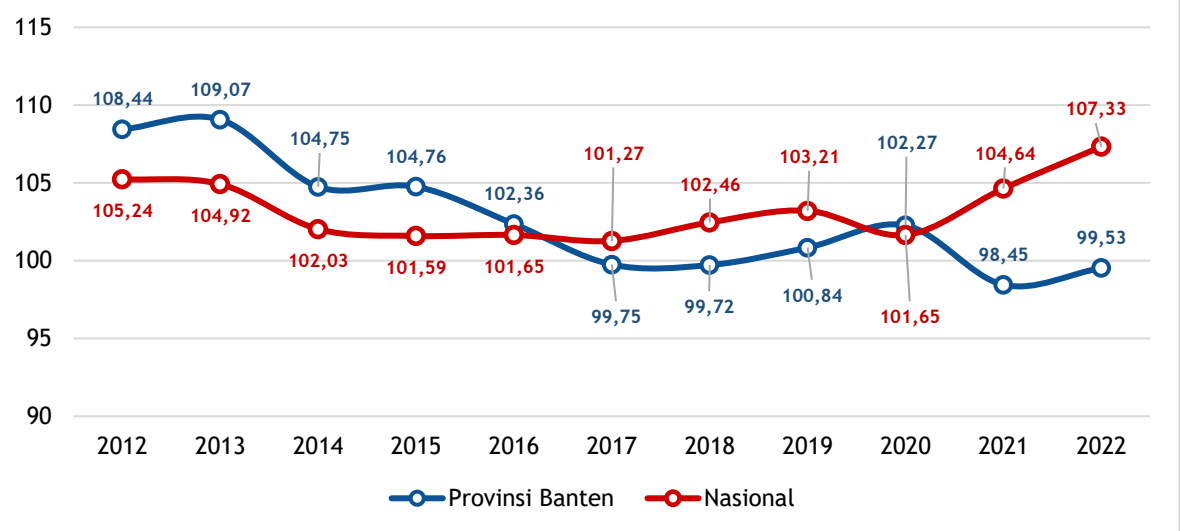
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Bukan Makanan

214Gambar 2. 215
Pensentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Pada tahun 2021, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.371.144 per jiwa/bulan dengan pengeluaran kelompok makanan sebesar Rp734.838 per jiwa/bulan (atau 53,6% dari total pengeluaran) dan pengeluaran kelompok bukan makanan sebesar Rp636.306 per jiwa/bulan (atau 46,4% dari total pengeluaran).

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP>100 artinya Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani.



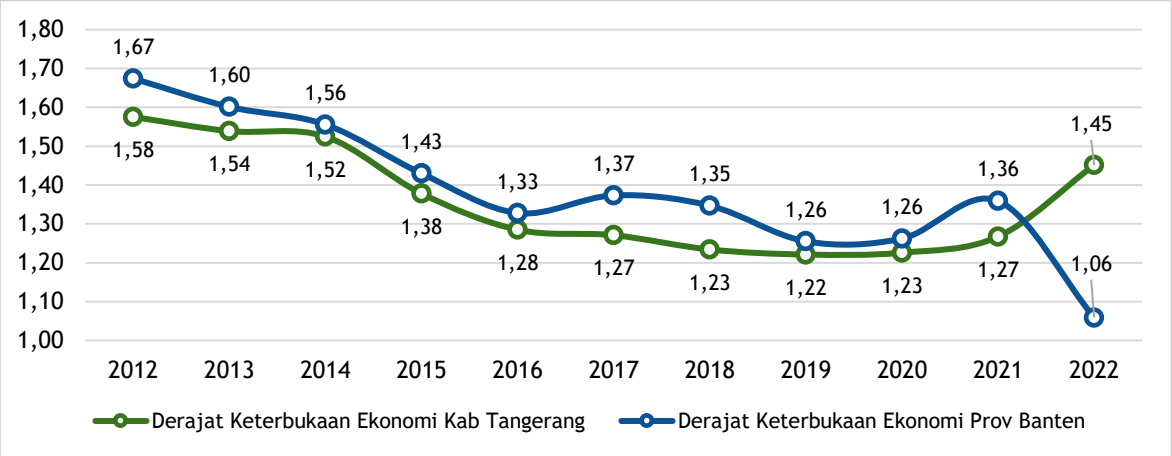
216Gambar 2. 217
Nilai Tukar Petani Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2010-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan diagram di atas, secara umum NTP Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan menurun di mana kondisi ini berbanding terbalik dengan

NTP Nasional yang meningkat utamanya dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini perlu disikapi serius dalam pembangunan Banten untuk lebih memperhatikan dalam peningkatan kesejahteraan petani dan kaitannya dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

C. Indikator Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi negara/daerah diukur dari kegiatan ekspor dan impor, Semakin banyak kegiatan ekspor dan impor, semakin menunjukkan semakin tingginya derajat keterbukaan ekonomi suatu negara/daerah.



~~Gambar 2. 218~~Gambar 2. **218**
Perbandingan Derajat Keterbukaan Ekonomi Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang memiliki nilai ekspor yang mencapai 132.194,57 miliar rupiah, nilai impor sebesar 100.275,41 miliar rupiah, dan PDRB ADHB sebesar 160.268,18 miliar rupiah. Maka dari itu nilai derajat keterbukaan ekonomi Kab. Tangerang tahun 2022 mencapai 1,45%. Capaian tersebut di atas Provinsi Banten yang sebesar 1,06%. Sementara itu, jika melihat tren dalam 10 tahun terakhir, bahwa derajat keterbukaan ekonomi Kab. Tangerang cenderung menurun, tetapi kembali meningkat pada tahun 2021-2022.

D. Produktivitas Total Daerah

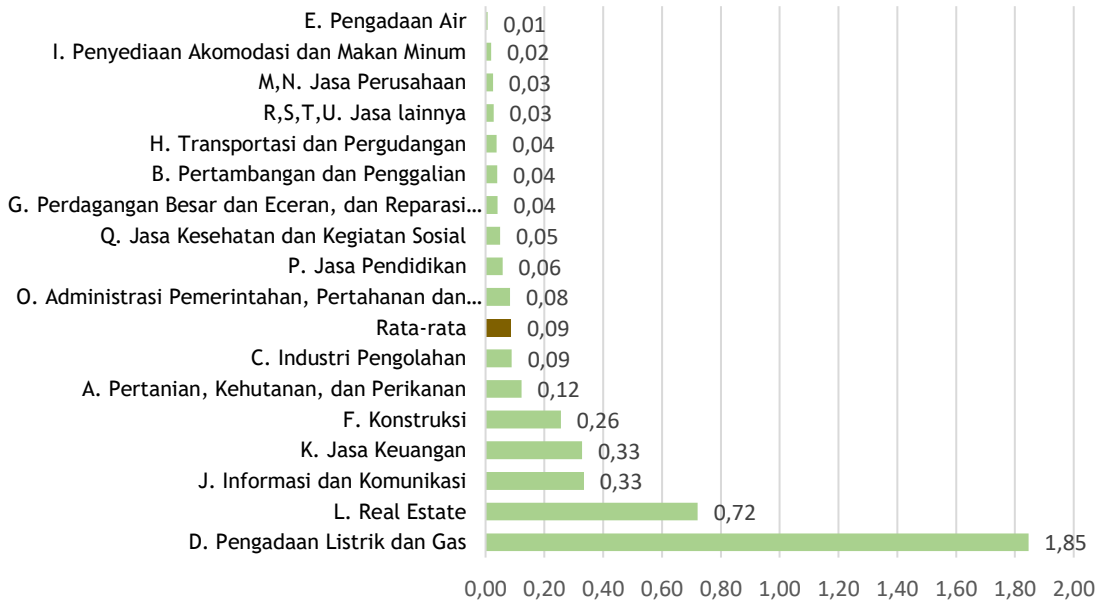
Produktivitas total daerah merupakan perbandingan antara nilai tambah sektor terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel di bawah ini merupakan hasil perhitungan rasio produktivitas sektor/lapangan usaha di Kabupaten Tangerang tahun 2021.

Tabel 2. 71
Rasio Produktivitas Menurut Sektor/Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Lapangan Usaha	Nilai Tambah Bruto (dalam Miliar Rupiah)	Angkatan Kerja Sektor	Rasio Produktivitas Sektor
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.473,10	77.370	0,12
B. Pertambangan dan Penggalian	50,93	1.295	0,04
C. Industri Pengolahan	48.117,52	540.077	0,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.630,76	2.508	1,85

Lapangan Usaha	Nilai Tambah Bruto (dalam Miliar Rupiah)	Angkatan Kerja Sektor	Rasio Produktivitas Sektor
E. Pengadaan Air	100,24	14.792	0,01
F. Konstruksi	23.459,65	91.403	0,26
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.403,33	402.534	0,04
H. Transportasi dan Pergudangan	4.651,38	122.384	0,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.123,07	112.021	0,02
J. Informasi dan Komunikasi	5.144,75	15.376	0,33
K. Jasa Keuangan	8.239,97	25.118	0,33
L. Real Estate	11.859,43	16.441	0,72
M,N. Jasa Perusahaan	1.454,75	57.784	0,03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.618,05	31.405	0,08
P. Jasa Pendidikan	3.957,24	68.136	0,06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	774,48	15.638	0,05
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.225,00	80.929	0,03
JUMLAH / RATA-RATA	**145.283,68**	**1.675.211**	**0,09**

Sumber: Hasil Olahan, 2023



219Gambar 2. 220
Diagram Rasio Produktivitas Menurut Sektor/Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2021
Sumber: Hasli Olahan, 2023

Berdasarkan diagram di atas bahwa rasio produktivitas daerah Kabupaten Tangerang tahun 2021 sebesar 0,09 dengan nilai tambah bruto sebesar 145.283.68 miliar rupiah dengan tenaga kerja sebesar 1.675.211 jiwa. Berdasarkan lapangan usaha dengan rasio produktivitas daerah yaitu: (1) Pengadaan listrik dan gas sebesar 1,85; (2) Real estate sebesar 0,72; dan (3) Informasi dan komunikasi sebesar 0,33.

E. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Jenis dan jumlah bank dalam suatu daerah digunakan untuk mengukur kemudahan untuk mengakses kelembagaan keuangan, simpanan, dan jasa lalu lintas pembayaran. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten (2022), jumlah kantor bank umum di Kabupaten Tangerang tahun 2021 sebanyak 276 unit kantor. Jumlah tersebut menempati peringkat kedua terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Prov. Banten. Tabel dibawah ini merupakan perbandingan jumlah kantor bank umum menurut kab/kota di Provinsi Banten.

Tabel 2. 72
Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2021

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kantor Bank Umum					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Pandeglang	69	69	68	69	71	71
Kab. Lebak	66	63	63	60	61	67
Kab. Tangerang	**306**	**308**	**299**	**291**	**283**	**276**
Kab. Serang	93	95	96	95	87	109
Kota Tangerang	465	466	459	453	444	437
Kota Cilegon	73	70	69	66	66	82
Kota Serang	38	39	40	39	38	55
Kota Tangerang Selatan	102	111	116	110	102	176
Provinsi Banten	1212	1221	1210	1183	1152	1273

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2017-2022 (diolah)

F. Jumlah Restoran atau Rumah Makan

Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah, yang mana semuanya terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersangkutan. Pajak hotel dan restoran sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah sangat potensi untuk ditingkatkan mengingat peran pajak hotel dan restoran ini dalam peningkatan PAD.

Tabel 2. 73
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Pandeglang	116	118	124	116	116	116
Kab. Lebak	56	56	57	56	39	70
Kab. Tangerang	**724**	**810**	**878**	**907**	**960**	**1.020**
Kab. Serang	18	18	18	16	19	19
Kota Tangerang	385	406	418	426	462	760
Kota Cilegon	7	2	10	2	53	832
Kota Serang	107	51	51	46	59	45
Kota Tangerang Selatan	202	314	477	477	692	1.949
Provinsi Banten	1.615	1.775	2.033	2.046	2.400	4.811

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2023

Tabel diatas menunjukkan jumlah rumah makan atau restoran di Provinsi Banten menurut kabupaten/kota. Pada tahun 2022, jumlah rumah makan atau restoran di Kabupaten Tangerang mencapai 1.020 unit. Jumlah tersebut terbanyak kedua setelah Kota Tangerang Selatan. Jika melihat tren dalam enam tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Tangerang.

G. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jenis dan jumlah penginapan hotel dapat menunjukkan perkembangan wisata di suatu daerah dimana sebagai sarana pendukung akomodasi untuk kebutuhan masyarakat (wisatawan). Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah akomodasi di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 74
Jumlah Akomodasi, Kamar, Tempat Tidur di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Akomodasi	13	19	19	18	18	20
2	Kamar	1260	1841	2411	2468	2232	2007
3	Tempat tidur	1772	2605	3474	3554	3315	3040

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2023

Berdasarkan data diatas bahwa terjadi peningkatan jumlah akomodasi dan kapasitasnya mengikuti peningkatan wisatawan di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019, Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) mencapai 1,5 hari (BPS, 2019).

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

A. Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Menurut Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Jumlah panjang jalan seluruhnya akan dibagi dengan jumlah kendaraan yang ada untuk mencari seberapa besar rasionya. Dari perhitungan diketahui bagi setiap kendaraan di Kabupaten Tangerang tersedia sekitar 6,86 kilometer jalan.

Tabel 2. 75
Jumlah Kendaraan Menurut Jenisnya di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Jenis Kendaraan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sepeda Motor	1.224.583	1.216.558	1.339.870	1.253.300	1.203.050	1.199.905
Mobil Penumpang	150.003	168.626	192.302	189.087	189.647	199.489
Truk	46.980	50.043	55.246	53.669	52.844	54.044
Bus	210	245	400	310	1.648	1.623
Jumlah						1.455.061

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023

Tabel 2. 76
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan Total	Rasio
Kabupaten Tangerang	992,61 km	1.445.061	1:6,86

Sumber: Hasil Olahan, 2023

B. Penataan Ruang

1) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif diperlihatkan dari penggunaan lahan pertanian sawah dan bukan sawah. Lahan pertanian merupakan lahan yang aktif dalam menghasilkan panen sebagai bahan produksi. Lahan sawah dikhususkan untuk pertanian tanaman pangan padi, sementara pertanian bukan sawah menghasilkan panen selain tanaman padi. Kabupaten Tangerang diketahui memiliki 36.202 Ha lahan pertanian sawah dan 18.845 Ha lahan pertanian bukan sawah. Apabila dijumlahkan didapat luas lahan produktif di Kabupaten Tangerang mencapai 55.047 Ha pada tahun 2020.

Tabel 2. 77
Luas Lahan Total Menurut Penggunaan Lahan dan Kabupaten/Kota di Banten Tahun 2020 (Hektar)

Kabupaten/Kota	Penggunaan Lahan		Total Luas Lahan Produktif
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	
Kab Pandeglang	52.640	207.039	259.679
Kab Lebak	51.298	228.252	279.550
Kab Tangerang	36.202	18.845	55.047
Kab Serang	48.123	55.888	104.011
Kota Tangerang	351	496	847
Kota Cilegon	1.423	6.898	8.321
Kota Serang	8.474	8.450	16.924
Kota Tangerang Selatan	10	661	671
Provinsi Banten	198.521	526.529	725.050

Sumber: Indikator Pertanian Provinsi Banten Tahun 2021

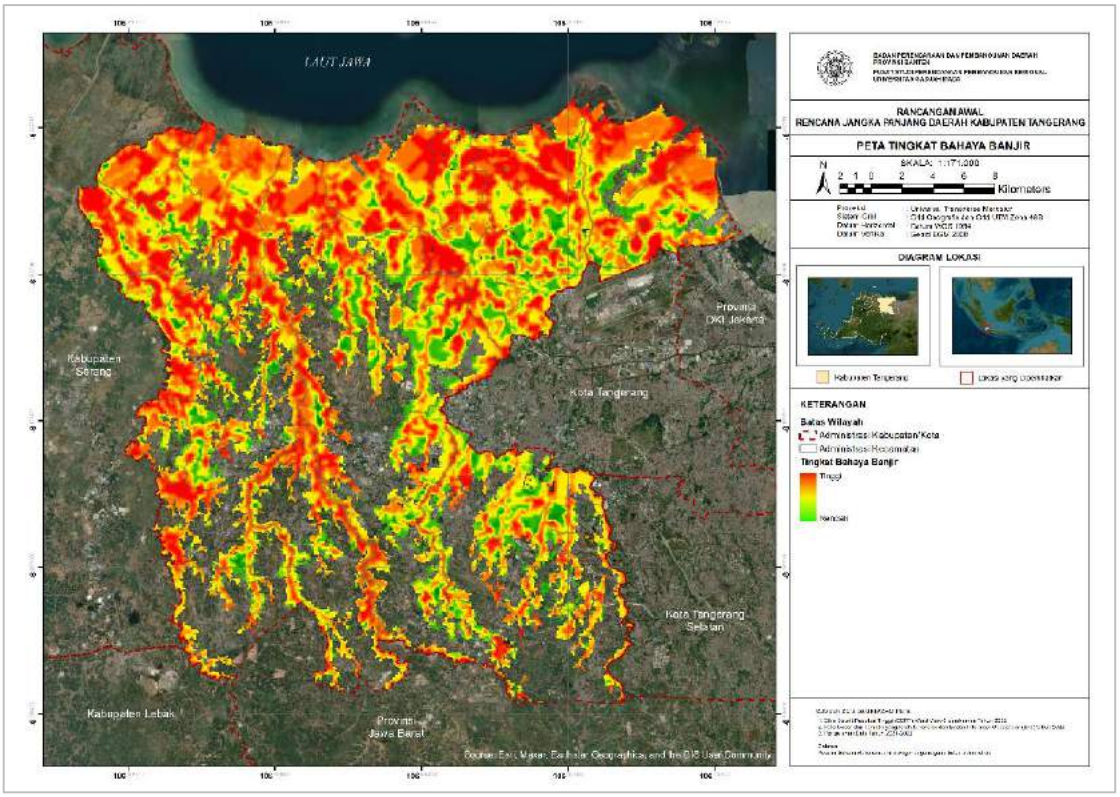
2) Luas Kawasan Rawan Banjir

Kawasan yang masuk ke dalam area rawan banjir di Kabupaten Tangerang memiliki karakteristik topografi datar yang berada di sekitar sungai dan pesisir pantai. Potensi bencana banjir didominasi di wilayah bagian utara yang juga termasuk wilayah padat penduduk. Jika dilihat dari potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi Banten pada tabel berikut, diketahui Kabupaten Tangerang menjadi wilayah dengan kategori tinggi dalam tingkat kerawanan bencana banjir.

Tabel 2. 78
Potensi Banjir di Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Bahaya (Ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Kabupaten Lebak	403	14.356	16.775	31.534	TINGGI
Kabupaten Pandeglang	793	26.636	31.252	58.681	TINGGI
Kabupaten Serang	1.687	31.616	41.596	74.898	TINGGI
Kabupaten Tangerang	1.528	31.408	34.391	67.327	TINGGI
Kota Cilegon	38	2.568	2.013	4.619	TINGGI
Kota Serang	650	7.690	4.230	12.570	SEDANG
Kota Tangerang	580	8.544	3.727	12.851	TINGGI
Kota Tangerang Selatan	71	3.537	1.892	5.499	TINGGI
Provinsi Banten	5.750	126.354	135.876	267.980	TINGGI

Sumber: Dokumen KRB Provinsi Banten Tahun 2021



Gambar 2. 221
Peta Tingkat Bahaya Banjir Kabupaten Tangerang
Sumber: InaRISK BNPB, 2023

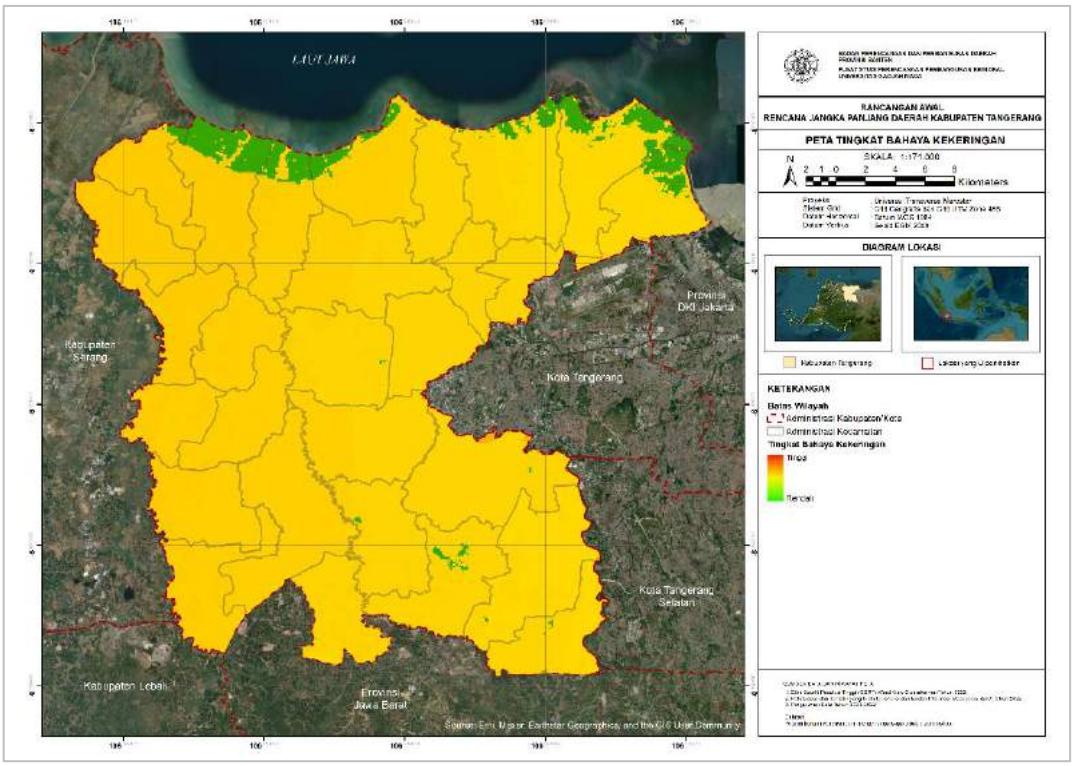
3) Luas Kawasan Rawan Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Berdasarkan parameter tersebut, Kabupaten Tangerang dikategorikan sebagai tingkat bahaya sedang di Provinsi Banten dengan total luas 101.186 Ha. Secara lebih rinci, potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Tabel 2. 79
Potensi Kekeringan di Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Bahaya (Ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Kabupaten Lebak	-	342.326	330	342.656	SEDANG
Kabupaten Pandeglang	-	149.015	125.674	274.689	TINGGI
Kabupaten Serang	-	131.304	42.124	173.428	TINGGI
Kabupaten Tangerang	-	101.186	-	101.186	SEDANG
Kota Cilegon	-	16.199	1.351	17.550	SEDANG
Kota Serang	-	26.671	-	26.671	SEDANG
Kota Tangerang	-	15.393	-	15.393	SEDANG
Kota Tangerang Selatan	-	14.719	-	14.719	SEDANG
Provinsi Banten	-	796.812	169.480	966.292	TINGGI

Sumber: Dokumen KRB Provinsi Banten Tahun 2021



Gambar 2. 222
Peta Tingkat Bahaya Kekeringan di Kabupaten Tangerang
Sumber: InaRISK BNPB, 2023

C. Komunikasi dan Informatika

1) Daya Listrik yang Terpasang

Daya listrik yang terpasang menunjukkan jumlah kWh yang mampu digunakan di kabupaten/kota masing-masing. Daya ini dialirkan untuk memberikan layanan listrik kepada rumah tangga. Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten yang memiliki daya listrik terbesar di Provinsi Banten dengan angka 3.583.602.153 kWh daya listrik terpasang diikuti oleh Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Tabel 2. 80
Daya Listrik yang Terpasang di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Daya Listrik Terpasang (kWh)			
	2018	2019	2020	2021
Kab. Pandeglang	210.719.710	221.913.660	234.876.510	249.605.260
Kab. Lebak	392.383.620	419.835.670	475.821.720	502.868.070
Kab. Tangerang	3.077.992.651	3.287.742.351	3.403.422.454	3.583.602.153
Kab. Serang	1.520.058.050	1.596.799.400	1.686.258.000	1.876.550.450
Kota Tangerang	1.507.083.119	1.555.083.682	1.538.498.186	1.608.512.586
Kota Cilegon	1.481.017.220	1.488.344.220	1.485.443.920	1.532.771.070
Kota Serang	327.343.810	347.264.310	366.344.310	388.548.660
Kota Tangerang Selatan	2.034.489.750	2.145.136.650	2.156.914.800	2.292.092.300
Provinsi Banten	10.551.087.930	11.062.119.943	11.347.579.900	12.034.550.549

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

2) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase distribusi listrik untuk setiap rumah tangga pada tahun 2021 di Provinsi Banten termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sudah mencapai 99,3% pada tahun 2021. Rasio elektrifikasi

memperlihatkan Kabupaten Tangerang sudah mencapai angka 97,31%, berada di posisi kelima di Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang juga menjadi penyumbang terbanyak dalam jumlah rumah tangga belum berlistrik di Provinsi Banten dengan angka 27.132 rumah tangga.

Tabel 2. 81
Persentase Jumlah Pelanggan Listrik di Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (PLN)	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN	Jumlah Rumah Tangga Belum Berlistrik	Rasio Elektrifikasi (%)
Kab Pandeglang	349.747	2.534	15.687	95,75%
Kab Lebak	360.543	119	23.266	93,81%
Kab Tangerang	980.206	1.062	27.132	97,31%
Kab Serang	451.125	0	15.425	96,66%
Kota Tangerang	577.676	0	40	99,99%
Kota Cilegon	120.682	0	1.167	98,81%
Kota Serang	225.912	1.519	2.449	98,67%
Kota Tangerang Selatan	455.534	0	147	99,97%
Provinsi Banten	3.521.425	5.234	85.313	99,30%

Sumber: Laporan Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2021

3) Persentase Penduduk yang Menggunakan Handphone atau Telepon

Persentase penduduk yang menggunakan handphone atau telepon di Kabupaten Tangerang memiliki tren yang fluktuatif. Persentase pengguna sempat naik pada tahun 2017 mencapai 71,46 sebelum akhirnya terus turun hingga 63,50% pada tahun 2020. Pengguna telepon di Kabupaten Tangerang menempati posisi terbanyak kelima di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang.

Tabel 2. 82
Persentase Penduduk yang Menggunakan Handphone atau Telepon di Provinsi Banten Tahun 2015-2020

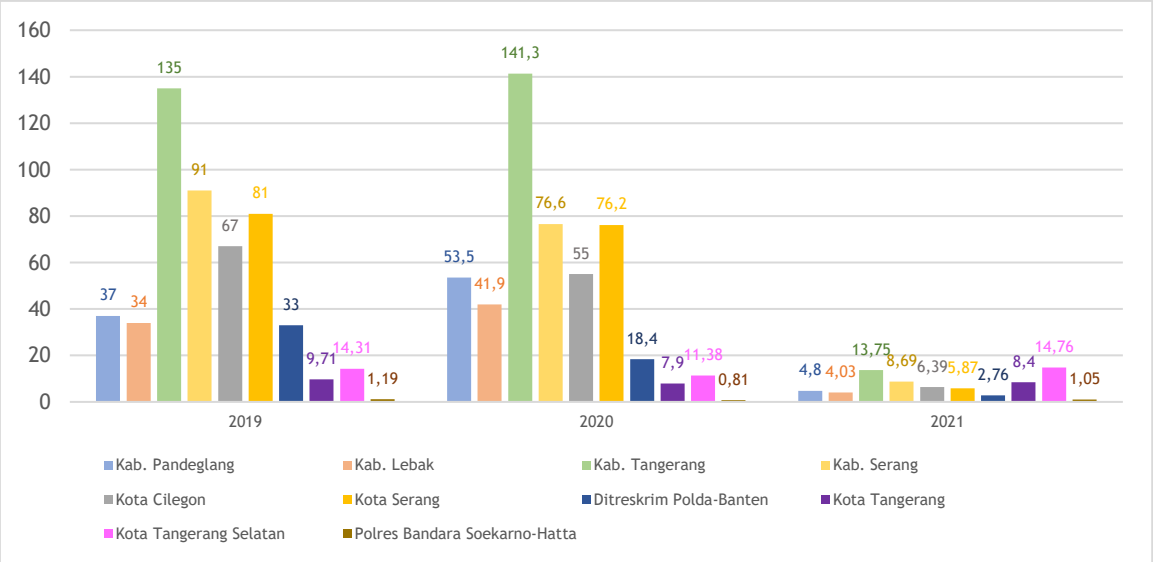
Kabupaten/Kota	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Pandeglang	45,35	47,23	57,37	47,93	53,20	50,23
Kab. Lebak	43,57	43,08	60,18	46,51	49,01	47,07
Kab. Tangerang	59,68	60,59	71,46	64,69	63,98	63,50
Kab. Serang	49,79	50,64	60,97	58,21	59,61	56,71
Kota Tangerang	74,98	74,17	78,20	74,92	74,86	76,26
Kota Cilegon	67,60	68,74	78,66	72,34	71,54	74,63
Kota Serang	57,95	61,40	71,84	59,71	64,70	65,93
Kota Tangerang Selatan	77,60	76,01	82,81	79,76	79,35	76,79
Provinsi Banten	60,49	60,92	70,60	64,25	65,21	64,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2022

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka kriminalitas

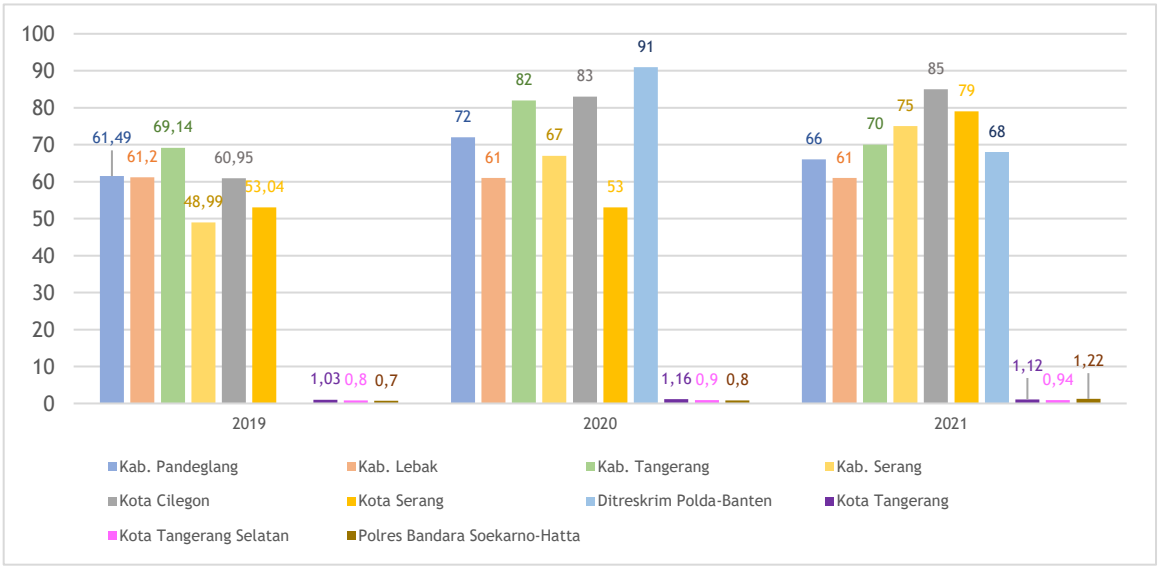
Kriminalitas menjadi salah satu faktor pembentuk iklim berinvestasi. Semakin kecil tingkat kriminalitas pada suatu wilayah makan semakin besar tingkat keamanan dari gangguan oknum masyarakat pada wilayah tersebut.



Gambar 2. 223
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Angka kriminalitas atau dapat juga disebut sebagai risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 adalah 13,75. Artinya dari 100.000 penduduk terdapat 14 penduduk yang terkena kejahatan. Angka tersebut berada di urutan ke-dua tertinggi di Provinsi Banten. Dua tahun sebelumnya angka capaiannya menempati urutan pertama.

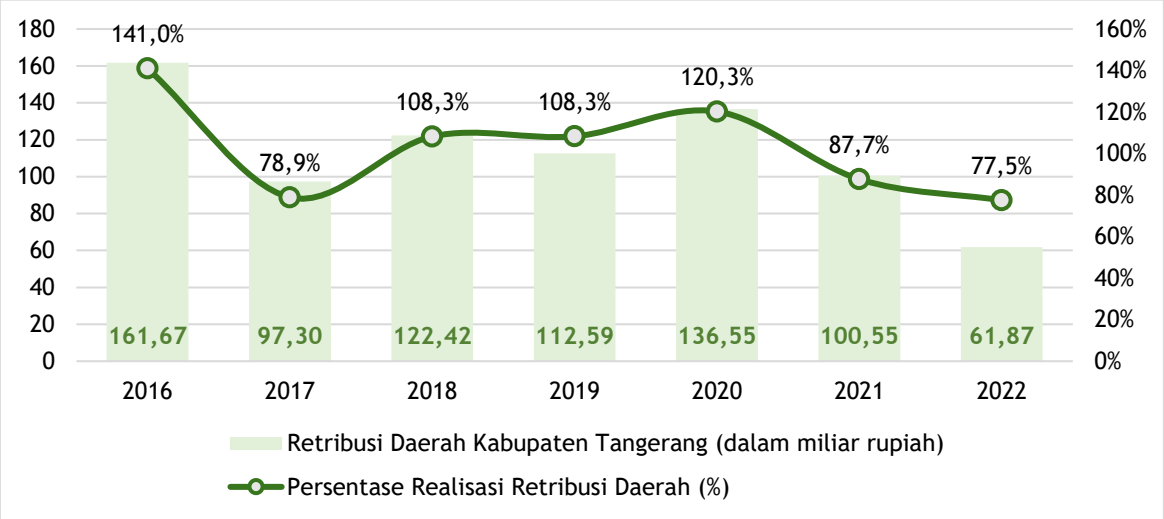
Dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Tangerang, lebih dari setengahnya berhasil diselesaikan. Persentase penyelesaian tindak pidana pada tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah 69,14%, 85%, dan 70%, suatu capaian yang fluktuatif.



Gambar 2. 224
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana
Sumber: BPS Provinsi Banten

B. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Gambar dibawah ini merupakan besaran dan persentase realisasi retribusi daerah Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. 225
Besaran dan Persentase Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
Sumber: Website DPJK Kemenkeu

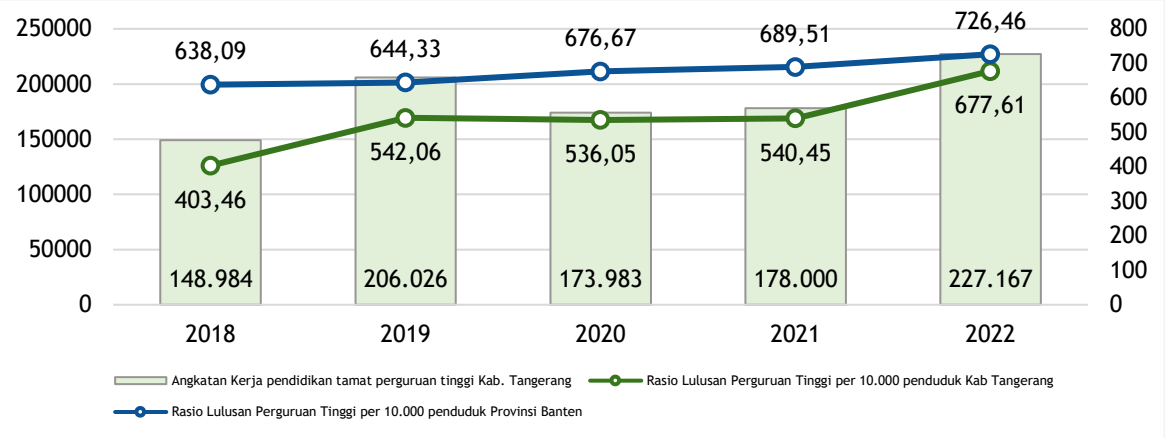
Berdasarkan grafik diatas bahwa dalam tujuh tahun terakhir, besaran retibusi daerah Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022, retribusi daerah Kabupaten Tangerang mencapai 61,87 miliar rupiah dengan persentase realisasi retribusi sebesar 77,5%. Capaian ini menurun dari tahun 2021.

C. Lama Proses Perijinan

Sistem perijinan dan non-perijinan di Kabupaten Tangerang diatur dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Jenis perizinan dan non-perizinan diberikan berdasarkan urusan pemerintah daerah. Prosedur perizinan dan non-perizinan terdiri dari verifikasi, permohonan, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, serta pemberian keputusan. Jangka waktu pelayanan DPMPTSP ditetapkan paling lama 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non-perizinan secara lengkap dan benar. Selain itu, pemohon dapat mengajukan pengaduan melalui DPMPTSP paling lambat 30 hari kerja sejak pemohon menerima pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sistem informasi pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis web di Kabupaten Tangerang yaitu "SIPINTER".

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)



226Gambar 2. 227
Angkatan Kerja Tamat Perguruan Tinggi dan Rasio Lulusan Perguruan Tinggi per 10.000 penduduk di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar di atas menunjukkan jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tamat perguruan tinggi serta rasio lulusan perguruan tinggi per 10.000 penduduk di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten tahun 2019-2022. Pada tahun 2022, rasio lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang mencapai 677,61 tiap 10.000 penduduk dan capaian ini lebih rendah dibanding Provinsi Banten yang mencapai 726,46 tiap 10.000 penduduk.

B. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, dapat diketahui pada tahun 2022 bahwa rasio ketergantukngan penduduk Kabupaten Tangerang adalah 41,07 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 42 penduduk yang berusia tidak produktif. Rasio ini lebih rendah daripada rasio nasional yang berada di angka 44,4 dan juga lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Jika dilihat dari tren rasio ketergantungan, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang mengalami penurunan sebesar 8,7% selama sepuluh tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) berkurang. Di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua memiliki nilai rasio ketergantungan yang paling rendah.

2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar urusan pemerintah wajib yang meliputi urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. SPM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tabel di bawah ini merupakan capaian SPM di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 83
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kesenjangan
A	SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	67,72	67,72	32,28
2	Pendidikan Dasar	100	98,07	98,07	1,93
3	Pendidikan Kesetaraan	100	96,63	96,63	3,37
B	SPM KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	0
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100	0
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	99,77	99,77	0,23
4	Pelayanan kesehatan balita	100	98,07	98,07	1,93
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	95,08	95,08	4,92
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	98,61	98,61	1,39
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	97,27	97,27	2,73
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	0
10	Pelayan kesehatan ODGJ	100	96,45	96,45	3,55
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis	100	98,75	98,75	1,25
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100	100	0
C	SPM PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	72,43	72,43	27,57
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	91,89	91,89	8,11
D	SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMRUKIMAN				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	100	100	100	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100	100	100	0
E	SPM KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	92,91	92,91	7,09
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	93,6	93,6	6,4
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	92,8	92,8	7,2
4	Pelayanan penyelamatandan evakuasi korban bencana	100	88	88	12
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	96,95	96,95	3,05
F	SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	97,33	97,33	2,67
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar terlantar di luar panti	100	97,33	97,33	2,67
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	97,33	97,33	2,67
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	93,33	93,33	6,67
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	88,37	88,37	11,63

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

2.6 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah

Tabel 2. 84
Capaian Kinerja Pembangunan Menurut Aspek dan Urusan Kabupaten Tangerang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2.1	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**														
2.1.1	**Aspek Geografi**														
	Indeks Risiko Bencana	indeks				200,8	200,8	185,63	185,63	170,15	146,93	146,93	91,98	Menurun (baik)	IRB yang semakin turun menunjukkan perkembangan yang baik, dapat diketahui dari strategi menyikapi bahaya, menurunkan kerentanan, dan meningkatkan kapasitas
2.1.2	**Aspek Demografi**														
2.1.2.1	Jumlah Penduduk Per Tahun	jiwa	3.050.929	3.157.780	3.264.776	3.370.594	3.477.495	3.584.770	3.692.693	3.800.787	3.245.619	3.293.533	3.352.472		
2.1.2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	%	3,47	3,34	3,39	3,24	3,17	3,08	3,01	2,93	0,51	1,16	1,05	Cenderung menurun	2020: Laju pertumbuhan penduduk per tahun dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan tahun 2020 (September) 2021: Laju pertumbuhan penduduk per tahun dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan tahun 2021 (Juni) 2022: Laju pertumbuhan penduduk per tahun dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2022 (Juni)
2.1.2.3	Rasio Jenis Kelamin	%	105	104,96	104,9	104,81	104,75	104,69	104,61	104,53	104,78	104,67	104,55	Menurun	Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 110 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kecamatan Kronjo yakni sebesar 99.
2.1.2.4	Rasio Ketergantungan	-			45,6	45,40	45,30	45,13	44,86	44,86	44,460	41,72	41,72	Menurun (baik)	
2.1.2.5	Kepadatan Penduduk	jiwa/km 2	3.015	3.121	3.227	3.331	3.437	3.543	3.649	3.756	3.208	3.255	3.262	Fluktuatif (meningkat)	

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2.1.2.6	Angka Kelahiran Kasar	-													
2.1.2.7	Migran Neto Seumur Hidup	%				594.539									
2.2	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**														
2.2.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**														
2.2.1.1	Pertumbuhan PDRB	%	6,17	6,41	5,37	5,6	5,41	5,82	5,8	5,58	-3,7	4,63	5,47	Fluktuatif (melambat)	LPE Kabupaten Tangerang berada di atas nasional, tetapi cenderung mengalami perlambatan.
2.2.1.2	Laju inflasi	%				3,94	2,65	3,50	3,46	3,31	1,17	1,81	4,56	Fluktuatif	Inflasi Tangerang tahun 2022 berada di bawah nasional. Inflasi Tangerang dipengaruhi oleh bensin, kelompok bahan makanan, dan kebutuhan rumah tangga
2.2.1.3	PDRB per kapita	juta rupiah	14.460,49	15.513,57	15.771,40	16.450,20	31.458,79	33.194,00	35.157,53	37.974,17	41.964,18	44.111,80	47.776,14	Meningkat	PDRB ADHB Kab. Tangerang lebih rendah dibanding Provinsi Banten yang sebesar 60,99 juta rupiah.
2.2.1.4	Indeks Gini	indeks	0,32	0,34	0,38	0,35	0,32	0,33	0,34	0,33	0,29	0,29	0,28	Menurun (baik)	Tren 10 tahun terakhir Indeks Gini kabupaten ini cenderung menurun dan lebih rendah dibanding Indeks Gini Provinsi Banten dan nasional.
2.2.1.5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	%											37,60		Pada tahun 2022, persentase penduduk terbesar dengan kelompok berpendapatan 40% terendah (Desil 1-4) yaitu Kecamatan Rajeg sebesar 95.151 jiwa
2.2.1.6	Indeks ketimpangan Williamson Provinsi Banten	indeks	0,86	0,82	0,79	0,77	0,75	0,72	0,70	0,69	0,65	0,64	0,63	Menurun	Tren data 10 tahun terakhir terjadi penurunan Indeks Willamson, namun masih dalam kategori ketimpangan tinggi.
2.2.1.7	Persentase Penduduk Miskin	%	5,71	5,78	5,26	5,71	5,29	5,39	5,18	5,14	6,23	7,12	6,92	Fluktuatif (meningkat)	Tren lima tahun terakhir meninjukkan PPM Kab. Tangerang meningkat dan di atas PPM Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, PPM Kab. Tangerang terendah ketiga
2.2.1.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,78	0,78	0,63	0,82	0,79	0,68	0,82	0,69	0,95	1,21	1,06	Fluktuatif	Tren 10 tahun terakhir, indeks kedalaman kemiskinan Kab. Tangerang dibawah Prov. Banten

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2.2.1.9	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,21	0,21	0,12	0,18	0,18	0,13	0,2	0,14	0,22	0,29	0,26	Fluktuatif	Tren 10 tahun terakhir, indeks kedalaman kemiskinan Kab. Tangerang dibawah Prov. Banten
2.2.1.10	Kemiskinan Ekstrem	%										2,2			
2.2.1.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	68,83	69,28	69,57	70,05	70,44	70,97	71,59	71,93	71,92	72,29	72,97	Meningkat	
2.2.1.12	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%									17,83				
2.2.1.13	Persentase PAD terhadap pendapatan atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	%	31,63%	35,16%	42,62%	43,77%	42,81%	54,00%	53,60%	46,10%	36,70%	45,20%		Fluktuatif	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tangerang dalam kategori Cukup (30-40%) dan Baik (40-50%). Dalam 10 tahun terakhir, DDF Kabupaten Tangerang lebih rendah dibanding Provinsi Banten.
2.2.1.14	Penguatan cadangan pangan	ton						17080	25700	12800	25000	18725	407362	Fluktuatif	
2.2.1.15	Pertumbuhan Industri	%		-1,03%	15,85%	0,00%	-3,20%	50,20%	-0,53%	19,63%	17,96%	14,47%		Fluktuatif (melambat)	Tren 10 tahun terakhir pertumbuhan industri sedang besar di Kab. Tangerang meningkat secara signifikan terutama pada tahun 2016-2017 yang meningkat 50,2%. Laju pertumbuhan industri Kabupaten Tangerang cenderung lebih tinggi dibanding Provinsi Banten
2.2.1.16	Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB	%													Dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kontribusi lapangan usaha terbesar adalah sektor industri pengolahan. Akan tetapi terjadi pergeseran struktur PDRB Kab. Tangerang dari sektor sekunder (industri) ke sektor tersier (perdagangan dan jasa).
2.2.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**														
2.2.2.1	**Pendidikan**														
	Angka melek huruf	%	95,89	96,37	96,69	96,9	97,06	95,92	95,89	97,38	97,62	97,84	96,64	fluktuatif	
	Angka harapan lama sekolah	tahun	11,18	11,44	11,65	11,89	12,11	12,51	12,8	12,81	12,82	12,84	12,85	Meningkat	
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,07	8,18	8,2	8,22	8,23	8,24	8,27	8,28	8,39	8,61	8,92	meningkat	

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2.2.2.2	**Kesehatan**														
	Angka harapan hidup	tahun	68,92	68,96	68,98	69,28	69,37	69,47	69,61	69,79	69,89	69,93	70,28	Meningkat	
	Stunting	%						28,8	27,3	18,4	N/A	23,3	21,1	Fluktuatif (menurun)	
	Balita Gizi Kurang	%			3,28	2,86	3,17	3,14	2,51	2,28	3,52	2,34	2,5	Fluktuatif	
	Balita Gizi Buruk	%			0,45	0,39	0,41	0,38	0,33	0,29	1,4	0,64	0,4	Fluktuatif (cenderung stagnan)	
	Cakupan desa siaga aktif	%	45	51	59	63	64	69	69	69	69	69	69	Stagnan	
2.2.2.3	**Pertanahan**														
	Luas Lahan Bersertifikat	m2	351.647.197	466.603.935	483.517.334	499.282.652	513.263.747	575.673.659	654.285.519	712.925.639	731.891.905	766.452.433	798.495.925		Penurunan sangat signifikan tahun 2020-2021 disebabkan karena keterbatasan data untuk sampling saat pandemi
2.2.2.4	**Ketenagakerjaan**														
	Tingkat Kesempatan Kerja	%	85,58	88,54	88,06	91,55	91,00	91,58	90,37	91,08	86,94	90,94	92,12		
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	66,74	68,02	62,7	62,46	66,34	63,79	63,01	66,07	65,43	63,94	67,05		
	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	11,46	11,94	8,45	9,00	8,42	10,57	9,63	8,92	13,06	9,06	7,88		
	Laju Pertumbuhan PDB terhadap tenaga kerja	rasio (%)		-2,42	0,57	3	5,41	-1,35	2,7	-2,71	-0,48	-0,2	-3,06		
2.2.3	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**														
2.2.3.1	**Kebudayaan**														
	Persentase grup kesenian yang aktif	%						50,68	56,16						
	Jumlah gedung kesenian		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.3.2	**Pemuda dan Olahraga**														
	Persentase kelompok masyarakat yang aktif berolahraga									90	85	95	95		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Jumlah gedung/prasarana olahraga												29		
2.3	**ASPEK PELAYANAN UMUM**														
2.3.1.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**														
2.3.1.2.	**Pendidikan**														
	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini	%		29,69	42,46	42,35	43,47	46,82	43	40,3	47			Meningkat	Pendidikan anak usia dini yang tidak optimal yang ditunjukkan oleh cakupan PAUD hanya 47% (Tahun 2020); hanya 0,16% anak usia 4-6 tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (Tahun 2021); dan Angka Partisipasi Kasar PAUD di angka 21,07 (Tahun 2022, paling rendah daripada jenjang pendidikan lainnya)
2.2.2.4	Angka partisipasi kasar (APK)														
	PAUD				52,68	54,48	58,57	60,28	19,54	15,15	20,55	21,07		Menurun	
	a. SD/Sederajat	-			115,35	109,64	110,92	111,02	107,87	103,29	104,79	103,69	104,8	Menurun	
	b. SMP/Sederajat	-			105,6	104,6	105,9	105,29	103,14	103,33	103,56	102,57	103,56	Menurun	
	c. SMA/Sederajat	-			61,87	67,51	70,96	78,12	79,95	82,71	84,42	85,8	71,15	Fluktuatif	
2.2.2.6	Angka Partisipasi Murni (APM)			92,06	92,64	88,14	85,14	110,5							
	a. SD/Sederajat	-	95,89	96,74	97,57	94,12	96,6	96,3	95,84	95,61	95,86	94,78	94,61	Fluktuatif (Stagnan)	
	b. SMP/Sederajat	-	75,96	82,22	84,35	84,31	78,4	78,95	79,06	76,54	84,39	74,2	74,02	Fluktuatif (Menurun)	
	c. SMA/Sederajat	-			47,9	53,17	52,6	55,62	57,34	67,23	58,16	57,89		Fluktuatif (Menurun)	
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SD/Sederajat	-							22,57	25,57	28,57	19,47		Fluktuatif (Menurun)	
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SMP/Sederajat								9,64	10,64	11,64	8,64		Fluktuatif (Menurun)	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	-				94,12	96,6	96,3	95,84	95,61	95,86	94,78	94,61	Fluktuatif (Meningkat)	
	Angka Partisipasi Murni (APM)	-				84,31	78,4	78,95	79,06	76,54	84,39	74,2	74,02	Fluktuatif (Menurun)	

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	SMP/MTS/Paket B														
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C	-							55,33	54,94	55,92	56,89	56,49	Fluktuatif (Meningkat)	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	-							0,02	0,02	0,03	0,03			
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	-							0,07	0,06	0,04	0,03			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	-	100	100	100	100	100	100,7	100	100	100				
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS	-	100	100	100	100	100	102,61	100	100	100				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat	-					67,59	98,05	98,06	96,69	97,19			Fluktuatif (Meningkat)	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Sederajat ke SMA/Sederajat	-					90,09	83,93	83,98	84,03	84,08			Fluktuatif (Menurun)	
	Fasilitas Pendidikan														
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%											86,55	Belum 100%	
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%											96,75	Belum 100%	
	Rasio ketersediaan sekolah														
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	-								35,06	28,16	27,5		Menurun	
	Rasio ketersediaan sekolah	-								42,19	23,99	29,03		Menurun	

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah														
	Rasio guru terhadap murid														
	a. Pendidikan dasar	-							0,003	0,004	0,004				
	b. Pendidikan Menengah	-							0,003	0,004	0,004				
	Pendidikan Dasar							**1:24**	**1:24**	**1:22**	**1:21**	**1:21**		Stagnan	
	SD							1:25	1:25	1:24	1:22	1:24		Stagnan	
	MI							1:19	1:19	1:19	1:19	1:17		Stagnan	
	SMP							1:25	1:25	1:23	1:22	1:22		Stagnan	
	MTS							1:15	1:12	1:12	1:12	1:10		Stagnan	
	Angka Partisipasi Ditamatkan														
	a. SD/Sederajat	-							19,57	22,57	25,57	28,57			
	b. SMP/Sederajat	-							8,64	9,64	10,64	11,64			
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							89	90	92,5	92,7		90,93		
2.3.1.2.	**Kesehatan**														
	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup										12,14				
	Jumlah kasus kematian bayi				268	334	289	285	247	227	217	251	219	Meningkat	Pada tahun 2021 penyebab kematian bayi didominasi afiksia, sementara tahun 2022 didominasi BBLR
	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	kasus		70	75	78	80	58	58	36	47	109	57		Penyebab kematian ibu disebabkan faktor risiko anemia, obesitas, kurang energi kalori, TBC
	Angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup	kasus			4	5	4	4	3	3	3	3	3,8		Penyebab kematian bayi yaitu afiksia, berat badan lahir rendah
	Angka kematian balita per	kasus				78			3,3	3	3,3	3,6	3,9		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	100.000 kelahiran hidup														
	Rasio posyandu per 1000 balita	-							0,63	0,63	0,64	0,65	0,84		
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	-							17,7	18,3	18,4	18,7	18,7		
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 1.000 penduduk						0,00708	0,0077	0,0077	0,00801	0,00831	0,00831		
	Rasio dokter per satuan penduduk	per 1.000 penduduk					0,21	0,12	0,29	0,29	0,58	0,51			
	Rasio tenaga medis bidan per 100.000 penduduk						44,98		73,95	46,3	35,65				
	Rasio tenaga medis perawat per 100.000 penduduk						47,62		61,6	60,5	91,3				
	Rasio dokter per 100.000 penduduk	-					21,34	11,74	29,29	28, 2170	57,9	51,49	1,307		
	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	per 7.500 penduduk					0,21	0,12	0,29	0,29	0,58	0,51			
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%				72,3	81,3	89,1	93,1	91,4	90,7	80,6	85,9		
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	82,78	92,42	88,11	88,11	93,5	94,3	95,7	99,6	100,25	101,5	100,2		
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	92,7	90,1	78,47	95,6	95,6	98,2	98,2	98,2	90,9	85,2	93,4		
	Cakupan balita gizi buruk		73,69	87,91	90,87				100	100	100	98,8	99,6		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	mendapat perawatan														
	Persentase Balita Penderita Pneumonia	%	15,68	24,5	24,49						2,7				
	Jumlah Kasus Balita dengan Pneumonia			7733	7694	8813	8348	10841	12842	13550	10108				
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%		95,5	86,1	95,5	101,9	89,9	100	N/A	96,5				
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi BCG			97,7	91,3	97,2	104,7	101,8	107,5	99,66	92,6				
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi Hepatitis BO			93,6	92,1	94,9	97	99,7	106,7	100,52	102,3				
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi DPT HB III			96,7	98,8	96,4	103,6	99,8	100,9	108	95,6				
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi Polio IV			96,6	92,4	96,1	103,3	101,1	100,9	100,52	95,6				
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun	kasus	97,94	97,73	97,64										
	Cakupan penemuan penyakit TBC BTA		65,49	65,38	69,88										
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	100	100				100	100	100	100	100		
	Jumlah kasus TBC				2730	2986	3651	7978	11213	8698	5860	6364		fluktuatif cenderung meningkat	
	Jumlah Penduduk				3.264.776	3.370.594	3.477.495	3.584.770	3.692.693	3.800.787	3.245.619	3.293.533	3.352.472		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Angka TBC per 100.000 penduduk				83,62	88,59	104,99	222,55	303,65	228,85	180,55	193,22			
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD								100	100	100	100	100		
	Penderita diare yang ditangani	%							100	100	100	100	100		
	Angka Kejadian Malaria	Kasus							0	0	0	0	0		cakupan penemuan kasus tertinggi di Kabupaten Tangerang berada di wilayah Gunung Kaler, Caringin, Jambe dan Bojong Kamal.
	Persentase Kasus HIV		10	11	14	16	20	27,00	32	53	69				
	Cakupan kunjungan bayi	%	92,43	95,08	93,18	90,4	93,3	94,7	93,1	102,8	103	96,6	99,75		
	Cakupan pelayanan puskesmas	%							20,72	20,72	24,86	28,59	27,6		
	Cakupan pelayanan puskesmas pembantu	%							18,78	16,79	16,79	16,79	16,8		
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	75,24	88,90	89,42	95,00	93,80	94,90	96,1	98,33	97,72	95	100		
	Cakupan pelayanan nifas	%	74,34	88,43	90,72	91,6	91,7	92,3	93,4	97,78	99,41	99	99		
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		58,63	76,44	75,36	71	79	76	76,9	78,95	80,03	76,1	90,48		
	Cakupan pelayanan anak balita	%	73,69	87,91	90,87		90	90.3	98,2	100	94,3	98,2	99,35		
	Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional											83,21			
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat		100	94,94	95,09	97,62	98,59								

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		<10%	<10%	<10%										
	Persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah	%							83,6	97,9	92	86,5	98,6		
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%				71	79	76	76,9	78,95	80,03	76,1	90,48		
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD dan setingkat	%	95,09	97,62	98,59										
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	53,35	67	61	61	81,3		85,99	102,33	94,35	98,8	96		
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100										
	Persentase balita stunting											7,6			
	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%							36,85	64,29		83,21			
2.3.1.3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**														
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%							82,64	88,55	87,55	90,74	92,59	Fluktuatif	Masih ada beberapa kondisi jalan yang terkategori dalam kondisi sedang, rusak, dan rusak berat (sekitar 8% jalan). Kondisi jalan ini perlu mendapatkan perawatan dan perbaikan
	Persentase rumah tangga	%				65,38	76,63	78,11	81,21	72,89	82,23	85,89	86,63	Fluktuatif	Pemenuhan sanitasi rumah tangga masih belum 100%,

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	yang memiliki akses sanitasi layak														menduduki peringkat ke-5 di Banten
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	%											8,4		
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%									6,05	27,7	69,94	Meningkat	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%			70,76	73,98	69,82	73,20	80,95	80,26	98,48	97,97	98,55	Fluktuatif	Pemenuhan air minum rumah tangga masih belum 100%, kedua terbanyak di Banten
	Persentase areal kawasan kumuh	%							13,3	30,71	30,16	29,66		Fluktuatif	Menurun secara perlahan, diasumsikan terjadi perubahan perhitungan luas areal kumuh pada tahun 2018-2019
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB								13	16,61	16,61	17,05		Meningkat	
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan								13	16,61	16,61	17,05		Meningkat	
	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan								99,11	99,11	99,11	99,11	99,35	Meningkat	
	Ketaatan terhadap RTRW	%							90	85	90	90	90	Meningkat	
2.3.1.4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**														
	Rasio Rumah layak huni	%						97,46	98,56	98,17	63,38	71,8		Fluktuatif	Diasumsikan terjadi perubahan perhitungan rumah layak huni pada tahun 2019-2020
	Persentase luasan permukiman kumuh di	%							13,3	30,71	30,16	29,66		Fluktuatif	Menurun secara perlahan, diasumsikan terjadi perubahan perhitungan luas areal kumuh pada tahun 2018-2019

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	kawasan perkotaan														
2.3.1.5.	**Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**														
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%								90	90	90	100		
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%								100	95	100	100		
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%									100	100	100		
	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajeman Kebakaran	%									0,08	28	100		
	Persentase Penegakan Perda	%									75	100	100		
	Jumlah pelanggaran perda/perkada yang diselesaikan	kasus		176	124	136	107	132	114	88	29				
	Indeks Risiko Bencana					200,8	200,8	185,63	185,63	170,15	146,93			Menurun	Menurun, namun masih dalam kelas risiko kategori tinggi
2.3.1.6.	**Sosial**														
	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	jiwa						42.700	129.470	131.555	172.370				
	Persentase PMKS yang tertangani	%						96	85	97	72				
2.3.2.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Non Dasar**														
2.3.2.1	**Tenaga Kerja**														
	Pencari kerja terdaftar	jiwa	31306	33817	43401	27658	47500	50734	48993	47869	38280	47514	57949		
	Pencari kerja yang ditempatkan	jiwa	8140	6530	6260	7742	6269	6086	4387	17277	17877	21850	39225	Fluktuatif	Pada tahun 2022 terjadi peningkatan drastis jumlah pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2021 di Kan.

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
															Tangerang dan capaian tersebut di atas Provinsi Banten
	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	26,00%	19,31%	14,42%	27,99%	13,20%	12,00%	8,95%	36,09%	46,70%	45,99%	67,69%		Jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2019 menurun dari tahun 2018. Maka dari itu diperlukan strategi untuk meningkatkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan.
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	jiwa	720	600	720	720	560	400	752	400	0	464	416		
	Upah minimum regional	rupiah	1.527.000	2.200.000	2.442.000	2.710.000	3.021.650	3.270.936	3.555.835	3.841.368	4.168.268	4.230.793	4.230.793	Meningkat	UMR Kab. Tangerang lebih tinggi dibanding Prov. Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Tangerang menjadi tertinggi keempat setelah Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	indeks													
	Peningkatan Kesempatan Kerja	%		3,3	-0,5	3,8	-0,6	0,6	-1,3	0,8	-4,8	4,4	1,3	Fluktuatif	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kab. Tangerang berada di bawah nasional
	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio/10.000 penduduk							403,46	542,06	536,05	540,45	677,61	Meningkat	Rasio Lulusan Perguruan Tinggi per 10.000 penduduk di Kab. Tangerang lebih rendah dibanding Prov. Banten
2.3.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**														
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	90,53	90,62	91,11	90,72	91,04	91,2	90,9	90,97	90,98	91,08	91,24		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	55,41	53,26	61,67	62,54		62,43	62,25	61,54	61,53	62,17	63,35		
	Keterlibatan perempuan di parlemen	%	10	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14		Kursi yang di duduki Perempuan di DPRD Kabupaten Tangerang
	Keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan	%										12	14		
	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Kasus								275	155	154			
	Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan Yang Mendapatkan bantuan hukum/ jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%									13,22	15,38			
	Rasio APM perempuan/laki-laki														
	a. SD/Sederajat	-					0,9212	0,9209	0,9156	0,9141	0,9130				
	b. SMP/Sederajat	-					0,9441	0,9421	0,9464	0,9387	0,9400				
	c. SMA/Sederajat	-					1,2044	1,2191	1,2326	1,2165	1,1934				
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	-					0,99	0,98	0,99	1					
2.3.2.3	**Pangan**														
	Kecukupan Ketersediaan Pangan	ton							596351	429941	448491	18725	407362	Menurun	Terjadi penurunan secara drastis di tahun 2021 akibat anomali musim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
															Hal ini kemudian mempengaruhi angka ketersediaan pangan utama
	Ketersediaan energi masyarakat	kkal/ kapita/ hari		2207	2224	2235	2315	2239	2257	2356,7	2267,4	2374	2370	Meningkat	Angka ketersediaan energi meningkat akan tetapi masih di bawah angka ideal ketersediaan energi sebesar 2400 kkal/kapita/hari
	Ketersediaan protein	g/kapita/hari	57	63	68,5	69,5	72,3	72,7	81	77	75	80	82	Meningkat	Angka ketersediaan energi meningkat dan nilainya berada di atas angka ideal (63 gram/kapita/hari)
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85	85	87	89	86,4	85,1	87,5	84,3	85,5	86,3	84,4	Fluktuatif	Pertumbuhan angka gizi masyarakat cenderung belum stabil dan di bawah target nasional
	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita	g/kapita/hari						67,22	71,5	72,71	71,61	68,33	71,26	Meningkat	
	Aksesibilitas/Keterjangkauan terhadap Pangan	%								87,84	87,27				
	Kualitas/Keamanan Pangan									72,47	76,07	76,07	77	Meningkat	
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks							71,1	75,54	72,47	76,07	77	Meningkat	Kondisi ketahanan pangan membaik
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	83	86	89	92	95	100	100	100	100	100	Meningkat	Selama 5 tahun kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten
	Ketersediaan pangan Utama	kg/jiwa							161,49	113,12	138,18	5,69	121,51	Menurun	Terjadi penurunan secara drastis di tahun 2021 akibat anomali musim yang mempengaruhi produktivitas pertanian
	Ketersediaan pangan	%								49,79	65,42				
	Pemanfaatan pangan	%								77,94	75,65				
2.3.2.4	**Pertanahan**														
	Persentase Lahan Bersertifikat	m2							75,40	76,40	11,35	16,35			
	Penyelesaian Izin Lokasi	Jumlah Lokasi							100	100	100	100			semua data tidak menjadi indikator kegiatan pada dinas perkim
2.3.2.5	**Lingkungan Hidup**														

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Indeks Kualitas Air	Indeks										56,43	58,89		kategori sedang. Daya dukung dan daya tampung lahan sebesar 4% belum terlampaui, sementara 96% lahan terlampaui.
	Indeks Kualitas Udara	Indeks										70,14	71,06		Kategori baik
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks										24,74	22,67		Kategori sangat kurang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks								47,57	58,68	55,04	55,8	Fluktuatif (meningkat)	Kategori sedang
	Timbulan sampah yang tertangani							32,34	23,63	24,13	24,63	39,00	60,66	Meningkat	Capaian tersebut dibawah nasional
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%								0,82			1,41		
2.3.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**														
	Rasio kepemilikan KTP dan NIK	%	75	81,6	83,22	89,38	87	90,48	96,89	96,23	85,52	91,21			
	Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	70	73,55	76,79	72,01		100,59							
2.3.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**														
	Indeks Desa Membangun	indeks													
	Posyandu aktif	%							100	100	91,86	93,11	100		
	Persentase PKK aktif	%		31,04	53,96	43,23	49,88	51,21	93,73	93,73	52,7	49,57	55,96		
2.3.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**														
	Total Fertility Rate	-		2,2	2,2	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,552	2,4	2,13		Kenaikan tersebut disebabkan oleh tingginya usia perkawinan masyarakat Kabupaten Tangerang yang berada dalam masa produktifnya, sehingga dapat mempengaruhi jumlah rata-rata kelahiran.
	Cakupan peserta KB aktif	%	75,74	65,72	66,65	68,47	68,79	69,21	69,77	70,3	71.69				
	Angka kelahiran remaja (15-19	-		23	23	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	29	17	16		Dalam pelaksanaan masih ada kendala seperti keterbatasan akses layanan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	tahun) per 1000 perempuan (ASFR 15-19)														kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja
	Cakupan Unmet Need KB	%							15,44	15,44	26,44	26,44	10,4		
	Rata-rata usia kawin pertama wanita								20,12	19,6	18	21	21		
	Tingkat putus pakai kontrasepsi	%													
	Persentase penduduk umur 15-19 tahun berstatus kawin/pernah kawin	%							2,38	3,1	2,05	1,59	1,17		
2.3.2.9	**Perhubungan**														
	Rasio ijin trayek								5,64	9,06	4,34			Fluktuatif	
2.3.2.10	**Komunikasi dan Informatika**														
	Indeks SPBE	Indeks										2,99	2,66	Menurun	
	Persentase penduduk yang menggunakan handphone atau telepon	%				59,68	60,59	71,46	64,69	63,98	63,5			Fluktuatif (meningkat)	Pengguna telepon mulai menurun sejak tahun 2017. Pelaksanaan pembangunan teknologi perlu ditingkatkan untuk menanamkan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat yang modern
2.3.2.11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**														
	Persentase koperasi aktif	%	80,30	69,70	74,20	77,80	77,20	72,00	72,20	36,50	37,00	35,20	35,70	Menurun	Penurunan jumlah koperasi aktif
	Jumlah usaha UMK	usaha						24611	25103	16348	15866	15359		Menurun	Penurunan jumlah usaha UMK. Hal ini dipicu karena permasalahan di bidang koperasi dan UMKM adalah belum optimalnya aspek permodalan dan promosi
	Jumlah tenaga kerja UMK	jiwa						78487	72308	43592	44495	38620		Menurun	Penurunan jumlah tenaga kerja UMK
2.3.2.12	**Penanaman Modal**														
	Jumlah proyek investasi PMDN	jumlah proyek	26	39	37	127	212	298	326	911	2.124	1.548	2.378		
	Jumlah proyek investasi PMA	jumlah proyek		247	308	760	815	1.048	786	1.101	1.754	768	900		
	Jumlah nilai investasi	juta rupiah		572.583,50	4.845.967,50	2.062.478,00	6.153.530,80	5.340.184,80	8.135.633,00	7.656.675,00	12.101.112,10	4.927.603,90	13.162.827,20		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	berskala nasional PMDN														
	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	ribu USD		726,46	460,14	508,61	421,42	785,36	984,95	516,45	444,38	435,92	403,28		
	Rasio daya serap tenaga kerja	rasio							19,55	14,15	25,15	33,13	27,86		
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%			746,33%	-57,44%	198,36%	-13,22%	52,35%	-5,89%	58,05%	-59,28%	167,12%		
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA	%			-36,66%	10,53%	-17,14%	86,36%	25,41%	-47,57%	-13,95%	-1,90%	-7,49%		
2.3.2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**														
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%						20	40	45	70	85	83,33		
	Persentase wirausaha muda	%						42	57	62	67	70	87,7		
	Cakupan pembinaan olahraga	%						33	38	38	41	75	100		
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi								41	56	65	37	n/a		
	Cakupan pembinaan atlet muda	%						20	38	38	41	75	100		
	Jumlah atlet berprestasi							22	41	18	21	4	104		
	Jumlah prestasi olahraga								138	29		1	98		
2.3.2.14	**Statistik**														
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak											Ada		
	Buku kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.3.2.15	**Kebudayaan**														
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya								15	15	2	11	12		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%							100	100	100	100			
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi								31	41	42	42			
2.3.2.16	**Perpustakaan**														
	Jumlah pengunjung perpustakaan	pengunjung/hari	48369	39.750	59.033	84.344	161.221	249.793	304.358	335.707	72.256	15.852	52841		
	Jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah	buku	84711	85931	93274						55.881	57.432	57.979		
	Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah									105.331	111363	112417	112881		
2.3.2.17	**Kearsipan**														
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%		15,15	22,72	37,87	53,03	68,18	66	63	64,5	62,25	66		
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan								1	1	1	1	1		
2.3.3.	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**														
2.3.3.1	**Pariwisata**														
	Kunjungan Wisata	wisatawan			79.283	80.624	94.311	5.150.667	185.676	215.526	193.066	214.970			
	Kontribusi Sektor Akomodasi Makan Minum terhadap PDRB	%	1,37%	1,37%	1,42%	1,45%	1,49%	1,50%	1,51%	1,52%	1,49%	1,46%	1,46%		
2.3.3.2	**Pertanian**														
	Luas Lahan Pertanian	ha	39.177	39.177	39.177	36.934	37.073	36.196	36.231	36.202	36.202	36.202	36.202		
	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama	kuintal/ ha	59,25	59,87	60,23	60,31	60,12	57,12	47,2	50,37	52,16	52,49	48,37	Fluktuatif	

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja										Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Luas Panen Tanaman Hortikultura Buah dan Sayur	ha	148.873	111.382	78.655	66.223	64.426	59.401	76.630	114.266	98.190	124.712		
	Produksi dan Produktivitas Hasil Peternakan	ekor*	291769	247.755	224.633	229.090	242.758	249.799	243.861	244.060	222.320	210.838	154.946	
	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	%	6,40%	6,66%	6,55%	6,64%	6,92%	6,85%	6,68%	6,46%	6,95%	6,52%	6,33%	Fluktuatif	Berada di posisi keenam setelah sektor-sektor dengan kontribusi lebih besar
	Jumlah Kelompok Tani												1.294		
	Luas Lahan Irigasi	ha	25.650	25.650	25.657	24.857	24.805	24.217	23745	23745	23745	23745	23745	Menurun	Setelah mengalami penurunan di tahun 2018, luas lahan irigasi stagnan hingga 2022
2.3.3.3	**Kehutanan**														
	Kondisi Umum Hutan di Tangerang (Luas)	Ha	1591,85	1591,85	1591,85	1591,85	1601,60	1601,60			1776	1664,65			
2.3.3.4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**														
	Jumlah Pelanggan Listrik	Unit				746.842	816.007	785.612	850.184	917.146	969.308	1.024.463		Meningkat	
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%							100	100	100	100	100		
2.3.3.5	**Perdagangan**														
	PDRB ADHB lapangan usaha perdagangan	juta rupiah	8.394.453,9	8.991.673,6	10.000.305,6	10.999.549,2	11.766.171,4	13.138.608,9	14.742.544,8	16.234.312,5	15.934.123,3	16.403.333,9	17.698.472,5		
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,61	11,16	10,94	10,82	10,76	11,04	11,36	11,59	11,74	11,29	11,05		
	Laju PDRB ADHK sektor perdagangan	%	11,1	4,01	6,39	5,71	4,01	6,59	8,69	6,22	-3,7	1,82	3,27		
	Net ekspor	juta rupiah	9.135.109,08	13.529.928,80	19.213.340,04	22.717.997,31	23.580.705,12	24.520.594,85	26.217.507,16	26.111.136,01	23.285.665,67	27.020.356,91	31.919.161,45		
	Ekspor Bersih Perdagangan	juta US$							24520,59	26217,51	26111,14	23291,97	102501,16		
2.3.3.6	**Perindustrian**														

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	42,54	42,51	39,3	37,95	37,47	36,84	35,86	35,1	33,3	33,12	33,2		
	Laju PDRB ADHK sektor industri pengolahan	%	4,69	7,24	0,82	3,16	2,92	3,47	2,66	3,2	-8,74	4,26	5,44		
	Jumlah industri sedang-besar	unit perusahaan	682	675	782	782	757	1137	1131	1353	1596	1827			
	Rasio serapan tenaga kerja industri sedang-besar	rasio	248,3	252,07	232,67		240,83	248,67	243,1	207,89					
	Jumlah industri kecil menengah	unit usaha													
	Cakupan bina kelompok pengrajin								18,33	20,00	4,94	12,92			
2.3.3.7	**Transmigrasi**														
	Persentase transmigran	KK	25	0	0	25	10	5	5	0	0	0	4		
2.3.3.8	**Kelautan dan Perikanan**														
	Produksi perikanan	Ton	39.667,60	41.760,05	41.430,28	40.870,63	37.049,12	68.014,48	56.728,37	41.086,25	41.615,34	41.947	42200	Fluktuatif	Hingga tahun 2017, angka produksi ikan terus meningkat. Namun, di tahun 2018 angka mengalami penurunan dan tahun-tahun berikutnya pertumbuhan bersifat tidak signifikan
	Luas Lahan Tangkap dan Budidaya Perikanan	ha	4.770,19	5.055,39	5.055,43	5.104,7	N/A	N/A	5.240,27	591,60	5.189,00	5.079,30	N/A	Meningkat	Terjadi penurunan drastis di tahun 2019 karena tidak ada data mengenai luas lahan perikanan budidaya
	Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun	Kg/tahun	16,3	20,07	25,9	27,2	29,37	31,28	33,12	34,62	36,08	36,08	38,42	Meningkat	Peningkatan setiap tahun tetapi masih di bawah Provinsi Banten dan target nasional (62 kg/tahun)
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%		20,93	0	53,66	30,95	34,47	38.47	37.50	24.07	28.35	29.17	Menurun	Diasumsikan penurunan cakupan bina kelompok nelayan terjadi karena melemahnya upaya pemerintah terkait kesejahteraan nelayan
	Proporsi tangkapan ikan produksi perikanan	%		107	102,92	97,98	99,75	97,65	99,78	95,29	96,73	97,73	98,71	Fluktuatif	Secara ekologis, proporsi tangkapan ikan produksi tidak mungkin lebih dari 100%. Sehingga diasumsikan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	budidaya Kelompok Nelayan														tahun 2013-2014 terjadi kesalahan dalam pengumpulan/pelaporan data
	Nilai Tukar Nelayan				115	119,9	118,5	119,68	122	110	99	110	106	Fluktuatif	
	Jumlah Kapal	unit	2.671	2.685	3.160	3.467	2.706	2.387	2.327	3.439	3.439	3.439	3.626	Fluktuatif	
	Jumlah Rumah Tangga Perikanan		7.875	8.014	8.014	8.014	8.113	7.273	8.886	7.734	8.067	6.534	6.534	Fluktuatif	
2.3.4.	**Urusan Penunjang**														
2.3.4.1	**Perencanaan Pembangunan**														
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.3.4.2	**Keuangan**														
	Opini BPK terhadap laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
	Persentase SILPA terhadap APBD								10,73	13,23	11,51	18,7	22,31	Fluktuatif	
2.3.4.3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**														
	Indeks Profesionalitas ASN											41,44	56,8	Meningkat	
	Indeks Sistem Merit											276	296,5	Meningkat	
2.3.4.4	**Penelitian dan pengembangan**														
	Indeks Inovasi Daerah										2274	41,16	54,7		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2.3.4.5	**Sekretariat Dewan**														
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2.3.4.6	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**														
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP														
	Kegiatan pembinaan politik daerah														
2.3.4.7	**Layanan Masyarakat**														
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik					71,25	76,39	75,05	81,45	83,66	86,36				
	Indeks Pelayanan Publik											3,91	4,12		
2.4	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**														
2.4.1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**														
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	rupiah							1.258.701	1.359.893	1.378.780	1.371.144			
	Nilai Tukar Petani Provinsi Banten	indeks	108,44	109,07	104,75	104,76	102,36	99,75	99,72	100,84	102,27	98,45	99,53		
	Derajat Keterbukaan Ekonomi	rasio	1,58	1,54	1,52	1,38	1,28	1,27	1,23	1,22	1,23	1,27	1,45		
	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	rupiah							619.048	654.344	612.350	636.306			
	Produktivitas total daerah	%											0.09		
	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit					306	308	299	291	283	276			
	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit													

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Unit			131				109	47					
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Unit					9	13	19	19	18	18	20		
2.4.2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur**														
	Penataan Ruang														
	Ketaatan terhadap RTRW		80	80	82	84	86	88	90	85	90	90	90		
	Lingkungan Hidup														
	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan sumber air minum bersih	%						77,33	83,55						
	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan sumber air minum layak				70,76	73,98	69,82	73,20	80,95	80,26	98,48	97,97	98,55	Fluktuatif (meningkat)	
	Komunikasi dan Informatika														
	Daya listrik yang terpasang	kWh													
	Persentase rumah tangga menggunakan listrik	%	99.8	100	99.82	99.94	100	100	100	100	100	100	100		
	Persentase penduduk yang menggunakan handphone atau telepon	%				59.68	60.59	61.67	71.35	70.47	63.5	79.46	78.08		
	Jumlah Jaringan Telepon	Desa/ Kelurahan								274	274	274	274		
	Jumlah desa/kelurahan terlayani layanan telekomunikasi	Desa/ Kelurahan								274	274	274	274		
	Jumlah Desa/kelurahan belum terlayani	Desa/ Kelurahan								0	0	0	0		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja											Tren	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai komputer pribadi	%	18.99	22.97	18.33			17.25	17.33	17.65	13.85	19.27	14.56		
2.4.3	**Fokus Iklim Berinvestasi**														
	Angka kriminalitas Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Per 100.000 Penduduk)										141,3	15,8	20,39		
	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha			3	6	9	2	-							
2.4.4	**Fokus Sumber Daya Manusia**														
	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio/ 10.000 penduduk							403,46	542,06	536,05	540,45	677,61		
	Rasio ketergantungan							45,13	44,86	44,86	44,460	41,72	41,72		

Sumber: Hasil Olahan, 2023

BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Gambaran Indikator Makro

Capaian pembangunan daerah dapat diukur dengan indikator makro pembangunan di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, indeks gini dan tingkat inflasi. Tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator pembangunan dan gambaran kondisi dalam 10 tahun terakhir di Kabupaten Tangerang.

Tabel 3. 1
Perbandingan Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional

Indikator Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2022)	Gambaran Kondisi
Indeks Pembangunan Manusia	Kab. Tangerang	72,97	Capaian IPM Kabupaten Tangerang dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen, dengan capaian IPM pada tahun 2012 sebesar 66,74, dan meningkat menjadi 73,32 di tahun 2022. Namun kondisi IPM di Kabupaten Tangerang selalu di bawah angka pencapaian Provinsi Banten dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
	Prov. Banten	73,32	
	Nasional	72,91	
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Kab. Tangerang	5,47	Perekonomian Kabupaten Tangerang yang didukung oleh sektor industri dan perdagangan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, PDRB ADHK Kab. Tangerang sebesar 103.221,02 miliar rupiah dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,47% dan capaian tersebut diatas provinsi dan nasional. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir LPE Kabupaten Tangerang berada di atas nasional, tetapi cenderung mengalami perlambatan.
	Prov. Banten	5,03	
	Nasional	5,31	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Kab. Tangerang	7,88	Capaian TPT Kabupaten Tangerang dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,68% per tahun. tingginya TPT Kab. Tangerang yaitu karakter investasi padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja serta ketidakmampuan kompetensi SDM penduduk Kab, Tangerang untuk mengakses tenaga kerja.
	Prov. Banten	8,09	
	Nasional	5,86	

Indikator Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2022)	Gambaran Kondisi
Persentase Penduduk Miskin (%)	Kab. Tangerang	6,92	Capaian PPM dalam 10 tahun terakhir cenderung menurun (membaik). Namun, dalam lima tahun terakhir PPM Kab. Tangerang meningkat dan di atas PPM Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, PPM Kab. Tangerang terendah ketiga di mana yang tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang
	Prov. Banten	6,16	
	Nasional	9,54	
Indeks Gini	Kab. Tangerang	0,282	Indeks Gini Kab. Tangerang tahun 2022 sebesar 0,282 yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. Grafik diatas menunjukkan dalam 10 tahun terakhir Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan lebih rendah dibanding Indeks Gini Provinsi Banten dan nasional.
	Prov. Banten	0,363	
	Nasional	0,384	
Tingkat inflasi	Tangerang	4,56	Pada Desember 2022, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 4,56 persen. Inflasi di Tangerang disebabkan oleh kenaikan harga dari indeks 10 kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy di Tangerang (per Desember 2022) yaitu bensin, mobil, angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, upah asisten rumah tangga, tukang bukan mandor, telur ayam ras, tahu mentah dan daging ayam ras.
	Provinsi Banten	5,88	
	Nasional	5,51	

Sumber: Hasil Olahan, 2023

3.2 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kgegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan *gap* kinerja embangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tabel dibawah ini merupakan permasalahan pembangunan Kabupaten Tangerang berdasarkan aspek dan/atau bidang urusan pemerintah daerah.

Tabel 3. 2
Permasalahan Pembangunan Menurut Bidang Urusan di Kabupaten Tangerang

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
Aspek Kesejehtaraan Masyarakat		
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Adanya ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan	Walaupun Indeks Gini dalam kategori rendah, diperlukan upaya untuk menurunkan ketimpangan. Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah sektor pertanian yang rendah, industri padat modal yang menyerap sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah tinggi, dan berbagai faktor lainnya.
	Persentase penduduk berpendapatan Desil 1-4 (atau 40% terendah) sebesar 37,6% atau sekitar 1,2 juta jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk yang terbesar adalah Kecamatan Rajeg sebesar 95.151 jiwa.	
	Pesentase Penduduk Miskin cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir	Penyebabnya adalah terdapat penduduk usia produktif dengan pendapatan rendah, dampak dari pandemi, angka putus sekolah di tingkat SD - SMP yang meningkatkan TPT
Fokus Kesejahteraan Sosial	Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Tangerang (8,92 tahun) belum sampai 9 tahun (SMP) atau 12 tahun (SMA)	Dapat disebabkan oleh: • Kapasitas internal penduduk yang kurang untuk berpartisipasi dalam pendidikan • Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang dan belum merata • Masih Adanya Peserta Didik yang Putus Sekolah • Belum optimalnya angka partisipasi murni pendidikan SD dan SMP
	Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu 7,88% (tahun 2022) dan berada di atas nasional	Disebabkan oleh • Adanya perlambatan industri dapat mempengaruhi menurunnya serapan tenaga kerja • Rendahnya kompetensi angkatan kerja • terbatasnya kesempatan kerja dan terbatasnya informasi lowongan kerja • dipengaruhi oleh kemiskinan
	Laju pertumbuhan PDRB terhadap tenaga kerja menurun dalam lima tahun terakhir	Dipengaruhi oleh TPT, menurunnya produktivitas tenaga kerja dan nilai tambah sektor
	Masih terdapat 21,1% balita yang menderita stunting dan capaian ini masih berada di atas capaian provinsi.	Disebabkan oleh: • Belum optimalnya pelayanan dasar Kesehatan • Kurangnya asupan gizi pada 1 000 hari pertama kehidupan yang ditunjukkan oleh hanya 51,3% bayi <6 bulan (Tahun 2020) yang menerima ASI eksklusif
Fokus Seni Budaya dan Olahraga	Gedung kesenian tidak tersedia	Disebabkan oleh: • Minimnya sarana prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni • Kurangnya pembinaan terhadap pelaku seni dan budaya
	Rendahnya persentase kelompok kesenian yang aktif	
Aspek Pelayanan Umum		
Pendidikan	Pendidikan anak usia dini yang tidak optimal	Ditunjukkan oleh: • Cakupan PAUD hanya 47% (Tahun 2020) • Hanya 15,6% anak usia 4-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Tahun 2021);

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
		• Angka Partisipasi Kasar PAUD di angka 21,07 (Tahun 2021, paling rendah daripada jenjang pendidikan lainnya) Disebabkan oleh: • Peran Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan Paud Bagi Pengembangan Potensi Anak (Golden Age) masih rendah • Kurangnya Jumlah TK Negeri • Adanya lembaga PAUD yang belum memenuhi 8 Standar Pendidikan
	Rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun dan masih berada di bawah capaian provinsi (67,7%, Tahun 2021).	Disebabkan oleh: • Motivasi remaja yang kurang untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. • Kapasitas keluarga yang belum optimal untuk mendukung pendidikan lebih lanjut
	Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD, SMA, dan SMK cukup tinggi	Ditunjukkan oleh: • Angka Putus Sekolah SMK mengalami peningkatan dan paling tinggi di Provinsi Banten (0,47% Tahun 2022/2023) • APS SD adalah 0,13% (Tahun 2022/2023, di atas capaian provinsi di 0,05%) • APS SMA adalah 0,15% (Tahun 2022/2023, tertinggi ketiga di Provinsi Dapat disebabkan oleh: • Motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang kurang bagi remaja • Tantangan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar • Kondisi ekonomi keluarga • Melanjutkan pendidikan non-formal di pesantren yang tidak tercatat oleh dapodik/emis
	Angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA	Rendahnya tingkat pendidikan erat kaitannya dengan faktor ekonomi (Ustama, 2009.Terjadinya rendahnya partisipasi sekolah pada rumah tangga miskin, terutama miskin ekstrem disebabkan oleh keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.
	Terdapat 42% ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kondisi bangunan rusak	Ditunjukkan oleh: Hanya terdapat 59,14% ruang kelas SD yang berada dalam kondisi baik Disebabkan oleh: • Kurangnya pemeliharaan ruang kelas oleh sekolah • Kurangnya pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan (dana terbatas, fokus pendanaan untuk membayar tenaga pendidik)
	Rasio ketersediaan sekolah cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir	Berkaitan juga dengan: Rasio Peserta Didik Terhadap Ruang Kelas belum ideal Dapat disebabkan oleh: Pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah tidak seimbang dengan peningkatan jumlah sekolah
	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar cukup rendah yaitu di angka 20,3% (Tahun 2022) *	• Belum maksimalnya pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik; • Belum maksimal pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka; • Masih kurangnya sarana pendukung pembelajaran. • Masih rendahnya standar kualifikasi/tingkat pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan; • Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
	Guru di SD dan SMP belum seluruhnya memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan menurunnya presentase guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV terendah di Provinsi (Tahun 2021)	• Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi tenaga pendidik • Kurangnya tenaga pendidik • Banyak tenaga pendidik yang ditempatkan di sekolah-sekolah negeri sebagian besar adalah guru honorer sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Adapun penunjukan guru PTT untuk mata pelajaran yang belum memenuhi kualifikasi disebabkan perbedaan latar belakang Pendidikan dengan penugasan mengajar materi pelajaran
	Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan, Dan Tenaga Struktural Lainnya masih rendah	• Kualitas, Kompetensi Dan Profesionalitas Guru Masih Rendah • Distribusi Guru Dan Tenaga Kependidikan Belum Merata • Belum optimalnya linearitas pendidikan/program studi pendidik (Nazidah, 2021)
Kesehatan	Angka kematian bayi tertinggi kedua di Provinsi Banten dan memiliki jumlah kasus kematian bayi terbanyak di Provinsi Banten (Tahun 2022)	• Fenomena tiga terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. • Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak • Kurangnya cakupan tenaga medis
	Masih terdapat kasus kematian ibu	Terdapat kecamatan yang masih berada di atas target AKI nasional pada tahun 2024 di angka 183 per 100.000 kh yaitu Kecamatan Legok, Jayanti, Jambe, Tigaraksa, Kronjo, Kemiri, dan Gunung Kaler. Angka kematian ibu disebabkan: • Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang kurang • Kapasitas internal ibu dan keluarga • Pemenuhan gizi yang belum optimal • Ibu hamil yang tidak menetap dan berpindah fasilitas kesehatan • Ibu hamil bekerja yang menyulitkan pemantauan
	Rendahnya kunjungan menuju posyandu	Rendahnya kunjungan menuju posyandu. Hal ini dapat disebabkan: • Kurangnya fasilitas posyandu • Kurang meratanya posyandu yang ada
	Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk.(Prevalensi stunting 21,1%,Tahun 2022)	Dapat disebabkan oleh: • Upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal • Pola asuh balita • Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal.
	Cakupan tenaga medis bidan dan perawat yang belum optimal	Ditunjukkan oleh: • Rasio bidan per 100.000 penduduk ada di angka 35 (sasaran nasional: 75) • Rasio perawat per 100.000 penduduk ada di angka 91 (sasaran nasional : 158_ Disebabkan oleh: Kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan
	Tingginya kasus komplikasi kebidanan dan masih ada kasus yang belum ditangani (85,9% sudah ditangani tahun 2022)	Disebabkan oleh:

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
		• Belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi. • Fenomena tiga terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. • Belum optimalnya angka partisipasi posyandu
	Cakupan balita yang menderita pneumonia tertinggi kedua di Provinsi Banten (Tahun 2020, 2,7%)	• Lingkungan tempat hidup balita yang kurang memadai • Penerapan tata laksana kasus pneumonia balita yang sesuai standar baku belum konsisten dilaksanakan • Pencatatan dan pelaporan kasus pneumonia belum melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta • Belum adanya data hasil survei insidensi baik secara nasional maupun regional yang dapat dijadikan acuan yang lebih valid.
	Jumlah kasus TBC masih cukup tinggi	Jumlah kasus TBC terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang (27,04%).
	Tingginya prevalensi kasus DBD dan tingginya case fatality rate DBD.	Jumlah kasus DBD tertinggi kedua di Provinsi Banten, dengan case fatality rate sebesar 2,7%, case fatality rate adalah tertinggi di Provinsi Banten. Disebabkan oleh: • Kondisi lingkungan perumahan di musim penghujan menjadi faktor adanya nyamuk penyebab DBD • Kurangnya usaha preventif kasus DBD seperti pemeliharaan lingkungan perumahan untuk pencegahan adanya nyamuk penyebab DBD • Fenomena tiga terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat.
	Belum seluruh komplikasi kebidanan ditangani sesuai standar	Kabupaten Tangerang memiliki perkiraan jumlah kasus komplikasi kebidanan yang paling banyak di Provinsi Banten yaitu sebanyak 14.884 kasus. Sedangkan kasus yang telah ditangani di Kabupaten Tangerang hanya sebanyak 12.004 kasus atau sebesar 80,7%. Hal ini disebabkan oleh: • Belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi. • Angka partisipasi posyandu yang belum optimal
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum tercakupnya seluruh wilayah terhadap akses sanitasi layak	
	Belum tercakupnya seluruh wilayah terhadap akses air minum layak	Belum adanya standar perhitungan kebutuhan minimal air minum
		Sulitnya mencari sumber air baku air minum bukan perpipaan, juga jaraknya yang sangat jauh
	Terdapat sebesar 30% jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat	Kapasitas jalan kurang memadai karena lebar jalan tidak sesuai dengan volume kendaraan
		Peningkatan volume kendaraan yang sangat pesat setiap tahunnya
	Sistem drainase yang tersumbat	Banyaknya sedimentasi endapan berupa sampah yang menghambat aliran air drainase

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
		Kurangnya pembangunan resapan air
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat sekitar 30% areal kawasan kumuh perkotaan yang tersebar di seluruh wilayah	Belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian
		Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rendahnya tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran	Disebabkan oleh; • masih rendahnya kualitas dan kuantitas data kebencanaan dan kebakaran • belum adanya dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran dan dokumen rencana kontingensi per jenis bencana; • masih rendahnya kapasitas aparatur BPBD dalam kebencanaan dan kebakaran • masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat
	Pelanggaran K3 dan pelanggaran Perda masih terjadi	Disebabkan oleh: • Tingkat kesadaran masyarakat akan Perda dan Perkada serta penanggulangan bencana masih kurang • Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Satlinmas
Sosial	Belum optimalnya layanan PMKS	Disebabkan oleh: • Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan PMKS • Belum optimalnya pendataan administrasi terkait layanan PMKS (belum optimalnya operator data DTKS di tingkat desa setiap triwulan) • Belum optimalnya koordinasi lintas lembaga atau sektor
	Masih tingginya tingkat kesenjangan, keterlantaran, kekerasan kepada anak disabilitas dan kelompok rentan lainnya	Disebabkan oleh: • belum optimalnya sarana prasarana kebutuhan dasar bagi anak dan lansia terlantar • belum optimalnya fasilitas pelayanan pengasuhan rehabilitasi anak dan lansia terlantar
Tenaga Kerja	Rasio pencari kerja yang ditempatkan (atau serapan tenaga kerja) tahun 2012-2021 cenderung rendah dimana pada tahun 2021 sebesar 21,33%	Hal ini dipengaruhi oleh kualifikasi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja dan informasi lowongan kerja masih terbatas
	Besaran tenaga kerja yang dilatih masih rendah dimana tahun 2019 hanya sebanyak 400 orang	Disebabkan oleh: • belum optimalnya lembaga pelatihan kerja dan jenis pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan • kapasitas balai latihan kerja yang terbatas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam empat tahun terakhir (2019-2022)	Disebabkan oleh: Pemberdayaan perempuan yang belum optimal
	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang dibawah capaian Provinsi Banten	• Masih tingginya kekerasan pada perempuan dan anak • Rendahnya kualitas hidup perempuan terutama dalam mengakses pendidikan
	Masih adanya kasus kekerasan pada anak dan kurangnya pendampingan PPA dan KB	Disebabkan oleh : Upaya penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang belum optimal *

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) rendah	Disebabkan oleh: • kurangnya keragaman pangan yang bergizi, seimbang, dan aman (Kurangnya konsumsi protein kacang, sayur dan buah) • belum optimalnya sosialisasi atau GERMAS pola konsumsi masyarakat • Adanya perubahan perhitungan dengan tahun 2021 dari Badan Pangan Nasional
	Ketersediaan pangan utama menurun	Disebabkan oleh : • Anomali musim • Sistem pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum optimal • Kelembagaan pangan dan sistem distribusi pangan belum optimal • Harga bahan pakan unggas tidak stabil • Penurunan produksi di tahun 2022 dipicu karena adanya revitalisasi irigasi di bagian utara sehingga pasokan air berkurang
	Cadangan Pangan Daerah belum optimal	Ditunjukkan oleh : Angka ketersediaan energi masih di bawah angka ideal Disebabkan oleh : • Kelembagaan pangan dan distribusi pangan belum ideal • Sistem CPPD belum optimal
Lingkungan Hidup	Persentase timbulan sampah yang dikelola hanya 60,66% dan hanya 1,41% sampah yang di daur ulang dari total timbulan sampah	Belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat regional dan tingkat mikro (desa/kelurahan/kecamatan). Diantaranya sisi armada pengangkut sampah hanya dapat menganggkut 51% dari total sampah dan total timbulan sampah melebihi kapasitas TPS dan TPA
	IKLH Kab Tangerang lebih rendah dibanding Provinsi Banten dan nasional. Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 22,67 atau kategori kurang	Hal ini dipengaruhi oleh polusi udara dari aktivitas industri, transportasi, dan lain sebagainya; belum optimalnya pelayanan IPAL domestik dan industri, dan belum optimalnya pemelihataan tanaman mangrove
	Penyediaan air di Kabupaten Tangerang saat ini terdapat 83% lahan terlampaui, artinya 84.338,35 Ha merupakan lahan dengan kategori krisis air.	Kualitas air permukaan (sungai) yang memburuk alias tercemar sedang dan berat yang dipengaruhi oleh aktivitas sektor industri, permukiman, dan pertanian
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya pengelolaan data administrasi kependudukan	Disebabkan oleh: • Belum terintegrasinya sistem Dinas Komunikasi dan Informatika dengan data administrasi dan kependudukan • kurangnya SDM dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan • Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kependudukan • Inovasi pelayanan yang kurang optimal
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masih belum optimalnya posyandu aktif (hanya 55,96% yang berada dalam kondisi aktif)	
	Belum optimalnya kapasitas BUMDES dimana dari 132 BUMDES hanya 22 BUMDES yang aktif dan bersetifikat 15 BUMDES	Disebabkan oleh • Belum optimalnya Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKD) • Pemenugan dokumen administrasi untuk sertifikasi BUMDES belum terpenuhi
Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Meningkatnya presentase *unmet need* keluarga berencana dalam tiga tahun terakhir	Keterbatasan akses layanan, stigma, dan kendala ekonomi.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
	Penurunan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dalam lima tahun terakhir	Kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.
	Memastikan adanya keberlanjutan penganggaran untuk program P2KB karena 70% anggaran berasal dari APBN	Kekhawatiran adanya potensi tantangan penganggaran ketika ada pergeseran 'politis' di tengah adanya pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat
Perhubungan	Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi	Kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan
		Tingginya kebutuhan transportasi moda darat
		Tingkat kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah
Komunikasi dan Informatika	Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik	Pengumpulan data dari produsen data yang terlambat dari batas waktu
		Kurangnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam mendiseminisasikan data
		Data sektoral belum dimanfaatkan sebagai evaluasi pembangunan
	Belum tersedianya persandian antar perangkat daerah	Tingkat keamanan persandian belum kuat
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Persentase koperasi aktif cenderung menurun dalam lima tahun terakhir dan pada tahun 2022 hanya mencapai 35,7%. Capaian tersebut lebih rendah dibanding Provinsi Banten	Disebabkan oleh • belum optimalnya aspek permodalan dan promosi • perpindahan status koperasi menjadi koperasi tingkat provinsi
	Dalam lima tahun terakhir terlihat adanya penurunan jumlah tenaga kerja dan pendapatan UKM	Disebabkan oleh : • belum optimalnya aspek permodalan dan promosi • inovasi dan adopsi teknologi • diversifikasi produk yang masih rendah • ada perubahan pengkategorian berdasarkan pendapatan usaha
Penanaman Modal	Belum optimalnya realisasi investasi yang dimana realisasi PMA dan PMDN cenderung fluktuatif dalam 10 tahun terakhir	Disebabkan oleh: • Belum optimalnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal • kurangnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi • perubahan sistem perijinan menjadi OSS dan masih kurangnya kepatuhan melaporkan kegiatan penanaman modal
Kepemudaan dan Olahraga	Rendahnya cakupan pelatih yang Bersertifikasi	
	Minimnya prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional	Disebabkan oleh: Iklim pelatihan atlet belum terstruktur
	Daya saing pemuda belum optimal	Ditunjukkan oleh: Kewirausahaan pemuda yang belum optimal
Statistik	Data yang ditampilkan di laman satu data tidak sepenuhnya ditemukan, banyak data yang kosong	Beberapa konfirmasi hasil analisis data sektoral yang tidak ditanggapi
		Data sektoral dan publikasi statistik yang dihasilkan oleh produsen data belum seluruhnya terinput dalam portal data
		Kurangnya kegiatan statistik dari BPS
Kebudayaan	Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal	Ditunjukkan oleh • Belum memiliki gedung kesenian • Proyek pembangunan pariwisata hanya sampai tahap perencanaan belum dieksekusi

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
Perpustakaan	Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat	• Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar • Kompetensi SDM Perpustakaan masih terbatas serta Promosi layanan perpustakaan masih belum masif • Meningkatnya tren literasi secara daring • Sebaran perpustakaan masih kurang merata
	Menurunnya jumlah kunjungan perpustakaan	
Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku	
Pariwisata	Rendahnya kunjungan wisatawan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten	Disebabkan oleh: • Kurangnya pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan • Kurangnya tata kelola kawasan strategis pariwisata • Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
	Pengembangan sektor pariwisata yang belum optimal	Ditunjukkan oleh: Pemerintah hanya baru mengelola 1 area dengan fokus wisata yaitu Ketapang Disebabkan oleh: Kompleksitas struktur organisasi menyebabkan pelaksanaan oleh OPD belum efisien dan efektif
Pertanian	Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Disebabkan oleh : • Persentase penduduk yang bekerja dalam sektor ini tergolong kecil, hanya 4,9% (bukan merupakan sektor dominan di Kabupaten Tangerang) • Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor pertanian • Kurangnya sarana dan teknologi yang mendukung pertanian • Rendahnya kualitas dan daya saing produk pertanian dan peternakan • Rendahnya manajemen pengelolaan Balai Penyuluh Pertanian • kurangnya pasokan air untuk lahan pertanian (akibat pencemaran), serangan hama, dan penyakit tanaman. • alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun
Perdagangan	Sektor perdagangan berkontribusi ke-3 terbesar dalam PDRB, tetapi laju pertumbuhan fluktuatif cenderung melambat	Disebabkan oleh : • Dampak dari pandemi • Belum optimalnya sarana perdagangan dan pemasaran produk IKM dan UMKM lokal
Perindustrian	Penurunan kontribusi sektor industri dalam PDRB dan laju pertumbuhan sektor cenderung melambat	Disebabkan oleh : • Dampak dari pandemi : gelombang PHK dan penurunan produktivitas industri karena keterbatasan bahan baku impor • pergeseran struktur ekonomi ke sektor tersier • kinerja daya saing produk industri belum optimal • pindahnya industri ke daerah lain • belum optimalnya pembinaan pelaku kelompok pengrajin
Kelautan dan Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah	Disebabkan oleh : • Belum terintegrasinya rantai pemasaran produk perikanan dan kurangnya pengetahuan pembudidaya ikan dan nelayan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
		• Pola pembinaan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan bagi nelayan kurang sehingga produktivitas kurang • belum optimalnya pemasaran produk dan tingginya biaya operasional
	Konsumsi ikan perkapita pertahun jauh di bawah provinsi dan target nasional	Disebabkan oleh : Pola pembinaan dan fasilitasi untuk peningkatan konsumsi ikan bagi konsumen kurang
	Cakupan kelompok bina nelayan menurun	Disebabkan oleh : Kapasitas kelembagaan bidang perikanan dan bina nelayan di Kabupaten Tangerang masih rendah.
Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan	Koordinasi antar instansi masih kurang maksimal
Keuangan	Tingginya persentase SILPA terhadap APBD	Belum optimalnya efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan
Kepegawaian	Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN	Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi profesionalitas ASN
Pengawasan	Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung operasional pengawasan
Sekretariat Dewan	Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja, tugas, dan fungsi DPRD	Belum maksimalnya penyusunan dan pembahasan raperda

Sumber: Hasil Olahan, 2023

3.3 Telaah Dokumen Perencanaan

3.3.1 Isu Global

A. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB dalam hal ini telah ditetapkannya RAD TPB/SDGs Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2023. Berdasarkan persentase capaian TPB[1] untuk Kab.Tangerang 55% sudah terpenuhi sesuai target pada rencana pembangunan. Sementara terdapat 25% belum terpenuhi, sedangkan untuk beberapa indikator yang sudah terlaksana namun belum sesuai target atau tercapai sebagian yaitu 20%. Pilar Sosial merupakan indikator terbanyak, kemudian pada pilar hukum dan tata Kelola hanya terdapat 3 indikator.

B. Demografi Global dan Bonus Demografi

Demografi global sangat berpenaruh dalah perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2022), bahwa proyeksi jumlah penduduk tahun 2035 di Kab. Tangerang mencapai 3,73 juta jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 71,09% dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 40,66% pada tahun 2035. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

[1] Dalam Dokumen Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2023

C. Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global-nasional-regional. Posisi Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai kota global atau *Alpha*[2] dan konurbasi Jabodetabek-punjur dalam konteks perekonomian global menjadi potensi mendorong sektor sekunder dan tersier. Selain itu kerja sama antar negara dan institusi global tentunya akan mendorong akselerasi ekonomi negara berkembang dalam hal pendanaan komitmen global. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu *Asean Free Trade Area* (AFTA) juga berpengaruh pada dinamika ekonomi dan perdagangan Kabupaten Tangerang. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya.

D. Perkembangan Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpenaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebaginya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IOT),* Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, *nanotechnology*, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

E. Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis)* yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. . Pada *Paris Agreement* tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41%

[2] Kelompok peneliti *Globalization and World Cities* (GaWC) yang berpusat di Longborough University membagi perkotaan di dunia ke dalam empat kelas perkotaan (*Alpha, Beta, Gamma dan Sufficiency*). *Alpha* adalah kelompok perkotaan yang memiliki pengaruh dan dominasi kuat atas dinamika dan perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan adanya pemusatan institusi ekonomi global (kantor pusat, kantor cabang) di kota-kota tersebut.

dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas (2019)[3] menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh morotarium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan. Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang.

3.3.2 Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045[4]

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai arahan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan dalam dinamika global sebagai negara berkembang dan tantangan kedepannya adalah menjadi negara maju. Isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:

- rendahnya tingkat produktivitas di tengah peningkatan persaingan global
- kualitas dan kuantitas SDM dalam penelitian belum memadai
- deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
- belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
- belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
- rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
- produktivitas tenaga kerja indonesia relatif tertinggal
- pembangunan belum sepenuhnnya menerapkan prinsip berkelanjutan
- rendahnya penggunaan EBT dan efisiensi energi
- kualitas pendidikan yang masih rendah
- belum meratanya akses jaminan sosial
- disharmoni regulasi dan kelembagaan instansi yang terfragmentasi
- belum meratanya kualitas pelayanan publik
- tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati

Maka dari itu dalam RPJPN 2025-2045 dirumuskan visi "Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Lima sasaran utama Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional mengikat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; serta (5)

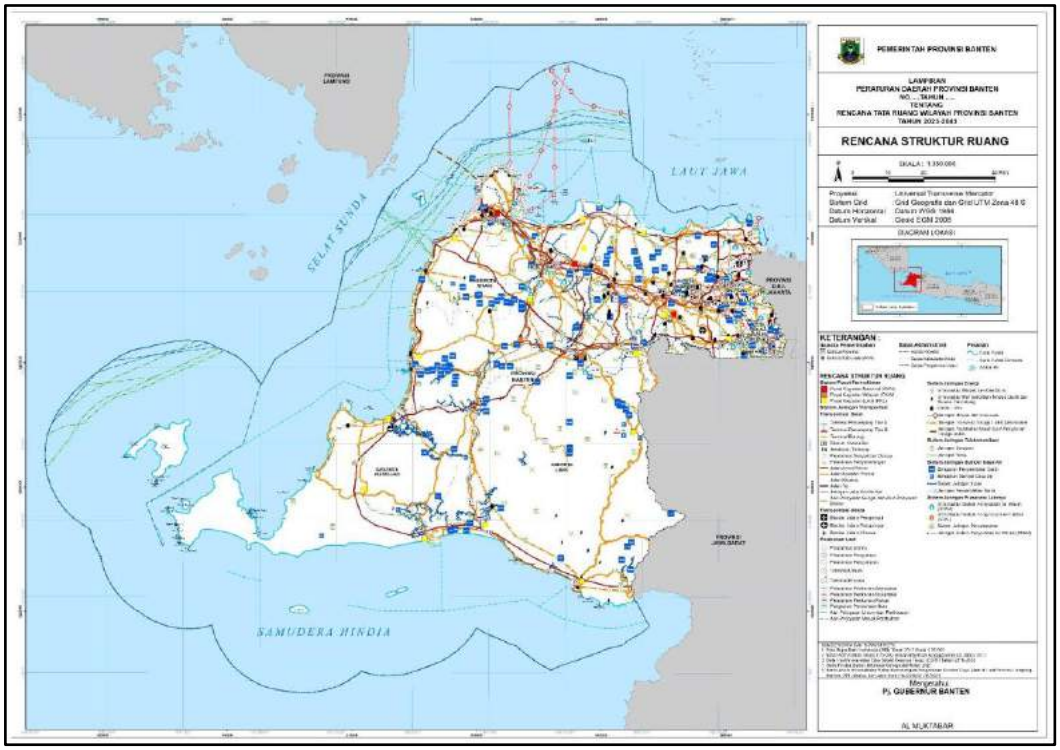
[3] Diperoleh dari Dokumen Pembangunan Rendah Karbon : Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia oleh Bappenas dan LCDI (2019). Diakses dari *https://lcdi-indonesia.id/dokumenpublikasipembangunanrendahkarbon/*
[4] Diperoleh dari *https://www.indonesia2045.go.id/* dan dikutip untuk keperluan penyusunan Dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tangerang

intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Lima sasaran tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 indikator utama pembangunan.

Dalam dokumen tersebut juga menjabarkan arahan transformasi ekonomi untuk Wilayah Jawa. Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor "Industri Berbasis Inovasi, Riset, dan Teknologi. Secara khusus mengenai Kabupaten Tangerang diarahkan dengan kebijakan pengembangan kawasan strategis industri Serang-Tangerang dengan klaster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor.

3.3.3 Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043 memberikan arahan dalam perencanaan pola ruang dan struktur ruang wilayah. Tujuan penataan ruang Provinsi Banten yang tertuang dalam dokumen ini adalah untuk "*Mewujudkan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif Berkelanjutan dan Berkeadilan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata*". Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di atas, dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.



Gambar 3. 1
Peta Struktur Ruang Provinsi Banten
Sumber: Lampiran RTRW Provinsi Banten 2023-2043

Gambar diatas merupakan peta struktur ruang Provinsi Banten. Struktur ruang Provinsi Banten yang diarahkan dalam tata ruang Kabupaten Tangerang terdiri atas:

1) Sistem Pusat Permukiman

- Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jabodetabek-punjur yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman, transportasi udara, kelautan dan perikanan, serta pendidikan.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Tangerang meliputi Kecamatan Kronjo, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Pagedangan.

2) Sistem Jaringan Transportasi

- Pengembangan terminal bus tipe A yaitu Terminal Balaraja serta terminal bus tipe B yaitu Terminal Pasar Kemis dan Terminal Teluk Naga.
- Pengembangan Pelabuhan Sepatan dan Pelabuhan Pakujahi sebagai Pelabuhan Sungai dan Danau
- Pengembangan Pelabuhan Cituis dan Pelabuhan Tanjung Pasir sebagai Pelabuhan Penyeberangan
- Pengembangan Bandar Udara Soekarna-Hatta sebagai Bandar Udara Pengumpul
- Pengembangan Bandar Udara Budiarto sebagai Bandar Udara Pengumpan

3) Sistem Jaringan Energi

- Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
- Pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik

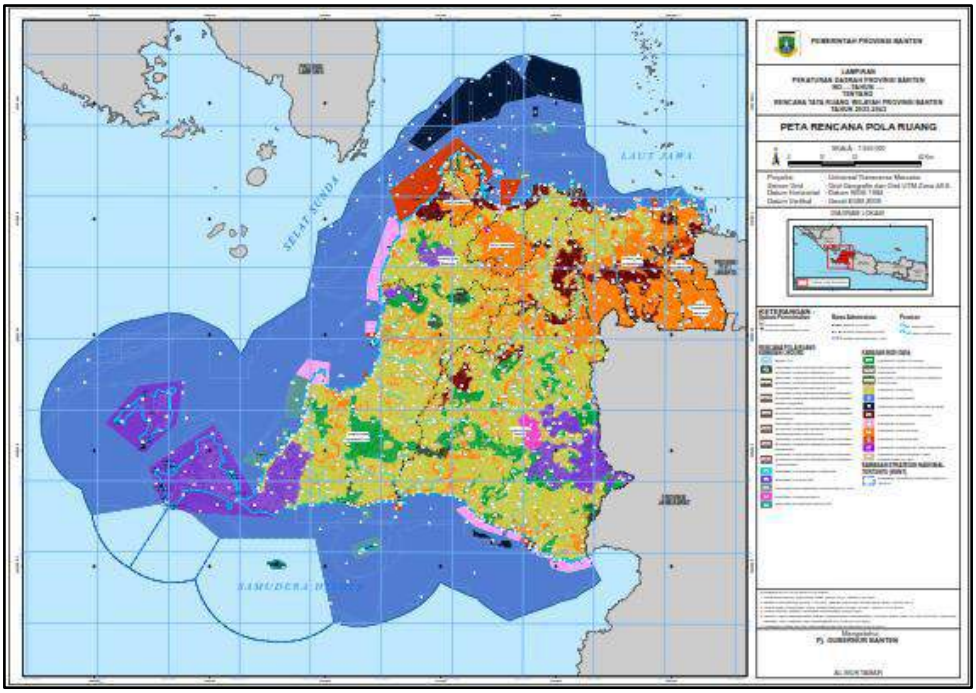
4) Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Pengembangan jaringan tetap dan jarungan bergerak telekomunikasi di wilayah kabupaten/kota

5) Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Pengembangan sistem jarngan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air di wilayah kabupaten/kota

6) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.



Gambar 3. 2
Peta Pola Ruang Provinsi Banten
Sumber: Lampiran RTRW Provinsi Banten 2023-2043

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten terdiri dari perencanaan peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya seperti pada gambar di atas. Selain itu juga diatur mengenai pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten yang diarahkan untuk Kabupaten Tangerang, yaitu Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabek-Punjur, di perairan utara Kabupaten Tangerang dapat dilaksanakan reklamasi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.4 Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang 2011-2031

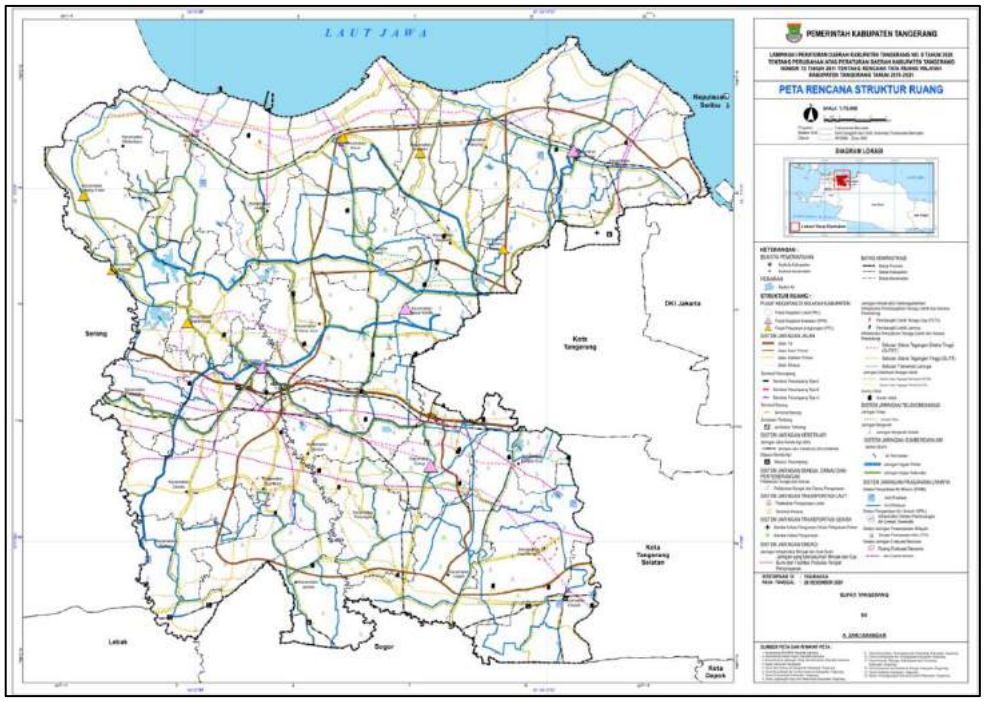
Dokumen RTRW Kabupaten Tangerang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang Kabupaten Tangerang adalah *Mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju Masyarakat madani melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan*. Penjabaran kebijakan dan strategi penataan ruang adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Tangerang

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan	a) mempersiapkan Ruang Kawasan Peruntukan Industri Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan

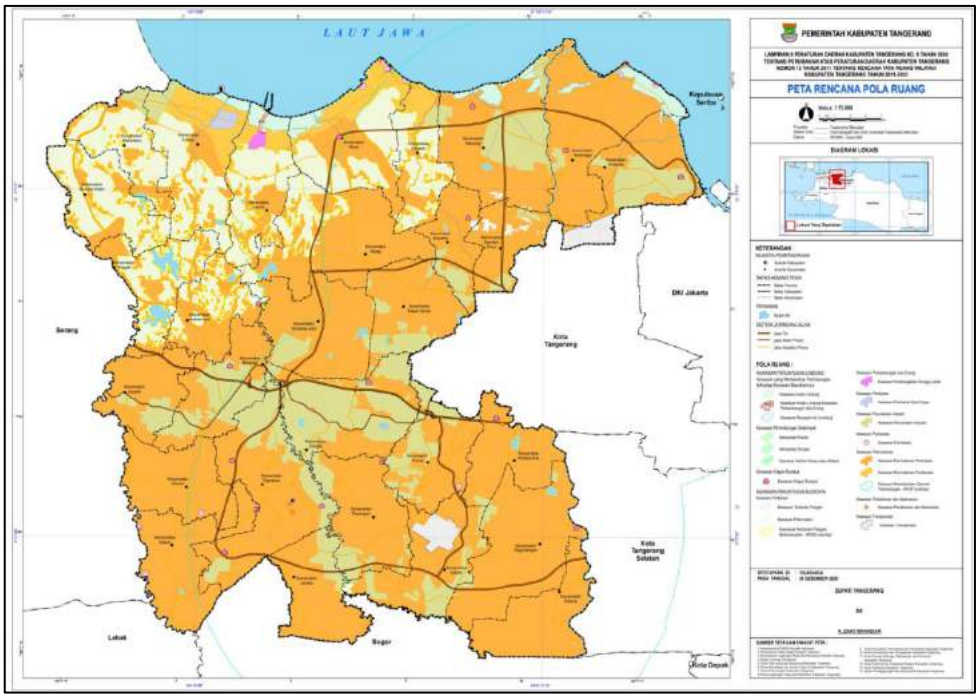
Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
nilai tambah dengan skala pelayanan nasional	b) meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung Kawasan Industri c) meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran
Pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah Kabupaten	a) mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan Industri dan pertanian b) mewujudkan pusat-pusat kegiatan Wilayah baru sesuai dengan kewenangan Daerah c) mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di Daerah sesuai dengan hierarkinya; d) meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap Kecamatan melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan dan/atau pengembangan Kawasan Permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan; e) menata Kawasan Permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Daerah; dan f) meningkatkan aksesibilitas antarpusat perkotaan, antarpusat desa, antarpusat perkotaan, dan pusat desa.
Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan	a) melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di atas lahan hasil reklamasi sepanjang pantai utara Daerah dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan Daerah sekitarnya b) membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai utara dengan Wilayah daratan Daerah.
Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara	a) mendukung penetapan kawasan pertahanan nasional dengan fungsi khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara b) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara c) mengembangkan Kawasan Peruntukan Lindung dan/atau Kawasan Peruntukan Budi Daya tidak terbangun disekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara dengan Kawasan Peruntukan Budi Daya terbangun d) membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara
Rencana pengembangan RTH	Rencana pengembangan RTH pada kawasan perkotaan ditetapkan paling rendah 30% dari Kawasan Perkotaan yang direncanakan terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%

Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031



Gambar 3. 3
Peta Struktur Ruang Kabupaten Tangerang
Sumber: Lampiran RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Dari peta rencana struktur ruang di atas, diketahui beberapa perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang meliputi rencana sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Rencana sistem perkotaan terdiri dari pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi kawasan perkotaan di sekitar Jabodetabekpunjur yaitu kecamatan Balaraja dan kecamatan Tigaraksa; pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi kecamatan Kronjo, kecamatan Tigarakasa, dan kecamatan Pagedangan; serta pengembangan pusat-pusat kegiatan lain seperti PPK dan PPL yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Rencana jaringan prasarana diperlihatkan dengan perencanaan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. Pengembangan jaringan transportasi didukung dengan rencana pembangunan jalan tol, peningkatan kelas terminal tipe A, tipe B, dan tipe C, dan reaktivasi sistem jaringan rel kereta api. Selain itu, perencanaan transportasi laut juga dilaksanakan melalui pengembangan pelabuhan meliputi pelabuhan pengumpul, pelabuha pengumpul lokal, dan terminal khusus laut. Kemudian, pengembangan bandar udara dilaksanakan di bandar udara Soekarno-Hatta dan bandar udara Budiarto.



Gambar 3. 4
Peta Pola Ruang Kabupaten Tangerang
Sumber: Lampiran RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Perencanaan pola ruang Kabupaten Tangerang terdiri dari perencanaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud meliputi kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan cagar budaya. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya diantaranya adalah kawasan hutan lindung hutan bakau mangrove seluas 1.555,32 Ha di pantai utara dan kawasan resapan air seluas 1.555 Ha di bagian hulu sungai DAS Cidurian, Ciujung, Cibareo, dan Cimanceuri. Kawasan perlindungan setempat yang dimaksud adalah sempadan pantai utara, sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk/danau. Mengenai kawasan cagar budaya yang dimaksud meliputi situs makam pahlawan masa lalu, situs sisa fosil *elephant maximus*, dan situs sumur tua. Perencanaan kawasan peruntukan budidaya yang dilaksanakan meliputi kawasan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan kemanan, dan transportasi.

3.3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

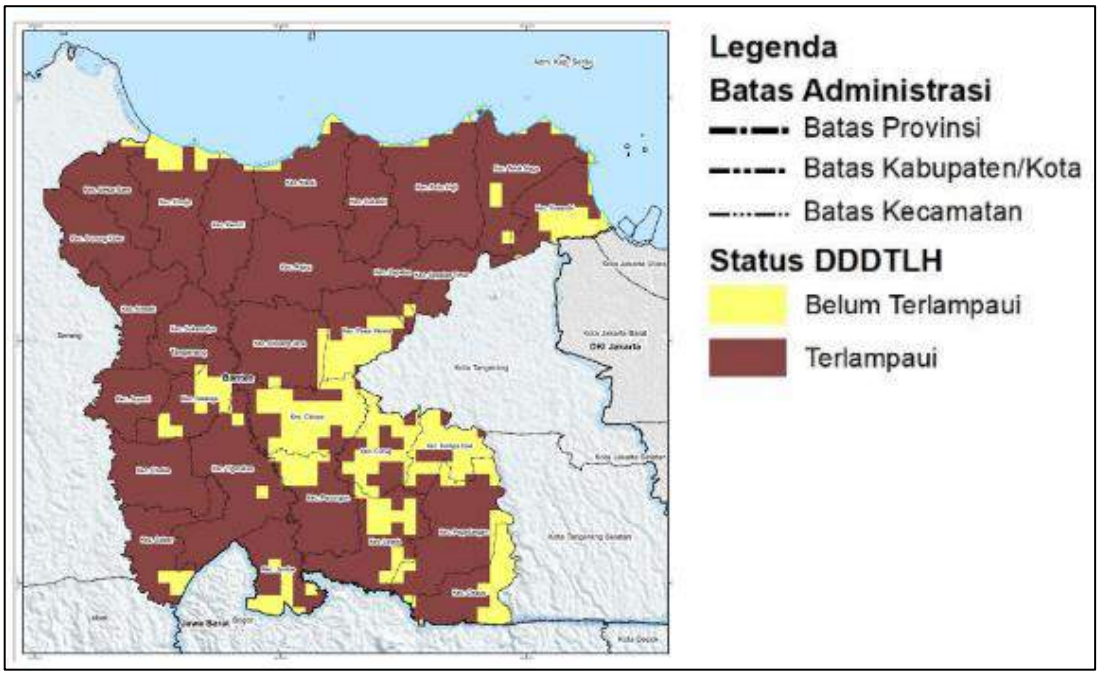
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisisi yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip permbangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Kajian ini dilaksanakan melalui beberapa kajian dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJD), dan Kebijakan Rencana Program (KRP). Penyusunan KLHS ini menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan KLHS juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Muatan KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Kajian ini juga menetapkan isu-isu terkait lingkungan hidup berdasarkan masalah dan potensi daerah yang dimiliki sebagai berikut.

1) Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Industri

Pengalihan fungsi lahan kawasan primer berdampak kepada beberapa aspek lingkungan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung ketahanan pangan, diketahui bahwa seluas 4% lahan belum terlampaui dan 96% lahan sudah terlampaui. Jika dilihat dari daya dukung dan daya tampung ketersediaan air, seluas 83% wilayah sudah terlampaui. Statistik ini memperlihatkan bahwa seluas 83% wilayah di Kabupaten Tangerang mengalami masa krisis air, dimana kebutuhan air tidak dapat dipenuhi dengan ketersediaan yang ada saat ini.



Gambar 3. 5
Daya Dukung Daya Tampung Ketersediaan Air Kabupaten Tangerang
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang

Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi fungsi permukiman dan industri yang tidak terkendali dapat memberikan dampak kepada tingkat ketahanan daerah terhadap bencana, jasa ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Risiko bencana dapat meningkat karena jumlah *grey infrastructure* yang bertambah dengan pesat. Jumlah dan kepadatan

bangunan/fisik yang tinggi mempengaruhi penilaian kerentanan daerah, yang juga akan semakin meningkat. Sebagai jasa ekosistem, kawasan pertanian berperan sebagai *provider* atau pemberi bagi lingkungan. Tingkat kinerja ekosistem dapat turun akibat adanya emisi GRK yang disebabkan oleh kawasan industri. Selain itu, tingkat keanekaragaman yang hidup dalam ekosistem kawasan pertanian juga akan terusir akibat alih fungsi lahan yang dilakukan.

2) Pendangkalan Aliran Sungai serta Terkendala dalam Penanganan Normalisasi Fungsi Sungai

Pendangkalan air sungai dan terkendalanya penanganan fungsi sungai berkaitan dengan ketersediaan air permukaan bagi wilayah Kabupaten Tangerang. Ketersediaan air permukaan di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang sudah mencapai titik batasnya. Seluas 83% wilayah yang mengalami masa krisis air memerlukan alternatif sumber daya air baru. Pendangkalan air sungai juga menyebabkan kerusakan pada keanekaragaman sumber daya hayati dan ekosistem sungai. Kurangnya sumber air permukaan dapat meningkatkan potensi bencana kebakaran dan kekeringan.

3) Belum Optimalnya Kinerja Saluran Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Industri

Kualitas D3TLH air yang rendah diketahui disebabkan oleh pengaruh dari rendahnya pengelolaan air limbah domestik dan industri. Kurangnya pengelolaan ini dipengaruhi oleh adanya risiko yang tinggi terhadap kegagalan teknologi. Hasil konsultasi publik menunjukkan beberapa kawasan perumahan (lebih dari 10%) memiliki saluran pembuangan air limbah yang berakhir di saluran drainase jalan maupun sungai. Oleh karenanya perlu adanya pengendalian dan pengelolaan air limbah yang dapat menjaga kualitas air bersih dan air minum di Kabupaten Tangerang.

3.3.6 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2009. Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam dokumen tersebut adalah “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing didukung Masyarakat Madani”. Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 dicita-citakan menjadi daerah yang memiliki kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dengan disertai masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertical dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan mahluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut.

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tangerang direncanakan bertahap lima tahunan sesuai dengan tujuan, strategi dan arah kebijkakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dalam pelaksanaan RPJPD dibagi menjadi empat RPJMD atau lima tahunan dengan RPJMD Tahapan Pertama (2005-2010) merupakan Tahap Penguatan, RPJMD Tahapan Kedua (2010-2015) merupakan Tahap Peningkatan, RPJMD Tahapan Ketiga (2015-2020) merupakan Tahap Pemantapan, RPJMD Tahapan Keempat (2020-2025) merupakan Tahap Usaha Peningkatan Berkelanjutan. Mengingat priode pemerintahan pada saat itu dilaksanakan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, maka RPJMD tahap pertama tidak dimulai dari tahun 2005, melainkan tahun 2008.

RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 yang sebentar lagi habis masa berlakunya telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Evaluasi tersebut menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025 disusun kurang mengikuti kaidah perundang-undangan yang berlaku yaitu: UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. RPJPD yang disusun kurang mampu menjelaskan target capaian indikator kinerja yang ingin dicapai di akhir periode RPJPD.
2. RPJPD kabupaten Tangerang 2005-2025 ditetapkan melalui Perda No 12 tahun 2009 sehingga tidak sesuai dengan periode RPJPN yang dimulai 2005- 20025 dikarenakan pemekaran daerah otonom Kota Tangerang Selatan dan pergantian kepala daerah. Selain itu, dokumen RPJMD yang tersedia hanya periode 2008-2013, 2013-2018 dan 2019-2023, sementara dokumen untuk periode sebelum 2008 tidak tersedia. Hal itu menyebabkan data untuk Evaluasi RPJPD ini sangat terbatas.
3. Strategi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tidak dapat diukur dampaknya terhadap pembangunan kabupaten Tangerang dikarenakan tidak adanya baseline dan target capaian yang ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap capaian Indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja pemerintah Daerah menunjukan adanya peningkatan dari nilai yang ditargetkan di awal.
4. Secara umum capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan dalam 119 periode 2005-2022 mengalami tren positif dan diatas angka rata-rata Provinsi Banten dan Nasional. Hanya Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan mencapai 80 pada tahun 2025 masih jauh dari pencapaian
5. Predikat capaian indikator Pendapatan Per Kapita periode 2005-2022 adalah meningkat (*on the track*) dan perlu dipertahankan. Predikat Capaian indikator Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan periode 2005-2022 adalah meningkat (moderat), akan tetapi angka tersebut masih berada

dibawah capaian rata-rata Provinsi Banten. Diperlukan upaya percepatan dalam meningkatkan indikator-indikator tersebut.

6. Capaian indikator pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mendapat predikat menurun, akan tetapi hal ini dampak dari kondisi perekonomian nasional yang terefek pandemic COVID-19

Dari kesimpulan tersebut maka dibuat beberapa rekomendasi untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Tangerang yang berikutnya. Beberapa rekomendasai tersebut adalah sebagai berikut.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tangerang kedepan perlu mengikuti peraturan perundang-undangan dan kaidah yang berlaku. Hal itu dikarenakan, dokumen RPJPD masih diperlukan sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen kerangka kelembagaan dan regulasi jangka panjang dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten ke depan, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bersifat signifikan pada masingmasing strategi dan arah kebijakan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

Peningkatan IPM, Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran perlu dijadikan sebagai isu strategis dan program prioritas dalam penyusunan dokumen perencanaan kedepan, baik baik dalam periode jangka panjangmaupun dalam periode jangka menengah dan pendek dengan target yang realistis.

Selain itu, diidentifikasi pula apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang diinginkan. Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025.

Tabel 3. 4
Faktor Pendorong dan Penghambar Pencapaian Kinerja Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Keberadaan sumber daya manusia aparatur yang terus dikembangkan kompetensinya untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam memberikan pelayanan publik yang prima	Terbentuknya daerah otonom baru Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya secara geografis merupakan wilayah Kabupaten Tangerang, mempengaruhi rencana dan implementasi agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu juga berakibat pada pelaksanaan pelayanan publik yang tidak optimal pada fase transisi pasca berdirinya Kota Tangerang Selatan.
Fasilitas sarana prasarana yang terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan	Hambatan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Hal ini antara lain seperti kebijakan relokasi industri ke wilayah lain, ketersediaan transportasi publik yang belum memadai, hingga kebijakan alih fungsi lahan yang belum selarasdengan kebutuhan sektor pertanian
Perkembangan teknologi informasi yang berkembang	Kecepatan merespon berbagai permasalahan publik yang memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat yang selama ini belum

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
pesat mendukung digitalisasi layanan publik yang dapat dimanfaatkan baik bagiaparatur dan juga masyarakat pengguna layanan Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap meningkatnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Kemandirian fiskal merupakan salah satu tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah	optimal. Hal ini menjadi tantangan terhadap perkembangan ekonomi lokal, termasuk kemudian menjadi penyebab minimnya inovasi pengembangan sektor strategis di Kabupaten Tangerang. Dalam aspek pengembangan sumber dayamanusia, permasalahan publik juga dapat dilihat dari kondisi dimana penduduk lokal kalah bersaing dengan penduduk pendatang dalam akses ke lapangan kerja
	Kompetensi sumber daya manusia aparatur belum secara keseluruhan memiliki kompetensi yang sesuai dalam mendukung kebutuhan organisasi. Disamping itu, persebaran kualitas sumber daya manusia aparatur juga belum merata. Misalnya di sektor pendidikan, jumlah ketersediaan guru di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga belum merata. Ketersediaan tenaga kesehatan juga masih terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat secara optimal
	Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintah daerah yang disebabkan pergantian kepala daerah dan restrukturisasi kelembagaan. Dampak dari hal tersebut salah satunya yaitu manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum optimal
	Terjadinya bencana non-alam pandemi COVID19 pada awal 117 tahun 2020 hingga pada saat laporan ini disusun masih berlangsung situasi pandemi, menjadi hambatan dalam mengeksekusi agenda-agenda pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan refocusing anggaranpembangunan untuk sektor kesehatan terutama pada periode tahun 2020-2021. Pada sektor informal, pandemi COVID19 menyebabkan banyak perusahaan tutup dan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan dan meningkatnya angka pengangguran

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

3.3.7 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang No. 39 tahun 2023, menjadi acuan dalam penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah strategis secara efektif dan efisien dalam jangka waktu 2024 hingga 2026. Secara garis besar, pembahasan dokumen ini terdiri dari beberapa bagian yaitu gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, pendanaan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah. Dokumen ini berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan analisis, terdapat beberapa poin yang menjadi masalah pokok di Kabupaten Tangerang. Masalah pokok tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun beberapa isu strategis di Kabupaten Tangerang mengingat secara konseptual isu strategis juga dapat berupa potensi masalah.

Tabel 3. 5
Masalah Pokok dan Isu Strategis Kabupaten Tangerang

Masalah Pokok	Isu Strategis
Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia	Pembinaan dan pengembangan ekonomi hijau serta masih tingginya angka kesenjangan pendapatan penduduk
Belum optimalnya pembangunan ekonomi dan tingginya kesenjangan pendapatan penduduk	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah
Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah	Belum optimalnya pelayanan dasar pada sektor sosial budaya
Belum optimalnya pemenuhan pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemenuhan dan pemerataan pelayanan infrastruktur
	Pemekaran wilayah

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Isu strategis tersebut kemudian menjadi salah satu dasar perumusan tujuan pembangunan daerah selain visi dan misi dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025 dan arah kebijakan RPJPD tahap IV. Tujuan pembangunan kemudian menjadi acuan dalam menyusun sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Tabel 3. 6
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	a) Meningkatkan kualitas pendidikan b) Meningkatkan kualitas kesehatan c) Meningkatkan daya saing pemuda d) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan e) Meningkatkan pengendalian penduduk
Meningkatkan kondusifitas daerah dengan pengembangan perilaku masyarakat dengan landasan keagamaan, toleransi, dan gotong royong	Mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman dan tertib
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif	a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sektor unggulan b) Meningkatkan kemandirian desa c) Meningkatnya ketahanan pangan d) Meningkatnya daya saing tenaga kerja e) Meningkatnya cakupan penanganan PPKS
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik melalui digitalisasi dan integrasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan	a) Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur b) Meningkatkan kualitas hidup yang sehat dan tangguh bencana

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan akan diimplementasikan ke dalam program pembangunan daerah yang secara umum dikecurutkan ke dalam prioritas utama, yaitu:

1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia
2) Meningkatkan perekonomian masyarakat
3) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan

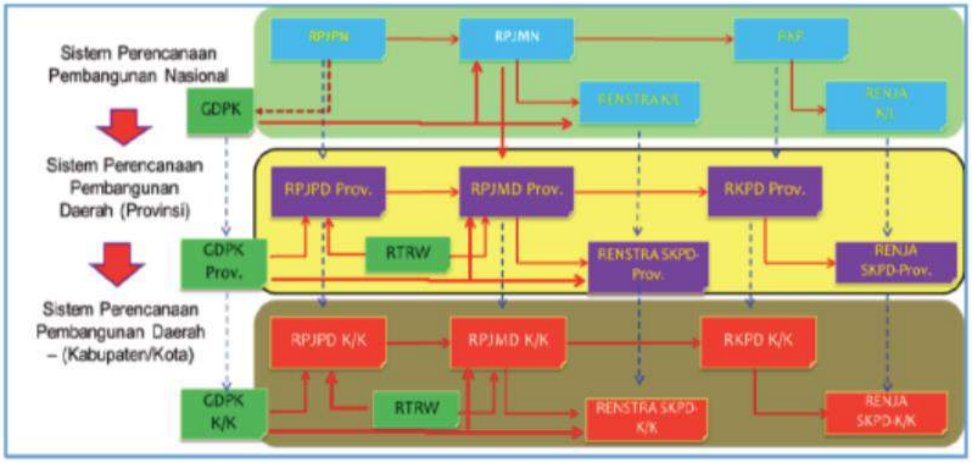
3.3.8 Dokumen Rencana Sektoral

A. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Tangerang 2022-2046

Grand Design Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 yang menyebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkolaborasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Banten dan instansi terkait lainnya untuk merancang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2046. Dokumen perencanaan ini memiliki peran penting sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam melaksanakan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Tangerang. Tujuan utama adalah menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang sebagai prasyarat untuk mencapai populasi tanpa pertumbuhan, dengan menurunkan tingkat fertilitas dan mortalitas serta meratakan persebaran penduduk. Salah satu target utama adalah mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang pada tahun 2026 dan seterusnya hingga tahun 2046. Untuk mencapai kondisi ini, sangat diharapkan agar angka kelahiran total (TFR) mencapai 2,1 anak per wanita atau netreproduction (NRR) sebesar 1 anak per wanita pada tahun 2026. Hal ini akan mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, terutama dalam hal perencanaan jumlah anak dalam sebuah keluarga.

Menurut panduan "Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar" yang diterbitkan oleh BKKBN pada tahun 2020, GDPK adalah kerangka utama atau rencana inti yang mencakup visi, misi, arah kebijakan, tujuan, serta target dalam pengembangan di sektor pembangunan. Ini juga mencakup lima pilar pembangunan dan merupakan pengembangan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). GDPK bertindak sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Gambar 3. 6
Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Tangerang 2022-2046

Tabel 3. 7
Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator dalam Pilar Pembangunan Kependudukan

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/Parameter
Pengendalian Kuantitas Penduduk	Mengendalikan jumlah penduduk melalui pengaturan fertilitas	- Mengatur pendewasaan usia perkawinan - Mengatur jarak antar kelahiran - Meningkatkan akses pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	-Pengaturan batas minimal usia perkawinan - Pengaturan jarak kelahiran dalam keluarga - Peningkatan akses pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	- Laju pertumbuhan penduduk (%) - Pendewasaan usia perkawinan (tahun) - TFR (%) - Keikutsertaan KB (%)
	Mengendalikan jumlah penduduk dengan menurunkan angka mortalitas	- Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, remaja, dan lansia - Meningkatkan kualitas pelayanan persalinan - Meningkatkan pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	- Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimum - Mengoptimalkan pelayanan Puskesmas untuk PONED dan PONEK untuk rumah sakit - Meningkatkan status gizi remaja putri, wanita usia subur, dan balita	- Angka kematian ibu (per 1000 kelahiran hidup) - Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) - Usia harapan hidup (tahun)
Peningkatan Kualitas Penduduk	Meningkatkan kualitas pendidikan	- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan - Meningkatkan kompetensi penduduk - Mengurangi	-Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan - Peningkatan kompetensi penduduk - Penurunan	- Angka Partisipasi Sekolah - Rata-rata lama sekolah (tahun) - Indeks Pembangunan Manusia - Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/Parameter
		kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin	kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin	
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	- Meningkatkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	- Mengoptimalkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)	- Prevalensi balita kurang gizi (%)
	Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif	- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sarana/fasilitas kesehatan yang berkualitas - Meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS - Meningkatkan status gizi masyarakat - Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular - Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak - Meningkatkan PHBS masyarakat	- Meningkatkan tata kelola manajemen dan klinis serta sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan - Meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS - Peningkatan status gizi masyarakat - Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular - Meningkatkan sanitasi total berbasis masyarakat dan kemitraan dengan lintas sektor dan swasta dalam penyehatan lingkungan - Meningkatkan promosi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	-Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan (JKN-KIS) - Persentase tempat tinggal penduduk terhadap akses sanitasi (%)
Pembangunan Keluarga Berkualitas	Meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan ketahanan keluarga	- Meningkatkan status ekonomi penduduk - Mengurangi kesenjangan ekonomi - Meningkatkan	- Penurunan tingkat pengangguran terbuka - Meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan dan pembinaan	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) - Tingkat kemiskinan - Cakupan kepemilikan jaminan sosial (%)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/Parameter
		perlindungan penduduk rentan	produktivitas - Peningkatan perlindungan dan pengawaan tenaga kerja	
		- Meningkatkan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, dan tumbuh kembang anak dan remaja - Meningkatkan perencanaan kehidupan dan pendampingan penduduk usia lanjut	- Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, dan tumbuh kembang anak dan remaja - Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia	- Keluarga pra sejahtera (%) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	- Mobilitas, migrasi dan pembangunan yang merata	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan wilayah - Mengurangi mobilitas penduduk ke kota	- Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah - Pembatasan mobilitas ke kota	- Laju pertumbuhan penduduk antar daerah (%) - Persentase infratruktur wilayah dalam kondisi baik - Pertumbuhan penduduk kota antar daerah
Penataan Data dan Informasi Kependudukan dan Administrasi Penduduk	Terwujudnya sistem data kependudukan yang teritegrasi dalam satu sistem informasi	- Meningkatkan tertib administrasi kependudukan - Meningkatkan kinerja kearsipan melalui implementasi teknologi dan digitalisasi - Meningkatkan cakupan pemanfaatan teknologi untuk mengakselerasi kualitas dan kapasitas pelayanan	- Peningkatan ketersediaan data dan informasi kependudukan - Peningkatan sistem pengolahan dan penyajian data kependudukan - Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kependudukan	- Persentase penduduk dapat menunjukkan catatan sipil berupa e-KTP dan akte kelahiran - Persentase penduduk menguasai akses komputer

Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Tangerang

B. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tangerang 2022-2027

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tangerang dibuat dengan tujuan menjadi panduan dan referensi bagi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program-program yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut. RPKD juga bertujuan menjadi landasan untuk menetapkan target pembangunan yang akan membantu mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Selain itu, RPKD disusun sebagai panduan bagi pemerintah dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Tangerang. Tujuan dan sasaran rencana penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tangerang tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1) Tujuan 1 Membangun sistem, fasilitas dan infrastruktur pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas, merata dan menyeluruh bagi keluarga miskin, dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam aspek pendidikan
   b. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender
   c. Sistem, fasilitas dan infrastruktur pendidikan formal dan non-formal yang memadai untuk seluruh penduduk Kabupaten Tangerang terutama penduduk miskin akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk sehingga dapat memenuhi kualifikasi dalam bekerja dan dapat menjalankan usaha yang diminati dengan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan penduduk.
2) Tujuan 2 Membangun sistem informasi lapangan pekerjaan yang inklusif
3) Tujuan 3 Membuka lapangan pekerjaan secara luas bagi keluarga miskin, dengan sasaran yang sama yaitu:
   a. Meningkatnya lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang bekerja

   Tujuan 1, 2 dan 3 sangat berkaitan dengan kondisi pengangguran di Kabupaten Tangerang. Kondisi sosial yang belum merata seperti kepemilikan perangkat komunikasi juga menjadi kendala bagi penduduk miskin untuk memperoleh informasi mengenai lapangan kerja sehingga sistem informasi dan lapangan kerja harus dibuat lebih inklusif untuk dapat menjangkau lapisan terbawah masyarakat.
4) Tujuan 4 Membangun sistem, fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang berkualitas, merata dan menyeluruh bagi keluarga miskin, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
   1. Meningkatnya Derajat Kesehatan
   2. Sistem, fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang berkualitas, merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Tangerang terutama penduduk miskin.

   Hal ini akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat.
5) Tujuan 5 Meningkatkan produktivitas para pelaku usaha (UMKM), petani, nelayan dan profesi lainnya, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, UMKM dan sektor pariwisata
2. Selain lapangan pekerjaan, dorongan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang juga perlu diberikan kepada para pelaku usaha menengah, kecil dan mikro serta para pekerja di bidang pertanian, perikanan dan bidang lainnya.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas usaha yang berujung pada meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

6) Tujuan 6 Mengurangi kawasan padat penduduk dan kumuh, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu:
   1. Meningkatnya luasan lingkungan hidup berkualitas
   2. Meningkatnya pengelolaan sampah Penataan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup sangat penting dilakukan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hal ini akan berujung pada peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (penduduk) terutama pada aspek kesehatan.
7) Tujuan 7 Membangun Bank Data Akurat Kabupaten Tangerang, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu:

   Terbentuknya Bank Data Akurat Kabupaten Tangerang yang terintegrasi Data merupakan hal dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Oleh karena itu, tujuan ketujuh ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta pembangunan yang efektif bagi masyarakat.

   Secara lebih rinci, tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 8
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Urusan berdasarkan Isu Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator	Urusan
Isu Strategis 1 : Aksesibilitas ke fasilitas pendidikan formal jenjang sekolah menengah dan non formal masih belum merata			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam aspek pendidikan	Pendidikan	Angka IPM	Pendidikan
		Rata-rata lama sekolah	
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	
Isu strategis 2: Aksesibilitas ke pekejaan (tempat kerja dan lapangan pekerjaan) masih belum merata			
Membangun sistem informasi lapangan pekerjaan yang inklusif	Meningkatnya lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ketenagakerjaan
Membuka lapangan pekerjaan secara luas bagi keluarga miskin			
Isu strategis 3: Fasilitas kesehatan belum merata dan belum memadai			

Tujuan	Sasaran	Indikator	Urusan
Membangun sistem, fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang berkualitas, merata dan menyeluruh bagi keluarga miskin	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Kesehatan
		Prevalensi Stunting	
		Cakupan Jaminan Kesehatan	
Isu Strategis 4 : Dukungan dan pemenuhan kebutuhan para pelaku usaha masih belum menyeluruh dan belum merata			
Meningkatkan produktivitas para pelaku usaha (UMKM), petani, nelayan dan profesi lainnya	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, UMKM dan sektor pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Koperasi dan UKM
		Laju Pertumbuhan (dari tahun ke tahun) sektor perikanan, pertanian dan pariwisata	
		Tingkat Kemiskinan	
		Jumlah UMKM dan IKM aktif	
Isu Strategis 5: Belum adanya penataan migrasi dan pembinaan bagi para migran			
Mengurangi Kawasan padat penduduk dan kumuh	Meningkatnya luasan lingkungan hidup berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan PUPR
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase timbunan sampah yang ditangani	
Isu Strategis 6: Belum adanya data akurat yang terintegrasi antar sektor			
Membangun Bank Data Akurat Kabupaten Tangerang	Terbentuknya Bank Data akurat Kabupaten Tangerang yang terintegrasi	Kelengkapan Bank Data akurat	Statistik

Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Tangerang

C. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Tangerang 2019-2023

Perencanaan bidang pangan dan gizi diatur melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, baik di tingkat nasional (RAN-PG) maupun daerah (RAD-PG). Rencana aksi memuat program dan kegiatan bidang pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia dengan kualitas serta daya saing yang optimal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perencanaan di bidang pangan perlu mengacu pada 5 pilar rencana aksi. Dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Tangerang, program-program terkait kemudian dikelompokkan berdasarkan 5 pilar.

Tabel 3. 9
Program Bidang Gizi dan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

No	Pilar	Program
1	Perbaikan gizi masyarakat	a) Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita b) Pos gizi c) Pencegahan stunting d) Peningkatan gizi masyarakat e) Pembinaan kesehatan masyarakat f) Perlindungan dan jaminan sosial g) Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat h) Tumbuh kembang anak
2	Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam	a) Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan b) Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan c) Program pengembangan perikanan tangkap d) Program pengembangan budidaya perikanan e) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

No	Pilar	Program
		f) Pertumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro g) Program pemberdayaan pembudidaya ikan h) Program perikanan budidaya air tawar/payau i) Optimalisasi TPI j) Peningkatan produksi dan produktivitas holtikultura ramah lingkungan k) Peningkatan produksi dan penerapan teknologi l) Peningkatan produksi dan penerapan teknologi peternakan m) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
3	Mutu dan keamanan pangan	a) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat b) Pembinaan tempat pengelolaan makanan c) Pengawasan dan pengendalian makanan d) Peningkatan STBM e) Pengawasan produk dan bahan berbahaya f) Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan g) Inspeksi dan sertifikasi pangan h) Peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner i) Pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian/perkebunan
4	Perilaku hidup bersih dan sehat	a) Penerapan perilaku sehat b) Program lingkungan sehat perumahan c) Program penataan lingkungan permukiman perdesaan d) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah e) Peningkatan akses air bersih dan sanitasi f) Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman g) Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan, sumber pembiayaan dan pola investasi serta pengembangan sistem penyediaan air minum h) Pengembangan informasi dan komunikasi publik
5	Koordinasi pembangunan pangan dan gizi	a) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya b) Program pengembangan desa lembaga ekonomi pedesaan c) Program perencanaan tata ruang

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan RAD-PG Kabupaten Tangerang 2019-2023

Selain program, dokumen RAD-PG memuat indikator-indikator untuk pemenuhan pangan dan percepatan perbaikan gizi. Indikator pemenuhan pangan terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1) Produksi komoditi sumber karbohidrat (padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)
2) Produksi daging ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi)
3) Produksi daging unggas (ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik, itik manila, dan burung puyuh)
4) Produksi telur (ayam buras, ayam petelur, itik, itik manila, puyuh)
5) Ketersediaan pangan terhadap konsumsi
6) Angka kecukupan gizi, ketersediaan pangan, ketersediaan energi, tingkat ketersediaan energi, ketersediaan protein, dan tingkat ketersediaan protein
7) Konsumsi pangan, konsumsi energi, tingkat konsumsi energi, konsumsi protein, dan tingkat konsumsi protein
8) Skor pola pangan harapan, konsumsi ikan

Sementara, indikator percepatan perbaikan gizi Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1) Prevalensi anemia pada remaja putri dan ibu hamil
2) Prevalensi KEK pada remaja putri dan ibu hamil

3) Bayi dengan berat badan lahir rendah
4) Bayi usia < 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif
5) Prevalensi *underweight* anak balita
6) Prevalensi *wasting* anak balita (bawah lima tahun)
7) Prevalensi stunting anak baduta (bawah dua tahun)
8) Angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita
9) Angka usia harapan hidup
10) Cakupan pelayanan kesehatan bayi
11) Cakupan kunjungan pelayanan anak balita
12) Cakupan desa UCI (*Universal Child Immunization*)
13) Cakupan bayi 0-11 bulan mendapat Imunisasi Dasar Lengkap sesuai standar
14) Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

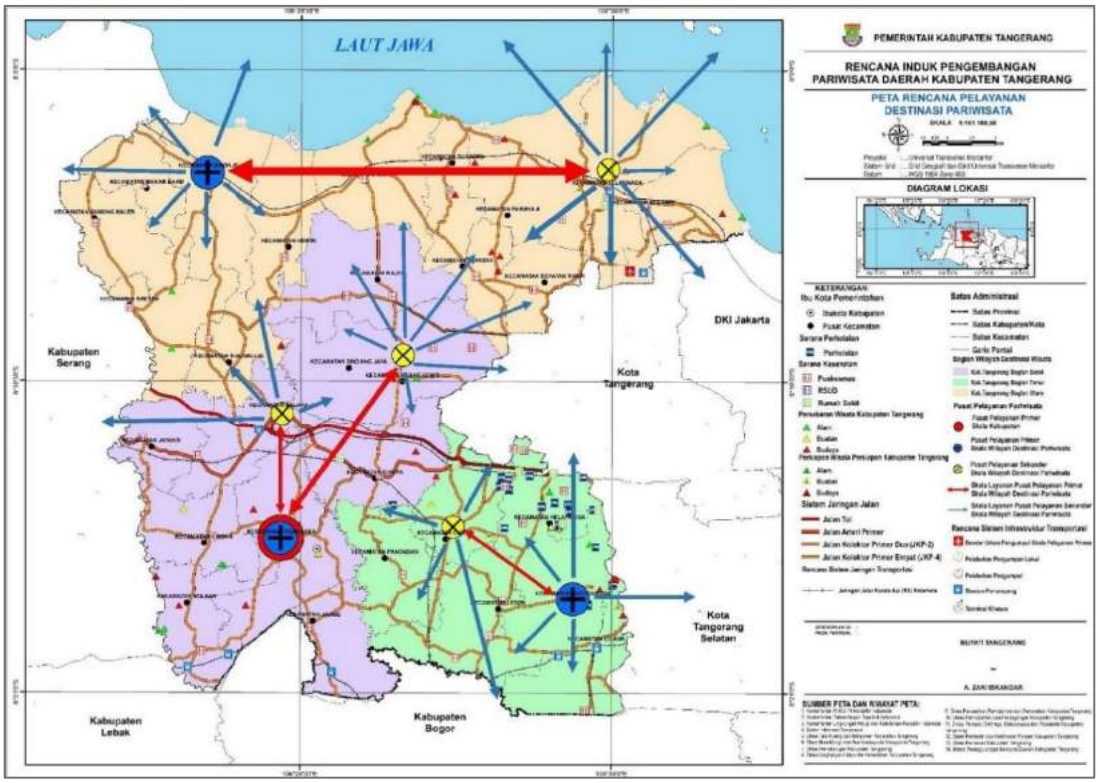
D. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tangerang 2023-2043

Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tangerang berisikan arahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tangerang. Di dalamnya memuat analisis, visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tangerang serta arahan detail berupa rencana pengembangan perwilayahan dan program pembangunan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisatan Kabupaten Tangerang adalah “Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang yang nyaman, berbudaya, berbasis masyarakat, serta berkelanjutan”.

Berdasarkan visi tersebut di atas, disusunlah misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tangerang sebagai berikut.

1. Pengembangan Objek Wisata dan Kebudayaan
2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
3. Peningkatan Aksesibilitas, Sarana dan Prasarana Pariwisata
4. Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Kepariwisataan

Misi di atas selanjutnya dijabarkan melalui tujuan-tujuan yang ada di dalamnya. Kemudian disusun kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan yang bermuara pada rencana pembangunan perwilayahan pariwisata. Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata terbagi menjadi dua, yaitu rencana struktur perwilayahan pariwisata yang dimuat dalam peta dan rencana kawasan pengembangan pariwisata dan Kawasan strategis pariwisata.



Gambar 3. 7
Peta Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata dan Pelayanan Destinasi Pariwisata Kabupaten Tangerang
Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2043

Wilayah destinasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian utara dengan tema wisata kawasan pesisir, bagian barat dengan tema wisata alam dan budaya, dan bagian timur dengan tema wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*). Pusat-pusat pelayanan pariwisata tersebar di beberapa titik yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. Penyusunan rencana struktur tersebut telah mengacu pada arahan sistem perkotaan Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.

E. Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2037

Dalam mendorong pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Tangerang yang menjadi *leading sector*, pemerintah daerah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2037. Dokumen RPIK menjabarkan arahan untuk mewujudkan *Industri Kabupaten Tangerang Cerdas, Hijau Menuju Kesejahteraan Masyarakat*. Industri Unggulan Daerah Kabupaten Tangerang yaitu (1) industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; (2) industri makanan dan minuman; (3) industri tekstil dan pakaian jadi; serta (4) industri kreatif. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang bertujuan untuk:

1) memberikan gambaran dan arah Rencana Pembangunan Industri Daerah;

2) memberikan landasan hukum dan pedoman Rencana Pembangunan Industri Daerah;
3) mengembangkan potensi pertumbuhan sektor industri;
4) meningkatkan nilai tambah industri;
5) meningkatkan serapan tenaga kerja;
6) meningkatkan kontribusi PDRB daerah;
7) meningkatkan ekspor produk industri;
8) memperkuat rantai pasok produk industri unggulan antar kecamatan;
9) meningkatkan daya saing dan meningkatkan sumber daya manusia terampil;
10) meningkatkan kesejahteraan masyarakat

F. Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2036

Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tangerang disusun sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat seiring berkembangnya jumlah rumah tangga dan kawasan permukiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Sistem Penyediaan Air, pengembangan dan perencanaan SPAM memiliki tujuan untuk menciptakan pengelolaan air minum yang berkualitas, berkuantitas, dan berkontinuitas kepada publik secara menyeluruh dengan harga yang terjangkau. Upaya pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui identifikasi sumber-sumber air baku yang dapat dimanfaatkan baik bersumber dari air permukaan, air tanah, maupun mata air; identifikasi kebutuhan dasar air bersih masyarakat dan ketersediaan potensi air baku masa depan; Menyusun rencana pengelolaan air bersih masyarakat; dan menyusun rencana anggaran investasi penyediaan air bersih.

Kabupaten Tangerang memiliki potensi air permukaan berupa sungai dan situ/rawa dan air bawah tanah yang tergabung dalam cekungan air tanah Serang-Tangerang. Berdasarkan satuan wilayah sungai, Kabupaten Tangerang dilalui oleh 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit sebagai berikut.

Tabel 3. 10
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Tangerang

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (m^3/dt)
1.	Sungai Cimanceuri	Panjang ±60 km; Luas ±25.141 Ha	0,601
2.	Sungai Cirarab	Panjang ±20,9 km; Luas ±20.488 Ha	113,44
3.	Sungai Cisadane	Panjang ±140 km; Luas ±30.892 Ha	115.315,00
4.	Sungai Cidurian	Panjang ±81,5 km; Luas ±17.140 Ha	2.551,00
5.	Sungai Cipasilian	Luas ±5.964 Ha	N/A
6.	Sungai Cileleus	Luas ±8.631 Ha	N/A

Sumber: RISPAM Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2036

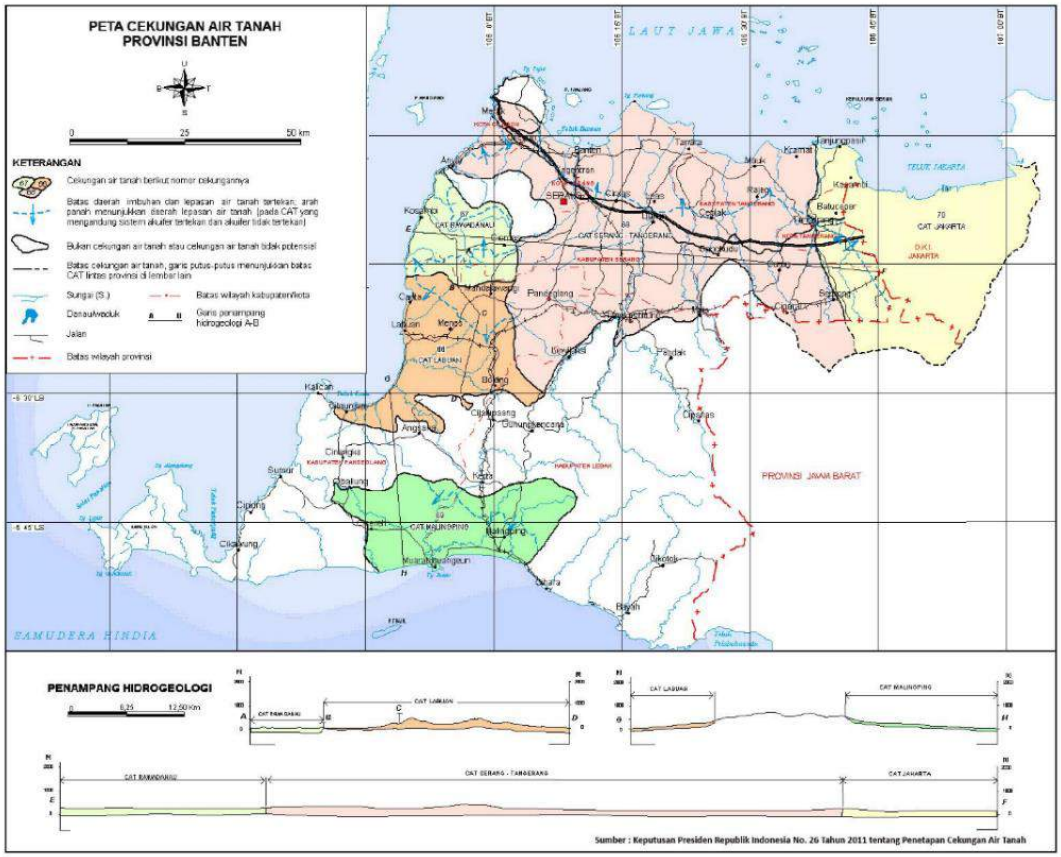
Selain sungai, Kabupaten Tangerang juga memiliki badan air yang menampung air hujan dan *run-off* berupa situ/danau dan rawa yang tersebar di seluruh wilayah dengan daftar sebagai berikut.

Tabel 3. 11
Situ/Danau/Rawa di Kabupaten Tangerang

No.	Nama Situ/Danau/Rawa	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Situ Pondok	Sukaharja	Sindang Jaya	27,7
2.	Situ Cilongok	Sukamantri	Pasar Kemis	23
3.	Situ Pasir Gadung	Pasir Gadung	Cikupa	7,3
4.	Siru Kelapa Dua	Kelapa Dua	Kelapa Dua	37,5
5.	Situ Cihuni	Cihuni	Pagedangan	32,34
6.	Situ Jengkol	Cikuya	Solear	4,1
7.	Rawa Ranca Ilat	Cirumpak, Kemuning	Kronjo	67,89
8.	Rawa Waluh	Kosambi Dalem	Kronjo	70
9.	Rawa Garugak	Kemuning	Kresek	177
10.	Rawa Patrasana	Patrasana, Pasirampo	Kresek	245
11.	Rawa Gabus	Tamiang	Kresek	9,72
12.	Rawa Genggong	Tamiang	Kresek	8,4
13.	Rawa Setingin	Klebet	Kemiri	26,4
14.	Rawa Gede	Pekayon, Sukadiri	Sukadiri	2,8
15.	Rawa Sulang	Lebakwangi	Sepatan	8
16.	Rawa Koja	Pisangan Jaya	Sepatan	-
17.	Rawa Kepuh	Rawabani, Pakuhaji	Pakuhaji	-
18.	Rawa Gelam/Panggang	Kutajaya	Pasar Kemis	11,7
19.	Rawa Pangodokan	Kutabumi	Pasar Kemis	-
20.	Rawa Dadap	Pengadegan	Pasar Kemis	-
21.	Rawa Warung Rawa Rebo	Wanakerta	Sindang Jaya	7,9
22.	Rawa Bojong	Bojong	Cikupa	7,6
23.	Rawa Jambu	Jambukarya	Rajeg	-

Sumber: RISPAM Kabupaten Tangerang 2022-2036

Selain air permukaan, Kabupaten Tangerang juga menyimpan potensi air tanah yang tergabung ke dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang. Debit air tanah di Kabupaten Tangerang diketahui berkisar antara 3-10 liter/dt/km^2. Potensi CAT dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu potensi umbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m^3/tahun dan potensi aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m^3/tahun.



Gambar 3. 8
Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Banten
Sumber: **Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah**

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tangerang saat ini disediakan dan diselenggrakan oleh PDAM Tirta Kerta Raharja. Perusahaan air minum ini telah melayani 6 zona (5 zona PERUMDAM TKR dan 1 zona swasta) yang dibagi di beberapa kecamatan. Pemenuhan ketersediaan air di keenam zona tersebut didistribusikan melalui 10 SPAM yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 12
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Tangerang

No.	SPAM	Unit Air Baku	Intake	Unit Produksi	Unit Distribusi
1.	SPAM Cikokol	Sungai Cisadane	Pompa 5x600 lt/dt	Kapasitas Pengolahan sebesar 1.275 lt/dt	Melayani wilayah Karawaci, Priuk, Jatiuwung, dan Kalideres
2.	SPAM Perumnas	Sungai Cisadane	Pompa 125 lt/dt	Kapsitas terpakai sebesar 120 lt/dt	Melayani wilayah Perumnas, Cibodas, dan Jatiuwung
3.	SPAM Babakan	Sungai Cisadane	Pompa 2x20 lt/dt	Kapasitas pengolahan sebesar 80 lt/dt	Melayani wilayah Pelayanan I (zona A)
4.	SPAM Bojong Renged	Sungai Cidurian	Pompa 2x50 lt/dt	Kapasitas pengolahan sebesar 100 lt/dt	Melayani Kecamatan Teluknaga dan Kosambi sebanyak 8.700 pelanggan
5.	SPAM Solear	Sungai Cidurian	Pompa 100 lt/dt	Kapasitas pengolahan sebesar 100 lt/dt	Melayani Kecamatan Solear, Tigaraksa, dan Balaraja sebanyak 12.848 pelanggan
6.	SPAM Cisauk	Sungai Cidurian	Pompa 50 lt/dt	Kapasitas pengolahan sebesar 50 lt/dt	Melayani Kecamatan Cisauk sebanyak 7.800 pelanggan

No.	SPAM	Unit Air Baku	Intake	Unit Produksi	Unit Distribusi
7.	SPAM Kronjo	Sungai Cipasilian	Pompa 10 lt/dt	Kapasitas terpakai sebesar 10 lt/dt	Melayani Kecamatan Kronjo sebanyak 650 pelanggan
8.	SPAM Kresek	Sungai Cimanceri	Pompa 15 lt/dt	Kapasitas pengolahan sebesar 15 lt/dt	Melayani Kecamatan Rajeg sebanyak 1.200 pelanggan
9.	SPAM Mauk	Irigasi Sungai Cisadane	Pompa 15 lt/dt	Kapasitas pengolahan dan terpakai sebesar 15 lt/dt	Melayani Kecamatan Mauk sebanyak 1.900 unit
10.	SPAM Rajeg	Irigasi Sungai Cisadane	Pompa 25 lt/dt	Kapasitas pengolahan dan terpakai sebesar 25 lt/dt	Melayani kecamatan Rajeg sebanyak 3.400 pelanggan

Sumber: RISPAM Kabupaten Tangerang 2022-2036

Berdasarkan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa terdapat beberapa kawasan kecamatan yang tidak mendapatkan sumber air minum. Sehingga penyediaan cakupan layanan air minum di Kabupaten Tangerang belum merata secara menyeluruh. Terdapat beberapa kecamatan yang harus mendistribusikan sumber airnya ke kecamatan lain yang mengalami krisis air. Oleh karenanya diperlukan pengelolaan dan pengendalian potensi ketersediaan air bersih dan air minum di Kabupaten Tangerang sehingga terpenuhinya kebutuhan air bagi seluruh rumah tangga.

G. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2041

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2041 disahkan melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 116 Tahun 2021. Dokumen ini diterbitkan dengan maksud untuk mewujudkan keterpaduan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman, mewujudkan lingkungan hunian yang mendukung perikehidupan terpadu, mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, mewujudkan penggunaan sumber daya, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang. Visi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang yaitu "*Terwujudnya lingkungan perumahan dan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tangerang yang layak, sehat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta keterpaduannya dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan sistem perkotaan*". Misi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah "*Membantu semua orang agar dapat menhuni rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif, dan berkelanjutan*".

Strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tangerang tahun 2020-2039 adalah sebagai berikut.

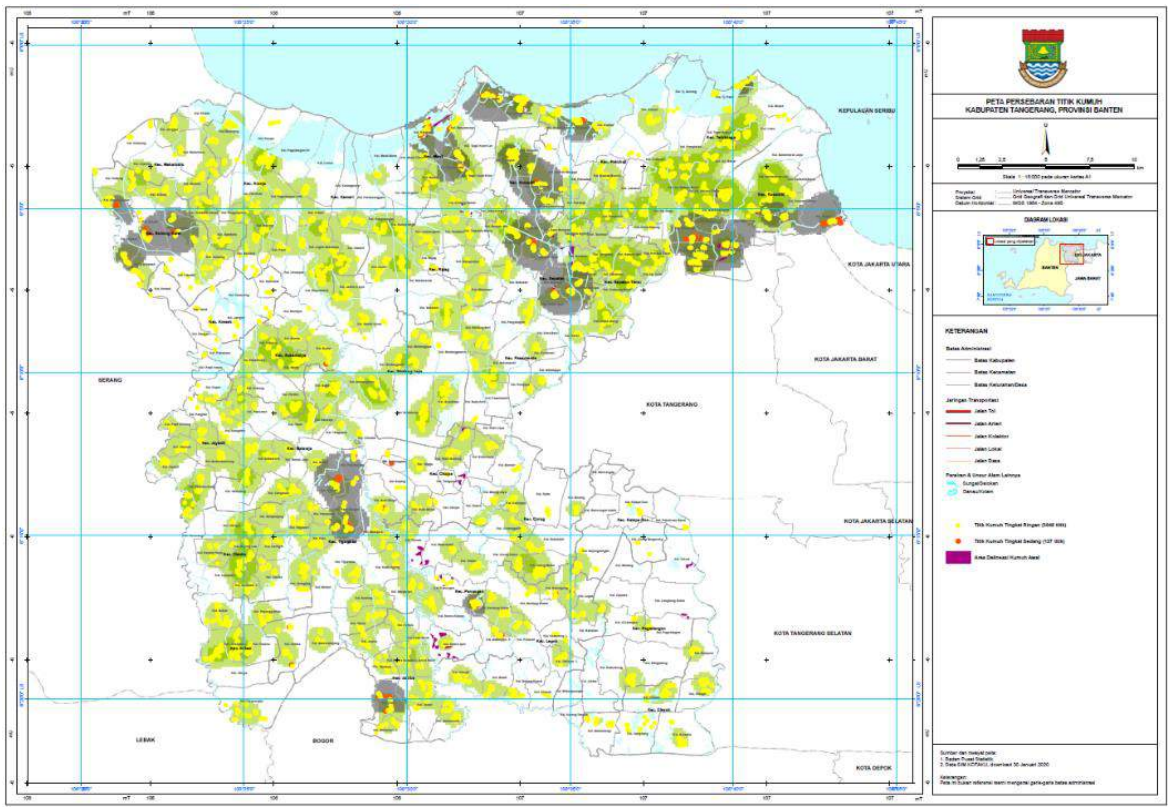
1) Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan baru dan hunian vertikal untuk mengatasi backlog perumahan;
2) Pembangunan baru dan peningkatan kualitas perumahan swadaya;
3) Pembangunan baru dan peningkatan kualitas perumahan mendukung pariwasta;

4) Peningkatan kualitas permukiman kawasan strategis dan permukiman tradisional;
5) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota Baru;
6) Peningkatan kualitas kawasan kumuh secara bertahap untuk mengurangi luasan kawasan kumuh;
7) Pembangunan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada perumahan dan kawasan permukiman termasuk wilayah terdampak bencana; dan
8) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.

Saat ini, kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi dan sedang terhitung kurang lebih sebanyak 27.937 hektar meliputi 21 kecamatan. Sementara, permukiman perdesaan dengan kepadatan penduduk rendah terhitung kurang lebih sebanyak 16.631 hektar meliputi 8 kecamatan. Berdasarkan pengamatan primer dan sekunder yang dilakukan, diketahui dari seluruh kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan beberapa permasalahan mendesak yang perlu ditangani dan diantisipasi yaitu:

1) Lingkungan Permukiman Kumuh

   Keberadaan permukiman kumuh menunjukkan kesejahteraan tinggal masyarakat di Kabupaten Tangerang yang belum sepenuhnya merata. Saat ini masih terdapat sekitar 30% kawasan permukiman kumuh dan persentase jumlah rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh wilayah.



Gambar 3. 9
Persebaran Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Tangerang
Sumber: Lampiran Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 50/Kep.1807-Huk/2021

Kawasan permukiman kumuh ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagian besar keluarga merupakan bagian dari Keluarga Kurang Sejahtera karena kesulitan ekonomi. Lokasi permukiman kumuh tersebar di kawasan perkotaan, kawasan nelayan, bantaran sungai, hingga tersembunyi di balik bangunan-bangunan besar perumahan maupun pertokoan.

2) Kurangnya Ketersediaan Prasarana Permukiman yang Memadai

Prasarana permukiman yang terdiri dari penerangan jalan umum (PJU), layanan air minum, serta layanan air limbah dan sanitasi perlu diperluas agar dapat menjangkau seluruh wilayah secara menyeluruh. Pada beberapa titik permukiman spontan, penerangan jalan masih kurang sehingga meningkatkan bahaya dan tindak kriminal. Selain itu, masalah pembuangan air limbah juga ditemukan karena masih banyak keluarga yang mengandalkan buangan alami sehingga mengakibatkan penumpukan air limbah. Hal ini berbahaya dan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan.

3) Berkembangnya Industri Rumah Tangga Polutif di Kawasan Perumahan Padat

Beberapa kawasan padat di Kabupaten Tangerang diisi oleh kegiatan industri rumah tangga. Namun, kegiatan ini keberadaanya tidak sesuai dengan fungsi perumahan sehingga menimbulkan polusi air dan tanah di kawasan permukiman. Upaya relokasi industri rumah tangga polutif menjadi solusi saat ini, kegiatan akan dipindahkan ke area yang lebih didukung dengan sarana dan prasaran pengolahan limbah industri.

4) Intervensi Lahan Permukiman ke Kawasan Lindung

Pertumbuhan kepadatan permukiman di Kabupaten Tangerang diperkirakan akan semakin meningkat mengingat semakin tingginya jumlah penduduk. Kebutuhan akan tempat tinggal tumbuh pesat sehingga ketersediaan lahan pun menjadi konsentrasi yang perlu dipikirkan. Kondisi ini memungkinkan adanya mekanisme regulasi dan kontrol serta pengendalian untuk mempertahankan kawasan lindung agar tidak diambil/diintervensi untuk pemenuhan kebutuhan permukiman.

5) Penurunan Kualitas Lingkungan Permukiman

6) Masalah Kepemilikan Lahan dan Bangunan

3.4 Isu Strategis

3.4.1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2022 Kabupaten Tangerang memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Tangerang. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Saat ini sumber daya

manusia masih menjadi isu yang perlu pengoptimalan dari banyak aspek pendukungnya. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang adalah melalui angka indeks pembangunan manusia. IPM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 masih berada di bawah capaian provinsi dengan peringkat ketiga terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi banten. Kabupaten Tangerang masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal. Selain itu adanya kondisi sosial yang lebih rendah di daerah pesisir juga memerlukan perhatian lebih. Sehingga aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dalam capaian kualitas dan kuantitas namun pemerataannya juga.

A. Belum Optimalnya Kualitas dan Partisipasi Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas pendidikan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari aspek sarana, prasarana, tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan serta tingkat partisipasi pendidikan yang ada.
Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Tangerang adalah 8,92 tahun yang berarti penduduk secara rata – rata menempuh pendidikan hanya hingga pendidikan menengah SMP dan bahkan belum mencapai angka wajib belajar 9 tahun. Perlu adanya dorongan rata – rata lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu dalam aspek ketercukupan sarana dan prasarana juga masih belum optimal yang dapat dilihat dari cakupan pendidikan anak usia dini yang masih rendah, angka putus sekolah yang tinggi, kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan yang belum optimal serta kualitas bangunan sekolah yang belum baik. Kualitas dari tenaga pendidik dan lingkungan belajar yaitu bangunan sekolah akan turut berpengaruh terhadap kondisi belajar murid dan motivasinya untuk mengikuti atau bahkan melanjutkan belajar. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting.

B. Derajat Kesehatan Masyakarat yang Rendah

Salah satu aspek penting yang menunjukkan kualitas masyarakat adalah kondisi kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan. Namun, tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang masih tergolong rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kematian ibu dan bayi memiliki kecenderungan meningkat. Penyebab kematian ibu disebabkan beberapa faktor seperti risiko anemia, obesitas, kekurangan energi kalori dan penyakit TBC. Sementara itu, penyebab kematian bayi didominasi afiksia dan berat badan lahir rendah (BBLR). Kasus stunting dan balita gizi buruk juga masih ditemukan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi dari Dinas

Kesehatan setempat, faktor penyebab kasus stunting & balita gizi buruk adalah pola hidup dan pola asuh bayi dalam keluarga. Selanjutnya, masalah aspek kesehatan secara umum yang terjadi adalah peningkatan prevalensi penyakit menular dan tidak menular yaitu HIV/AIDS, kasus ISPA, infeksi diare, TBC, dan DBD.

Pencegahan dan penanganan masalah-masalah yang telah disebutkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, masih belum maksimal. Terdapat tenaga kerja yang bekerja di luar SOP kesehatan dan belum memiliki respon kegawatdaruratan yang optimal. Selain itu, kecukupan tenaga medis (dokter, paramedis, dan bidan) di Kabupaten Tangerang masih terbatas sehingga hanya fasilitas kesehatan dengan alokasi dana lebih yang mampu mempekerjakan secara mandiri. Tidak hanya dari sisi pelayanan, saat ini ketersediaan obat dan logistik kesehatan dari program yang dilaksanakan masih terbatas, terutama alat TCM untuk pemeriksaan TB.

C. Kurangnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Saat ini, pemberdayaan dan penanganan bagi kelompok fakir miskin masih belum memadai. Taraf kehidupan fakir miskin di Kabupaten Tangerang dinilai masih belum layak. Tidak hanya itu, peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial juga masih kurang. Padahal keterlibatan PSKS sangat diperlukan oleh pemerintah, mengingat bidang kemiskinan merupakan isu dengan dimensi yang luas dan memiliki banyak fokus, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial. Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan kerjasama dan koordinasi antara banyak pihak.

Pemberdayaan sosial juga dapat dilihat dari sisi pemberdayaan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang belum optimal. Berdasarkan tren selama beberapa tahun, persentase PMKS yang tertangani masih fluktuatif dengan kecenderungan kasus PMKS yang meningkat dan persebaran merata di seluruh kecamatan. Di tahun 2020, persentase penanganan PMKS berada di angka 72%, menurun sebanyak 25% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil FGD, inti dari permasalahan PMKS adalah tingginya kesenjangan, keterlantaran, dan kekerasan kepada anak disabilitas & kelompok rentan. Sementara itu, penanganan PMKS yang belum optimal disebabkan operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang kurang maksimal dalam pengelolaan data. Penanganan PMKS perlu dukungan dari berbagai pihak sehingga kerjasama antara OPD perlu ditingkatkan.

D. Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak belum Optimal

Kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa terbatas gender tertentu. Mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui strategi sistematis Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu aspek yang dapat merepresentasikan kesetaraan gender adalah aspek pembangunan gender dan pemberdayaan wanita & anak. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan Indeks

Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Tangerang tidak terlalu signifikan. Selain itu, nilainya masih berada di bawah Provinsi Banten dan Nasional. Menurut hasil yang disampaikan dalam FGD, hal tersebut disebabkan kurangnya keterlibatan perempuan dalam parlemen dan pemerintahan (14%), masih rendahnya kualitas hidup perempuan di Kabupaten Tangerang, termasuk dalam mengakses pendidikan, ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini menunjukkan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum maksimal. Diperlukan peningkatan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan lain melalui pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menyampaikan bahwa jumlah kasus saat ini hanya berasal dari kejadian terlapor, sehingga tidak menutup kemungkinan kasus kekerasan terhadap perempuan jauh lebih banyak terjadi.

3.4.2 Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan dan pemerataan ekonomi menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kabupaten Tangerang yaitu pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan kesenjangan pembangunan ekonomi.

A. Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Sektor produktif merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB Kabupaten Tangerang, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan konstruksi. Namun, jika melihat tren bahwa pertumbuhan ketiga sektor fluktuatif dan cenderung melambat pada lima tahun terakhir. Industri yang berorientasi pada padat modal menghadapi tantangan deindustrialisasi dini. Kondisi deindustrialisasi muncul ketika terjadi penurunan produktivitas sektor industri sehingga sektor industri manufaktur tidak lagi menjadi pangsa kontribusi terhadap perekonomian. Berdasarkan telaah dokumen dan hasil FGD, permasalahan tersebut dipicu oleh belum optimalnya daya saing industri dan investasi yang berdampak pada pindahnya industri ke daerah lain sekaligus berdampak pada gelombang pengangguran. Selain itu dari faktor sumber daya manusia utamanya angkatan kerja yang belum memenuhi kualifikasi pasar kerja. Dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan inovasi produk. Maka dari itu diperlukan upaya meningkatkan kapasitas SDM yang berorientasi *entrepreneur* untuk membuka peluang inovasi, pasar baru, dan dalam arti luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tangerang memiliki sektor ekonomi potensial berbasis SDA yang belum dioptimalkan. Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, kelautan & perikanan, serta peternakan belum menunjukkan performa yang baik karena produktivitasnya yang

stagnan. Permasalahan ini dipicu oleh kapasitas SDM dan kelembagaan sektor belum optimal serta operasional dan kualitas produk hasil sektor yang belum berdaya saing. Berdasarkan hasil FGD, faktor penting yang mempengaruhi produktivitas sektor pertanian adalah ketersediaan air untuk irigasi pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi terbangun, dan minimnya regenerasi petani. Sektor pertanian dan kelautan & perikanan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam arti luas juga berperan untuk ketahanan pangan dan konsumsi pangan yang bergizi.

B. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Isu strategis lainnya adalah kesenjangan pembangunan ekonomi. Kesenjangan pembangunan ekonomi Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Berdasarkan data P3K Kemenko PMK (2022), persentase penduduk dengan berpendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 37,6% atau 1.260.022 jiwa. Capaian tersebut lebih baik dibanding Provinsi Banten sebesar 40% dari jumlah penduduk Banten. Walaupun Indeks Gini Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 dalam kategori rendah yaitu 0,282, tetapi diperlukan upaya untuk menurunkan ketimpangan. Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah sektor pertanian yang rendah sementara industri padat modal yang menyerap sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah tinggi. Produktivitas tenaga kerja yang rendah yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang rendah di beberapa sektor (pertanian, penyedia makan minum) akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat alias persentase penduduk miskin.

3.4.3 Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur bagi pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan lingkungan menjadi salah satu isu strategis Kabupaten Tangerang. Koordinasi dan keterpaduan penataan ruang serta penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan dasar perlu dicapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang baik memperlihatkan bahwa daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maskimal. Infrastruktur yang berkualitas minimal dapat memfasilitasi kehidupan sosial dan lingkungan secara efektif, membantu mendorong ekonomi yang baik, dan mampu bertahan dalam waktu yang lama (CSIS, 2017). Isu penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Tangerang ditunjukkan oleh belum optimalnya perencanaan pembangunan permukiman, belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lingkungan perkotaan, dan belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi.

A. Penyediaan Infrastruktur Lingkungan

Masalah mengenai penyediaan infrastruktur lingkungan bagi pelaksanaan fungsi dan kegiatan perkotaan ditunjukkan dari masalah yang berkaitan dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kinerja jaringan jalan, dan kinerja drainase. Data dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 memperlihatkan luasan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Tangerang masih seluas 17,05% pada tahun 2021.

Sementara, pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATRKBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mengatur bahwa luas RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan dengan rincian 20% bersifat RTH publik dan 10% bersifat RTH privat. Kemudian, permasalahan kinerja jalan disebabkan oleh pesatnya peningkatan volume kendaraan dan tidak sesuainya kapasitas jalan. Dapat dibayangkan ketika padatnya kendaraan saling berdempetan di lebar jalan yang sempit. Kerumunan kendaraan ini menurunkan kualitas kondisi jalan sehingga ditemukan masih ada sebanyak 27,1% jalan dalam keadaan rusak dan rusak berat pada tahun 2022. Isu ketiga diperlihatkan oleh tidak berjalannya kinerja saluran drainase dengan baik. Saluran drainase yang terhambat menyebabkan angka kejadian banjir semakin meningkat. Tercatat angka kejadian banjir melonjak dari 6 kejadian pada tahun 2021 menjadi 42 kejadian pada tahun 2022. Masalah drainase ini merupakan dampak dari banyaknya sampah yang menyumbat jalannya air dan kurangnya jumlah resapan air.

B. Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman

Kondisi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman memperlihatkan seberapa besar kesejahteraan tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data sekunder yang ditemukan, isu strategis pembangunan kawasan permukiman ditandai dengan masalah pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman serta persentase kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang masih tinggi. Infrastruktur rumah tangga yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan layanan sanitasi, layanan air minum, dan layanan jalan. Kondisi saat ini memperlihatkan belum 100% rumah tangga di Kabupaten Tangerang terlayani oleh layanan infrastruktur tersebut. Kegiatan penunjang seperti melakukan pembangunan dan perbaikan aksesibilitas jalan, pembangunan pipa dan septic tank untuk sanitasi, dan pengembangan rencana induk sistem penyediaan air minum terus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga seluruh wilayah dapat tercukupi dengan baik. Selain itu, masih adanya sekitar 30% persentase luas kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang membuat pembangunan permukiman perlu diantisipasi. Jumlah perumahan perlu dihitung dan diproyeksikan pertumbuhannya di masa mendatang sehingga tidak muncul lebih banyak rumah-rumah organik di Kabupaten Tangerang. Program rehabilitasi kawasan kumuh menjadi salah satu solusi yang ditawarkan, namun program ini perlu ditangguhkan karena kawasan kumuh yang direhabilitasi pun dapat menjadi kumuh kembali apabila tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik. Dinas permukiman Kabupaten Tangerang menyampaikan dalam FGD bahwa belum kuatnya kemampuan anggaran menjadi salah satu penyebab paling krusial dalam upaya pengendalian dan pengelolaan pembangunan kawasan permukiman.

C. Pemenuhan dan Integrasi Layanan Transportasi

Isu ini ditunjukkan melalui masalah kinerja jaringan jalan angkutan umum dan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Masalah angkutan umum ditunjukkan melalui tingginya kebutuhan moda transportasi darat. Kondisi transportasi

Kabupaten Tangerang saat ini sudah hampir mendekati dengan kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan. Pemerintah daerah mengharapkan Kabupaten Tangerang juga dapat mengembangkan layanan konektivitas MRT dan LRT, seperti yang sudah bisa dirasakan oleh kawasan Jabodetabek sebagai salah satu moda transportasi publik. Namun, diketahui masalah lain disampaikan oleh dinas perhubungan Kabupaten Tangerang, dimana minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum saat ini masih sangat kurang. Sehingga rencana pengembangan transportasi massal perlu diikuti dengan program strategis yang dapat mendorong masyarakat. Selain itu, tingkat kemacetan yang tinggi di kawasan perkotaan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu masalah yang paling mudah dikenali. Oleh karena itu, pembangunan jalan dan pengembangan jalan tol di beberapa lokasi juga dilakukan untuk mengimbangi kapasitas kendaraan yang semakin tinggi.

3.4.4 Pengendalian Lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan permbangunan berkelanjutan. Target permbangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang jangka panjang. Manajemen kebencanaan, pengelolaan sumber daya alam, serta kualitas dan daya dukung lingkungan hidup menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Tangerang.

A. Manajemen Kebencanaan

Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, yaitu bencana bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tsunami. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana seperti banjir, kebakaran, abrasi, dan kekeringan dipengaruhi oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2023). Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana menjadi upaya meminimasir potensi kerugian bencana. Tantangan adaptasi dan mitigasi kebencanaan di Kabupaten Tangerang yaitu penurunan kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah dalam manajemen kebencanaan, serta masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat.

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam menjadi modal dasar pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya alam berperan dalam menjaga ketahanan pangan, air, dan energi. Dalam aspek pangan, permasalahan yang dihadapi adalah kecenderungan penurunan ketersediaan pangan utama. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan produktivitas pangan. Menurut informasi yang didapatkan dari FGD, di bagian utara terjadi revitalisasi irigasi yang menyebabkan sumber air terhambat sehingga produksi tanaman pangan hanya terjadi satu kali. Dalam mengatasi masalah

ketersediaan air ini, terdapat dua sumber air (situ) potensial yang bisa dimanfaatkan, tetapi memerlukan kolaborasi dari beberapa lembaga. Tidak hanya itu, saat ini pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara ideal karena belum terdapat lembaga formal yang memegang tanggung jawab tersebut. Kabupaten Tangerang baru mulai melakukan pengelolaan cadangan pangan di tahun 2017. Kelembagaan pangan yang masih belum memadai, kemudian berpengaruh pada distribusi pangan yang belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka ketersediaan energi masyarakat yang masih di bawah angka ideal, sebesar 2370 kkal/kapita/hari di tahun 2022.

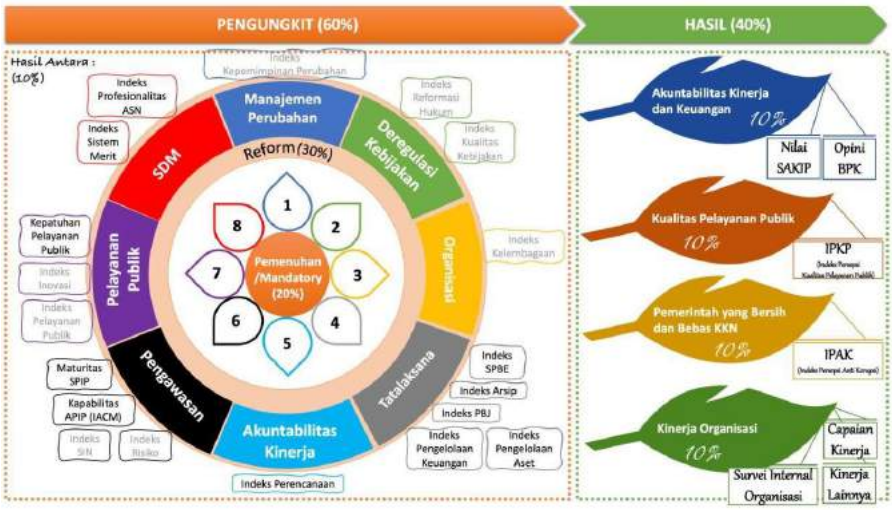
Selain masalah mengenai ketersediaan pangan, kondisi ketersediaan sumber daya air juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Apabila melihat pesatnya perkembangan kawasan perkotaan saat ini, Kabupaten Tangerang tidak dapat mengandalkan volume air permukaan sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya. Terlebih di masa mendatang kebutuhan air akan semakin meningkat karena pertumbuhan beberapa fungsi kawasan, terutama permukiman, industri, dan pertanian. Pengembangan waduk/bendungan menjadi salah satu program yang dapat dilakukan untuk meretensi tampungan air permukaan sehingga air permukaan tidak langsung mengalir jatuh dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah. Selain dari air permukaan, Kabupaten Tangerang dirasa perlu memanfaatkan potensi air tanah yang terkandung dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang.

C. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pada tahun 2022, capaian IKLH Kabupaten Tangerang sebesar 55,8 (kategori sedang) dengan komponen IKU sebesar 71.06 (kategori baik), IKA sebesar 58,89 (kategori sedang), dan IKL sebesar 22,67 (kategori sangat kurang). Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kab. Tangerang tahun 2018, ditemukan beberapa sungai sebagai sumber air permukaan telah tercemar ringan hingga berat. Permasalahan tersebut berpengaruh pada ketersediaan air dimana berdasarkan kajian KLHS menunjukkan bahwa 83% lahan terlampaui daya dukung airnya yang artinya lahan seluas 84.338,35 Ha merupakan lahan dengan kategori krisis air. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kualitas udara. Walaupun capaian IKU Kabupaten Tangerang dalam kategori baik, tetapi penurunan kualitas udara menjadi perhatian di pertengahan tahun 2023. Penurunan kualitas udara disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan asap buangan pabrik, buangan pembangkit listrik tenaga batu bara, asap kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah secara terbuka. Tantangan lainnya adalah mempertahankan luas lahan konservasi dari tekanan fungsi lahan menjadi terbangun. Kawasan konservasi berperan penting dalam penyangga pembangunan untuk menjaga ketersediaan air, kualitas udara, kerentanan terhadap bencana, dan ketahanan pangan yang dalam arti luas untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan.

3.4.5 Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksanya tata kelola pemerintahanyang lebih baik lagi.



Gambar 3. 10
Model Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sumber: **PermenPANRB No. 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refornasi Birorkasi**

Gambar di atas memperlihatkan indikator penyusun Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi penilaian dalam tata kelola pemerintahan. Capaian Indeks Reformasi Birokasi Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah 62,74 dengan kategori ”BB/baik, perlu sedikit perbaikan”. Berdasarkan data pada aspek pelayanan umum, Indikator penyusun yang perlu diperhatikan untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi yang lebih baik lagi adalah Indeks Profesionalitas ASN, persentase perangkat daerah yang pengelola arsip secara baku, Indeks SPBE, konsistensi penjabaran dokumen perencanaan, dan persentase tindak lanjut temuan BPK.

1. Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 adalah 56,80 dengan kategori sangat rendah (<60). Profesionalitas ASN yang masih rendah dapat menghambat pencapaian kinerja yang seharusnya dapat optimal.
2. Capaian Persentase perangkat daerah yang pengelola arsip secara baku pada tahun 2022 adalah 60%. Artinya belum semua perangkat daerah mengelola arsipnya secara baku. Pengelolaan arsip yang belum menyeluruh dapat menjadi penghambat perencanaan di masa depan.
3. Capaian Indeks SPBE pada tahun 2022 adalah 2,66 dengan predikat “baik”. Meskipun sama-sama berpredikat “baik”, nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 yang memiliki capaian 2,99. Di masa depan, tata kelola pemerintahan tentunya akan sangat mungkin untuk mengadopsi teknologi-toknologi maju yang relevan untuk menciptakan kondisi yang efektif dan efisien. Indeks SPBE

kedepannya diharapkan dapat mengalami peningkatan dan mencapai capaian maksimal sehingga pemerintahan dapat terkelola dengan sangat optimal.

4. Capaian Konsistensi penjabaran dokumen perencanaan pada tahun 2022 adalah 95,12%. Konsistensi penjabaran dokumen perencanaan dapat menunjukan pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan dokumen kebijakan yang terkait dengan tujuan pembangunan daerah. Capain konsistensi yang maksimal dapat membuat pelaksanaan pembangunan semakin dekat dengan tujuannya.
5. Capaian persentase SILPA terhadap APBD pada tahun 2022 adalah 11,31%. Angka tersebut dapat mengindikasikan kondisi yang baik dan kondisi yang kurang baik. Persentase SILPA yang besar dapat mengindikasikan efisiennya penyusunan APBD. Persentase SILPA yang besar juga dapat mengindikasikan penyusunan APBD belum menyeluruh. Kedepannya Kabupaten Tangerang akan membuat sistem yang mengendalikan rencana anggaran dan realisasi anggaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
6. Capaian tindak lanjut Temuan BPK pada tahun 2022 adalah 83,54%. Temuan BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi penting untuk ditindaklanjuti karena pada temuan tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan keuangan. Oleh karena itu, temuan BPK kedepannya diharapkan dapat ditindaklanjuti secara maksimal agar tercipta pengelolaan keuangan yang optimal.

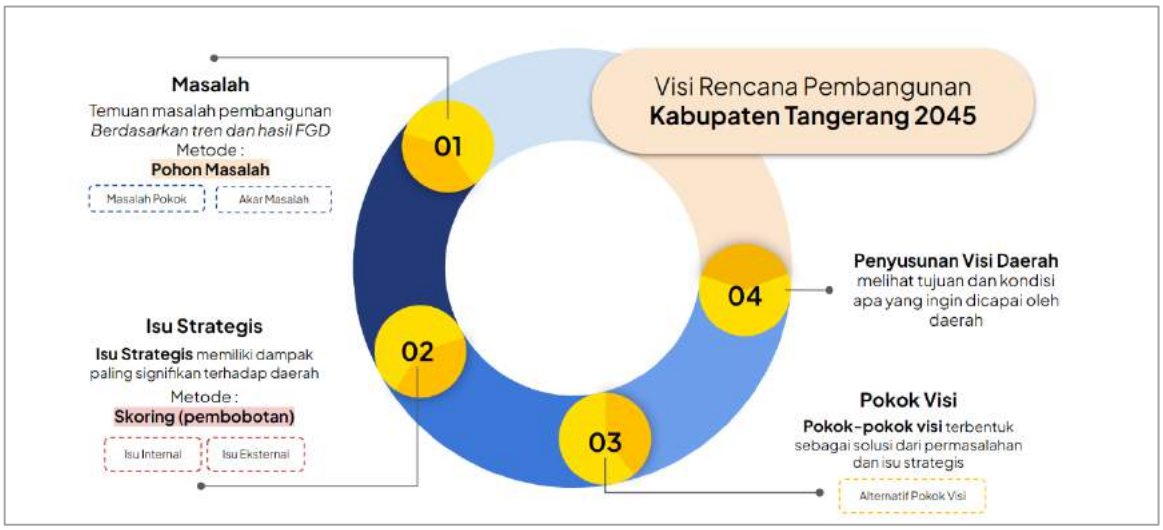
Selain indikator di atas, indikator lain yang memiliki capaian baik perlu untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga tata kelola pemerintahan dapat berada pada posisi yang sangat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.

BAB 4
VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

4.1 Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan.



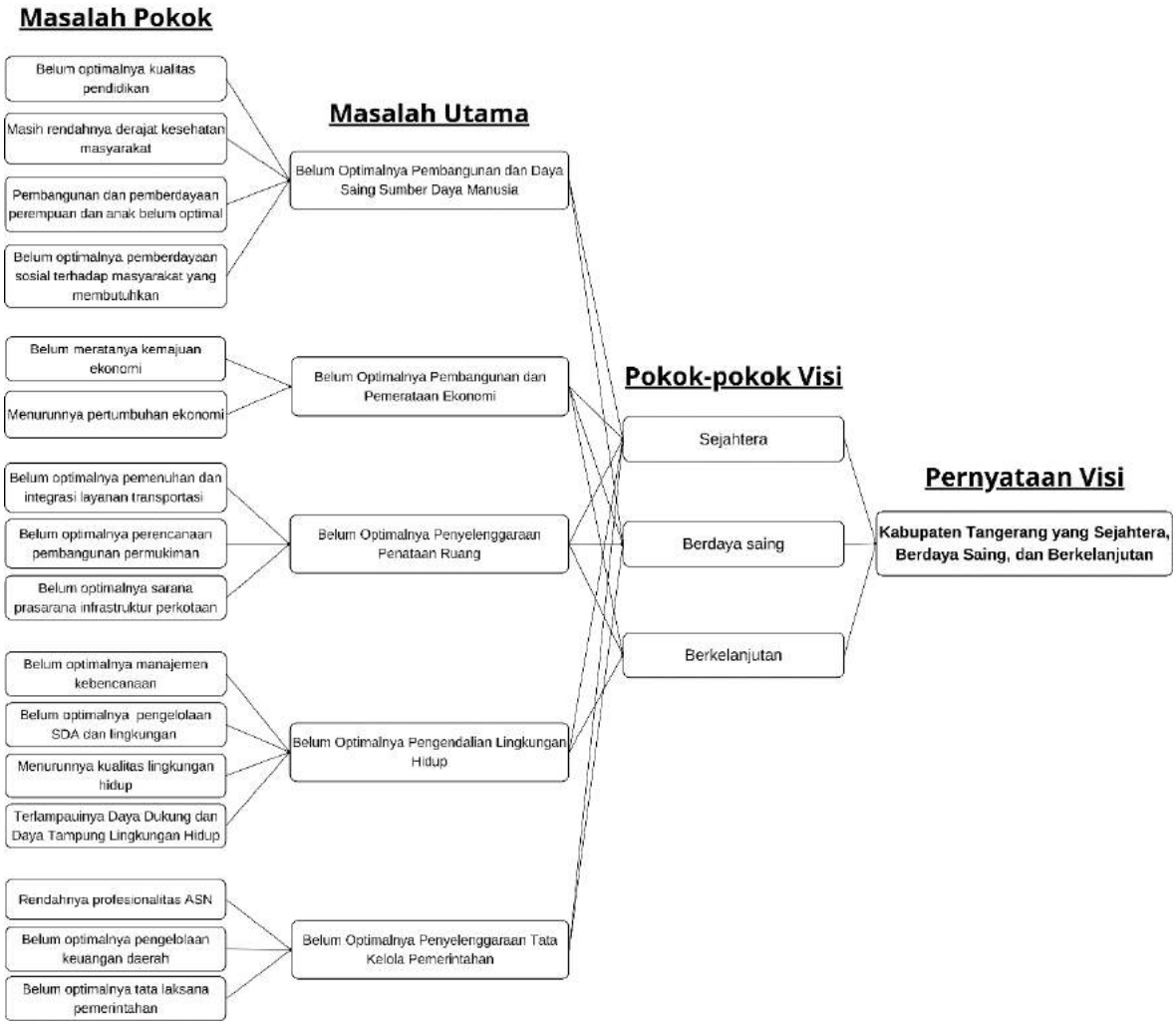
Gambar 4. 1
Konsep Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Tangerang
Sumber: Hasil Olahan, 2023

Perumusan visi pembangunan Kabupaten Tangerang 2045 didasarkan pada masalah utama atau isu strategis pembangunan. Isu strategis pembangunan Kabupaten Tangerang, yaitu: (1) Belum optimalnya pembangunan dan daya saing SDM; (2) Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan ekonomi; (3) Belum optimalnya penyelanggaraan penataang ruang; (4) Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup; serta (5) belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Tabel dan gambar di bawah ini menunjukkan perumusan pokok-pokok visi berdasarkan masalah utama atau isu strategis pembangunan Kabupaten Tangerang.

Tabel 4. 1
Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Tangerang

No	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Belum Optimalnya Pembangunan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Sejahtera, Berdaya Saing	**KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN**
2	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Sejahtera, Berdaya Saing, Berkelanjutan	
3	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Sejahtera, Berdaya Saing, Berkelanjutan	
4	Belum Optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup	Sejahtera, Berkelanjutan	
5	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Sejahtera, Berdaya Saing	

Sumber: Hasil Olahan, 2023



Gambar 4. 2
Diagram Konsep Visi RPJPD Kabupaten Tangerang
Sumber: Hasil Olahan, 2023

Dengan berlandaskan pemikiran tersebut, maka **visi RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2045** adalah:

"KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN"

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tangerang yaiu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1) **Sejahtera.** Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan.
2) **Berdaya Saing.** Terwujudnya Kabupaten Tangerang yang unggul, senantiasa berinovasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah yang diperlihatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK, kelembagaan pemerintahan yang akuntabel, dan perekonomian yang maju.
3) **Berkelanjutan.** Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim; keadilan dan kesetaraan; serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari.

4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan menngacu pada visi pembangunan, masalah pokok, dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tangerang periode sebelumnya. Tabel di bawah ini merupakan perumusan dan penjelasan misi RPJPD Kabupaten Tangerang.

Tabel 4. 2
Perumusan dan Penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
1	Belum Optimalnya Pembangunan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	**KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN**	Belum optimalnya kualitas pendidikan	**Misi 1:** Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Kemajuan pembangunan yang merata salah satunya didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, transformasi sumber daya manusia menjadi modal penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan melalui bidang-bidang pendidikan, kesehatan,
			Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat		
			Pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan anak belum optimal		
			Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap		

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
			masyarakat yang membutuhkan		dan pemberdayaan gender & sosial.
2	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi		Belum meratanya kemajuan ekonomi	**Misi 2:** Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Perekonomian yang maju dan berkeadilan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktvitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi. Hal tersebut didorong dengan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas, akselerasi ekosistem UMKM, serta pengembangan kapasitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan adaptif terhadap transformasi digital.
			Menurunnya pertumbuhan ekonomi		
3	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang		Belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi	**Misi 3:** Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang serta Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh	Keterpaduan penataan ruang menjelaskan bahwa daerah mampu menciptakan integrasi pusat-pusat kegiatan melalui pembangunan dan pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien serta untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana yakni fasilitas sosial dan fasilitas umum secara merata
			Belum optimalnya perencanaan pembangunan permukiman		
			Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur perkotaan		
4	Belum Optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup		Belum optimalnya manajemen kebencanaan	**Misi 4:** Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi dasar perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang. Hal tersebut diupayakan dengan konservasi SDA untuk menjaga ketahanan energi-pangan-air, manajemen pengelolaan lingkungan yang sirkular, serta meningkatkan kapasitas resiliensi terhadap bencana dan krisis iklim. Selain itu juga menjalankan target global dan nasional untuk penurunan GRK,
			Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan		
			Menurunnya kualitas lingkungan hidup		
			Terlampauinya Daya Dukung dan		

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
			Daya Tampung Lingkungan Hidup		transisi energi terbarukan
5	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan		Belum optimalnya profesionalitas ASN	**Misi 5:** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip good governance (*consensus oriented, accountable, transparent, responsive, equitable and inclusive, effective and efficient, follows the rule of law, and participatory*). Pemakaian tiga kata kunci tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraaan pemerintahan Kab. Tangerang kedepannya dapat menonjol dalam hal akuntabel, efektif, dan efisien.
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah		
			Belum optimalnya tata kelola pemerintah		

Sumber: Hasil Olahan, 2023

BAB 5
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

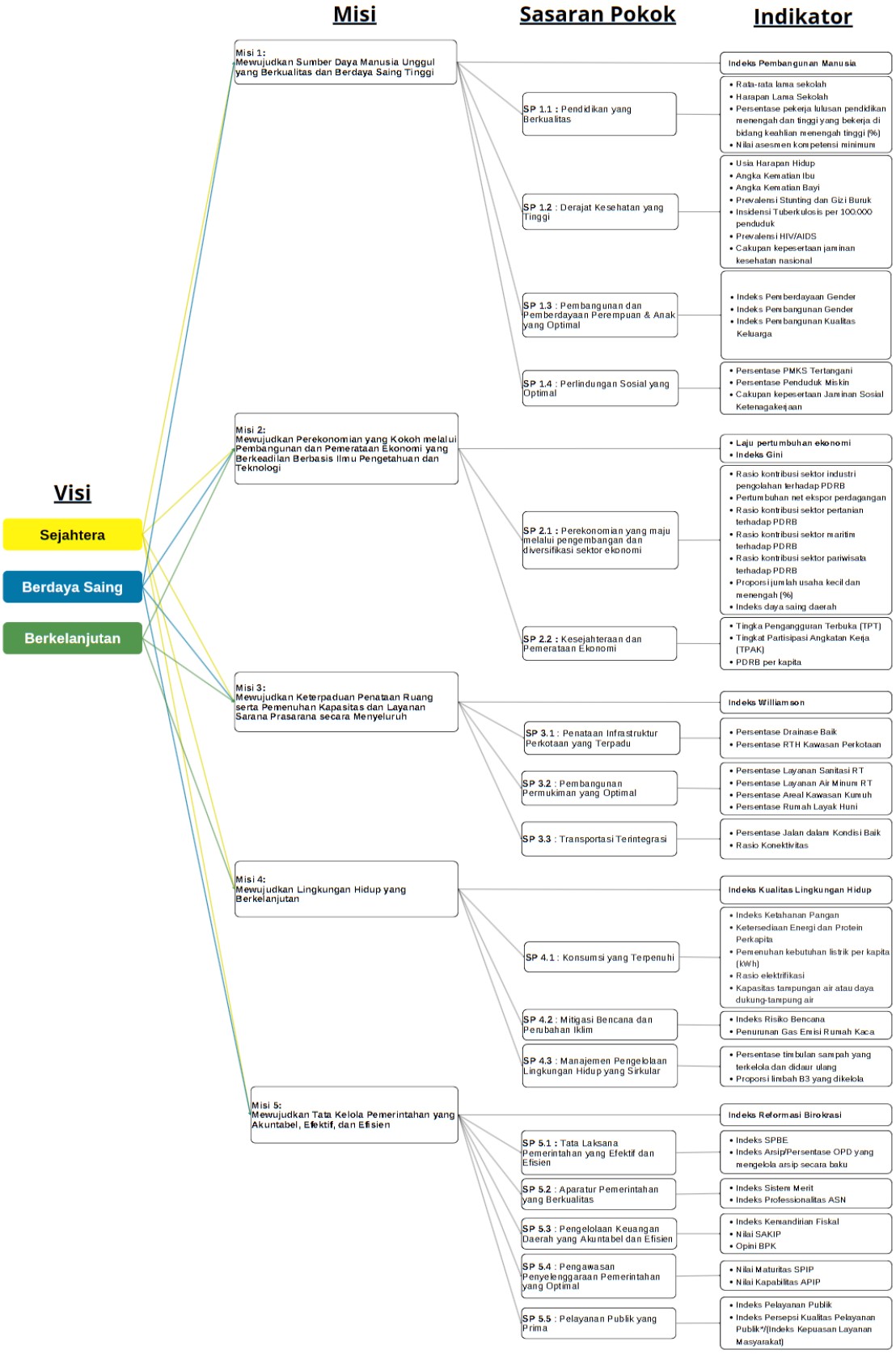
5.1 Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025. Tabel dan gambar bagan di bawah ini merupakan rumusan capaian indikator makro, sasaran, indikator, dan arah kebijakan lima tahunan rencana pembangunan Kabupaten Tangerang.

Tabel 5. 1
Target Capaian Indikator Makro

Indikator Makro		Satuan	Capaian tahun 2022	Target Capaian			
				Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	72,97	74,91	77,49	80,76	84,60
PDRB Per Kapita		juta rupiah	47,78	115,32	205,37	319,33	453,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi		%	5,47	5,50	5,70	6,00	6,50
Tingkat Pengangguran Terbuka		%	7,88	7,12	6,10	4,81	3,30
Persentase Penduduk Miskin		%	6,92	4,50	3,70	3,00	2,40
Rasio Kontribusi PDRB	Sektor Pertanian	%	6,3	6,33	6,38	6,43	6,50
	Sektor Pariwisata	%	1,5	2,08	2,86	3,85	5,00
	Sektor Industri Pengolahan	%	33,2				30
	Sektor Maritim	%	N/A				18
Indeks Gini		Indeks	0,28	0,27	0,25	0,23	0,21
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks	55,8	59,19	63,70	69,42	76,12

Sumber: Hasil Olahan, 2023



Gambar 5. 1
Perumusan Sasaran Pokok dan Indikator
Sumber: Hasil Olahan, 2023

Tabel 5. 2
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi RPJPD 2025-2045: "Kabupaten Tangerang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan"

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Target 2045	Arah Kebijakan			
				2025-2029 (Penguatan Modal Dasar)	2030-2034 (Akselerasi Pembangunan)	2035-2039 (Ekspansi dan Transformasi DIgital)	2040-2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan)
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi							
	Indeks Pembangunan Manusia	72,97	84,60				
Mewujudkan pendidikan yang berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,92	16 Tahun	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana & prasarana pendidikan	Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Pendidikan	Pengembangan sarana & prasarana pendidikan	Pemantapan kondisi sarana & prasarana pendidikan
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85	18 tahun	Peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Pemantapan akses terhadap pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	-	75	Peningkatan aksesibilitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah tinggi	Pemerataan aksesibilitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah tinggi	Pengembangan kapasitas dan kompetensi lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah tinggi	Pemantapan kapasitas dan kompetensi lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah tinggi
	Nilai asesmen kompetensi minimum	-		Peningkatan kualitas pendidikan melalui meningkatkan literasi dan kemampuan matematika bagi seluruh peserta didik	Peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang mendukung adanya penguasaan ilmu	Peningkatan upaya penyelenggaraaan pendidikan dan pengajaran yang mendukung kewirausahaan	Pemantapan kapasitas peserta didik untuk bersaing di lapangan pekerjaan keahlian tinggi

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Target 2045	Arah Kebijakan			
				2025-2029 (Penguatan Modal Dasar)	2030-2034 (Akselerasi Pembangunan)	2035-2039 (Ekspansi dan Transformasi DIgital)	2040-2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan)
					pengetahuan dan teknologi		
Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi	Usia Harapan Hidup (UHH)	70,28 tahun	80 tahun	Pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai & memenuhi standar serta peningkatan kuantitas & kualitas SDM bidang kesehatan	Pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis	Pengembangan & pemanfaatan teknologi, digitalisasi dan bioteknologi sektor kesehatan	Pemantapan pelayanan transformasi kesehatan
	Angka kematian ibu	57	16				
	Angka kematian bayi	3,8	menurun				
	Prevalensi stunting dan gizi buruk	0,4	0	Peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kesadaran, kemauan serta kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kualitas dan akses sanitasi	Pemantapan perilaku hidup sehat dan kualitas & akses sanitasi
	Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	193	76				
	Prevalensi HIV/AIDS	0,016%	0,001%				
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	83,21%*	100%	Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok masyarakat	Penyediaan jaminan kesehatan nasional secara berkelanjutan	Peningkatan promotif dan preventif melalui JKN dan Standar Pelayanan Minimal	Keterkecukupan jaminan kesehatan nasional yang efektif, efisien, dan merata
Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan perempuan serta anak yang optimal	Indeks Pemberdayaan Gender	63,35	>80	Penguatan kelembagaan kesetaraan gender	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan	Pengoptimalan upaya pembangunan manusia berbasis gender dan peningkatan pendidikan talenta digital perempuan	Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender
	Indeks Pembangunan Gender	91,24	meningkat				
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	n/a	80	Penguatan kelembagaan kepengurusan anak	Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan lingkungan yang baik dan aman untuk anak	Peningkatan kerjasama mitra nasional dan internasional	Pemantapan perlindungan dan pemenuhan hak anak

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Target 2045	Arah Kebijakan 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar)	2030-2034 (Akselerasi Pembangunan)	2035-2039 (Ekspansi dan Transformasi DIgital)	2040-2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan)
Mewujudkan perlindungan sosial yang optimal	Persentase Penduduk Miskin	6,92 %	2,40%	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS	Peningkatan kapabilitas dan kapasitas PMKS melalui pemberdayaan berbasis kewirausahaan	Peningkatan kolaborasi pentahelix dalam penanggulangan masalah sosial	Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat
	Persentase PMKS Tertangani	4%*	100%				
	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	99,5%				
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							
	LPE	5,47%	6,50%				
	Indeks Gini	0,28	0,21				
Mewujudkan perekonomian yang maju melalui pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi	Indeks Daya Saing Daerah	3,45	3,75 - 5,00	Pengembangan dan penguatan komoditas (jenis usaha) industri dengan ekspor bersih perdagangan; optimalisasi kemudahan investasi	Pengembangan kawasan strategis industri ramah lingkungan dan berbasis inovasi; peningkatan produktivitas hasil produk industri; peningkatan realisasi investasi	pengembangan infratsruktur pendukung dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan skala pasar	Pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktvitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi.
	Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	33,2%	30%				
	Pertumbuhan net ekspor perdagangan	-2,51%	meningkat				
	Laju pertumbuhan realisasi investasi	PMDN = 167%; PMA = -7,49%	meningkat				
	Rasio kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	6,3%	6,50%	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan; serta pengembangan skema *corporate*	pengarusutamaan digitalisasi dan inovasi teknologi dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan diversifikasi produk hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan	Pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi
	Rasio kontribusi sektor maritim terhadap PDRB	N/A	18%				
	Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,5%	5%				

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Target 2045	Arah Kebijakan 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar)	2030-2034 (Akselerasi Pembangunan)	2035-2039 (Ekspansi dan Transformasi DIgital)	2040-2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan)
					farming dan tata keloka pertanian dengan pertanian poli-kultur		
	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	N/A	5%	Peningkatan kemandirian ekonomi untuk mendorong usaha mikro (industri rumah tangga) dan industri kreatif	Pengembangan komoditas UMKM berdasarkan klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan ekosistem digital dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan inkubator bisnis, pelatihan, dan permodalan	Pemantapan dan akselerasi ekosistem UMKM untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi
Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	Tingka Pengangguran Terbuka (TPT)	7,88%	3,30%	Peningkatan intensitas pelatihan tenaga kerja untuk memiliki kapasitas *enterpreneur;* optimalisasi jaminan kesejahteraan tenaga kerja	Peningkatan up-skilling dan re-skilling tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja dan kerja sama sekolah vokasi/kejuruan	Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital	Pemantapan kapasitas tenaga kerja terhadap transformasi digital dan SDM digital
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,05%	90%				
	PDRB per kapita	47,78 juta rupiah	453 juta rupiah				
Misi 3 : Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang serta Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh							
	Indeks Williamson						
Mewujudkan penataan infrastruktur perkotaan yang terpadu	Persentase drainase baik	N/A	100%	Rehabilitasi lahan hijau perkotaan dan pengadaan resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota	Pengoptimalan fungsi drainase perkotaan dan RTH sebagai pengendali banjir	Pengembangan ruang terbuka hijau yang sekaligus berperan sebagai ruang kegiatan publik	Perawatan vegetasi dan kualitas ruang terbuka hijau yang berkelanjutan
	Persentase RTH kawasan perkotaan	17,05%*	minimal 30%				
Mewujudkan pembangunan permukiman yang optimal	Persentase layanan sanitasi RT	86,63%	100%	Perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur	Perluasan jangkauan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penerapan teknologi sebagai upaya pengoptimalan pemenuhan	Pengawasan dan pemantapan kinerja infrastruktur perumahan dan
	Persentase layanan air minum RT	98,55%	100%				

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Target 2045	Arah Kebijakan			
				2025-2029 (Penguatan Modal Dasar)	2030-2034 (Akselerasi Pembangunan)	2035-2039 (Ekspansi dan Transformasi DIgital)	2040-2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan)
				perumahan dan kawasan permukiman	ke area yang sulit mendapatkan sumber air	kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman	kawasan permukiman
	Persentase areal kawasan kumuh	29,66%*	0%	Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah dan reformasi subsidi perumahan dari pemerintah daerah	Peningkatan efisiensi penyediaan lahan perumahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang	Pengoptimalan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tempat tinggal	Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan permukiman
	Persentase rumah layak huni	71,8%*	100%				
Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi	Persentase jalan dalam kondisi baik	72,9%	100%	Penyelenggaraan perbaikan kondisi jalan hingga ke jalan permukiman dan pengendalian kapasitas konektivitas	Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hub transportasi	Pengintegrasian hub-hub transportasi angkutan massal dengan daerah-daerah di sekitarnya serta modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengendalian lalu lintas jalan dan perawatan kondisi hub-hub transportasi
	Cakupan layanan transportasi	N/A	100% (Setiap kecamatan memiliki hub transportasi)				
Misi 4 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,8	76,12				
Mengoptimalkan Pemenuhan Konsumsi	Indeks ketahanan pangan	77	meningkat	Perlindungan, pengembangan, dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; peningkatan diversifikasi tanam; serta peningkatan layanan irigasi masyarakat	Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi, pengembangan *corporate farming*, optimalisasi layanan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan	Penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, penerapan efisiensi energi dan pengoptimalan EBT; penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air	Pemantapan ketahanan energi, air, dan pangan dengan mendorong konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam
	Ketersediaan energi per kapita	2370	2400				
	Ketersediaan protein per kapita	82	meningkat				

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Target 2045	Arah Kebijakan			
				2025-2029 (Penguatan Modal Dasar)	2030-2034 (Akselerasi Pembangunan)	2035-2039 (Ekspansi dan Transformasi DIgital)	2040-2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan)
	Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita (kWh)	1.068,94 kWh*	3.500 kWh	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan keandalan sistem kelistrikan	Peningkatan suplai listrik untuk kawasan permukiman dan kawasan kegiatan lainnya	Pengembangan dan penerapan teknologi hijau sebagai sumber-sumber listrik alternatif	Pengendalian kapasitas listrik yang merata dan menyeluruh
	Rasio elektrifikasi	97,31%*	100%				
	Kapasitas tampungan air atau daya dukung-tampung air	83% lahan terlampaui	menurun (40% lahan terlampaui)	Pengembangan sumber-sumber air bersih dalam meningkatkan pasokan air baku dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air	Peningkatan kualitas manajeman pengelolaan air daerah dalam menjaga supply dan demand yang sesuai	Penerapan teknologi dalam peningkatan kinerja layanan infrastruktur sumber air	Pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan menjaga dan mengawasi kuantitas serta kualitas air baku untuk kebutuhan
Meningkatkan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	146.93**	sedang: 40-80	Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon	Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi, pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan; serta memperkuat fungsi konservasi hutan mangrove yang berada di pesisir utara sekaligus sebagai daya tarik wisata eco-tourism	Penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal dan terintegrasi serta pengoptimalan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan krisis iklim	Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana dan pengendalian krisis iklim
	Persentase penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK)	N/A	81,96%				
Mewujudkan manajemen pengelolaan lingkungan yang sirkular	Persentase timbulan sampah yang terkelola	60,66% (1,41% daur ulang)	100% (35% daur ulang)	Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional	Pengembangan infratsruktur pengelolaan limbah dan persampahan melalui kerja sama layanan pengelolaan antar daerah (kerjasama antar regional)	Pengembangan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah dan persampahan	Pemantapan manajemen pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler
	Proporsi limbah B3 yang dikelola	N/A	100%				

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Target 2045	Arah Kebijakan			
				2025-2029 (Penguatan Modal Dasar)	2030-2034 (Akselerasi Pembangunan)	2035-2039 (Ekspansi dan Transformasi DIgital)	2040-2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan)
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien							
	Indeks Reformasi Birokrasi	62,74	90-100				
Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	2,66	5	Pemantapan pembagian tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) pada seluruh instansi pemerintahan serta menyusun rencana pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dan berjangka panjang	Pembangunan infrastruktur TI pada instansi pemerintahan secara menyeluruh yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	Pengintegrasian dan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan secara maksimal	Pemantapan tata laksana pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
	Indeks Arsip (Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku)	66%	100%				
Mewujudkan aparatur pemerintahan yang berkualitas	Nilai Sistem Merit	296,5	400	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Pengembangan kompetensi dan nilai-nilai moral ASN yang sesuai dengan kebutuhan	Memperketat sistem manajemen ASN terutama yang terkait dengan profesionalitas serta reward and punishment	Peningkatan standar kualitas dan standar kinerja ASN
	Indek Professionalitas ASN	56,80	91-100				
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien	Indeks Kemandirian Fiskal	0.505	0,75 - 1,00	Peningkatan kompetensi ASN pengelola keuangan daerah	Pemantapan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	Penciptaan inovasi dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
	Nilai SAKIP	75,52	90-100				
	Opini BPK	WTP	WTP				
Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan	Nilai Maturitas SPIP	3	>4,5	Pemantapan pemahaman SPIP kepada seluruh Instansi yang terkait	Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian instansi	Pengembangan berkelanjutan pada SPIP	Pemantapan SPIP dan kapabalitias APIP

Sasaran Pokok	Indikator	Capaian 2022	Target 2045	Arah Kebijakan			
				2025-2029 (Penguatan Modal Dasar)	2030-2034 (Akselerasi Pembangunan)	2035-2039 (Ekspansi dan Transformasi DIgital)	2040-2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan)
pemerintahan yang optimal	Nilai Kapabilitas APIP	3	Level 5 (Optimized)	serta menyusun kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP	pemerintahan serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi APIP yang sesuai kebutuhan		
Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	4,12	5	Pemantapan kebijakan dan pemahaman pelayanan publik pada seluruh instansi pemerintahan	Penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Memaksimalkan pelayanan publik yang prima
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (atau Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat)	86,36**	100				
Keterangan: **)* = Capaian Tahun 2021** **)** = Capaian Tahun 2020**							

Sumber: Hasil Olahan, 2023

5.2 Sasaran Pokok

Berdasarkan analisis capaian indikator makro, Kabupaten Tangerang diharapkan dapat mencapai target IPM pada angka 84,60; PDRB per Kapita sebesar 453 juta rupiah; LPE sebesar 6,50%; TPT sebesar 3,30%; Presentase Penduduk Miskin sebesar 2,40%; Indeks Gini sebesar 0,21; IKLH sebesar 76,12; dan Rasio kontribusi PDRB pada masing-masing sektor pertanian sebesar 6,50%; sektor pariwisata sebesar 5%; sektor industri pengolahan sebesar 30%; serta sektor maritim sebesar 18% pada tahun 2045. Tidak hanya bertumpu pada capaian indikator makro, berdasarkan rumusan visi dan misi yang telah disusun sebelumnya, pembangunan Kabupaten Tangerang secara lebih rinci diarahkan melalui perwujudan capaian sasaran pokok sebagai berikut.

A. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

- Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tangerang sebesar 8,92 tahun di tahun 2022 dan ditargetkan dapat meningkat hingga mencapai 16 tahun melalui peningkatan ketersediaan & kualitas sarana prasarana serta sumber daya manusia bidang pendidikan.
- Harapan lama sekolah sebesar 12,85 tahun 2022 diharapkan akan mencapai target 18 tahun di tahun 2045. Pencapaian target ini dilakukan melalui peningkatan & pemerataan akses terhadap pendidikan usia dini, menengah, dan tinggi.
- Pengembangan kualitas pendidikan melalui peningkatan nilai asesmen kompetensi minimum dilaksanakan melalui pemantapan kompetensi peserta didik dalam kemampuan literasi dan matematika, pembelajaran kewirausahaan, serta penguasaan teknologi dalam penerapan akademik.

B. Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Tinggi

- Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Tangerang sebesar 70,28 tahun pada tahun 2022 dan ditargetkan mencapai angka 80 tahun pada tahun 2045. Selain itu, di tahun 2045, angka kematian ibu ditargetkan menurun mencapai angka 16 dan angka kematian bayi menurun dari capaian 2022 sebesar 3,8. Target-target tersebut dicapai melalui pemenuhan fasilitas kesehatan & tenaga medis serta pemanfaatan bioteknologi dan digitalisasi bidang kesehatan.
- Prevalensi stunting dan gizi buruk dari angka 0,4 pada tahun 2022 ditargetkan turun hingga 0 pada tahun 2045. Selain itu, insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk diharapkan menurun hingga 76 dan prevalensi HIV/AIDS 0,001% di tahun 2045. Pencapaian target dilakukan melalui peningkatan peran lintas sektor, pemberdayaan & peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemantapan perilaku hidup sehat.
- Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan capaian 83,21% di tahun 2021, ditargetkan mencapai 100% di tahun 2045 melalui pemenuhan jaminan kesehatan nasional secara berkelanjutan serta peningkatan promotif & preventif.

C. Mewujudkan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak yang Optimal

- Pada tahun 2045, Indeks Pemberdayaan Gender ditargetkan mencapai angka lebih dari 80 dan Indeks Pembangunan Gender ditargetkan meningkat, dilaksanakan melalui penguatan lembaga kesetaraan gender, peningkatan kapasitas perempuan, serta peningkatan pendidikan talenta digital perempuan.
- Target Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga tahun 2045 ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan anak, pemberdayaan masyarakat & lingkungan yang aman untuk anak, dan peningkatan kerjasama mitra yang lebih luas.

D. Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Optimal

Persentase penduduk miskin masih berada di angka 6,92% pada tahun 2022 dan ditargetkan menurun mencapai angka 2,4% pada tahun 2045. Sementara itu, persentase PMKS tertangani dan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditargetkan meningkat masing-masing mencapai 100% dan 99,5%. Target-target tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kolaborasi, kapasitas, dan kapabilitas kelembagaan serta perlindungan sosial.

E. Mewujudkan Perekonomian yang Maju melalui Pengembangan dan Diversifikasi Sektor Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mencapai 5,47% dan pada tahun 2045 dapat tumbuh menjadi 6,50%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh produktivitas unggulan yang kuat, berdaya saing, dan berlandaskan ekonomi lestari. Maka dari itu diperlukan beberapa arahan strategis, yaitu:

- Pengarustuamaan transformasi digital dalam mendorong produktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi secara keberlanjutan yang disertai dengan penguatan talenta digital.
- Hilirisasi industri prioritas dan peningkatan produktivitas komoditas sektor potensial yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui strategi penguatan ekonomi lokal (berbasis *social learning)* serta pengarustamaan teknologi pertanian (misalnya ekosistem *aquaculture)*.
- Diversifikasi sektor ekonomi potensial melalui penguatan ekonomi lokal dengan mendorong UMKM serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
- Posisi Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Jakarta menjadi nilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Tangerang di sektor perdagangan dan jasa. Dengan begitu penetapan wilayah Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Jakarta dapat diarahkan sebagai kawasan investasi industri teknologi padat modal (berbasiskan *Research and Development* dan TIK).

F. Mewujudkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPAK), peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), peningkatan PDRB per kapita, serta pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2045, TPT dapat ditekan dengan target mencapai 3,30%, TPAK dapat ditingkatkan dengan target 90% dan PDRB per kapita mencapai target nasional sebesar 453 juta rupiah per tahun. Dalam mencapai target tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar serta menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Maka dari itu diharapkan dapat menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan nilai tambah sektor ekonomi. Arahan strategis dalam mendorong pencapaian target tersebut dengan pengembangan balai latihan kerja, sekolah vokasi, dan penguatan kewirausahaan bagi angkatan kerja produktif.

G. Mewujudkan Penataan Infrastruktur yang Terpadu

Perwujudan penataan infrastruktur dan tata ruang perkotaan yang terpadu dilaksanakan melalui pengembangan ruang terbuka hijau sesuai dengan kebutuhan minimal dan peningkatan kapasitas dan kinerja drainase perkotaan. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang ditargetkan dapat memenuhi standar kebutuhan minimal 30% pada tahun 2045. Pada masa mendatang, kebutuhan sarana RTH di kawasan perkotaan menjadi penting untuk diperhatikan melihat perkembangan infrastruktur abu-abu yang sangat pesat. Konsentrasi yang tidak lepas dari tingginya tingkat pembangunan adalah kebutuhan kawasan perkotaan akan prasarana drainase. Pada tahun 2045, perlu dicapai 100% drainase dalam kondisi baik sehingga *runoff* air hujan dapat mengalir dengan lancar dan tidak menciptakan genangan yang dapat menimbulkan banjir.

H. Mewujudkan Pembangunan Permukiman yang Optimal

- Kesejahteraan masyarakat dalam bertempat tinggal diharapkan dapat meningkat seiring pemenuhan kebutuhan infrastruktur rumah tangga terpenuhi. Setiap rumah tangga di Kabupaten Tangerang ditargetkan dapat terlayani oleh prasarana air minum dan sanitasi yang layak secara menyeluruh (100%) pada tahun 2045. Layanan infrastruktur rumah tangga yang layak dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih minimal.
- Penanganan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni menjadi upaya dalam memberikan kualitas tempat hidup yang layak bagi seluruh masyarakat. Pada tahun 2045, ditargetkan sudah tidak ada lagi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang. Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan permukiman menjadi konsentrasi yang perlu diperhatikan melihat perkembangan jumlah penduduk yang pesat dapat me jumlah ketersediaan lahan permukiman juga semakin menipis.

I. Mewujudkan Sistem Transportasi yang Terintegrasi

Transportasi yang terintegrasi diwujudkan melalui rencana-rencana pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi massal. Pengembangan kapasitas jalan ditargetkan dapat meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi baik menjadi 100% pada tahun 2045 sehingga dapat meningkatkan kualitas keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Sarana transportasi berbasis massal juga sepatutnya dapat dikembangkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Ketersediaan terminal dan stasiun sebagai hub-hub transportasi ditargetkan dapat menjadi solusi kemacetan di kawasan perkotaan dan mampu menjangkau seluruh wilayah.

J. Mengoptimalkan Pemenuhan Konsumsi

- Pengoptimalan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Tangerang diwujudkan dengan peningkatan indeks ketahanan pangan, ketersediaan energi per kapita (minimal 2400), dan ketersediaan protein per kapita pada tahun 2045. Sasaran ini dilaksanakan melalui pengembangan diversifikasi dan konservasi energi pangan, pengembangan *corporate farming*, penerapan teknologi pangan, serta pendorongan konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam.
- Pemerataan suplai listrik dan penerapan teknologi sebagai sumber listrik alternatif menjadi upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target pemenuhan kebutuhan listrik per kapita sebesar 3.500 kWh dan rasio elektrifikasi sebesar 100% di tahun 2045.
- Di tahun 2022, capaian daya dukung-tampung air mencapai 83% lahan terlampaui. Untuk mewujudkan target penurunan mencapai angka 40% lahan terlampaui dan sumber air yang berkualitas di tahun 2045, dilakukan upaya pengembangan sumber air, peningkatan kualitas manajemen pengelolaan dan pemanfaatan teknologi dengan tujuan mengoptimalkan infrastruktur.

K. Meningkatkan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Perwujudan mitigasi bencana dan perubahan iklim ditunjukkan dengan penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK). Pada tahun 2045, IRB Kabupaten Tangerang ditargetkan dalam kategori sedang yaitu sebesar 40-80 dan persentase penurunan GRK mencapai target nasional yang sebesar 81,96%. Target tersebut dapat dicapai melalui arahan strategis, yaitu peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana, pengembangan infrastruktur kebencanaan, pengembangan sumber energi terbarukan, serta pengembangan industri hijau.

L. Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Lingkungan yang Sirkular

Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui manajemen pengelolaan lingkungan yaitu pengelolaan sampah dan limbah yang sirkular. Pada tahun 2045, ditargetkan 100% timbulan sampah dan limbah B3 terkelola dengan integrasi manajemen pengelolaan yang sirkular. Target tersebut dapat dicapai dengan arahan strategis, yaitu pengembangan infrastuktur pengelolaan limbah dan persambahan melalui kerjasama

antar daerah (atau KSDD), pengembangan ekonomi sirkular pada industri prioritas, penyediaan infrastruktur penunjang pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.

M. Mewujudkan Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tata laksana pemerintahan mencakup keseluruhan sistem, proses, dan prosedur kerja pemerintahan. Tata laksana pemerintahan kedepannya diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Tata laksana yang efektif dan efisien sangat membantu pemerintah daerah untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tangerang. Hal-hal yang terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) harus disesuaikan dan dibuat pemahaman yang sama antara satu sama lain agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Teknolgi informasi juga perlu dimanfaatkan dalam mempermudah pekerjaan.

N. Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Berkualitas

Aparatur pemerintahan sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kualitas Aparatur pemerintahan diharapkan dapat terus meningkat dan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang selalu berbubah-ubah. Pada periode akhir rencana jangka panjang ini, aparatur pemerintahan diposisikan sebagai komponen pemerintahan yang telah sangat siap dalam penyempurnaan Indonesia Emas 2045.

O. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Efisien

Keuangan daerah yang dipergunakan dalam pembangunan daerah harus dikelola secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola secara cermat agar tidak terjadi *mis*alokasi dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang tidak berlebihan.

P. Mewujudkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Optimal

Penyelenggaraan pemerintahan rawan akan terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus terus dijalankan dengan seoptimal mungkin. Temuan-temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran harus diusut tuntas dan diperbaiki.

Q. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

Dalam undang-undang pelayan publik, institusi penyelenggaraan negara adalah salah satu penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi tersebut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Kondisi pelayanan publik Kabupaten Tangerang diharapkan dapat terus meningkat dan pada priode-priode akhir pembangunan jangka panjang ini dapat mencapai kondisi yang sangat prima dalam melayani masyarakat.

5.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahunan

Arah kebijakan pembangunan daerah direncanakan ke dalam 4 periode dalam rentang waktu 5 tahun pada masing-masing periode. Arah kebijakan setiap periode dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Pertama

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Tangerang difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui pembangunan dan pemerataan sarana prasarana bagi setiap bidang seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, transportasi, dan ekonomi; perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh fasilitas yang sudah ada saat ini; pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah; rehabilitasi ruang-ruang terbuka publik; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, konservasi lingkungan, dan risiko bencana; serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan.

2) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun kedua (periode 2) di Kabupaten Tangerang difokuskan pada akselerasi pembangunan daerah. Akselerasi pembangunan daerah diwujudkan melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat; peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan, dan pemberdayaan komunitas; pengembangan kawasan industri ramah lingkungan berbasis inovasi; peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian dan komoditas UMKM; peningkatan jangkauan infrastruktur pendukung pusat-pusat pertumbuhan; peningkatan efisiensi lahan untuk peruntukan lahan dan tata ruang; dan penguatan implementasi layanan kebijakan publik.

3) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Ketiga

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun ketiga (periode 3) di Kabupaten Tangerang difokuskan pada ekspansi dan transformasi digital. Ekspansi dan transformasi digital diwujudkan melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi bagi seluruh sektor pembangunan; peningkatan kerjasama mitra nasional dan internasional; peningkatan kolaborasi dan koordinasi; perluasan ekosistem digital dan inovasi teknologi dalam mendorong ekonomi; pengoptimalan pemenuhan kebutuhan ruang layak huni; pengintegrasian seluruh kawasan melalui pengembangan transportasi; pengembangan efisiensi energi melalui pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan; pengoptimalan kapasitas daerah dalam menghadapi isu iklim dan bencana; dan pengembangan sistem manajemen kebijakan dan pelayanan publik.

4) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Keempat

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun keempat (periode 4) di Kabupaten Tangerang difokuskan pada pemantapan capaian pembangunan. Pemantapan capaian pembangunan diwujudkan melalui pemantapan kondisi sarana dan prasarana pembangunan; pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; perlindungan sosial yang adaptif; pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi; pengendalian ruang terbuka hijau publik yang berkelanjutan; pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman; pemantapan ketahanan energi, air, dan pangan; pemberdayaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan; dan pemantapan tata laksana pemerintahan daerah.

BAB 6
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan visi **"Kabupaten Tangerang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan"** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tangerang; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Kebijakan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemeberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022

Peraturan Bupati Tangerang No. 116 Tahun 2021 tentang Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2041

Peraturan Bupati Tangerang No. 39 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2037

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Sistem Penyediaan Air

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi

Laporan dan Artikel Jurnal

Badan Pangan Nasional. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022*. Kota Jakarta Selatan: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. (2022*). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tangerang 2023-2043*: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. (2023*). Evaluasi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025*: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. (2023*). Evaluasi Index Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang*: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2013). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2013*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2014). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2014*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2015). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2015*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2016). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2016*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2017). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2017*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2018). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2018*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2019). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2019*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2020). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2020*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2021). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2021*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2022). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2022*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2023). *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2023*. Kabupaten Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2013). *Provinsi Banten dalam Angka 2013*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2014). *Provinsi Banten dalam Angka 2014*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2015). *Provinsi Banten dalam Angka 2015*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2016). *Provinsi Banten dalam Angka 2016*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2017). *Provinsi Banten dalam Angka 2017*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2017). *Statistik Perumahan Provinsi Banten Tahun 2017*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2018). *Provinsi Banten dalam Angka 2018*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2018). *Statistik Perumahan Provinsi Banten Tahun 2018*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2019). *Provinsi Banten dalam Angka 2019*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2019). *Pariwisata Banten dalam Angka Tahun 2019*: Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2019). *Statistik Perumahan Provinsi Banten Tahun 2019*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2020). *Provinsi Banten dalam Angka 2020*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2020). *Statistik Perumahan Provinsi Banten Tahun 2020*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2021). *Provinsi Banten dalam Angka 2021*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2021). *Statistik Perumahan Provinsi Banten Tahun 2021*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2022). *Provinsi Banten dalam Angka 2022*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2023). *Provinsi Banten dalam Angka 2023*. Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Bappenas. (2019). *Pembangunan Rendah Karbon: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. (2021). Analisis *Statistik Sektoral Priode Data 2018-2020*: Open Data Kabupaten Tangerang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. (2022). *Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2022*: Open Data Kabupaten Tangerang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. (2023). *Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023*: Open Data Kabupaten Tangerang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. (2023). *Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045*: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. (2023). *Sarana dan Prasarana Olahraga*: Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Direktorat Akreditasi dan Standarisasi Perpustakaan Nasional. (2023). *Jumlah Perpustakaan Terakreditasi*: Satu Data Perpustakaan Nasional RI

Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2018). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Tahun 2013-2018 Bupati Tangerang kepada DPRD Kabupaten Tangerang*. Kabupaten Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang.

PT. Wahana Data Utama. (2022). *Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2022*: Perpustakaan Nasional RI.

RANCANGAN AWAL
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Tangerang
2025–2045

Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang